

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Hubungan antar Dokumen	5
1.4. Sistematika Dokumen	6
1.5. Maksud dan Tujuan	7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	8
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	8
2.1.1 Aspek Geografis, Luas, dan Batas Wilayah.....	8
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	29
2.1.3 Kondisi Umum Kemiskinan.....	47
2.1.4 Pengangguran.....	52
2.1.5 Aspek Pelayanan Umum.....	53
2.1.6 Aspek Daya Saing Daerah.....	93
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD.....	95
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD	95
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	95
2.3.1 Isu Strategis.....	95
2.3.2 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	79 107
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	129
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	129
3.1.1. Kondisi Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan	130
3.1.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut	133
3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tanah Laut	138
3.2. Arah kebijakan Keuangan Daerah	142
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	143
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	147

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	152
3.2.4 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	157
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	160
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	161
4.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional 2019	161
4.1.2 Prioritas Pembangunan Prov. Kalsel Tahun 2019.....	169
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019	171
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	190
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH....	194
BAB VII P E N U T U P	229
LAMPIRAN	231

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya kegiatan pembangunan merupakan suatu ikhtiar pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dan pihak swasta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam melaksanakan pembangunan hal yang menjadi komponen pentingnya adalah keberadaan sumberdaya, dimana sumberdaya ini memiliki kapasitas yang terbatas. Dengan adanya keterbatasan sumberdaya inilah maka diperlukan suatu proses perencanaan agar pemilihan dan alokasi sumberdaya tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, urutan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan/Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengalaman dan data empiris di Tahun 2017 dalam perencanaan pembangunan Tahun 2018, program dan kegiatan serta pagu indikatif kegiatan merupakan suatu hal yang diacu dan ditaati sampai dengan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ke DPRD

Kabupaten Tanah Laut. Hal ini merupakan suatu wujud konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Dengan kondisi tersebut penyusunan RKPD tahun 2019 ini merupakan suatu hal yang harus dicermati, ditelaah, dan dibahas secara seksama agar dalam pelaksanaannya menjadi benar-benar baik dan mengakomodir semua kebutuhan yang riil, rasional, dan secara nyata berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 disusun dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah, dan merupakan input untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Otonomi Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, TLN 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 82, TLN 4737):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 21, TLN 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

(1) RKPD dan RPJMD Kabupaten Tanah Laut

RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 merupakan RKPD tahap kelima dari tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018. Sampai dengan disusunnya dokumen ini RPJMD telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

(2) RKPD dan RKP Tahun 2019

RKPD melaksanakan yang tertuang dalam RKP sehingga akan mensinkronkan Pembangunan Nasional dan Daerah.

(3) RKPD dan RTRW Kabupaten Tanah Laut

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tanah Laut sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Tanah Laut.

(4) RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang berwawasan 1 (satu) tahunan. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis

operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanah Laut.

1.4. Sistematika Dokumen

Rancangan RKPD tahun 2019 terdiri dari 6 bab, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Bab I Pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan Lainnya.
- (2) Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah berisi Kondisi Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, dan Permasalahan Pembangunan Daerah.
- (3) Bab III Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah.

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Bagian ini mengemukakan implementasi program perekonomian untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah, isu strategis daerah sebagai dasar untuk menyusun prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menguraikan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

- (4) Bab IV Sasaran dan Prioritas pembangunan daerah, berisi tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2019.
- (5) Bab V Rencana Kerja dan pendanaan Daerah
- (6) Bab VI Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- (7) Bab VII Penutup

1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 disusun berdasarkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati terpilih hasil pemilukada tahun 2013, dan mengacu pada RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025, Kebijaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2018, serta kondisi riil permasalahan dan isu strategis yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Maksud penyusunan dokumen RKPD tahun 2019 ini adalah agar dapat menjadi dokumen pengarah dan pegangan bersama bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Selanjutnya dokumen perencanaan ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya berproses menjadi RAPBD dan APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, obyektif dan transparan, membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar pembangunan yang telah dilaksanakan.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

Kondisi fisik dasar suatu wilayah mempunyai peran yang penting, karena dapat mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu kawasan sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut. Fisik alami yang ada di kawasan berfungsi sebagai wahana atau penampung aktivitas penduduk, sebagai suatu sumber daya alam yang cukup mempengaruhi perkembangan kawasan dan sebagai pembentuk pola aktivitas penduduk.

Kabupaten Tanah Laut secara geografis terletak antara 114°30' - 115°23' Bujur Timur dan 3°30' - 4°11' Lintang Selatan. Di sebelah Barat dan Selatan, Kabupaten Tanah Laut berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan Kabupaten Tanah Bumbu, dan sebelah Utara dengan Kabupaten Banjar.

Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut yang mencapai 3.631,35 Km² atau 9,71 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut beribukota di Kecamatan Pelayhari. Secara administrasi, Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 kecamatan, 135 desa/kelurahan dan 1.527 rukun tetangga (RT). Selama kurun waktu sampai tahun 2018 tidak terjadi perubahan wilayah administrasi.

Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 km², kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,10 km² dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 km², sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 km².

Tabel 2.1 Cakupan Administrasi Kabupaten Tanah Laut

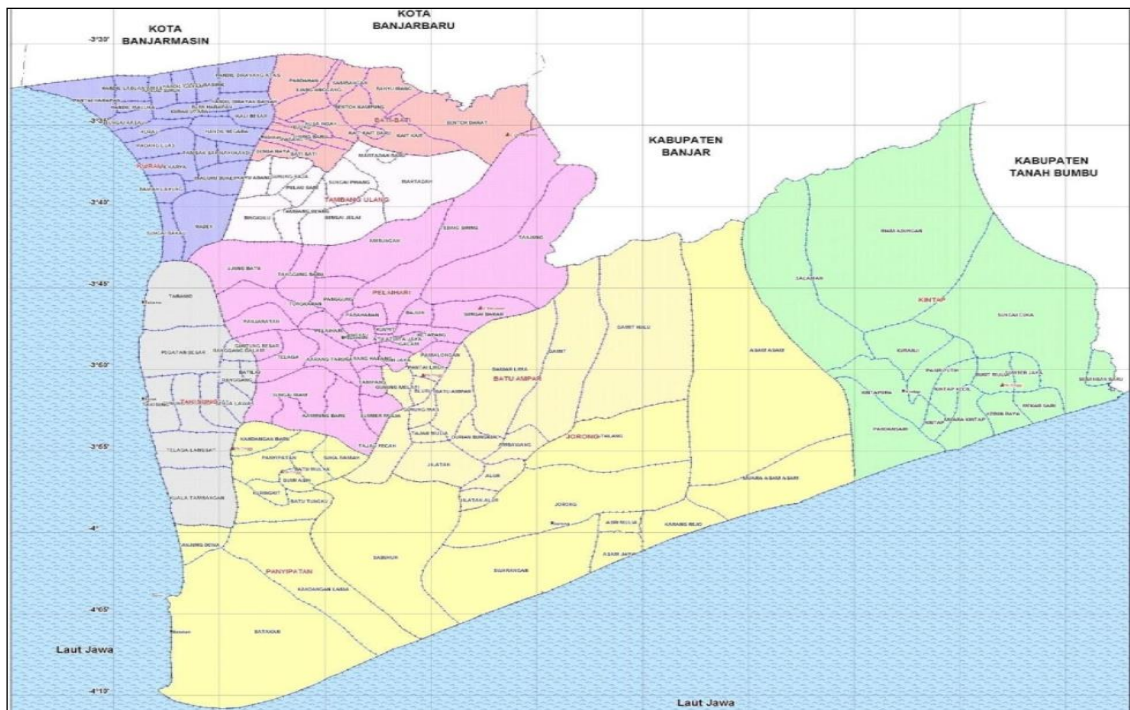
No.	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
1	Panyipatan	1. Batakan	4.500
		2. Tanjung Dewa	4.200
		3. Kandangan Lama	6.000
		4. Batu Tungku	2.500
		5. Kuringkit	2.400
		6. Bumi Asih	1.500
		7. Batu Mulia	750
		8. Suka Ramah	1.750
		9. Panyipatan	6.900
		10. Kandangan Baru	3.100
		Jumlah	33.600
2	Takisung	1. Kuala Tambangan	5.920
		2. Telaga langsung	4.330
		3. Takisung	4.630
		4. Gunung Makmur	2.690
		5. Sumber Makmur	2.130
		6. Banua Tengah	2.250
		7. Banua Lawas	2.250
		8. Ranggung	1.130
		9. Batilai	600
		10. Ranggung Dalam	1.500
		11. Pegatan Besar	4.530
		12. Tabanio	2.340
		Jumlah	34.300
3	Bati-Bati	1. Banua Raya	1.300
		2. Bati-Bati	900
		3. Padang	700
		4. Ujung	600
		5. Ujung Baru	1.000
		6. Nusa Indah	2.300
		7. Kait-Kait	1.576
		8. Kait-Kait Baru	924
		9. Bentok Darat	4.000
		10. Banyu Irang	1.400
		11. Bentok Kampung	2.775
		12. Sambangan	800
		13. Liang Anggang	3.150
		14. Pandahan	2.050
		Jumlah	23.475

No.	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
4	Kurau	1. Raden	1.500
		2. Maluka Baluin	900
		3. Bawang Layung	1.500
		4. Tambak Karya	1.000
		5. Padang Luas	1.600
		6. Tambak Sarinah	450
		7. Sarikandi	450
		8. Handil Negara	900
		9. Kali Besar	1.500
		10. Kurau	1.400
		11. Sungai Rasau	2.050
			Jumlah
5	Bumi Makmur	1. Sungai Bakau	1.500
		2. Bumi Harapan	150
		3. Kurau Utara	250
		4. Pantai Harapan	1.850
		5. Handil Maluka	900
		6. Handil Labuan Amas	3.500
		7. Handil Suruk	600
		8. Handil Gayam	600
		9. Handil Babirik	600
		10. Handil Birayang Bawah	2.000
		11. Handil Birayang Atas	1.600
			Jumlah
6	Batu Ampar	1. Tajau Pecah	25.200
		2. Jilatan	19.200
		3. Jilatan Alur	1.300
		4. Ambawang	635
		5. Durian Bungkuk	700
		6. Tajau Mulia	600
		7. Gunung Mas	1.000
		8. Batu Ampar	400
		9. Damar Lima	675
		10. Damit	1.800
		11. Damit Hulu	600
		12. Pantai Linuh	1.000
		13. Bluru	500
		14. Gunung Melati	1.200
			Jumlah
7	Tambang Ulang	1. Bingkulu	1.750
		2. Kayu Abang	2.075
		3. Gunung Raja	1.700

No.	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
		4. Pulau Sari	1.050
		5. Tambang Ulang	1.200
		6. Sungai Jelai	1.575
		7. Sungai Pinang	600
		8. Martadah	4.603
		9. Martadah Baru	1.522
		Jumlah	16.075
8	Pelaihari	1. Sungai Riam	4.233
		2. Kampung Baru	3.277
		3. Sumber Mulia	1.050
		4. Tampang	1.150
		5. Sarang Halang	1.100
		6. Bumi Jaya	800
		7. Atu-Atu	300
		8. Angsau	1.050
		9. Pelaihari	1.500
		10. Karang taruna	2.200
		11. Telaga	2.300
		12. Guntung Besar	600
		13. Panjaratan	1.600
		14. Tungkaran	2.775
		15. Panggung	3.900
		16. Pabahanan	280
		17. Ambungan	1.350
		18. Panggung Baru	1.900
		19. Ujung Batu	2.100
		Jumlah	33.465
9	Bajuin	1. Tirta Jaya	550
		2. Galam	800
		3. Pamalongan	900
		4. Sungai Bakar	1.740
		5. Tanjung	8.000
		6. Bajuin	1.700
		7. Ketapang	1.000
		8. Kunyit	400
		9. Tebing Siring	9.020
		Jumlah	24.110
10	Jorong	1. Sabuhur	23.500
		2. Swarangan	17.500
		3. Alur	478
		4. Jorong	2.622
		5. Karang Rejo	1.500

No.	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
		6. Muara Asam-Asam	1.000
		7. Asam Jaya	900
		8. Asri Mulia	900
		9. Asam-Asam	12.100
		10. Batalang	2.300
		Jumlah	62.800
11	Kintap	Pandansari	5.000
		Salaman	1.000
		Kintapura	2.800
		Pasir Putih	1.200
		Kintap Kecil	3.700
		Kintap	1.300
		Muara Kintap	4.900
		Bukit Mulia	1.733
		Sumber Jaya	2.475
		Kebun Raya	1.920
		Mekar Sari	1.732
		Sebamban Baru	1.080
		Sungai Cuka	5.760
		Riam Adungan	19.100
		Jumlah	53.700
		Jumlah Total	363.135

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut



Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016 - 20136

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Tanah Laut

2.1.1.1. Topografi

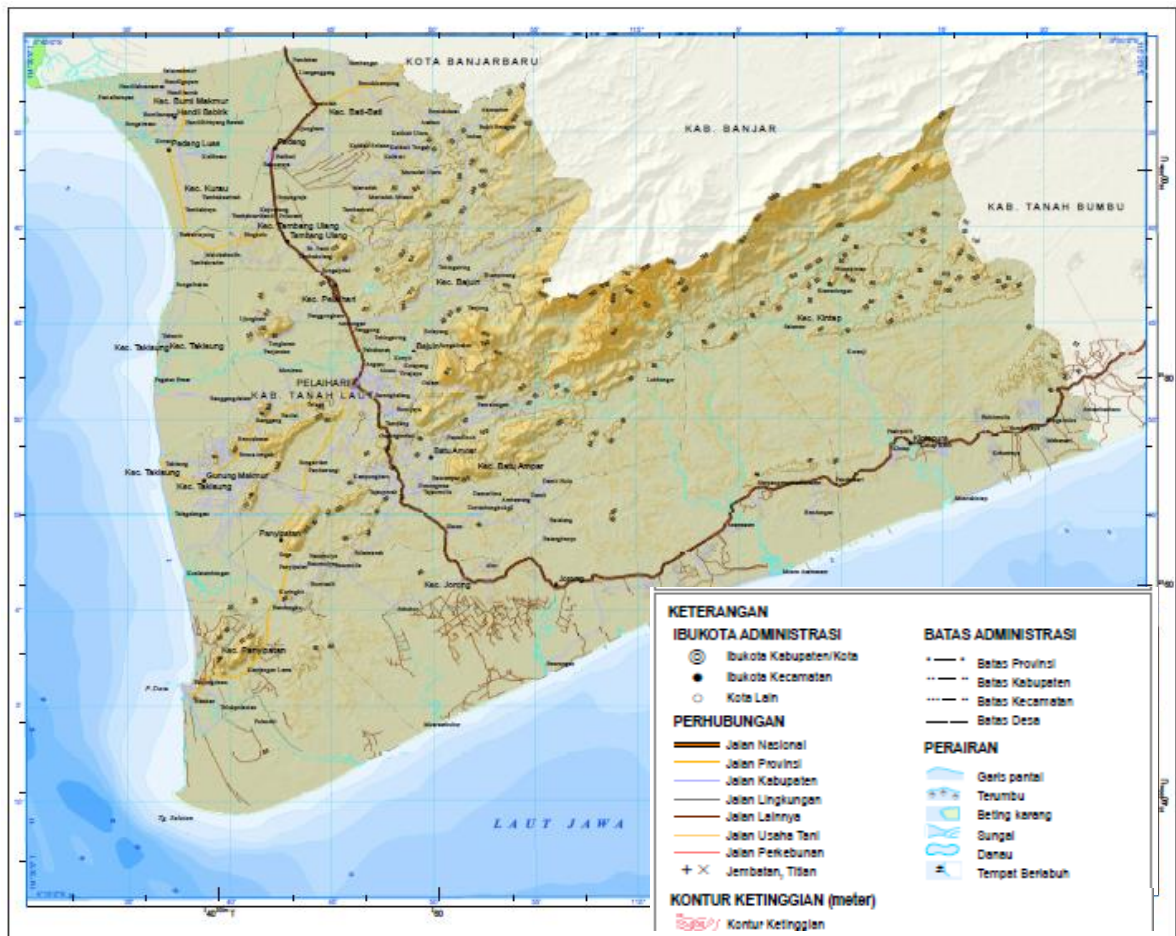
Kabupaten Tanah Laut umumnya merupakan daerah dataran tinggi dan bergunung-gunung yang terdapat di bagian Utara dan Timur. Daerah tersebut tersebar di Kecamatan Pelaihari, Bajuin, Jorong, Batu Ampar, Tambang Ulang dan Kintap sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Banjar. Pada wilayah ini terdapat beberapa puncak yaitu:

1. Puncak gunung Kemuning (750 m dpl)
2. Puncak Gunung Batu Karo (621 m dpl)
3. Puncak Gunung Batu Balerang (921 m dpl)
4. Puncak Gunung Kematian (951 m dpl)
5. Puncak Gunung Batu Mandi (901 m dpl)
6. Puncak Gunung Sekupang (1.051 m dpl)
7. Puncak Gunung Haur Bonak (744 m dpl)
8. Puncak Gunung Aur Bunek (1.150 m dpl)
9. Puncak Gunung Condong (553 m dpl).

Sedangkan di Bagian Selatan dan Barat merupakan daerah dataran

rendah, pantai, dan rawa-rawa yaitu terdapat di Kecamatan Kurau, Bumi Makmur, Takisung, dan Panyipatan.

Daerah pasang surut terdapat dipesisir pantai sepanjang 200 km yang merupakan hutan api-api, dan hutan bakau. Tingkat kelerengan tanah umumnya berkisar antara 0 - 2 % dan rata-rata ketinggian tanah berkisar antara 0 – 7 m di atas permukaan laut. Kemiringan Tanah di Kabupaten Tanah Laut sangat bervariasi yaitu berkisar antara kurang dari 2% hingga lebih dari 40%. Wilayah dengan kelerengan lebih dari 40% merupakan wilayah yang dilindungi dengan penyebaran di sekitar Gunung Paikat, Gunung Damar Gusang, Pegunungan Kemuning, dan Batumandi. (Peta Topografi dapat dilihat pada Gambar 2.2)

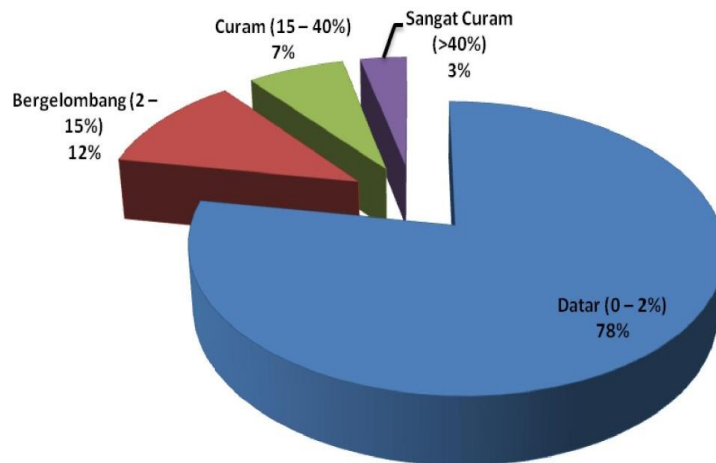


Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016 - 20136

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Tanah Laut

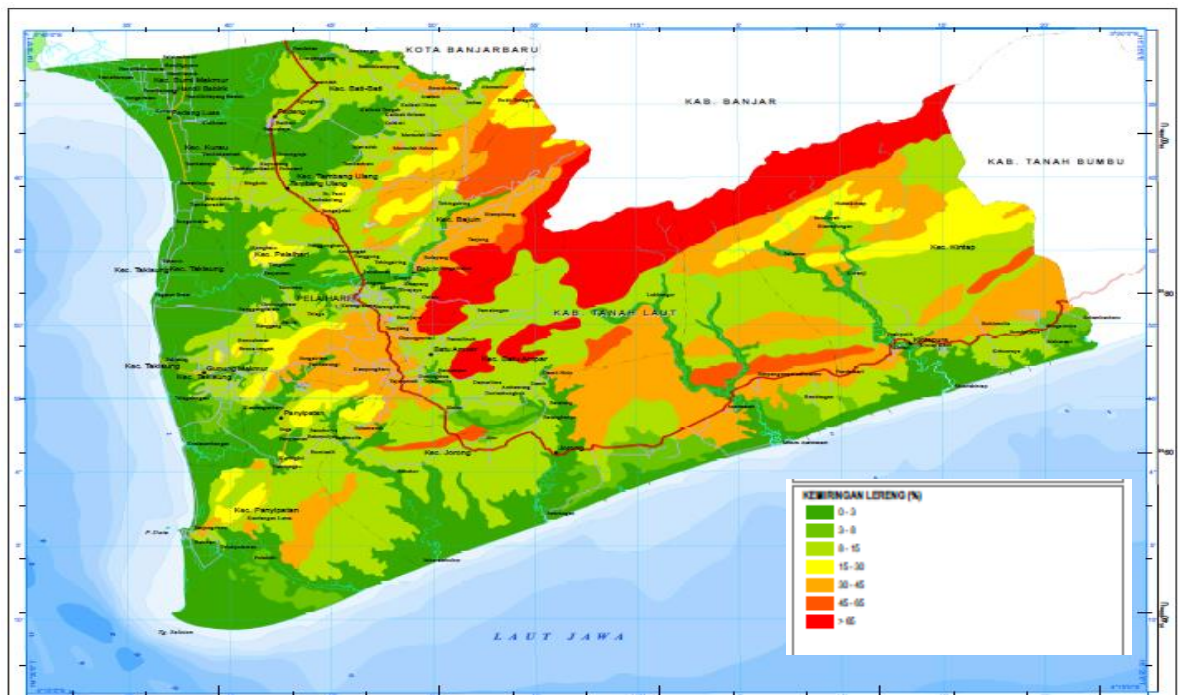
Berdasarkan tingkat kelandaiannya, wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu

meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 290.147 Hektar (78%); wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 43.060 Hektar (12%); wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 26.833 Hektar (7%); dan wilayah sangat curam (kemiringan > 40%) sebesar 12.890 Hektar (3%). Peta Kemiringan Lereng dapat dilihat pada gambar 2.4



Sumber: Bappeda Kabupaten Tanah Laut (diolah)

Gambar 2.3 Persentase Kemiringan Lahan Beserta Luasnya

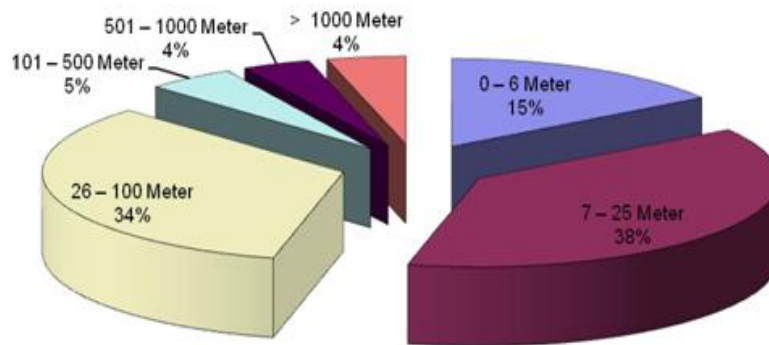


Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016 – 20136

Gambar 2.4 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Tanah Laut
Kabupaten Tanah Laut mempunyai ketinggian diatas permukaan

laut dapat diklasifikasikan dalam delapan kelompok, yaitu

ketinggian 0 - 6 Meter sebesar 58.231 Hektar (16%), ketinggian 7 - 25 Meter sebesar 142.133 Hektar (37%), ketinggian 26 - 100 Meter sebesar 125.386 Hektar (34%), ketinggian 101 - 500 Meter sebesar 17.759 Hektar (5%), ketinggian 501 - 1000 Meter sebesar 13.661 Hektar (4%) dan ketinggian lebih dari 1000 Meter sebesar 15.760 Hektar (4%).



Sumber : Bappeda Kabupaten Tanah Laut (diolah)

Gambar 2.5 Persentase Tinggi Permukaan Laut

2.1.1.2. Jenis Tanah

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari tanah Organosol Gleihumus, Aluvial, Latosol, Komplek Podsolik Merah, Kuning dan Laterit, dengan dominasi berupa tanah Latosol yang tersebar dibagian tengah kabupaten (Kecamatan Takisung, Batu Ampar, Pelaihari, Jorong dan Kintap), sedang jenis tanah Aluvial tersebar di tepi pantai barat dan selatan kabupaten. Untuk jenis tanah Organosol Gleihumus tersebar di Kecamatan Takisung, Kurau, dan Pelaihari serta untuk jenis tanah Komplek Podsolid Merah Kuning dan Laterit tersebar di Kecamatan Pelaihari, Kintap, Jorong, dan Batu Ampar.



Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016 – 20136

Gambar 2.6 Gambar Jenis Tanah

2.1.1.3. Hidrologi

Hidrologi permukaan membahas tentang karakteristik hidrologi sungai atau tubuh perairan lainnya yang ada di daratan, seperti rawa, embung, genangan atau kolam-kolam bekas lokasi penambangan. Sebelum membahas satu persatu kondisi hidrologi permukaan, maka penting kiranya untuk memahami batas dan luasan daerah aliran sungai (DAS) yang ada di Kabupaten Tanah Laut. DAS adalah daerah yang di batasi oleh igir-igir topografi sebagai pemisahan aliran (divide) yang berfungsi menangkap aliran hujan, menyimpan, dan mengalirkannya melalui sistem aliran sungai, dan keluar melalui outlet tunggal. Berdasarkan batas alami berupa pembatas topografi tersebut, maka di Kabupaten Tanah Laut paling tidak dapat di kelompokkan ke dalam 18 (delapan belas) DAS, seperti terinci dalam Tabel 3.5 dan gambar 3.4. Berdasarkan interpretasi peta, daerah aliran sungai terluas adalah DAS Kintap (70.034,11 Ha), di susul DAS Tabanio (62.425,19

Ha), DAS Asam-asam (54.312,42 Ha), dan DAS Maluka (51.318,14 Ha).

Tubuh hidrologi permukaan lainnya yang di jumpai di Kabupaten Tanah Laut adalah kolam – kolam bekas penambangan batubara, emas atau biji besi yang banyak tersebar di Kecamatan Kintap, Jorong, dan Pelaihari serta daerah rawa-rawa yang tersebar di bagian Selatan dan Barat wilayah kajian, yaitu di sekitar muara sungai Kintap; sekitar Muara sungai Kudung dan Asam-asam; sekitar Muara Sungai Pandan, Sabuhur, Sanipah, dan Sapunggur; sekitar pantai Batakan: sekitar muara Sungai Batanggayang, Kuala Tambangan dan Tabanio; serta bagian tengah Kecamatan Bati-bati dan Tambang Ulang. Rawa-rawa di Kabupaten Tanah Laut ini umumnya berasosiasi dengan satuan geosistem dataran alluvial rawa, seperti di sajikan dalam Peta Sebaran Rawa Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya, kondisi hidrologi permukaan akan di bahas berdasarkan satuan ekosistem yang dilewati atau ditempati oleh bentuk hidrologi permukaan yang bersangkutan.

Berdasarkan kondisi geomorfologi dan kemampuan batuan dalam menyimpan air tanah, maka secara umum diwilayah kajian dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) satuan hidrogeomorfologi, seperti disajikan dalam Peta Hidrogeomorfologi Kabupaten Tanah Laut.

- a. Hidrogeomorfologi Dataran Aluvial merupakan satuan dengan potensi air tanah cukup tinggi dengan penyebaran local, airtanah berkualitas baik, dan akuifer mampu menyimpan airtanah dalam jumlah cukup. Kelompok ini menempati satuan dataran alluvial dan dataran banjir.
- b. Hidrogeomorfologi Dataran nyaris merupakan satuan dengan potensi airtanah sedang, penyebarab cukup meluas, airtanah berkualitas sedang hingga baik, tetapi terdapat kendala berupa muka airtanah cukup dalam, dan seringkali mengalami kekeringan saat musim kemarau. Dijumpai pada seluruh satuan dataran nyaris yang ada di wilayah kajian.
- c. Hidrogeomorfologi Dataran Aluvial Rawa (Fluvio-mari) merupakan satuan dengan potensi airtanah sedang hingga rendah, penyebaran local, air tanah local, air tanah berkualitas sedang hingga buruk dengan

pembatas kualitas berupa kandungan bahan organik dan klorida yang tinggi, dan airtanah terkadang berasa payau hingga asin. Dijumpai pada satuan dataran Aluvial rawa atau dataran fluvio-marin.

- d. Hidrogeomorfologi Pesisir merupakan satuan dengan potensi airtanah rendah, kualitas air tanah buruk, dan pada umumnya air tanah berasa payau hingga asin akibat pengaruh intrusi air laut. Kelompok ini menempati satuan gisik pantai dan rataan pasang surut.
- e. Hidrogeomorfologi perbukitan-pegunungan merupakan satuan yang miskin atau langka air tanah, yang menempati satuan perbukitan atau pegunungan structural lipatan dan bukit-bukit intrusiv. Langkanya airtanah disebabkan karena batuan penyusunan ketiga satuan tersebut tidak mampu menyimpan airtanah, bersifat kedap atau masif, bahkan air tanah dapat hilang karena struktur batumannya.

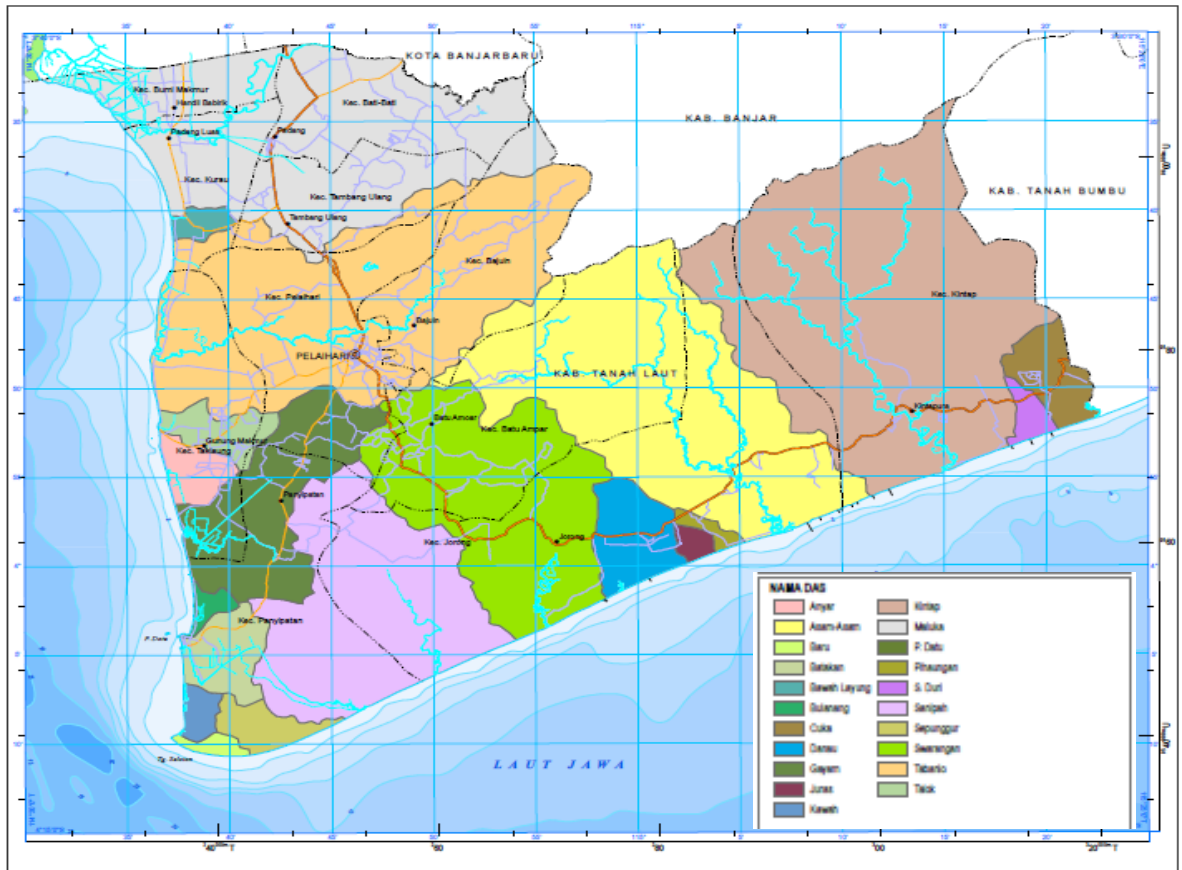
Cakupan DAS dan Luasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2, dan Peta Hidrologi dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Tabel 2.2 Cakupan DAS dan Luasnya di Kabupaten Tanah Laut

No	Nama DAS	Cakupan Sub DAS	Cakupan Wilayah	Luas (Ha)
1.	DAS Kintap	Sungai Pudak, Haruan, Rantau, dan Kintap	Kecamatan Kintap	70.034,11
2.	DAS Tabanio	Sungai Bakar dan Tabanio	Kecamatan Pelaihari, Kurau, dan Takisung	62.425,19
3.	DAS Asam-asam	Sungai Kaldan, Rangkan, dan Asam-Asam	Kecamatan Pelaihari, Batu Ampar, dan Jorong	54.312,42
4.	DAS Maluka	Sungai Rangga dan Maluka	Kecamatan Bati-bati, Tambang Ulang, dan Kurau	51.318,14
5.	DAS Swarangan	Sungai Swarangan	Kecamatan Pelaihari, Batu Ampar dan Jorong	34.106,32
6.	DAS Sabuhur	Sungai Sabuhur	Kecamatan Panyipatan, dan Jorong	20.958,56
7.	DAS Batanggayang	Sungai Batanggayang	Kecamatan Pelaihari, Panyipatan, dan Takisung	16.992,25
8.	DAS Kandangan	Sungai Kepunggur dan Kandangan	Kecamatan Takisung dan Panyipatan	13.923,16
9.	DAS Sepunggur	Sungai Sepunggur	Kecamatan Panyipatan dan Jorong	10.817,96
10.	DAS Danau	Sungai Danau	Kecamatan Jorong	9.014,91
11.	DAS Anyar	Sungai Anyar	Kecamatan Takisung	8.789,23
12.	DAS Pandan	Sungai Pandan	Kecamatan Jorong	7.055,39
13.	DAS Cuka	Sungai Cuka	Kecamatan Kintap	6.764,78
14.	DAS Kudung	Sungai Kudung	Kecamatan Kintap dan Jorong	6.334,35
15.	DAS Satui	Sungai Satui	Kecamatan Kintap	5.719,92
16.	DAS Sanipah	Sungai Sanipah	Kecamatan Jorong	3.573,52

No	Nama DAS	Cakupan Sub DAS	Cakupan Wilayah	Luas (Ha)
17.	DAS Barito Timur	Sungai Barito Timur	Kecamatan Kurau	943,21
18	DAS Baru			
19.	DAS	Tidak ada nama sungai	Kecamatan Bati-bati	3.405,59
20	DAS Batakan			
21	DAS Bulanang			

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut (2007) dan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2015



Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016 – 20136

Gambar 2. 7 Peta Hidrologi

2.1.1.4. Iklim

Iklim merupakan kondisi rata-rata dari semua peristiwa yang terjadi di atmosfer yang terdapat pada suatu daerah yang luas serta pada waktu relatif lama. Temperatur udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai.

Berdasarkan tabel, Kabupaten Tanah Laut sepanjang tahun mengalami hujan dengan 2 kali puncak hujan dalam satu tahun.

Puncak hujan pertama terjadi pada bulan Januari yaitu dengan curah hujan 477,2 mm, sementara puncak hujan kedua terjadi pada bulan Desember yakni sebesar 579,0 mm. Sementara curah hujan terkecil terjadi pada periode Agustus hingga September. Secara umum pola curah hujan di Kabupaten Tanah Laut relatif sama, hanya ada satu daerah yang polanya berbeda, yaitu di Kecamatan Kintap terjadi penurunan curah hujan.

Tabel 2.3 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Setiap Bulan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016

No.	Bulan	Curah hujan (mm)	Hari Hujan (hh)
1	Januari	209	21
2	Februari	227	22
3	Maret	352	26
4	April	589	28
5	Mei	427	25
6	Juni	362	12
7	Juli	189	9
8	Agustus	28	3
9	September	183	12
10	Oktober	220	17
11	November	151	25
12	Desember	408	25

Sumber : Kabupaten Tanah Laut dalam angka, Tahun 2017

2.1.1.5 Penggunaan Lahan

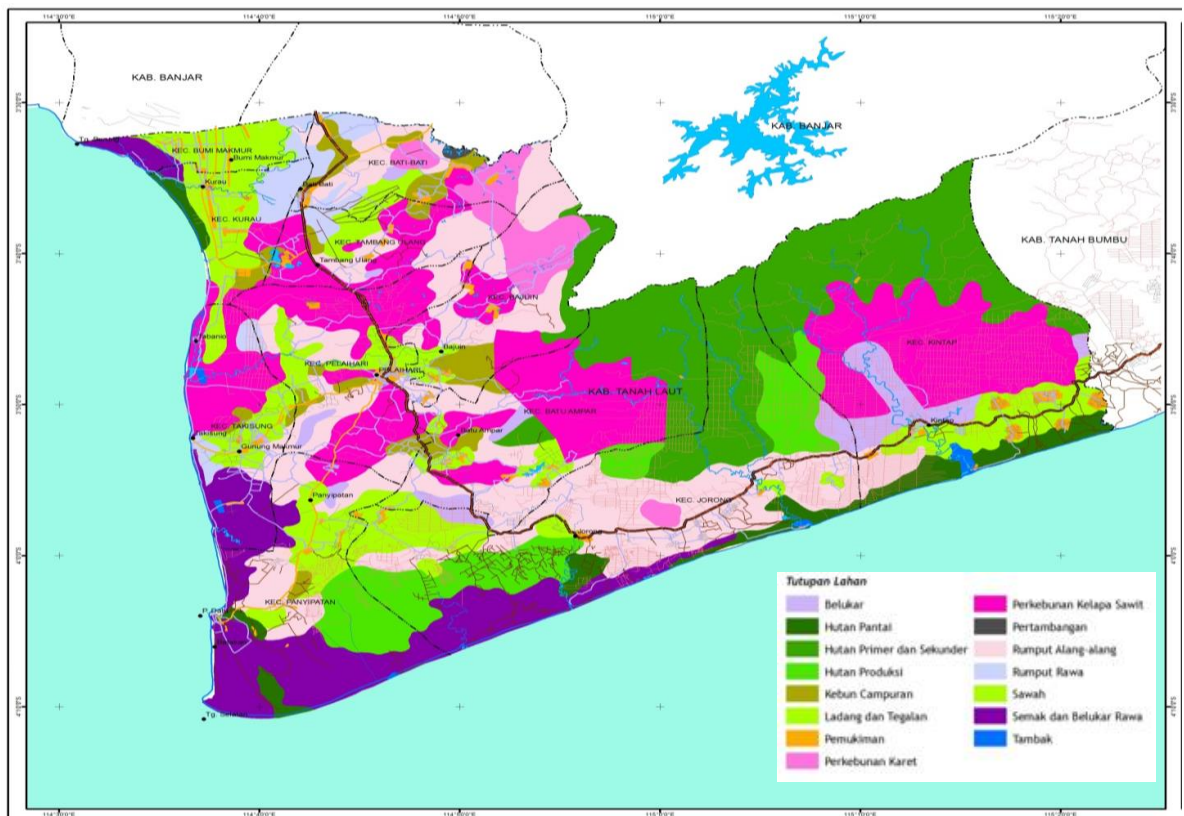
Penggunaan lahan faktual di Kabupaten Tanah Laut dapat dibedakan menjadi : wilayah permukiman, hutan, permukiman, perairan (sungai), perkebunan, pertambangan, pertanian, rawa, semak belukar, tambak dan tegalan. Pada Tabel 2.4 dan Gambar 2.8 disampaikan guna lahan eksisting di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan interpretasi citra satelit resolusi tinggi tahun 2014.

Tabel 2.4 Jenis Guna Lahan

No.	Jenis Guna Lahan	Persentase (%)
1	Hutan	32,96
2	Pemukiman	0,38
3	Perairan (sungai)	0,05

No.	Jenis Guna Lahan	Persentase (%)
4	Perkebunan	16,49
5	Pertambangan	0,08
6	Pertanian	25,69
7	Rawa	14,64
8	Semak Belukar	8,14
9	Tambak	0,01
10	Tegalan	1,56
Luas Total		100

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016 – 20136



Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016 – 20136

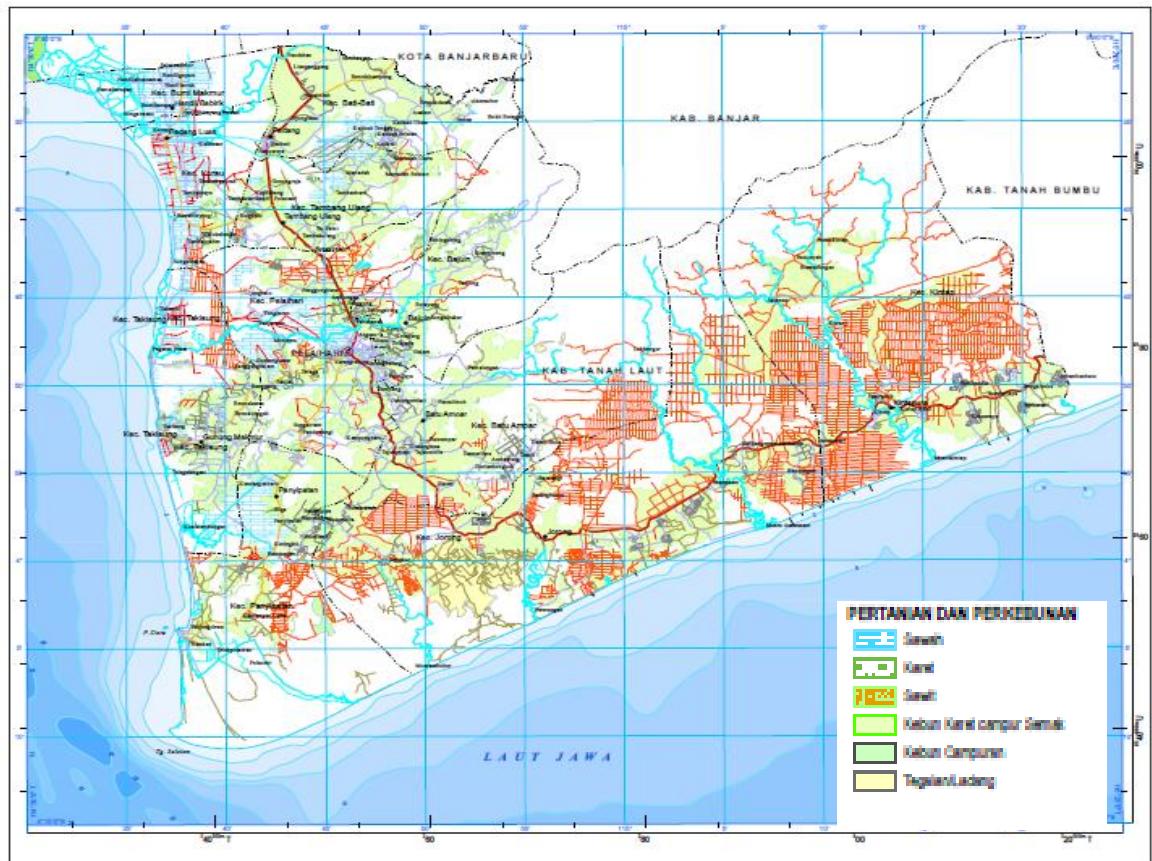
Gambar 2.8 Peta Tutupan Lahan

2.1.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.1.6.1 Pertanian

Pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Tanah Laut dirasakan sangat potensial dengan didukung oleh kondisi lahan yang cukup luas. Sasaran dan pengembangan pertanian utama adalah padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau.

Namun demikian, hampir semua jenis tanaman bahan makanan lainnya mengalami penurunan produksi. Hal ini mungkin disebabkan beralihnya sebagian petani tanaman pangan menjadi hortikultura dan perkebunan.



Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016 – 20136

Gambar 2.9 Peta Pertanian dan Perkebunan

2.1.1.6.2 Perkebunan

Sub sektor perkebunan di Kabupaten Tanah Laut memegang peranan penting dalam mendukung pengembangan wilayah. Perkebunan yang eksisting di Kabupaten Tanah Laut terdiri atas perkebunan rakyat, perkebunan negara, dan perkebunan besar swasta. Komoditas yang diusahakan beragam terdiri atas karet dan kelapa sawit. Lahan yang telah dimanfaatkan untuk perkebunan sampai dengan akhir tahun 2016 untuk sawit 11.822 Ha dan karet 14.746 Ha, komoditas ini sudah melebihi kuota sehingga untuk selanjutnya perkembangan perkebunan di Kabupaten Tanah Laut tidak diijinkan

untuk membuka kawasan baru, hanya mengelola dan memaksimalkan potensi lahan perkebunan yang sudah ada.

Jenis tanaman perkebunan yang potensial untuk menjadi tanaman andalan Kabupaten Tanah Laut adalah tanaman kelapa sawit dan karet. Luas panen tanaman kelapa sawit pada tahun 2016 mencapai 10.956 ha, nilai tanaman kelapa sawit pada tahun ini mengalami penurunan sebesar 7 persen dari luas panen tahun lalu yang diambil dari luas tanaman menghasilkan ditambah dengan luas tanaman yang belum menghasilkan. Hal ini disebabkan karena harga kelapa sawit yang turun dan juga kemarau. Sementara untuk tanaman karet, pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 27,5 % menjadi 14.629 ha.

2.1.1.6.3 Peternakan dan Perikanan

Potensi sektor perikanan meliputi perikanan budidaya air tawar (tambak dan keramba) dan tangkapan (rawa, sungai, dan laut). Dengan potensi luasan rawa, danau, dan sungai di Kabupaten Tanah Laut memungkinkan untuk dikembangkan kawasan budidaya perikanan air tawar. Sedangkan potensi laut, dimana Kabupaten Tanah Laut merupakan Kabupaten yang memiliki garis pantai terpanjang di Kalimantan Selatan, memiliki sumberdaya perikanan tangkapan yang sangat besar dengan variabilitas jenis ikan yang beragam. Topografi laut yang landai dan masih terdapat kawasan terumbu karang yang masih hidup menjadikan Kabupaten Tanah Laut sebagai penghasil berbagai jenis udang dan ikan laut yang bernilai tinggi.

Ekosistem estuarin (muara sungai) merupakan daerah yang potensial untuk pengembangan kawasan perikanan yang merupakan pertemuan air sungai yang dipengaruhi oleh daratan dan laut. Ekosistem estuarin dapat dijumpai hampir disemua kecamatan dimana terdapat sungai-sungai yang bermuara ke Laut Jawa, antara lain : Kecamatan Kintap (Sungai Haruan, Sungai Kintap, dan Sungai Cuka; Kecamatan Jorong (Sungai Swarangan, Sungai Sabuhur, Sungai Sanipah, Sungai Pandan, Sungai Asam-asam, dan Sungai Kudung); Kecamatan Panyipatan (Sungai Kandangan); Kecamatan takisung

(Sungai Batangayang, Sungai Kuala Tambangan, dan Sungai Tabanio); dan Kecamatan Kurau (Sungai Bakau, Sungai Rasau, Sungai Bawah Layung, dan Sungai Maluka). Sebagian besar air sungai yang mengandung sedimen lumpur membawa sejumlah unsur hara ke perairan muara dan pantai sehingga menyebabkan peningkatan kesuburan perairannya. Beberapa muara sungai di Kabupaten Tanah Laut merupakan habitat yang produktif dan penting untuk mendukung kehidupan biota air. Ekosistem estuarin juga memiliki kekhasan dengan terdapatnya hutan mangrove yang merupakan tempat untuk memijah dan pembibitan bagi berbagai jenis ikan (bandeng) dan udang. Hasil yang diperoleh masyarakat dari potensi sumberdaya perikanan pada ekosistem estuarin berupa ikan, udang, kepiting, kerang-kerangan, mamalia laut, dan reptilia. Pengembangan kawasan perikanan pada ekosistem estuaria dan laut harus mendapat perhatian yang sangat serius dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terkait dengan perlindungan sumberdaya hayati berupa hutan mangrove dan terumbu karang. Kerusakan sumberdaya hayati tersebut berarti kehilangan besar bagi lingkungan hidup yang akan berdampak pada kerusakan lingkungan pesisir (abrasi pantai) dan kehilangan plasma nutfah yang sangat berharga.

2.1.1.6.4 Pariwisata

Kabupaten Tanah Laut saat ini merupakan salah satu daerah andalan tujuan wisata regional Provinsi Kalimantan Selatan, dengan potensi andalannya berupa wisata pantai yang didukung oleh akses jalan yang memadai dan dekat dengan Kota Banjarmasin serta sebagian besar wilayah berbatasan langsung dengan Laut Jawa.

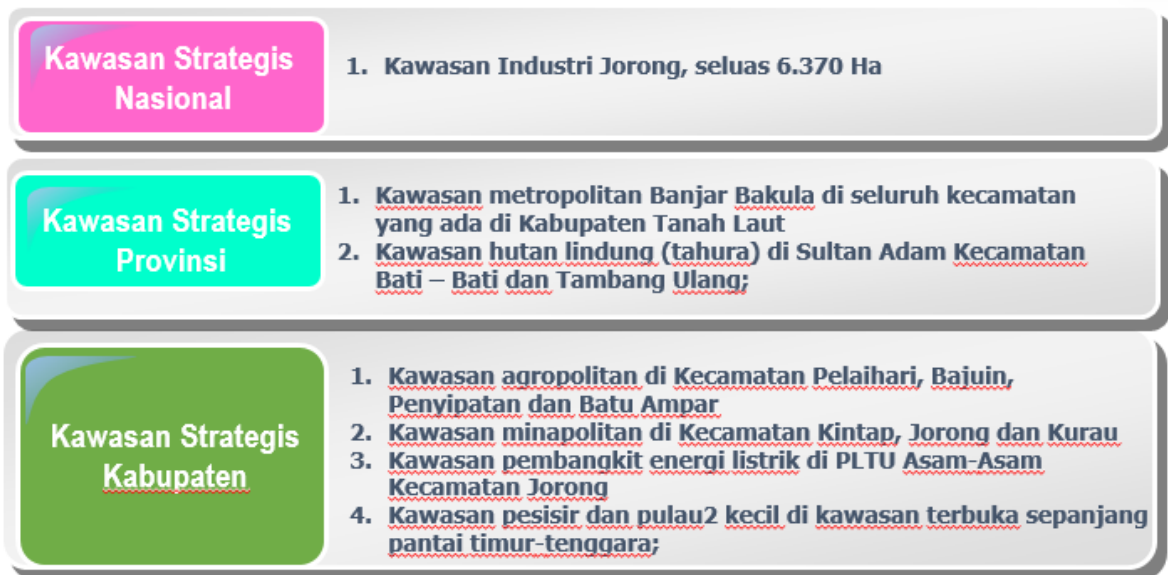
Obyek wisata pantai sangat berkembang di Kabupaten Tanah dengan potensi garis pantai yang panjang, sedangkan obyek wisata lainnya berupa wisata air terjun, pegunungan dan taman wisata, yaitu terdiri dari :

1. Pantai Takisung
2. Pantai Batakan
3. Pantai Swarangan

4. Pantai Batu Lima
5. Pantai Asmara
6. Pantai Sanipah
7. Pantai Tanjung Dewa
8. Pantai Joras
9. Air Terjun Bajuin
10. Air Terjun Balangdaras
11. Air Terjun Habulu
12. Gunung Kayangan
13. Gunung Keramaian
14. Bukit Sanghiyang
15. Kawasan Goa Marmer
16. Goa Macan/Liang Babau
17. Kerbau Rawa
18. Benteng Belanda Tabanio
19. Pulau Datu Pamulutan
20. Datu Insad
21. Telaga Alam Batu Batuah
22. Taman Mina Tirta
23. Taman Hutan Kota

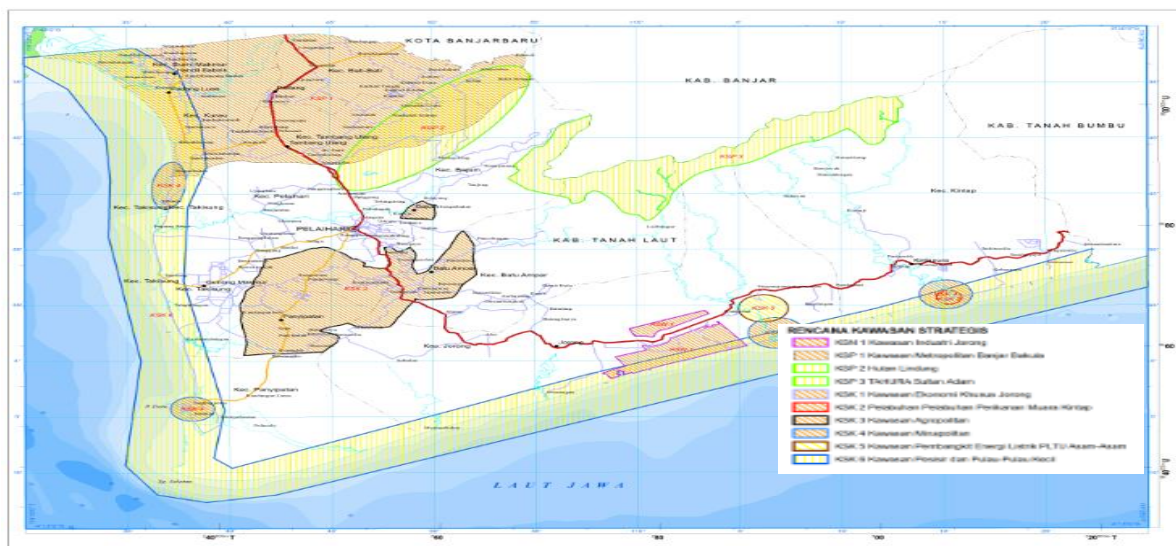
2.1.1.6.5 Kawasan Strategis

Kawasan strategis merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Salah satu kawasan di Tanah Laut merupakan kawasan strategis nasional yang menjadi prioritas pembangunan nasional yaitu Kawasan Industri Jorong. Sedangkan kawasan-kawasan lain yang menjadi prioritas provinsi maupun prioritas kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 2.10 Dan persebarannya dapat dilihat pada Gambar 2.11



Sumber : Bappeda Kabupaten Tanah Laut

Gambar 2.10 Peta Rencana Kawasan Strategis



Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016 – 20136

Gambar 2.11 Sebaran Kawasan Strategis

2.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana

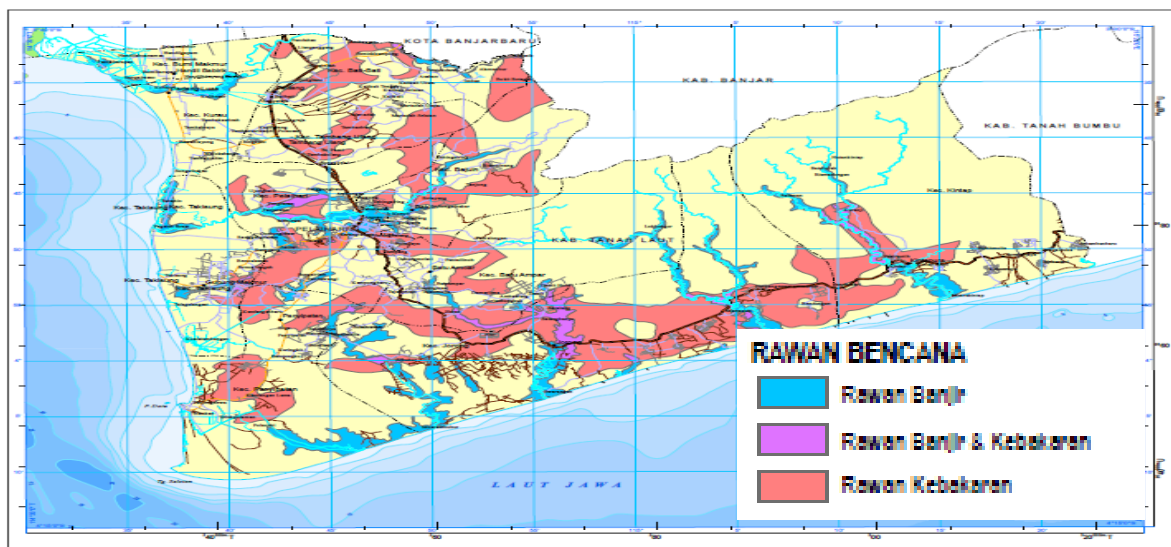
Kawasan rawan bencana di Kabupaten Tanah Laut dapat mencakup dua kategori antara lain kawasan rawan bencana banjir dan kebakaran. Kawasan rawan bencana banjir terkait dengan potensi luapan banjir yang sering terjadi selama musim hujan dalam wilayah DAS, sedangkan kawasan rawan bencana kebakaran mencakup wilayah gambut dalam dan kawasan lahan kering dengan penggunaan lahan berupa semak belukar.

Wilayah Kalimantan pada umumnya mempunyai curah hujan rerata tahunan yang tinggi, dengan sebagian besar batuan penyusun ultramafik dan metamorf yang masif dan kedap air sehingga tidak mampu meresapkan dan menyimpan air dengan baik. Kondisi tersebut ditambah dengan rusaknya kawasan hutan serta kawasan daerah aliran sungai (DAS) yang ada, menjadikan daerah-daerah di Kalimantan khususnya di Kabupaten Tanah Laut sangat rawan terjadinya bencana banjir pada saat musim penghujan.

Gugus pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan selatan yang membujur dari Utara - Selatan mengakibatkan terbentuknya beberapa sistem DAS dan tangkapan air (*catchment area*) menjadi sistem DAS bagian Barat, bagian Timur dan bagian Selatan pegunungan Meratus. Sistem DAS yang terdapat di wilayah Kabupaten Tanah Laut umumnya termasuk sistem DAS bagian Selatan pegunungan Meratus. Hampir semua sistem DAS di Kabupaten Tanah Laut yang berhulu di daratan punggung pegunungan Meratus tersebut bermuara di pesisir pantai yang juga terdapat di wilayah kabupaten. Kerusakan kawasan hutan dan kawasan DAS di Kabupaten Tanah Laut umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia sehingga kawasan-kawasan tersebut tidak mampu lagi berfungsi sebagai penyerap air dan memperlambat aliran permukaan saat musim hujan.

Berdasarkan hasil studi Profil Lingkungan Hidup Berbasis SIG Kabupaten Tanah Laut (2016), maka hampir di semua wilayah kecamatan Kabupaten Tanah Laut mempunyai permasalahan banjir, terutama wilayah yang berada pada satuan geosistem dataran banjir dan rata-an pasang surut. Hal ini disebabkan karena wilayah-wilayah tersebut memang merupakan wilayah bertopografi rendah dan dilewati aliran sungai, yang secara morfometri merupakan hilir sungai. Dengan kata lain, geosistem dataran banjir dan rata-an pasang surut merupakan bagian bawah atau topografi terendah dari suatu DAS.

Berdasarkan informasi dan pengamatan di lapangan, beberapa daerah yang sering dilanda banjir pada saat hujan deras dalam waktu yang cukup lama di musim penghujan yaitu kecamatan-kecamatan yang berada di cakupan sistem DAS Kintap, DAS Asam-Asam, DAS Swarangan, DAS Tabanio, DAS Maluka dan DAS Jorong, seperti Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kintap dan bati-Bati. Sedangkan beberapa daerah pesisir pantai yang rawan terhadap genangan akibat pasang surut air laut antara lain pesisir di Kecamatan Bumu Makmur, Kurau dan Takisung. Banjir dan genangan air tersebut telah merusak padi dan sawah masyarakat hampir setiap tahunnya.



Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016 – 20136

Gambar 2.12 Peta Rawan Bencana

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Sebuah konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dan ditegaskan bahwa secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan dan pengawasan daerah. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu

mencukupi kebutuhan fiskal (*fiscal need*) yang merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, sehingga tidak mengalami defisit fiskal. Salah satu upaya untuk meningkatkan *fiscal capacity* daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan daerah.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen (BPS 2016). PDRB sering digunakan sebagai interpretasi keberhasilan pembangunan perekonomian daerah oleh pemerintah. Adapun data PDRB ini dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan dengan tujuan untuk melihat struktur ekonomi. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar perhitungan. PDRB atas dasar harga konstan ini bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi baik secara global maupun pada masing-masing sektor perekonomian.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 4 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan (lihat Tabel 2.5 dan Gambar 2.13). Pada tahun 2016 PDRB Kabupaten Tanah Laut mencapai 11,4 trilyun rupiah, tahun 2015 mencapai 10,81 trilyun rupiah, tahun 2014 mencapai 10,2 trilyun, dan tahun 2013 mencapai 9,4 trilyun rupiah. Nilai PDRB yang selalu mengalami kenaikan tersebut mengindikasikan selalu terjadi pertumbuhan positif PDRB Kabupaten Tanah Laut. Hal tersebut sejalan dengan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut yang banyak dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

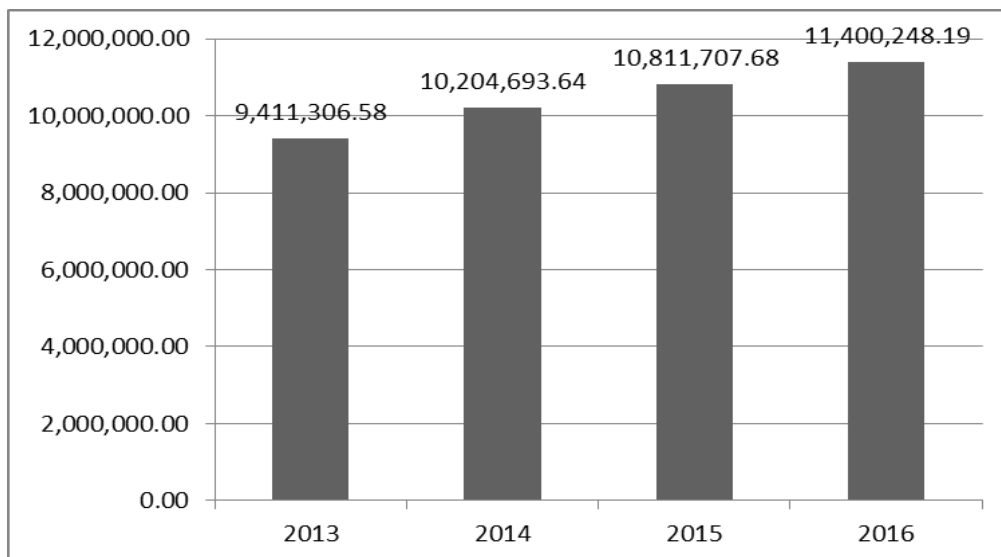
Tabel 2.5 PDRB ADHB Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2016

Lapangan Usaha	PDRB (Juta Rupiah)			
	2013	2014	2015*	2016**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,760,239.30	1,913,451.42	2,092,243.08	2,238,865.96
Pertambangan dan Penggalian	3,308,529.77	3,329,086.86	3,041,096.81	2,855,803.89
Industri Pengolahan	983,616.50	1,093,292.81	1,229,146.39	1,394,643.79
Pengadaan Listrik dan Gas	3,164.33	4,613.57	7,162.74	9,160.26
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,984.94	16,510.48	18,439.15	20,041.00
Konstruksi	548,976.49	632,809.87	734,064.46	799,280.71
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	790,113.35	921,078.35	1,052,151.73	1,188,046.65
Transportasi dan Pergudangan	460,544.58	532,691.01	609,787.47	669,639.50
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	119,307.01	138,564.97	153,987.55	168,091.31
Informasi dan Komunikasi	230,908.82	265,374.45	292,968.26	323,913.93
Jasa Keuangan dan Asuransi	121,461.20	138,570.10	153,302.02	165,911.42
Real Estate	166,754.61	190,219.51	209,402.98	228,544.85
Jasa Perusahaan	25,010.30	29,450.65	33,138.03	36,736.59
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	454,932.60	511,867.85	608,284.32	636,230.60
Lapangan Usaha	PDRB (Juta Rupiah)			
	2013	2014	2015*	2016**
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76,579.17	88,499.11	104,762.54	118,177.67
Jasa lainnya	54,914.24	64,821.15	75,233.07	84,550.23
TOTAL	9,411,306.58	10,204,693.64	10,811,707.68	11,400,248.19

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut 2018 (Diolah)

Gambar 2.13 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Tanah Laut Tahun 2013-2016

Sementara itu PDRB berdasarkan atas harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 2010), selama kurun waktu 4 tahun terakhir juga mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan (lihat Tabel 2.6 dan Gambar 2.14). Pada tahun 2016 PDRB Kabupaten Tanah Laut mencapai 9,13 trilyun rupiah, 2015 besaran PDRB mencapai sebesar 8,84 trilyun rupiah, tahun 2014 sebesar 8,59 trilyun rupiah, dan tahun 2013 sebesar 8,33 trilyun rupiah.

Tabel 2.6 PDRB ADHK Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2016

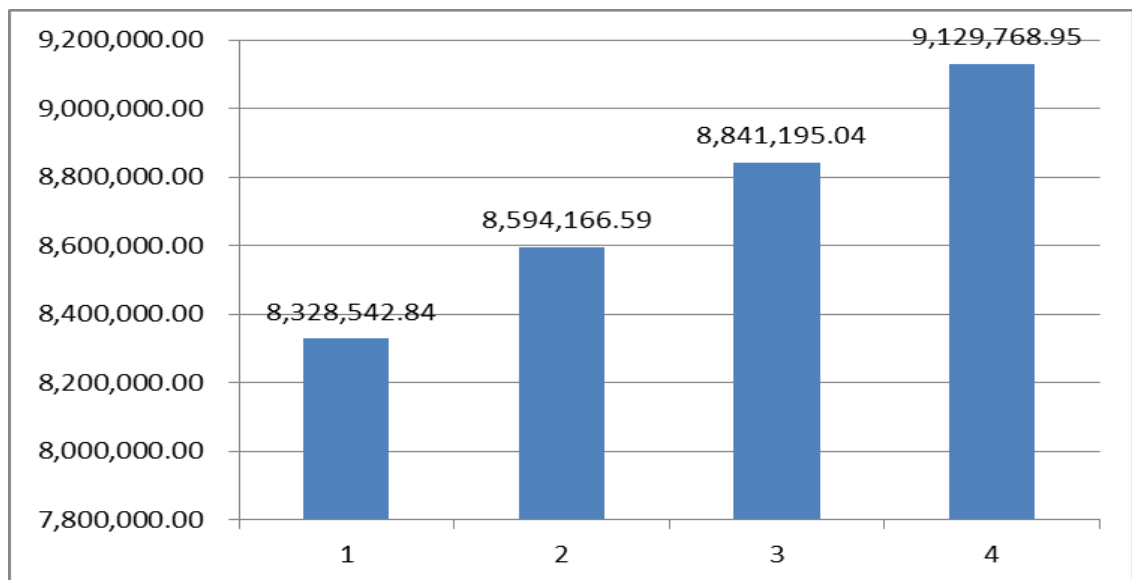
Lapangan Usaha	PDRB (Juta Rupiah)			
	2013	2014	2015*	2016**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,550,350.52	1,586,134.28	1,621,335.41	1,683,597.23
Pertambangan dan Penggalan	2,979,840.74	2,952,649.56	2,887,219.93	2,820,069.78
Industri Pengolahan	863,808.92	903,929.23	943,075.36	1,014,471.70
Pengadaan Listrik dan Gas	3,688.52	5,029.36	6,622.05	6,953.02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,426.64	13,527.64	14,290.60	15,352.39
Konstruksi	498,118.59	530,346.86	563,970.85	593,466.52
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	678,557.39	738,307.76	798,861.60	861,829.05
Transportasi dan Pergudangan	406,151.86	433,606.36	463,818.90	493,954.68

Lapangan Usaha	PDRB (Juta Rupiah)			
	2013	2014	2015*	2016**
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	106,107.99	113,252.49	120,278.16	127,898.76
Informasi dan Komunikasi	210,242.03	229,920.68	249,165.04	270,966.99
Jasa Keuangan dan Asuransi	101,699.95	109,058.89	114,429.54	120,965.81
Real Estate	151,127.98	159,379.57	168,384.51	179,278.99
Jasa Perusahaan	21,008.23	22,455.70	23,933.29	25,859.91
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	369,717.79	391,194.47	425,537.34	434,255.44
Jasa Pendidikan	258,622.58	279,674.46	305,851.99	335,030.27
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	68,325.45	72,934.82	78,426.81	85,524.44
Jasa lainnya	48,747.66	52,764.47	55,993.65	60,293.97
Total	8,328,542.84	8,594,166.59	8,841,195.04	9,129,768.95

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

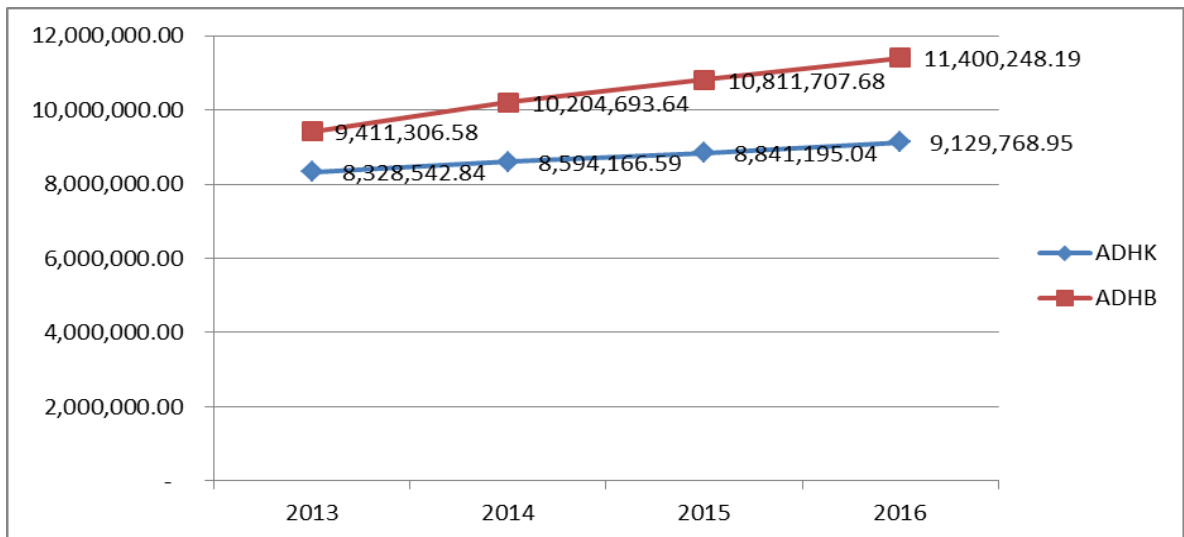
*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut 2018 (Diolah)

Gambar 2.14 PDRB ADHK Kab. Tanah Laut Tahun 2013-2016



Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut 2018 (Diolah)

Gambar 2.15 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 – 2017 (juta rupiah)

2. Distribusi Persentase PDRB

Berdasarkan hasil penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2016, dapat dilihat bahwa nilai *share* produk Pertambangan dan Penggalian masih menjadi tulang punggung struktur ekonomi Kabupaten Tanah Laut yang memberikan nilai paling besar kontribusinya sebesar 25,05 persen. Namun jika dibanding dengan periode sebelumnya yakni 2013 - 2015, persentase dari produk ini cenderung mengalami penurunan kontribusinya terhadap struktur ekonomi. Rata-rata kontribusinya menurun sebesar 3,36 persen per tahun. Pada sektor lain, nilai *share* produk pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar kedua yakni sebesar 19,64 persen. Jika dibanding dengan periode sebelumnya, produk ini mengalami peningkatan kontribusi terhadap struktur perekonomian di Kabupaten Tanah Laut, rata-rata peningkatannya dari tahun 2013 hingga tahun 2016 sebesar 0,31 persen.

Tabel 2.7 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2016 (Persen)

Kategori	Uraian	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	18,70	18,75	19,35	19,64
B	Pertambangan dan Penggalian	35,15	32,62	28,13	25,05
C	Industri Pengolahan	10,45	10,71	11,37	12,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,05	0,07	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,16	0,17	0,18
F	Konstruksi	5,83	6,20	6,79	7,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,40	9,03	9,73	10,42
H	Transportasi dan Pergudangan	4,89	5,22	5,64	5,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,27	1,36	1,42	1,47
J	Informasi dan Komunikasi	2,45	2,60	2,71	2,84
K	Jasa Keuangan	1,29	1,36	1,42	1,46
L	Real Estate	1,77	1,86	1,94	2,00
M, N	Jasa Perusahaan	0,27	0,29	0,31	0,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,83	5,02	5,63	5,58
P	Jasa Pendidikan	3,11	3,27	3,67	4,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	0,87	0,97	1,04
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,58	0,64	0,70	0,74
Produksi Domestik Regional Bruto		100	100	100	100

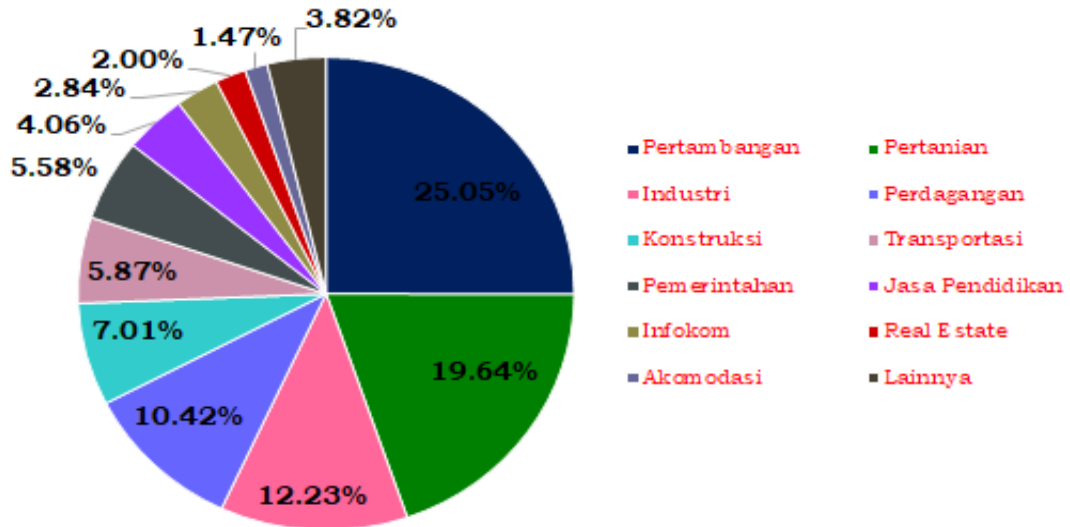
Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Kontribusi terbesar ketiga pada penyusunan struktur perekonomian di Kabupaten Tanah Laut tahun 2016 adalah produk industri pengolahan yaitu sebesar 12,23 persen dilanjutkan dengan kontribusi dari produk perdagangan besar dan eceran sebesar 10,42 persen. Secara keseluruhan, *share* masing-masing lapangan usaha terus meningkat sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 kecuali pada Pertambangan dan Penggalian yang bergerak sebaliknya. Jika ditelaah lebih lanjut, penyebab dari menurunnya *share* pertambangan bukan tanpa sebab. Munculnya Peraturan Menteri No. 07 Tahun 2017 baru mengenai pembangunan smelter dan pelarangan ekspor bahan mentah membuat perusahaan pertambangan dan penggalian lebih banyak memilih untuk mengurangi kegiatan produksinya, termasuk

dari pengurangan tenaga kerja maupun pengurangan output. Tanah Laut sendiri merupakan salah satu penghasil batu bara terbesar di Kalimantan, namun demikian harga batu bara yang terus merosot juga berpengaruh terhadap hasil produksi yang semakin berkurang.



Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut 2017 (Diolah)

Gambar 2.16 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016

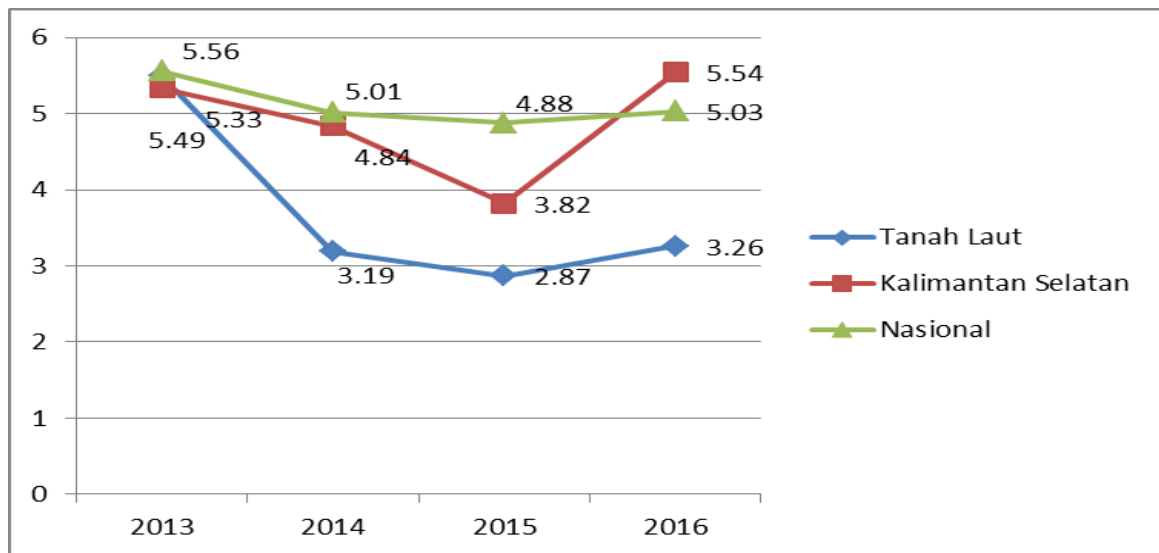
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Jika dibandingkan dengan kenaikan PDRB atas dasar harga berlaku maka PDRB atas dasar harga konstan, kenaikannya tidak terlalu besar. Dari nilai total PDRB ini dapat diketahui kenaikan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga pada tahun berjalan sehingga PDRB atas dasar harga konstan dapat dibandingkan antar tahun. PDRB konstan juga dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Hal ini juga merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan terutama dibidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan nilai PDRB konstan pada tahun tertentu dibandingkan dengan PDRB pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016, nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar 9,13 triliun rupiah sedangkan pada tahun 2015 sebesar 8,84 triliun rupiah. Dari nilai tersebut dapat diketahui pertumbuhan ekonomi di tahun 2016

sebesar 3,26 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 ini lebih besar atau tumbuh meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun 2015 yang tumbuh sebesar 2,87 persen. Namun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut masih di bawah (lihat Gambar 2.17).



Sumber: BPS RI (diolah)

Gambar 2.17 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2013-2016

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut diharapkan terus meningkat seiring dengan berbagai jenis kegiatan yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut, yakni pembangunan Pelabuhan Swarangan dan pembangunan kawasan Industri di Kecamatan Jorong. Pada tahun kedepan ada beberapa sector yang diharapkan mengalami pertumbuhan positif dan sangat berpengaruh besar di antaranya adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan lapangan usaha industri pengolahan.

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2016 (Persen)

Kategori	Uraian	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,83	2,31	2,22	3,84
B	Pertambangan dan Penggalian	4,94	-0,91	-2,22	-2,33
C	Industri Pengolahan	4,67	4,64	4,33	7,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,83	36,35	31,67	5,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,64	8,86	5,64	7,43
F	Konstruksi	5,75	6,47	6,34	5,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,54	8,81	8,20	7,88
H	Transportasi dan Pergudangan	7,12	6,76	6,97	6,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,18	6,73	6,20	6,34
J	Informasi dan Komunikasi	6,52	9,36	8,37	8,75
K	Jasa Keuangan	14,02	7,24	4,92	5,71
L	Real Estate	6,73	5,46	5,65	6,47
M, N	Jasa Perusahaan	7,44	6,89	6,58	8,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,81	5,81	8,78	2,05
P	Jasa Pendidikan	7,40	8,14	9,36	9,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,44	6,75	7,53	9,05
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,60	8,24	6,12	7,68
Produksi Domestik Regional Bruto		5,49	3,19	2,87	3,26

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

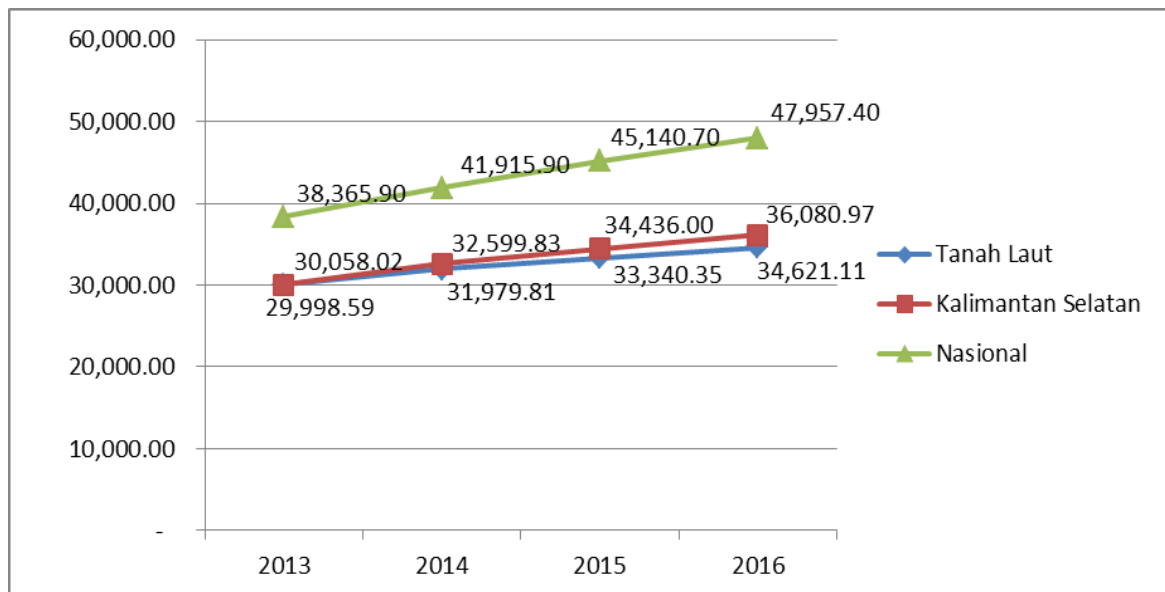
4. PDRB Perkapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah adalah PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu 2013 – 2016 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, nilai PDRB per kapita ADHB Kabupaten Tanah Laut tercatat sebesar 29.998,59 ribu rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2016 mencapai 34.621,11 ribu rupiah. PDRB per kapita ADHB Kabupaten Tanah Laut yang terus meningkat ini berimplikasi pada

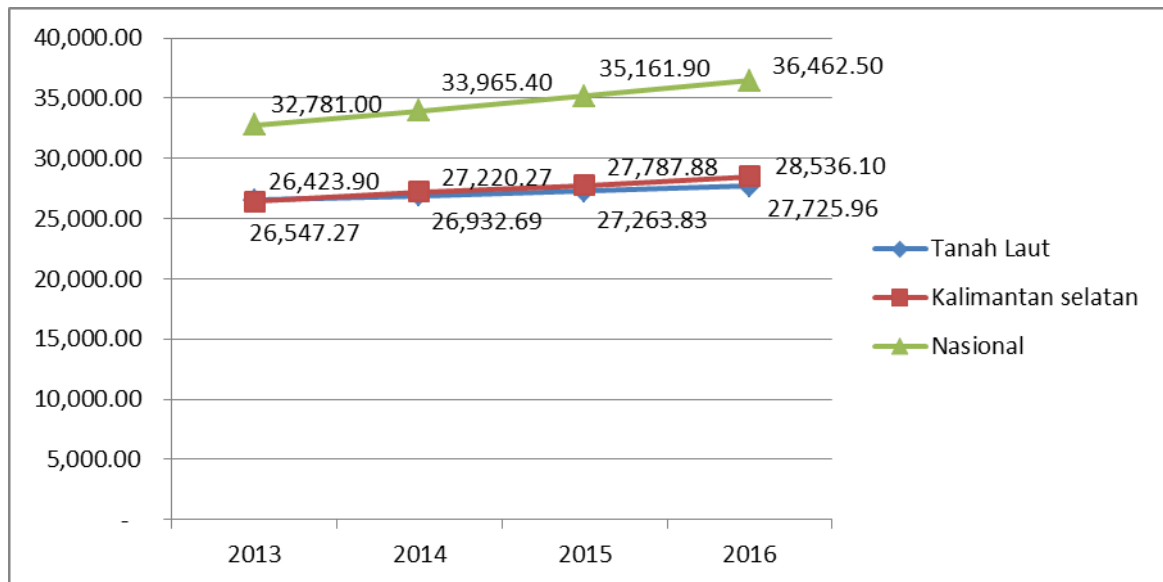
meningkatnya perputaran distribusi ekonomi di masyarakat. Diperkirakan pada tahun kedepan nilai ini akan mengalami lonjakan yang secara signifikan yang diperkirakan berhubungan dengan adanya pembangunan pelabuhan Swarangan dan Kawasan Industri di Kecamatan Jorong.

Berdasarkan data lain, PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu 2013 – 2016 juga mengalami peningkatan. PDRB per kapita ADHK Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2016 mencapai 27.725,96 ribu rupiah. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 27.263,83 ribu rupiah. Tetapi jika dibandingkan dengan nilai PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, baik itu ADHB maupun ADHK, PDRB per kapita Kabupaten Tanah Laut masih berada di bawah (lihat Gambar 2.18 dan Gambar 2.19).



Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, BPS Prov. Kalimantan Selatan dan BPS RI (Diolah)

Gambar 2.18 Perkembangan PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2013 – 2016 (ribu rupiah)



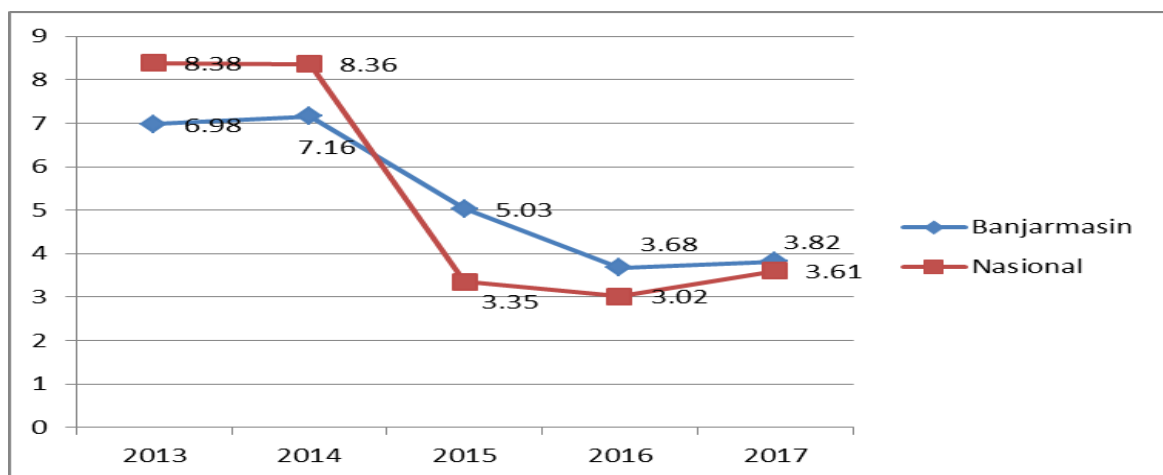
Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, BPS Prov. Kalimantan Selatan dan BPS RI (Diolah)

Gambar 2.19 Perkembangan PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2013 – 2016 (ribu rupiah)

Dengan adanya tren kenaikan PDRB per kapita ini diharapkan secara positif akan meningkatkan daya beli pasar Tanah Laut. Kondisi ini memberikan peluang terhadap peningkatan permintaan pasar sehingga apabila dapat direspon dengan kebijakan yang tepat akan dapat mendorong pertumbuhan sektor hulu maupun sektor hilir. Sektor hilir akan memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan variasi produk jadi lokal dengan harga yang lebih kompetitif. Pemenuhan arus barang yang variatif dan harga yang kompetitif diharapkan mampu mendorong pembentukan karakter pasar Tanah Laut yang berorientasi pada produk lokal. Oleh karena itu sub sektor industri pengolahan harus mendapat perhatian dalam kebijakan sehingga dapat mendorong pembangunan embrio industri hilir yang kuat dan kompetitif. Pemenuhan pasar pada skala lokal pada tahun 2018 ke atas diprediksikan akan mengalami perubahan yang mendasar dengan adanya pembangunan Kawasan Industri di kabupaten Tanah Laut. Pasar lokal Kabupaten Tanah Laut diharapkan akan berkembang menjadi lebih besar. Disisi lain, untuk mengantisipasi permintaan pasar terhadap suplai bahan mentah perlu penguatan pada sektor industri hulu, dalam hal ini tidak dapat diabaikan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Tanah Laut paling besar disumbang oleh sub sektor pertanian setelah sektor Pertambangan.

5. Inflasi

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah dan mampu memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi. Inflasi Kabupaten Tanah Laut sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Banjarmasin, hal tersebut karena Kota Pelaihari belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan inflasi pada kota-kota di Indonesia. Pada periode tahun 2013 – 2017, laju inflasi di Kota Banjarmasin menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungannya menurun. Nilai inflasi tertinggi Kota Banjarmasin adalah pada tahun 2014, yaitu sebesar 7,16% dan nilai inflasi pada tahun 2016 adalah yang terendah, yaitu 3,68%. Fluktuasi inflasi Kota Banjarmasin ini sejalan dengan fluktuasi inflasi di tingkat nasional, dimana pada tingkat nasional, inflasi tertinggi adalah pada tahun 2013, yakni 8,38% dan terendah pada tahun 2016, yakni 3,02%. Pada Tahun 2017 nilai inflasi Kota Banjarmasin berada pada angka 3,82%. Nilai ini lebih tinggi sedikit jika dibandingkan dengan inflasi nasional yakni 3,61%.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan dan BI (Diolah)

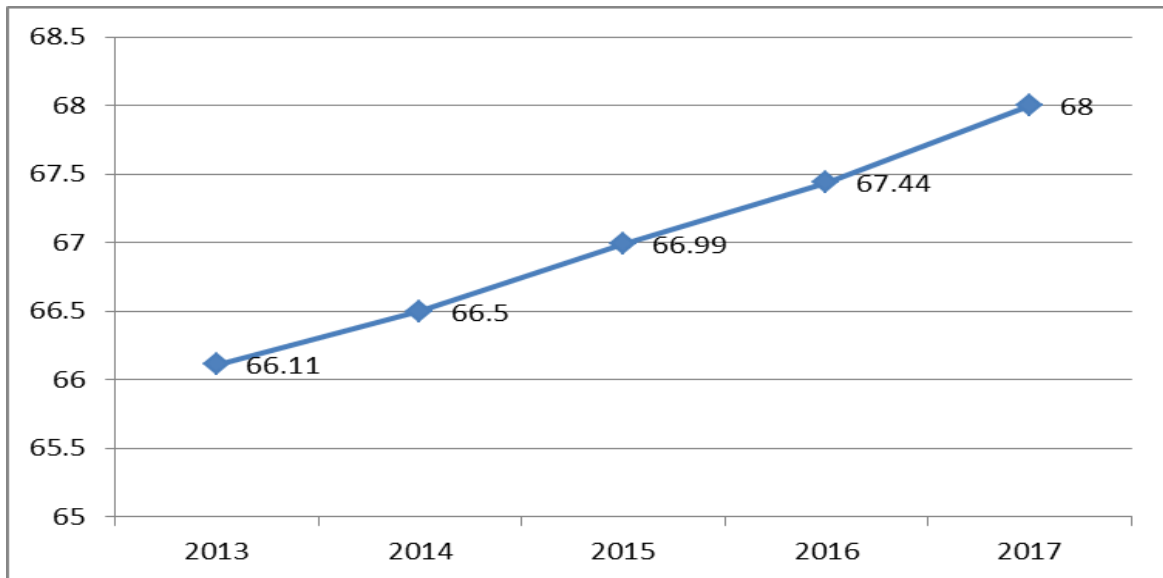
Gambar 2.20 Inflasi Tahunan (YoY) Kota Banjarmasin dan Nasional Tahun 2013 – 2017 (.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

Dalam perencanaan pembangunan, pembangunan manusia senantiasa berada di baris terdepan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Dalam perspektif perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pemikiran paradigma pembangunan manusia. Paradigma pembangunan manusia dikaitkan dengan upaya untuk memanusiakan masyarakat dalam jati diri pembangunan (*people-centered development*). Di sini, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Secara praktikal, pembangunan manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perhitungan IPM terdiri atas tiga aspek mendasar pembangunan manusia. Aspek kesehatan yang diwakili oleh indikator harapan hidup, aspek pendidikan yang direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek perekonomian yang digambarkan dengan pengeluaran per kapita disesuaikan. Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia.

Sebagai Indeks komposit, IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu. IPM suatu daerah/wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori menurut UNDP, yaitu (1) $IPM \geq 80$ termasuk kategori sangat tinggi; (2) $70 \leq IPM < 80$ termasuk kategori tinggi; (3) $60 \leq IPM < 70$ termasuk kategori sedang; dan (4) $IPM < 60$ termasuk

kategori rendah. Berdasarkan data yang dihimpun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan pencapaian keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Tanah Laut selama lima tahun terakhir ini mengalami peningkatan (lihat Gambar 2.21) dengan nilai IPM pada tahun 2017, mencapai angka 68 persen dibandingkan angka IPM pada tahun 2013 hanya sebesar 66,11 persen.



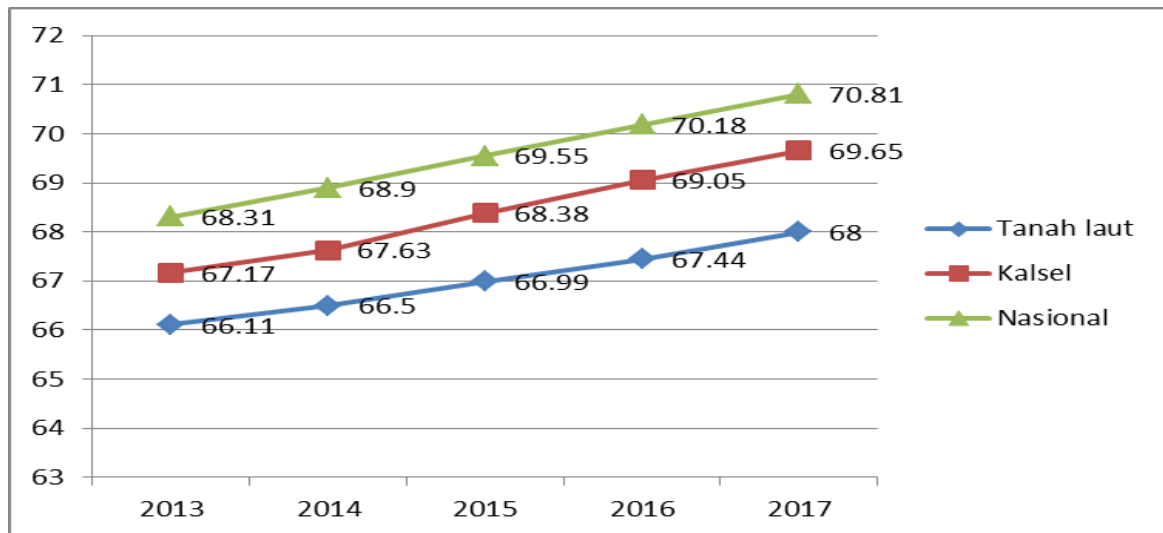
Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut, 2017 (diolah)

Gambar 2.21 Perkembangan IPM Kabupaten Tanah Laut 2013-2017

Tabel 2.9 IPM dan variabel pembentuknya di Kabupaten Tanah Laut tahun 2015-2017 serta perbandingannya dengan Kalimantan Selatan dan Nasional

Komponen	Tanah Laut			Kalsel			Nasional		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
IPM	66.99	67.44	68	68.38	69.05	69.65	69.55	70.18	70.81
Angka Harapan Hidup	68.62	68.76	68.89	67.8	67.92	68.02	70.78	70.9	71.06
Harapan Lama Sekolah	11.25	11.5	11.82	12.21	12.29	12.46	12.55	12.72	12.85
Rata-rata Lama Sekolah	7.29	7.3	7.37	7.76	7.89	7.99	7.84	7.95	8.1
Pengeluaran perkapita (Rp Ribu)	10,75 3	10,86 2	10,92 5	10,89 1	11,30 7	11,60 0	10,14 9	10,42 0	10,66 4

Sumber: BPS RI, BPS Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Tanah Laut



Sumber BPS RI, BPS Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Tanah Laut (diolah)

Gambar 2.22 Perkembangan IPM Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2013 – 2017

2.1.2.3 Perkembangan Komponen IPM

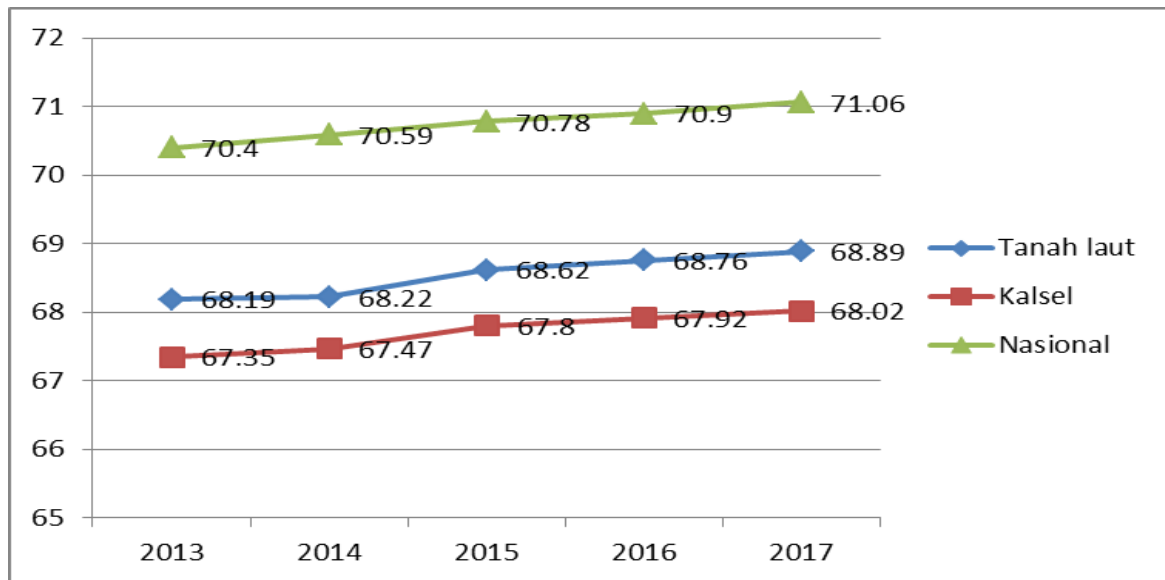
Secara konseptual, pembangunan manusia diukur dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang komponennya adalah : (a) lamanya hidup yang didekati dengan angka harapan hidup; (b) tingkat pendidikan yang didekati dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; (c) standar hidup yang didekati dengan kemampuan daya beli atau pengeluaran perkapita.

2.1.2.3.1 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Berdasarkan data dari BPS, Angka harapan hidup Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan dari tahun 2013 s/d tahun 2017, tercatat pada tahun 2017 sebesar 68.89 tahun. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (lihat Gambar 2.23).

Peningkatan angka harapan hidup Kabupaten Tanah Laut ini menunjukkan adanya peningkatan derajat hidup masyarakat. Peningkatan angka ini dipengaruhi juga oleh penurunan angka kematian bayi. Angka Harapan Hidup ini juga lebih tinggi dibanding dengan angka harapan hidup provinsi Kalimantan Selatan yakni

sebesar 68,02 pada tahun 2017.



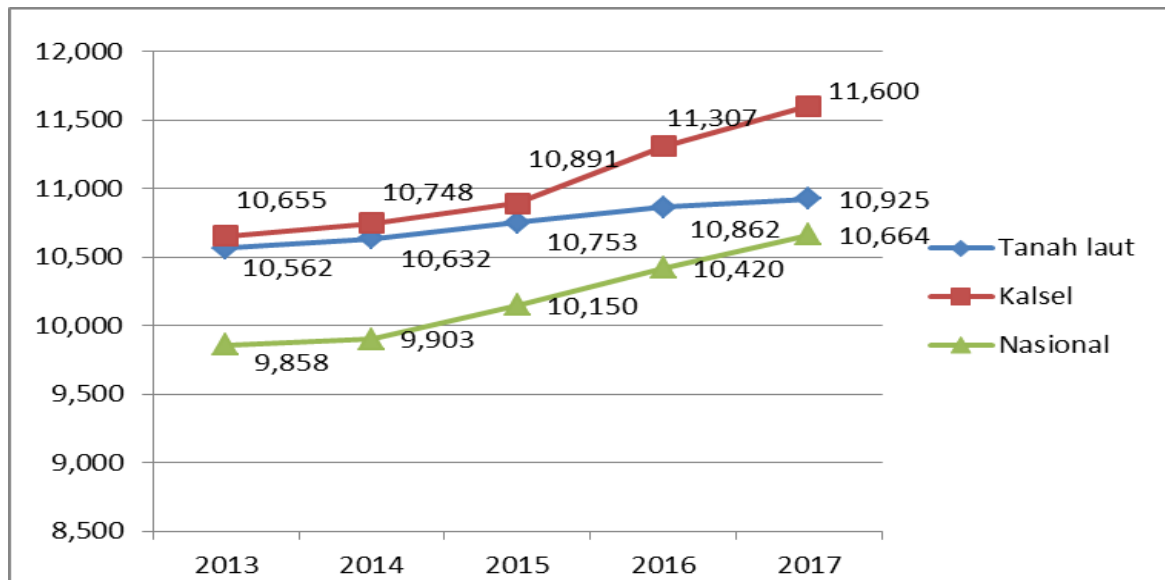
Sumber: BPS RI, BPS Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Tanah Laut (diolah)

Gambar 2.23 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2013 - 2017

2.1.2.3.2 Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan komponen yang digunakan untuk perhitungan IPM dilihat dari aspek ekonomi. Komponen ini digambarkan dengan nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uang untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menaikkan atau menurunkan daya beli.

Berdasarkan data BPS, selama lima tahun terakhir pengeluaran riil per kapita Kabupaten Tanah Laut memiliki tren positif. Tahun 2017 pengeluaran riil per kapita Kabupaten Tanah Laut mencapai angka Rp 10.925 ribu rupiah pertahun per kapita. Angka ini berada di atas rata-rata nasional yakni sebesar 10.664 ribu rupiah pertahun per kapita.



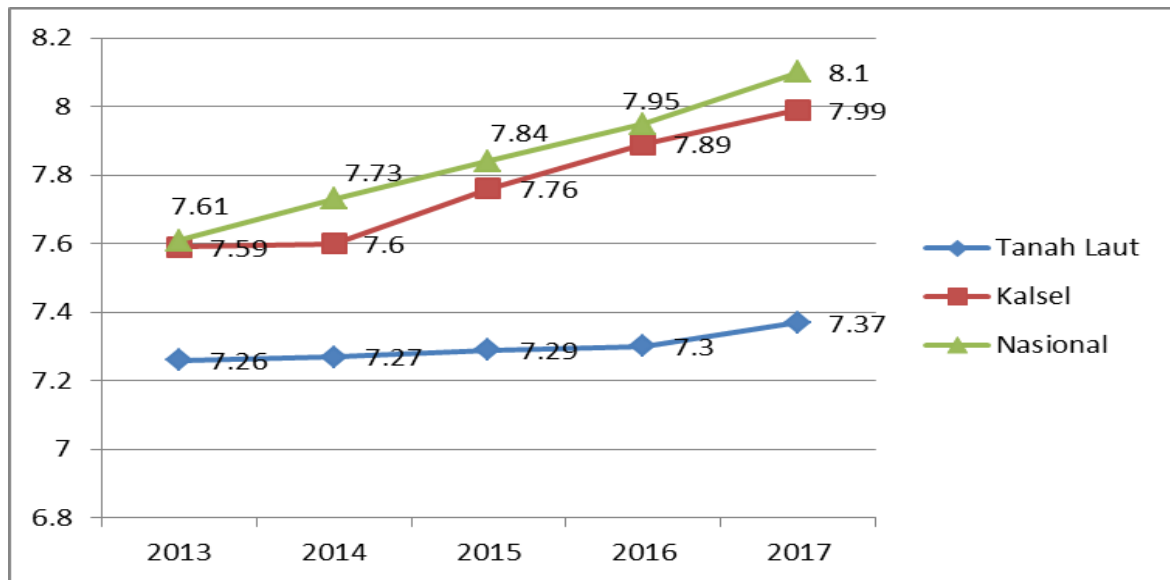
Sumber: BPS RI, BPS Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Tanah Laut (diolah)

Gambar 2.24 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2013 – 2017 (Ribu Rupiah/orang/tahun)

2.1.2.3.3 Rata-rata Lama Sekolah

Komponen lainnya yang merepresentasikan dari aspek pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir (BPS).

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Tanah Laut menunjukkan trend peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Hal ini dapat dimaknai bahwa penduduk Tanah Laut semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia.



Sumber : BPS RI, BPS Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Tanah Laut (diolah)

Gambar 2.25 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2013 – 2017

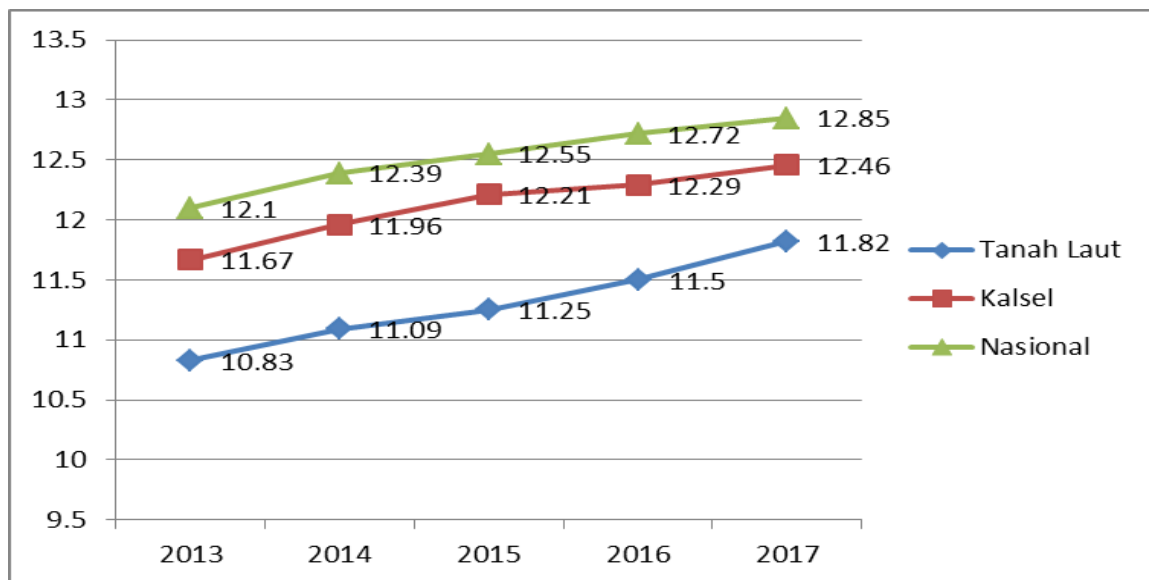
Angka Rata-rata lama sekolah penduduk Tanah Laut meningkat pada tahun 2017 sebesar 7,37 tahun, namun masih dibawah angka rata-rata lama sekolah Kalimantan Selatan sebesar 7,99 tahun dan Nasional sebesar 8.1 tahun. Hal ini disebabkan masih adanya penduduk usia lebih dari 15 tahun yang belum menyelesaikan sekolahnya, baik melalui satuan pendidikan formal maupun non formal. Angka 7,37 menunjukkan bahwa penduduk usia lebih dari 15 tahun memiliki rata-rata belum lulus SMP/MTs atau sederajat (9,00 dalam tahun). Kecenderungan penduduk di atas antara lain yang tidak sedang menjalankan pendidikan di sekolah formal yakni di SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan sederajatnya. Penduduk tersebut lebih cenderung bekerja dengan ijazah terendahnya (misalnya SD).

2.1.2.3.4 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diartikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah

dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak (BPS).

Berdasarkan data BPS, Angka Harapan lama sekolah penduduk Tanah Laut meningkat pada tahun 2017 sebesar 11,82 tahun, namun masih dibawah angka rata-rata lama sekolah Kalimantan Selatan sebesar 12,46 tahun dan Nasional sebesar 12,85 tahun. Angka 11,82 tahun ini menunjukkan bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 11,82 tahun atau tidak menyelesaikan pendidikan SMA/ sederajat.



Sumber : BPS RI, BPS Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Tanah Laut (diolah)

Gambar 2.26 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2013 - 2017

2.1.3 KONDISI UMUM KEMISKINAN

2.1.3.1 Persentase Penduduk Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut

Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan jumlah penduduk miskin. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi tidak hanya di Kabupaten Tanah

Laut, namun telah menjadi permasalahan dunia. Penduduk dikatakan termasuk dalam kategori miskin jika pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan.

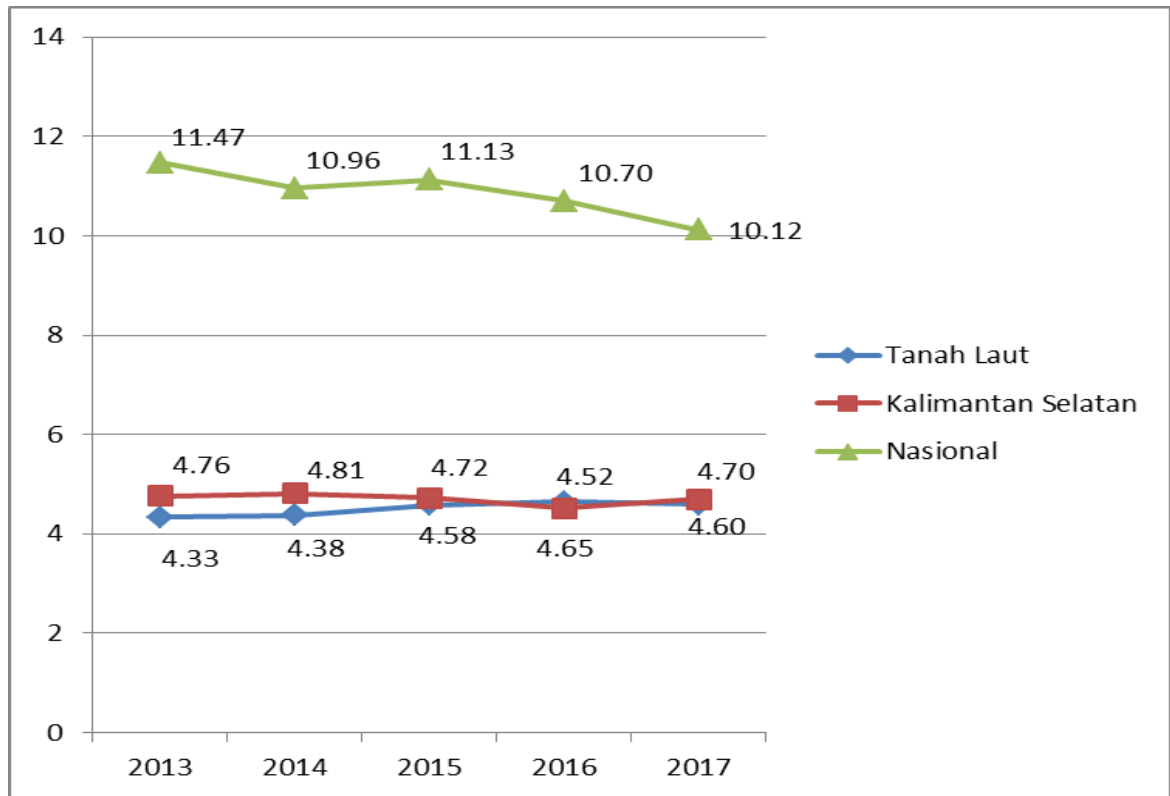
Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan garis kemiskinan tahun 2013 sebesar Rp317.127,-, artinya bahwa setiap penduduk Kabupaten Tanah Laut dengan nilai pengeluaran di bawah Rp317.127,- selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin. Selanjutnya garis kemiskinan meningkat pada tahun 2017 di Kabupaten Tanah Laut menjadi Rp425,152,-, artinya setiap penduduk Kabupaten Tanah Laut dengan nilai pengeluaran di bawah Rp425,152,- selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin.

Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 15,31 ribu orang (4.60 persen). Jumlah ini mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2016 yakni sebesar 15,24 ribu orang (4.65 persen). Secara persentase, penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut masih dibawah rata-rata provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,70 persen dan rata-rata nasional sebesar 10,12 persen.

Tabel 2.10 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)	317.127	335.160	354.481	400.757	425,152
Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	13,65	14,04	14,79	15,24	15,31
Persentase Penduduk Miskin	4,33	4,38	4,58	4,65	4,60

Sumber : BPS RI



Sumber: BPS RI (diolah)

- Data perseptember

Gambar 2.27 Perkembangan Kemiskinan Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2013 - 2017

2.1.3.2 Kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Tanah Laut

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi kemiskinan yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Dimensi ini diukur dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap-P1*) dan Indeks Keparahannya (*Poverty Severity Index-P2*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*). Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan digunakan untuk melihat masalah ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks ini menyatakan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks

berarti semakin parah tingkat kemiskinan karena semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

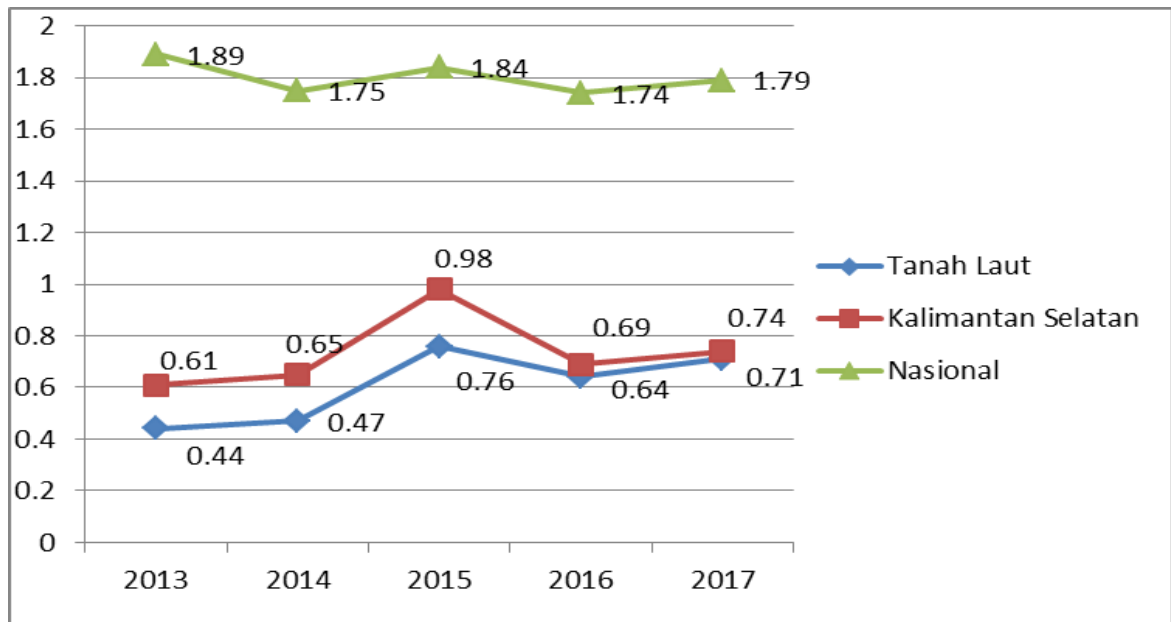
Pada tahun 2013-2017 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan indeks kedalaman kemiskinan dari 0,64 pada tahun 2016 menjadi 0,71. Hal ini menandakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin jauh pada garis kemiskinan. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 terjadi penurunan indeks dari 0,16 pada tahun 2016 menjadi 0,15. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut memiliki kecenderungan untuk menurun.

Tabel 2.11 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0.44	0.47	0.76	0.64	0.71
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0.09	0.11	0.18	0.16	0.15

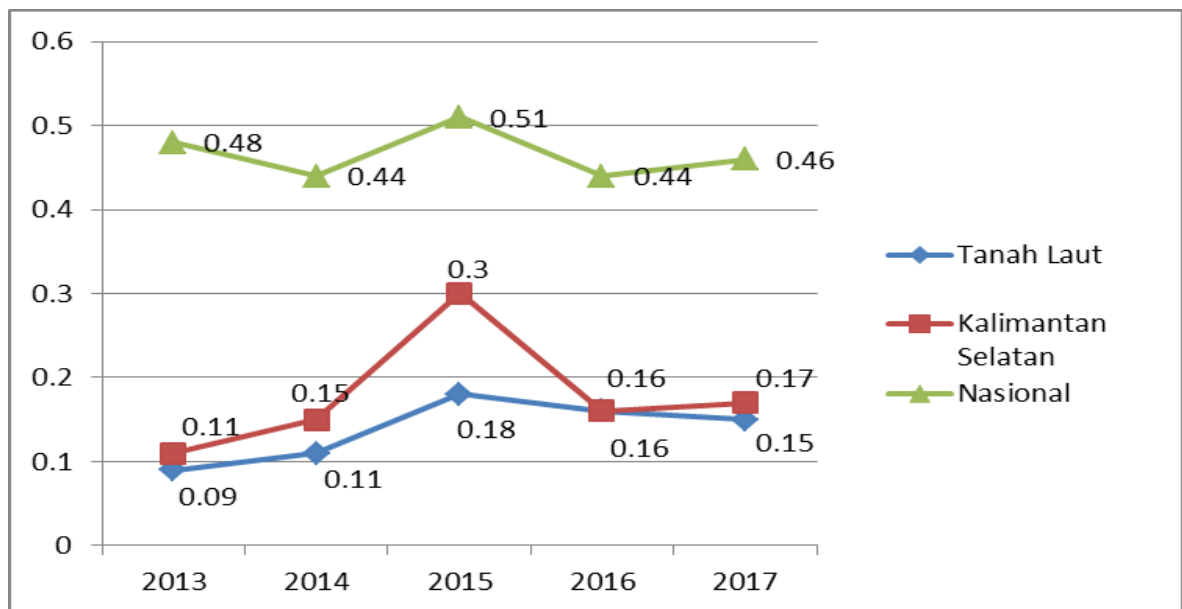
Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018

Secara umum, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Selatan yakni 0.74 dan di bawah angka nasional yakni 1.79. Dari sisi lain, indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 juga masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Selatan yakni 0.17 dan di bawah angka nasional yakni 0.64.



Sumber: BPS RI (diolah)

Gambar 2.28 Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017



Sumber: BPS RI (diolah)

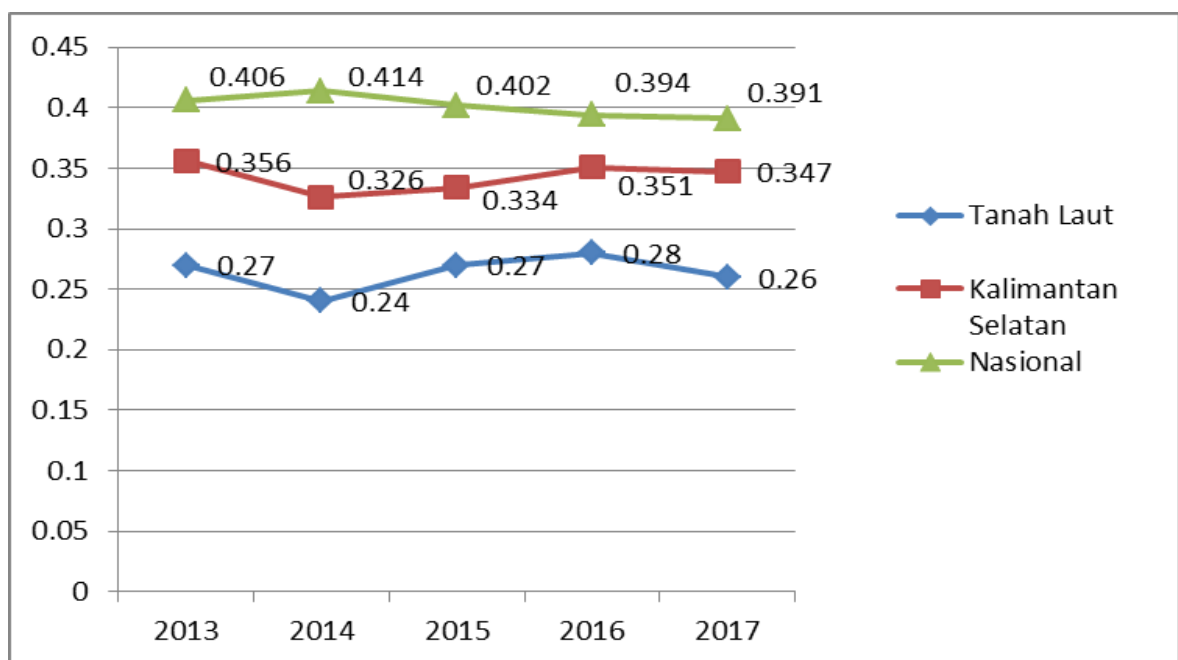
Gambar 2.29 Perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017

2.1.3.3 Indeks Gini

Pengukuran tingkat pemerataan dapat dilakukan dengan pendekatan koefisien gini. Koefisien gini atau rasio gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan kumulatif penduduk. Nilai rasio gini antara 0 hingga 1. Apabila nilai rasio Gini mendekati 0,

maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila rasio Gini mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi makin tinggi. Rasio Gini dibagi dalam tiga kategori: (a) *Gini Ratio* >0,5 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi, (b) *Gini Ratio* 0,3 – 0,5 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidak merataan sedang, dan (c) *Gini Ratio* <0,3 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidak merataan rendah.

Berdasarkan data BPS RI, angka rasio gini di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2013-2017 bergerak fluktuatif tapi masih masuk dalam kategori ketimpangan rendah pada posisi kurang dari 0,3 persen. Pada tahun 2017 angka rasio gini Kabupaten Tanah Laut menurun dari 0.28 pada tahun 2016 menjadi 0,26. Angka ini jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan berada di posisi yang lebih baik dengan nilai rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yakni 0,347. Angka ini juga masih lebih baik dari nilai rata-rata Nasional yakni 0.391.



Sumber: BPS RI (diolah)

Gambar 2.30 Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017

2.1.4. Pengangguran

2.1.4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada dasarnya pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja tersebut belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal atau dikarenakan faktor malas mencari pekerjaan. Secara teori, tingkat pengangguran terbuka merupakan jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk angkatan kerja.

Pada tahun 2017 per Agustus berdasarkan data Sakernas BPS, jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 5.932 orang atau 3,7 persen. Angka ini mengalami penurunan jika dibanding dengan data tahun 2015 yakni berjumlah 7.139 orang atau 4,53 persen. Angka TPT di Kabupaten Tanah Laut selama kurun lima tahun terakhir ini selalu di bawah angka TPT di Prov Kalimantan Selatan dan Nasional (lihat Tabel).

Tabel 2.12 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2013 – 2017

Tahun	Kab. Tanah Laut		Kalimantan Selatan	Nasional
	Jumlah Pengangguran (jiwa)	TPT (%)		
2013	4.589	2,99	3,66	6,17
2014	4.775	2,93	3,8	5,94
2015	7.139	4,53	4,92	6,18
2016	NA		5,45	5,61
2017	5.932	3,7	4,77	5,5

Sumber: BPS RI

2.1.5. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.5.1 Fokus Layanan urusan Wajib

2.1.5.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan proses sosialisasi sekaligus pewarisan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui proses pembelajaran dan interaksi sosial, pendidikan juga dapat menjadi instrument utama dalam internalisasi, adaptasi,

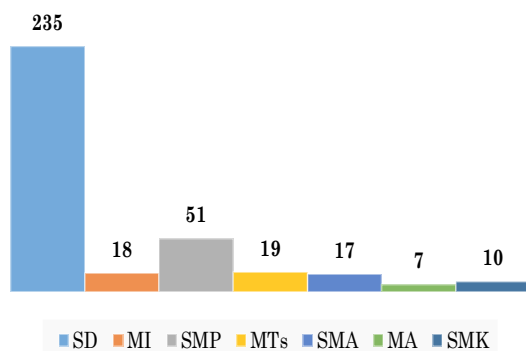
akulturasi, dan penciptaan budaya baru, disamping sebagai proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Dalam perspektif ekonomi, pendidikan terbukti dapat memacu pertumbuhan suatu Negara atau daerah, peningkatan kualitas pendidikan akan meningkatkan produktivitas yang nantinya akan meningkatkan pendapatan. Hal ini pada gilirannya akan membuat kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat dapat diturunkan, sehingga kesejahteraan dapat terwujud.

Mengingat peran penting dan strategisnya pendidikan, peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional agar seluruh rakyat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan dimanapun berada dapat mengikuti pendidikan paling tidak sampai jenjang pendidikan dasar (wajib belajar Sembilan tahun). Selain itu pemerintah terus berupaya memperbaiki mutu dan relevansi pendidikan agar kompetensi lulusan dapat ditingkatkan dan lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan, serta management pelayanan pendidikan yang transparan, bertanggung jawab.

Jumlah Sekolah

Fasilitas pendidikan salah satunya ditunjukkan dengan jumlah sekolah perlu menjadi perhatian dalam upaya mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Pada tahun 2016 di Kabupaten Tanah Laut, secara total jumlah sekolah yakni sebesar 357 sekolah dengan persebaran 235 sekolah dasar dan 18 madrasah ibtidaiyah, 51 SMP dan 19 MTs, 17 SMA, 7 MA, dan 10 SMK.



Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2017 (diolah)

Gambar 2.31 Jumlah Sekolah Menurut Level Pendidikan di Kab. Tanah Laut, 2016

Apabila dilihat menurut kecamatan, pada tahun 2016 kecamatan dengan sekolah dasar terbanyak yakni Kecamatan Pelayhari yang memiliki 44 sekolah dasar, dan Kecamatan Bumi Makmur dan Bati-bati menjadi wilayah yang memiliki jumlah MI terbanyak yakni 4 MI. Pada jenjang SMP, Kecamatan Pelayhari menjadi kecamatan dengan jumlah sekolah menengah pertama terbanyak yakni 9 SMP, sedangkan Kecamatan Bati-Bati menjadi kecamatan yang memiliki MTs terbanyak yakni 3 MTs. Pada jenjang SMA, kecamatan Pelayhari dan Kintap memiliki jumlah SMA terbanyak yakni 3 SMA, dan tiap-tiap kecamatan memiliki 1 MA kecuali Kecamatan Takisung, Bumi Makmur, Tambang Ulang, dan Bajui tidak memiliki MA. Untuk SMK, Kecamatan Pelayhari memiliki jumlah SMK terbanyak yakni sebesar 6 SMK.

Tabel 2.13 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2016

Kecamatan	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK
Panyipatan	18	2	3	5	2	1	0
Takisung	23	1	5	1	1	0	1
Kurau	14	1	3	1	1	1	1
Bumi Makmur	13	4	2	1	1	0	0
Bati-Bati	23	4	5	3	1	1	1
Tambang	13	0	2	1	1	0	0

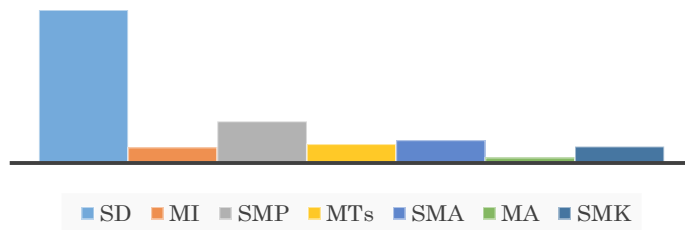
Kecamatan	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK
Ulang							
Pelaihari	44	2	9	2	3	1	6
Bajuin	19	0	4	0	1	0	0
Batu Ampar	21	1	5	2	1	1	0
Jorong	22	0	8	1	2	1	0
Kintap	25	3	5	2	3	1	1

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2017

Jumlah Murid dan Jumlah Guru

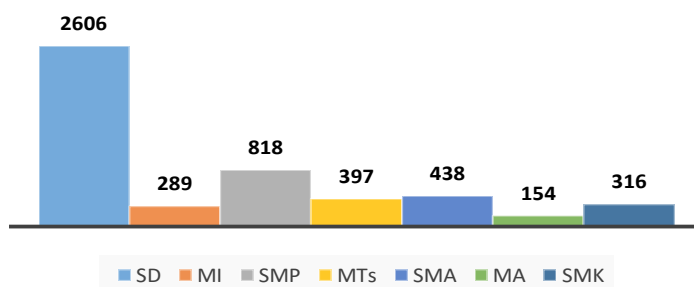
Selain jumlah sekolah, salah satu indikator dari pendidikan yang dapat diukur adalah jumlah murid dan jumlah ketersediaan guru. Pada tahun 2016, di Kabupaten Tanah Laut terdapat 36.045 murid sekolah dasar dan 3.656 murid MI, 9.725 murid SMP dan 4.405 murid MTs, serta 5.360 murid SMA, 1.269 murid MA, dan 3.849 murid SMK. Apabila dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Pelaihari hampir memiliki jumlah murid terbanyak di tiap jenjang pendidikan kecuali MI, yakni sebesar 7.447 SD, 2.253 SMP, 1123 Mts, 1210 MA dan 2510 SMK. Sedangkan Kecamatan Bati-Bati memiliki jumlah MI terbanyak yakni 997 MI.

Persebaran jumlah guru di Kabupaten Tanah Laut ditunjukkan dengan jumlah guru SD sebanyak 2.606 dan guru MI sebanyak 289, guru SMP sebanyak 818 dan MTs sebanyak 397, guru SMA sebanyak 438, guru MA sebanyak 154, dan guru SMK sebanyak 316. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa guru paling banyak di Kabupaten Tanah Laut adalah guru SD dan MA merupakan jenjang pendidikan yang memiliki guru paling sedikit. Apabila dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Pelaihari hampir diseluruh jenjang pendidikan memiliki jumlah guru paling banyak kecuali pada jenjang MI dan MA. Di Kecamatan Pelaihari, jumlah guru SD sebanyak 557, guru SMP sebanyak 178 dan guru MTs sebanyak 83, serta guru SMA sebanyak 88 dan guru SMK sebanyak 203. Kecamatan Bati-Bati memiliki jumlah guru MI terbanyak yakni sebesar 69 guru, dan Kecamatan Kurau merupakan kecamatan yang memiliki jumlah guru MA terbanyak.



Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2017 (diolah)

Gambar 2.32 Jumlah Murid Sekolah Menurut Level Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut, 2016

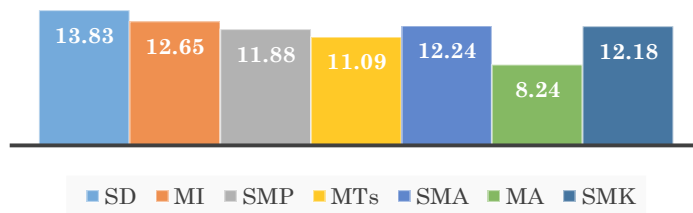


Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2017 (diolah)

Gambar 2.33 Jumlah Guru Sekolah Menurut Level Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut, 2016

Rasio Murid-Guru

Pelayanan pendidikan dapat dilihat melalui angka rasio murid-guru. Rasio ini menunjukkan tiap 1 guru bertanggung jawab terhadap sejumlah murid. Semakin kecil rasio yang ditunjukkan maka semakin baik pelayanan pendidikan yang diberikan. Pada tahun 2016, di Kabupaten Tanah Laut rasio murid-guru pada jenjang SD menunjukkan rasio 13 murid/guru dan jenjang MI 12 murid/guru, jenjang SMP 11 murid/guru dan jenjang MTs 11 murid/guru, jenjang SMA 12 murid/guru, jenjang MA 8 murid/guru, dan jenjang SMA 12 murid/guru.



Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2017 (diolah)

Gambar 2.34 Rasio Murid Guru Sekolah Menurut Level Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut, 2016

Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan proporsi dari anak sekolah pada usia di jenjang pendidikan tertentu yang termasuk dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan. APS di Kabupaten Tanah Laut dalam rentang waktu 6 tahun yakni pada tahun 2011 hingga 2016 cenderung menunjukkan tren yang positif. Menurut kelompok usia SD/MI (7-12 tahun), pada tahun 2011 APS menunjukkan angka sebesar 97,17%, menurun pada 2012 namun terus meningkat hingga pada tahun 2016 mencapai angka 99,68%. APS pada kelompok usia SMP/MTs (13-15) menunjukkan angka 87,27% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014 yakni pada angka 96,33%. Namun, pada tahun 2015 mencapai angka 96,05 dan kembali meningkat pada 2016 mencapai angka 92,16. Pada kelompok usia SMA/MA/SMK, pada tahun 2011 hingga tahun 2014 APS menunjukkan peningkatan hingga mencapai angka 68,01%. Namun pada tahun 2015 dan 2016 pada kelompok usia ini menunjukkan penurunan APS hingga mencapai angka 57,89 dan 56,88. APS di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan pola semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah nilai APS.

Tabel 2.14 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2011-2016
(persen)

Kelompok Usia	2011	2012	2013	2014	2015	2016
SD/MI [7-12]	97,17	96,27	98,51	98,70	99,37	99,68
SMP/MTs [13-15]	87,27	83,02	88,57	96,33	96,05	92,16
SMA/MA/SMK [16-18]	50,22	45,94	59,33	68,01	57,89	56,88

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2017

Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari jumlah anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi dari jumlah anak sekolah pada jenjang tertentu dalam kelompok usia sesuai dengan jenjang pendidikannya. Pada tahun 2016, APM di Kabupaten Tanah Laut pada jenjang SD/MI menunjukkan angka 97,36, jenjang SMP/Mts menunjukkan angka 69,85, jenjang SMA/SMK/MA menunjukkan angka 50,57, dan jenjang perguruan tinggi menunjukkan angka 12,57. Sedangkan APK pada jenjang SD/MI menunjukkan angka sebesar 112,13, jenjang SMP/MTs menunjukkan angka 83,39, jenjang SMA/MA/SMK menunjukkan angka 76,82, dan perguruan tinggi menunjukkan angka 12,57. Dari segi pola, kedua indikator menunjukkan pola yang sama yaitu semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah APM dan APK.

Tabel 2.15 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut, 2016

Jenjang Pendidikan	APM	APK
SD/MI	97,36	112,13
SMP/MTs	69,85	83,39
SMA/SMK/MA	50,57	76,82
Perguruan Tinggi	12,57	12,57

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2017

b. Pendidikan Keagamaan

Fasilitas pendidikan keagamaan seperti Pondok Pesantren, Raudatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Selain itu, di Kabupaten Tanah Laut. Semua fasilitas pendidikan ini, sudah tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut.

2.1.5.1.2. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

Kesehatan merupakan hak semua warga Negara yang dijamin oleh undang-Undang (UU). Kesehatan juga merupakan salah satu elemen penting dalam pengukuran indeks pembangunan manusia (IPM), selain tingkat pendidikan dan pendapatan. Untuk itu pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

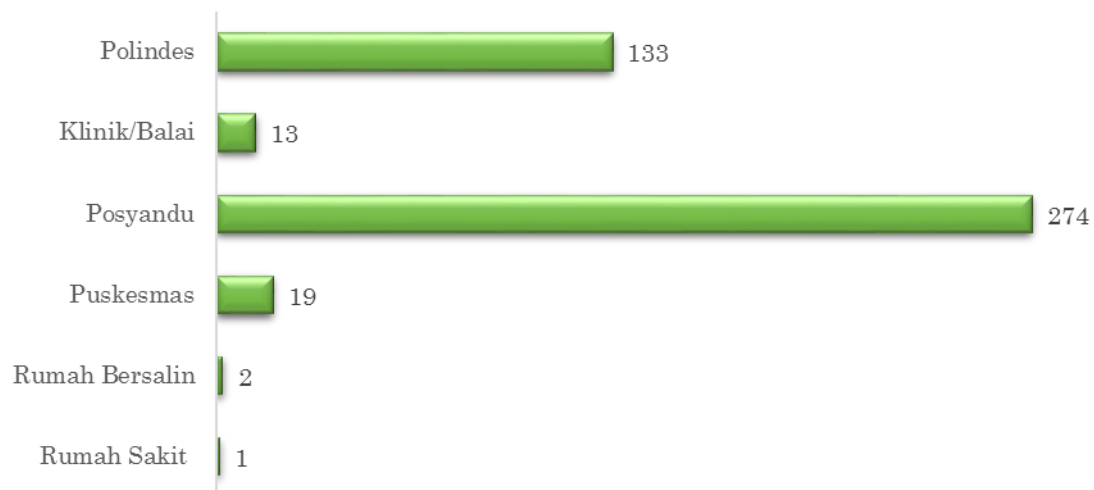
Peningkatan kualitas layanan kesehatan telah dilakukan dengan mengembangkan kemampuan layanan RSUD Boejasin, peningkatan kualitas prasarana dan sarana rumah sakit dan puskesmas, serta penambahan SDM di bidang kesehatan, membebaskan biaya berobat kepada penduduk miskin, perberlakuan kartu sehat bagi para masyarakat miskin, seniman, pemangku, lansia dan veteran, serta subsidi obat-obatan. Disamping pembangunan pusat-pusat layanan kepada masyarakat telah banyak dilakukan oleh pihak swasta, seperti klinik, rumah bersalin dan yang sejenisnya. Dimasa yang akan datang upaya peningkatan kualitas layanan dengan biaya layanan yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah akan diprioritaskan.

Sarana kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut yaitu RSUD H. Boejasin yang sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, Dokter, dan Bidan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pembangunan suatu wilayah adalah kesehatan. Kesehatan merupakan bentuk investasi pada kualitas sumberdaya manusia. Dengan kondisi kesehatan masyarakat yang

baik maka diharapkan kualitas manusia juga semakin baik, yakni masyarakat dapat semakin produktif. Berikut merupakan beberapa indikator yang menunjukkan kondisi kesehatan di Kabupaten Tanah Laut:

Fasilitas Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Beberapa fasilitas kesehatan yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut yaitu rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, posyandu, klinik/balai, dan polindes. Pada tahun 2016, data menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Laut hanya memiliki 1 rumah sakit dan 2 rumah sakit bersalin. Sedangkan posyandu menjadi fasilitas kesehatan terbanyak yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut yakni sebanyak 274 posyandu. Fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas berjumlah 19 unit, klinik/balai berjumlah 13 unit, dan polindes berjumlah 133 unit.



Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2017 (Diolah)

Gambar 2.35 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut, 2016

Apabila dirinci berdasarkan kecamatan, rumah sakit dan rumah sakit bersalin hanya terdapat di kecamatan pelaihari. Fasilitas kesehatan puskesmas, posyandu, klinik/balai, dan polindes paling banyak terdapat di kecamatan Pelaihari yakni secara berurutan berjumlah 3 puskesmas, 52 posyandu, 7 klinik/balai, dan 19 polindes.

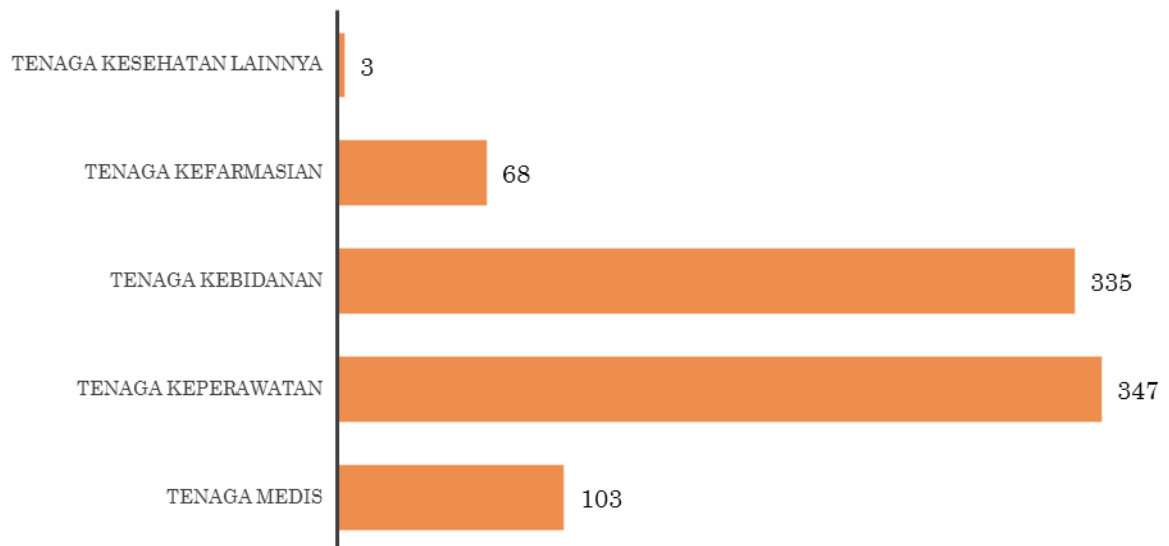
Tabel 2.16 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2016

Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik/Balai	Polindes
Panyipatan	0	0	2	24	0	10
Takisung	0	0	1	27	0	10
Kurau	0	0	2	11	0	9
Bumi Makmur	0	0	1	14	0	11
Bati-Bati	0	0	2	25	1	18
Tambang Ulang	0	0	1	19	0	9
Pelaihari	1	2	3	52	7	19
Bajuin	0	0	2	22	0	9
Batu Ampar	0	0	1	23	2	14
Jorong	0	0	2	26	0	9
Kintap	0	0	2	31	3	15

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2017

Tenaga Kesehatan

Selain fasilitas kesehatan, tersedianya tenaga kesehatan juga berperan dalam peningkatan kualitas kesehatan di suatu wilayah. Pada tahun 2016, tenaga kesehatan di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan jumlah sebesar 856 orang. Terbagi menjadi 5 jenis tenaga kesehatan yaitu tenaga medis sebanyak 103 orang, tenaga keperawatan sebanyak 347 orang, tenaga kebidanan sebanyak 335 orang, tenaga kefarmasian sebanyak 68 orang, dan tenaga lainnya sebanyak 3 orang.



Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2017 (diolah)

Gambar 2.36 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut, 2016

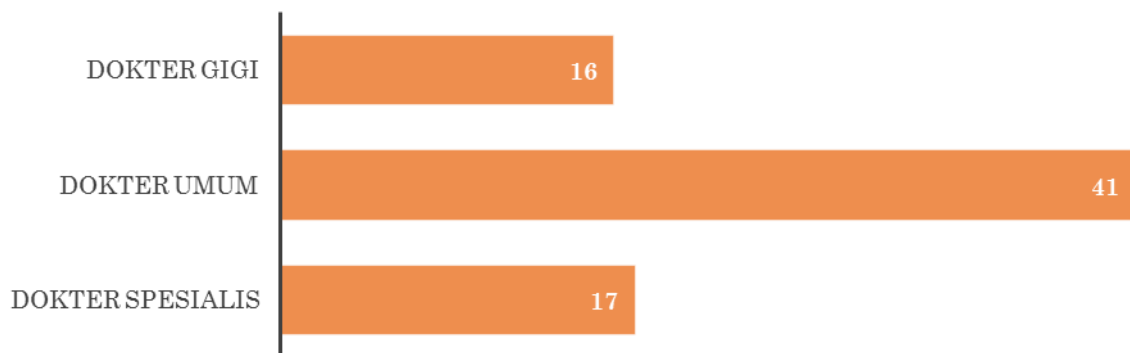
Apabila dilihat menurut kecamatan, persebaran tenaga kesehatan di Kabupaten Tanah Laut belum merata. Tenaga kesehatan secara keseluruhan terbanyak berada di Kecamatan Pelaihari yakni sebesar 63 tenaga medis, 184 tenaga keperawatan, 164 tenaga kebidanan, dan 49 tenaga kefarmasian.

Tabel 2.17 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kab.Tanah Laut, 2016

Kecamatan	Tenaga Medis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Lainnya
Panyipatan	4	12	14	2	1
Takisung	7	16	15	1	0
Kurau	6	14	10	1	0
Bumi Makmur	4	6	14	1	0
Bati-Bati	13	21	24	3	0
Tambang Ulang	3	7	13	1	0
Pelaihari	63	184	164	49	1
Bajuin	8	18	22	2	0
Batu Ampar	9	22	17	2	0
Jorong	11	20	20	2	1
Kintap	12	27	22	4	0

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2017

Selain itu, apabila dilihat berdasarkan jumlah dokter, pada tahun 2016 Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan memiliki 74 dokter yang terbagi menjadi dokter spesialis sebanyak 17 orang, dokter umum sebanyak 41 orang, dan dokter gigi sebanyak 16 orang. Dilihat menurut kecamatan, secara keseluruhan Kecamatan Pelaihari memiliki jumlah dokter terbanyak yakni 17 dokter spesialis, 15 dokter umum, dan 6 orang dokter gigi.

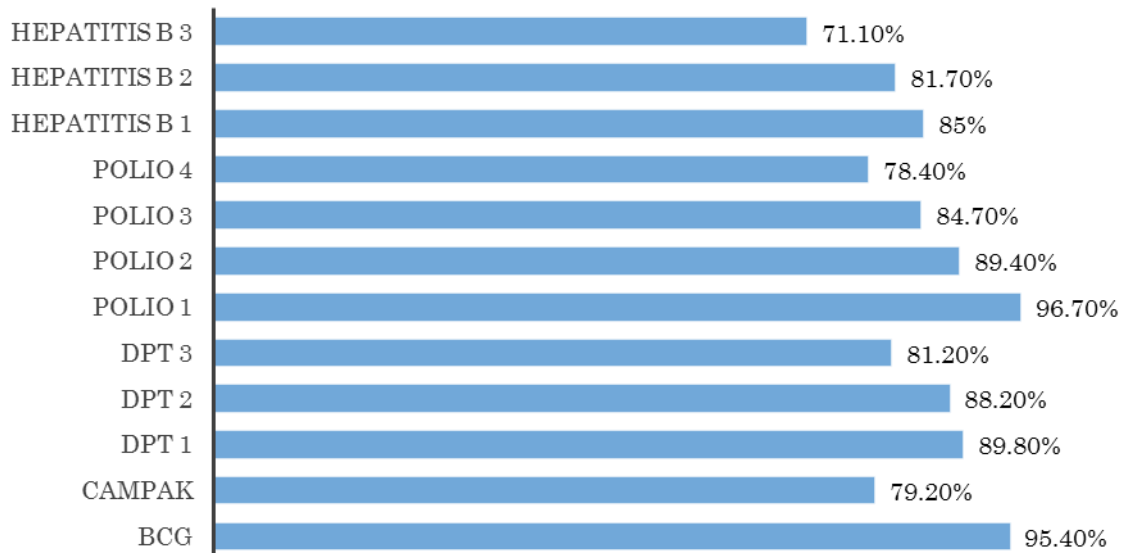


Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2017 (Diolah)

Gambar 2.37 Jumlah Dokter di Kabupaten Tanah Laut, 2016

Imunisasi Balita

Imunisasi balita merupakan pemberian imunisasi kepada balita yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh balita dari berbagai penyakit. Hal ini dilakukan juga sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas kesehatan. Beberapa jenis imunisasi bagi balita antara lain imunisasi BCG, Campak, DPT, Polio, dan Hepatitis B. Pada tahun 2016, persentase balita yang telah mendapat imunisasi terbesar pada jenis imunisasi di Kabupaten Tanah Laut yaitu 95,4% balita telah mendapat imunisasi BCG, 79,2% balita telah mendapatkan imunisasi campak, 89,8% balita telah mendapat imunisasi DPT 1, 96,7% balita telah mendapat imunisasi polio 1, dan 85% balita telah mendapat imunisasi hepatitis B 3. Secara keseluruhan, imunisasi BCG merupakan imunisasi yang paling banyak didapat oleh balita dan imunisasi Hepatitis B 3 merupakan imunisasi yang paling sedikit didapat oleh balita di Kabupaten Tanah Laut.

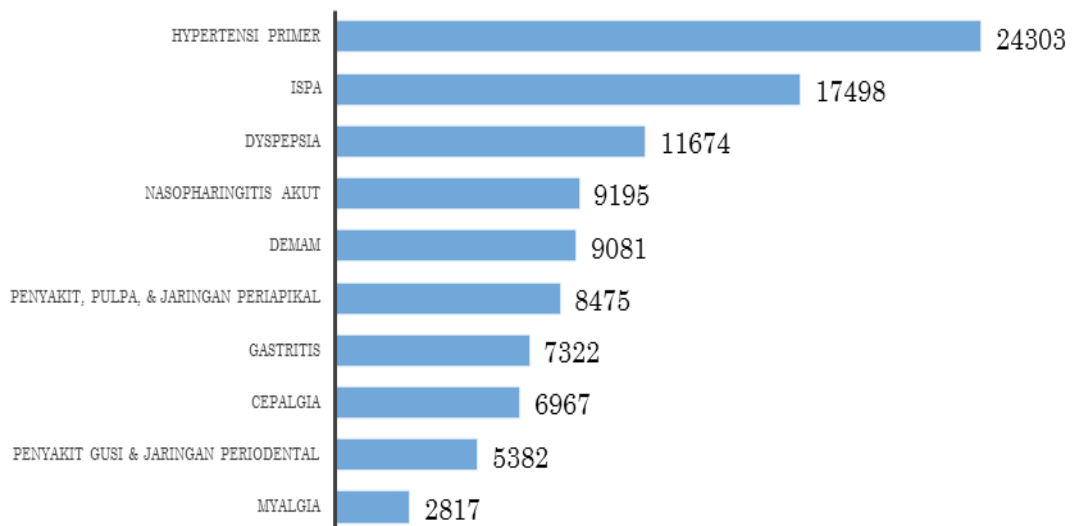


Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2017 (Diolah)

Gambar 2.38 Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Tanah Laut, 2016

Jumlah Kasus Penyakit

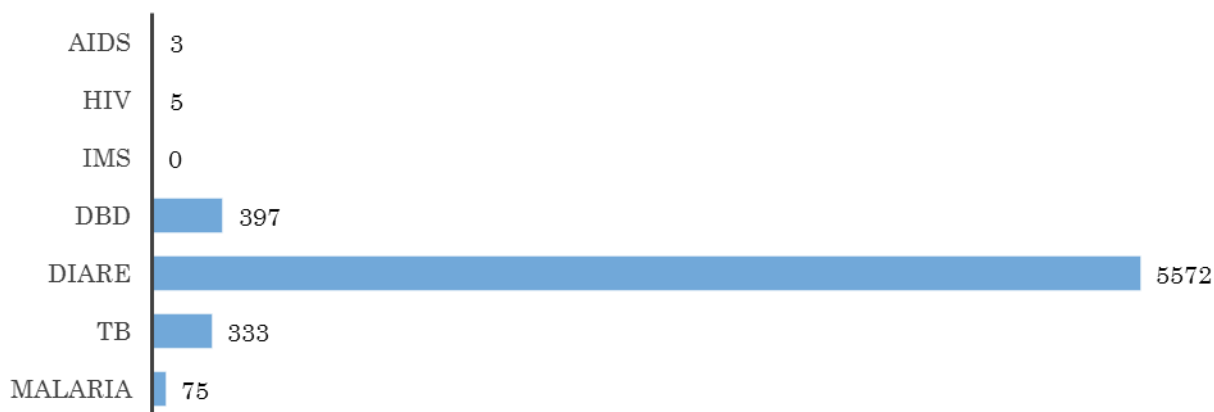
Kualitas kesehatan dapat dilihat pula melalui kasus penyakit yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Hal ini merupakan indikator eksternal selain indikator internal seperti fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Terdapat 10 kasus penyakit terbanyak yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2016, yaitu hipertensi primer, ISPA, Dyspepsia, Nasopharingitis Akut, Demam, Penyakit Pulpa & Jaringan Periapikal, Gastritis, Cepalgia, Penyakit Gusi & Jaringan Periodental, dan Myalgia.



Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2017 (diolah)

Gambar 2.39 Jumlah Kasus Penyakit Terbanyak di Kabupaten Tanah Laut, 2016

Selain itu, penyakit lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria. Pada tahun 2016, kasus penyakit diare tercatat mencapai 5.572 kasus, disusul penyakit DBD dengan 397 kasus, TB sebanyak 333 kasus, malaria sebanyak 75 kasus, HIV 5 kasus dan AIDS 3 kasus, serta tidak terdapat kasus IMS di Kabupaten Tanah Laut.



Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2017 (Diolah)

Gambar 2.40 Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria di Kabupaten Tanah Laut, 2016

2.1.5.1.3. Transportasi

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Panjang jalan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2016 adalah 1.814,03 km. Jalan terdiri atas jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten. Panjang jalan di Tanah Laut dibagi menjadi 3 yaitu : Jalan Negara/Nasional dengan panjang jalan yaitu 7,09 km, Jalan Provinsi dengan panjang jalan yaitu 134,47 km, dan Jalan Kabupaten dengan panjang jalan yaitu 1.672,47 km. Dan untuk kondisi jalan kabupaten yaitu ; kerikil sepanjang 795,13 km, aspal sepanjang 762,15 km, dan tanah sepanjang 115,19 km. Dari total panjang jalan yang telah dibuat terdapat 45,54 persen jalan yang sudah di aspal

sedangkan sisanya masing-masing sebesar 47,54 persen berupa krikil dan 6,89 persen masih berupa tanah

Tabel 2.18 Kondisi Ruas Jalan Di Kabupaten Tanah Laut

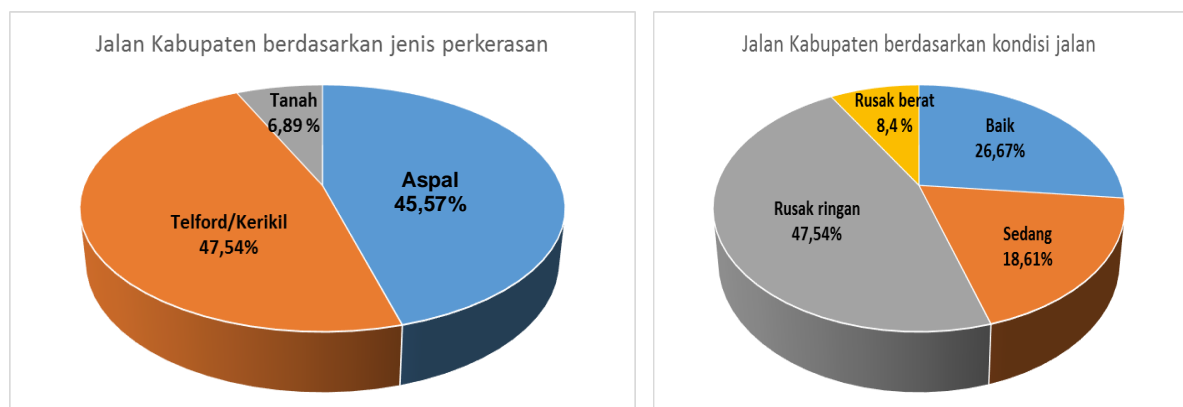
Status Jalan	panjang	Panjang tiap jenis permukaan (km)			Panjang tiap kondisi(km)			
		Aspal / Penetrasi / Macadam	Telford/ Kerikil	Tanah / Belum Tembus	baik	sedang	rusak ringan	rusak berat
Nasional	7,09	7,09			7,09			
Provinsi	134,47	115,535	13,825	5,11	81,507	9,596	15,5095	27,8574
kabupaten	2360,20	762,153	1482,862	115,188	445,89	311,32	774,65	140,61

Sumber: Pendataan Ruas Jalan Dinas PU Kabupaten Tanah Laut, 2016

Penyediaan infrastruktur jalan khususnya yang berkualitas selalu menjadi fokus perhatian dalam setiap pembangunan akan tetapi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut masih pula memiliki jalan yang mengalami rusak berat sepanjang 140,61 km, rusak sepanjang 774,65 km, sedang sepanjang 311,32 km dan baik sepanjang 445,89 km, ditambah beban pemeliharaan rutin terhadap jalan-jalan yang sudah beraspal lapen dan hotmix.

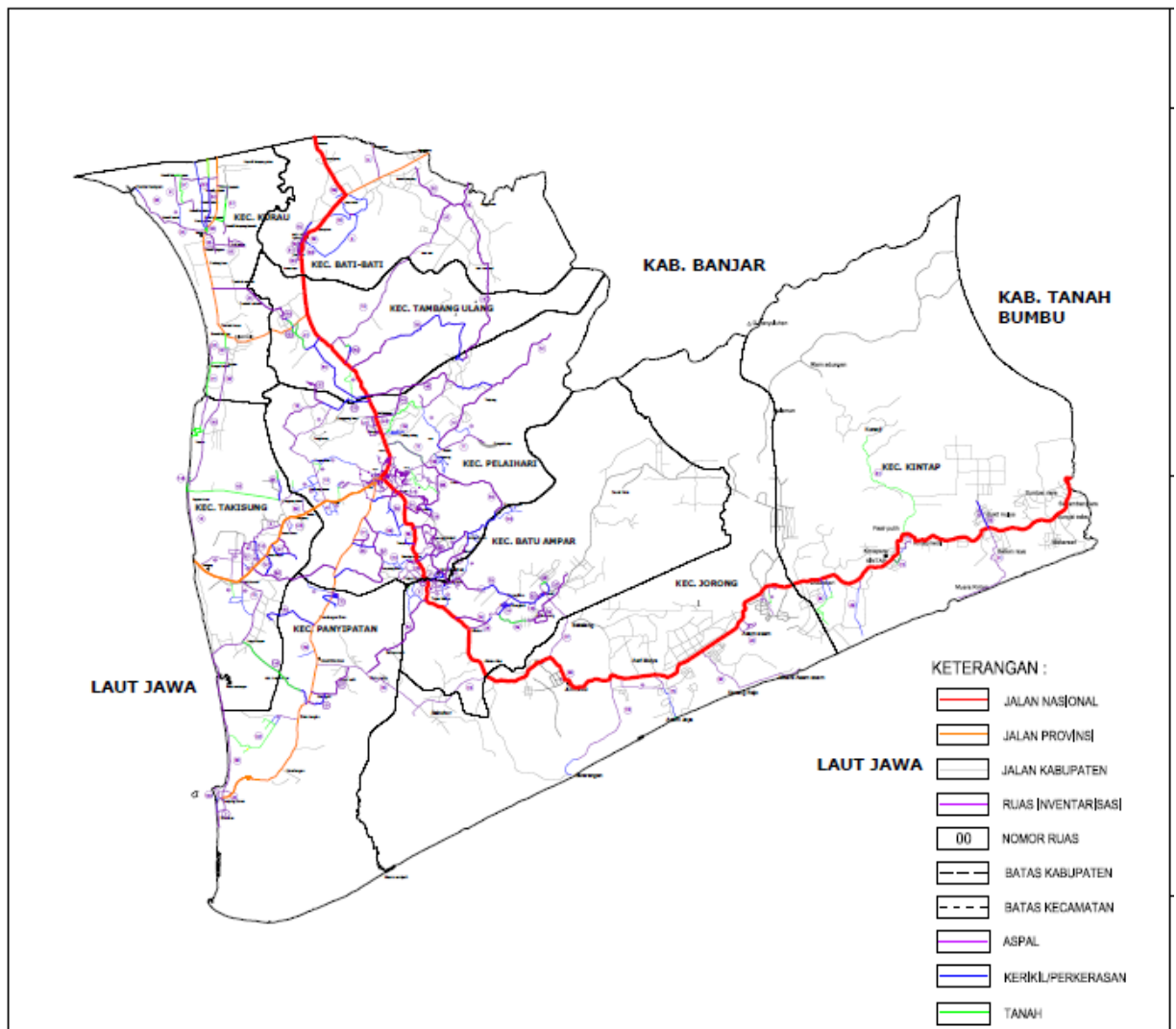
Salah satu faktor kendala dalam pengembangan sarana transportasi ini adalah keterbatasan dana yang menjadi kendala utama dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur wilayah.

Untuk Keadaan sarana transportasi berupa jembatan di Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2011 berjumlah 427 buah dengan panjang jembatan 21.755 km.



Sumber: DPUPRP Kabupaten Tanah Laut, 2017 (Diolah)

Grafik 2.41 Proporsi Jenis Perkerasan dan Kondisi Jalan Kab. Tanah Laut (Diolah)



Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016 - 20136

Gambar 2.42 Peta Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS tersebut dapat terlihat bahwa jumlah kendaraan di Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh sepeda motor dengan jumlah mencapai 5.956 buah yang tersebar di seluruh kecamatan. Selanjutnya di Kabupaten Tanah Laut juga tercatat adanya 939 mobil yang ada di 11 kecamatan. Diikuti oleh kendaraan jenis truk yang jumlahnya mencapai 102 buah. Selanjutnya, berkaitan dengan transportasi laut yang ada di Kabupaten tanah Laut merupakan moda transportasi yang cukup banyak digunakan. Berdasarkan data terakhir tahun 2016, berikut merupakan komposisi transportasi laut yang tercatat di Kabupaten Tanah Laut:

Tabel 2.19 Jumlah Transportasi Laut Berdasarkan Jenisnya, 2016

No.	Kecamatan	Jenis Kendaraan		
		Perahu Tanpa Motor	Perahu Motor Tempel	Kapal Motor
1.	Panyipatan	54	0	357
2.	Takisung	6	23	590
3.	Kurau	15	0	217
4.	Bumi Makmur	0	0	282
5.	Bati-Bati	0	0	0
6.	Tambang Ulang	0	0	0
7.	Pelaihari	0	0	0
8.	Bajuin	0	0	0
9.	Batu Ampar	0	0	0
10.	Jorong	0	1	289
11.	Kintap	15	0	218
Jumlah		90	24	1.953

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2017

Berdasarkan data terakhir tersebut dapat dikatakan bahwa Kapal motor merupakan moda transportasi laut pilihan masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang jumlahnya mencapai 1953 buah di seluruh kecamatan. Selanjutnya diikuti oleh perahu tanpa motor yang berjumlah 90 buah, dan perahu motor temple sejumlah 24 buah.

2.1.5.1.4. Perumahan

Rumah adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, setelah pangan, sandang, air bersih, pendidikan dan kesehatan. Rumah adalah tempat berlindung, sekaligus tempat membangun suatu keluarga yang sejahtera. Memiliki rumah yang layak huni merupakan dambaan setiap keluarga, sehingga seiring dengan semakin bertambahnya penduduk kebutuhan akan perumahan juga semakin meningkat.

Dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, pembangunan perumahan merupakan sasaran yang penting. Sejalan dengan usaha ini akan ditingkatkan pula usaha untuk perbaikan lingkungan pemukiman dan perbaikan sarana prasarana pengairan dan lain sebagainya.

Rumah sehat disertai fasilitas yang memadai merupakan kebutuhan bagi setiap keluarga, karena dapat mempengaruhi keadaan

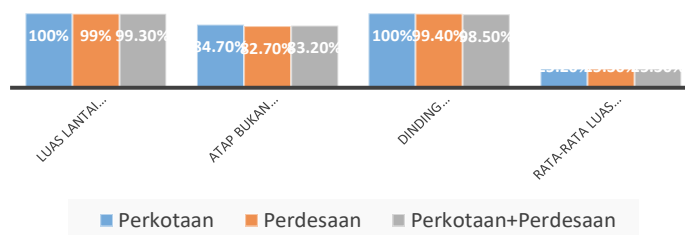
penghuninya dan secara tidak langsung mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Masalah yang berkaitan dengan kondisi perumahan sering ditemui di Indonesia baik dipertanian maupun pedesaan. Kondisi dan kualitas rumah yang ditempati dapat menunjukkan keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Semakin baik kondisi dan kualitas rumah yang dihuni, menunjukkan semakin baik keadaan sosial ekonomi rumah tangga.

Kebutuhan akan papan yang ditunjukkan melalui perumahan diperlukan dalam menunjang kehidupan manusia. Hal ini sebagai salah satu bentuk upaya pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Kualitas dari perumahan menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga di suatu wilayah. Semakin baik kualitas dari perumahan masyarakat maka semakin baik pula tingkat kesejahtraannya. Kesejahteraan rumah tangga dapat diukur melalui beberapa indikator. Berikut merupakan beberapa indikator yang menunjukkan kualitas dari perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, yaitu:

Kualitas Rumah

Berdasarkan data dari Susenas, pada tahun 2016 kondisi kualitas rumah di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat melalui beberapa indikator yakni luas lantai bukan tanah, atap bukan jerami/ijuk/daun/rumbia/ lainnya, dinding terluas tembok dan kayu, serta rata-rata luas lantai perkapita. Pada tahun 2016, kondisi rumah yang memiliki luas lantai bukan tanah sudah mencapai 100% di daerah perkotaan, 99% di daerah pedesaan, dan jika digabungkan daerah perkotaan dan pedesaan maka rumah tangga yang telah memiliki luas lantai bukan tanah sebesar 99,30%. Apabila dilihat dari atap maka rumah tangga yang telah memiliki atap bukan jerami/ijuk/daun/rumbia/lainnya di daerah perkotaan yakni sebesar 84,70%, di daerah pedesaan sebesar 82,70% dan jika digabungkan maka sebesar 83,20%. Selanjutnya jika dilihat dari dinding, di daerah

perkotaan rumah tangga yang memiliki dinding terluas tembok dan kayu telah mencapai 100% sedangkan di daerah perdesaan masih lebih rendah yakni pada persentasi 99,40%. Jika digabungkan antara kedua daerah maka persentasenya mencapai 98,50%. Jika dilihat dari lantai maka rata-rata luas lantai perkapita di daerah perkotaan yakni sebesar 25,20% sedangkan di daerah perdesaan lebih besar yakni pada angka 25,30. Apabila daerah perkotaan dan perdesaan digabungkan maka persentasi rata-rata luas lantai perkapita di daerah yakni sebesar 25,30%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kualitas rumah di Kabupaten Tanah Laut sudah cukup baik. Jika dirinci berdasarkan masing-masing indikator maka dijelaskan sebagai berikut:



Sumber: Susenas 2016 dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. Tanah Laut 2016

Gambar 2.43 Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Tanah Laut, 2016 (Diolah)

Fasilitas-fasilitas lainnya yang menjadi pendukung perumahan seperti air minum, tempat pembuangan air besar dan sumber penerangan perlu diketahui juga perkembangan keberadaannya. Fasilitas - fasilitas ini dapat dipakai sebagai variabel pendukung yang dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah.

Akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan salah satu pondasi inti dari masyarakat yang sehat, sejahtera dan damai yang merupakan fasilitas yang harus disediakan pemerintah dalam sektor perumahan. Hampir 84,85 % rumah tangga di wilayah perkotaan dan

pedesaan di Kabupaten Tanah Laut kekurangan layanan air bersih, khususnya sistem perpipaan, jika didasarkan pada cakupan pelayanan PDAM yang hanya 16,15 % dari total penduduk Kabupaten Tanah Laut tahun 2012 yaitu sebanyak 308.818 jiwa.

Pemakaian air bersih merupakan kebutuhan pokok yang harus dikonsumsi penduduk secara rutin guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Baik buruknya pelayanan air bersih akan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku air untuk pengolahan lebih lanjut. Sebagian besar penduduk kawasan Kabupaten Tanah Laut memperoleh air bersih melalui sistem pelayanan air bersih yang berada dibawah pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut. Kebutuhan air bersih di Kabupaten Tanah Laut diperkirakan dengan minimal tingkat pelayanan sekitar 75% dan standar pemakaian air sebesar 90 – 120 Lt/Hr/Org. Kebutuhan air bersih untuk kegiatan non domestik sebesar 15% dari kegiatan domestik. Hingga saat ini sumber bahan baku air yang tersedia untuk diolah dan dijadikan air bersih, umumnya diambil dari sumber air permukaan. Sistem penyediaan air bersih di wilayah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari sistem perpipaan dari PDAM dan non-perpipaan. Sistem perpipaan melayani bagian wilayah perkotaan. Sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Tanah Laut dilayani oleh PDAM Tanah Laut dan hanya sebagian kecil wilayah yang terlayani. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Tanah Laut tidak terlayani jaringan PDAM, untuk memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus kebutuhan air minum, sebagian masyarakat di Kabupaten Tanah Laut memperoleh dari air bersihnya dari sumur bor yang dibangun oleh pemerintah daerah ataupun dikelola oleh masyarakat setempat. Air bersih yang dihasilkan dari sumur gali atau sumur bor pada umumnya mempunyai kualitas yang cukup baik sehingga dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Tabel 2.20 Cakupan Pelayanan PDAM Di Kabupaten Tanah Laut

BNA/Unit/Cabang/ IKK	Total Jumlah penduduk (jiwa)	Wilayah Pelayanan (jiwa)	Penduduk terlayani (jiwa)	Cakupan Pelayanan (% Penduduk)	Air terjual (M ³ /bulan)
BNA PELAIHARI	68.425	43655	24.552	56,36	48740
IKK PANYIPATAN	19505	13833	3912	28,28	1.187
IKK BATU AMPAR	20253	6693	2748	41,06	531
IKK JORONG	25.536	12.942	4.448	34,68	8348
IKK TAKISUNG	25.545	12.413	3.176	25,57	975
IKK BATI-BATI	31305	18818	8706	46,24	1519
Pelayanan Rata-Rata				38,70	

Sumber: Laporan Tahunan Operasional PDAM KABUPATEN Tanah Laut

Masih besarnya persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar ini perlu diberi perhatian lebih lanjut karena dengan tidak adanya fasilitas buang air besar mengakibatkan orang untuk melakukannya di sembarang tempat, yang nantinya akan berdampak pada pencemaran lingkungan sehingga akan membuat orang sekitarnya menjadi rawan terserang penyakit.

2.1.5.1.5 Lingkungan Hidup

Pesatnya pembangunan dan penambahan penduduk di Kabupaten Tanah Laut telah menimbulkan permasalahan lingkungan antara lain sanitasi lingkungan yang rendah, pelanggaran dan perambahan kawasan yang berfungsi lindung, penyimpangan pemanfaatan ruang, pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem dan sumberdaya alam lainnya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Tanah Laut dalam mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan, meliputi pembenahan sarana dan prasarana, pembuatan peraturan, dan pedoman pengelolaan lingkungan, peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat, pemantauan lingkungan. Dalam praktek, beberapa upaya yang telah dilakukan seperti penghijauan, pengelolaan persampahan, pembinaan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Disamping prakarsa dari pemerintah, upaya pelestarian lingkungan juga dilakukan oleh masyarakat baik secara kelompok maupun individu.

Kabupaten Tanah Laut memiliki lahan potensial kritis seluas 92.021,52 Ha. Lahan ini terdiri dari lahan kritis di luar kawasan hutan dan lahan kritis dalam kawasan hutan.

Terkait dengan Lingkungan Hidup ini, hal yang harus dilestarikan sebagai penyeimbang alam dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten baik itu pertumbuhan penduduk, kawasan permukiman maupun kawasan perdagangan dan jasa serta industri.

Kualitas lingkungan hidup merupakan hal yang perlu menjadi perhatian bagi setiap daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang salah satunya memperhitungkan aspek lingkungan hidup dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kualitas lingkungan hidup dapat diukur melalui beberapa indikator seperti Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan, Pengelolaan Limbah, dan sebagainya

2.1.5.1.6 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Salah satu layanan komunikasi dan informatika yaitu menggunakan layanan komunikasi melalui kantor pos di Kabupaten Tanah laut. Pada Tabel 2.21, di bawah ini adalah perkembangan jumlah kantor pos berdasarkan jenisnya di Kabupaten Tanah Laut pada periode 2012-2016.

Tabel 2.21 Jumlah Kantor Pos Berdasarkan Jenisnya, 2012-2016

Tahun	Kantor Pos	Pos Pembantu	Rumah Pos	Agen Pos	Jumlah
2012	7	1	0	0	8
2013	7	1	0	0	8
2014	8	0	1	4	13
2015	8	0	1	7	13
2016	8	0	1	9	18

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2012-2017

Pada tahun 2016 terdapat 18 (delapan belas) kantor pos di Kabupaten Tanah Laut, yang terdiri dari 8 Kantor pos, 1 buah rumah pos, dan 9 agen pos. Jumlah ini sudah lebih banyak dibandingkan jumlah kantor pos pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2012-2013 hanya berjumlah 8 kantor pos, selanjutnya pada tahun 2014-2015 semakin bertambah menjadi 13 kantor pos, hingga pada tahun 2016 sudah mencapai 18 kantor pos di seluruh Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya berkaitan dengan layanan surat yang diterima menurut sifat pengirimannya pada periode 2012-2016, jumlahnya dapat dilihat pada Tabel 2.22 di bawah.

Tabel 2.22 Banyaknya Surat Pos yang Diterima Menurut Sifat Pengiriman, 2012-2016

Tahun	Kilat Khusus	Kilat	Surat Pos Biasa	Luar Negeri	Dinas
2012	12.120	3020	750	41	372
2013	-	-	-	-	-
2014	15.107	0	4.652	21	474
2015	44.325	736	4.281	51	689
2016	-	-	-	-	-

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2012-2017

Berdasarkan data yang dihimpundari BPS, pada periode 2012-2016 terdapat lima jenis surat yang dikirim melalui kantor pos. Pada data terakhir yang sudah dipublikasikan, surat kilat khusus di Kabupaten Tanah laut sejumlah 44.325, surat kilat berjumlah 736, surat pos biasa sejumlah 4281, surat luar negeri sejumlah 51, dan surat dinas sejumlah 689. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan tren pada jenis surat kilat khusus, surat pos biasa, surat luar negeri dan surat dinas. Akan tetapi menunjukkan tren yang turun pada jenis surat kilat. Sementara itu, terkait dengan jumlah pelanggan telepon yang ada di Kabupaten Tanah laut tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.23 berikut:

Tabel 2.23 Jumlah Pelanggan Telepon Menurut Kecamatan, 2015

No.	Kecamatan	Pelanggan Telepon		
		Akses Fisik	Akses Radio	Jumlah
1.	Panyipatan	0	0	0
2.	Takisung	10	0	10
3.	Kurau	0	0	0
4.	Bumi Makmur	0	0	0
5.	Bati-Bati	30	0	30
6.	Tambang Ulang	5	0	5
7.	Pelaihari	110	0	110
8.	Bajuin	0	0	0
9.	Batu Ampar	0	0	0
10.	Jorong	0	0	0
11.	Kintap	0	0	0
Jumlah Total				155

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2016

Berkaitan dengan jumlah pelanggan telepon di Kabupaten Tanah laut penggunaanya tersebar di 4 Kecamatan saja, yaitu Kecamatan Pelaihari, kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bati-bati dan kecamatan Takisung. Jumlah pengguna telepon terbanyak berada di Kecamatan Pelaihari yaitu mencapai 110 pengguna. Selanjutnya Kecamatan Bati-Bati memiliki 30 pengguna telepon. Sementara Kecamatan Takisung memiliki total 10 pengguna telepon. dan Kecamatan Tambang Ulang hanya memiliki 5 pengguna telepon. Sementara itu tujuh kecamatan lain di Kabupaten Tanah laut belum memiliki sambungan telepon sama sekali, hal ini dapat dikatakan bahwa penyebaran sarana komunikasi di Kabupaten Tanah Laut masih belum merata. Seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, jaringan internet juga telah merambah Kabupaten Tanah Laut. Penggunaan layanan internet tersebut dapat dilihat berdasarkan jenis penggunaanya yaitu pengguna layanan speedy ataupun jumlah warung internet. Pada periode 2012-2016 jumlah pengguna layanan internet di Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.24 Jumlah Pengguna Layanan Internet Speedy dan Warung Internet

Tahun	Pengguna Layanan Speedy	Jumlah Warung Internet
2012	1.112	29
2013	1.333	29
2014	835	15
2015	937	23
2016	1.154	12

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2012-2017

Berdasarkan Tabel 2.24 diatas dapat dilihat tren yang cukup bervariasi bagi para pengguna layanan speedy. Pada tahun 2012 penggunanya mencapai 1112 lalu naik menjadi 1333 pada tahun 2013. Kenaikan tersebut tidak berlanjut ketika jumlah pengguna layanan speedy tercatat anjlok menjadi sejumlah 835 pengguna di tahun 2014. Selanjutnya di tahun 2015 dan 2016 terjadi tren kenaikan jumlah pengguna layanan speedy yang masing-masing sejumlah 937 dan 1154 pengguna. Lain halnya dengan Jumlah warung internet atau *warnet* di Kabupaten tanah laut, Jumlahnya secara perlahan mengalami penurunan, dan hanya sekali mengalami kenaikan di periode tahun 2014-2015 dari 15 menjadi 23 warung internet. Pada tahun 2012 jumlah warung internet yang ada di Kabupaten Tanah laut mencapai 29 buah, namun pada tahun 2016 jumlahnya tinggal 12 warung internet saja.

2.1.5.1.7 Penataan Ruang

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran atau kinerja urusan penataan ruang didukung adalah Rasio Ruang Terbuka Hijau Per satuan Luas Wilayah dan Tingkat Pelayanan Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Ruang.

Tabel 2.25 Realisasi Indikator Urusan Penataan Ruang Tahun 2014 – 2016

Indikator	2014	2015	2016
<i>Rasio Ruang Terbuka Hijau Per satuan Luas Wilayah</i>	12,4%	12,8%	13,2%
<i>Tingkat Pelayanan Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Ruang</i>	70 dokumen	80 dokumen	80 dokumen

Sumber: DPUPRP Kabupaten Tanah Laut, 2017

Secara umum, Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah mengalami peningkatan tiap tahunnya. Besarnya persentase peruntukan lahan untuk RTH untuk kawasan perkotaan membutuhkan dana yang tidak sedikit, rasio kebutuhan RTH untuk kawasan perkotaan Kabupaten dapat ditingkatkan dengan memasukan kawasan pertanian sebagai kawasan RTH Privat dengan syarat lahan pertanian tersebut tidak beralih fungsi untuk waktu yang relatif lama. Solusi lainnya untuk penambahan kawasan ruang terbuka hijau, reboisasi, pengendalian ijin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan penindakan tegas bagi pelanggaran ijin tata bangunan dan lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dengan permohonan pemanfaatan lahan yang terus meningkat tiap tahunnya.

2.1.5.1.7 Perhubungan

Perhubungan Dalam penyelenggaraan urusan perhubungan, beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi antara lain meliputi Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek, Jumlah uji kir angkutan umum, Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis, dan Angkutan darat.

2.1.5.1.8 Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum merupakan salah satu kegiatan wajib Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang memiliki kontribusi sangat menentukan dalam pencapaian visi dan misi daerah,

khususnya dalam upaya meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum mengemban beberapa sasaran yaitu: (1) meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata ; (2) Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian; (3) Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

2.1.5.1.9 Pemerintahan

a. Administrasi Pemerintahan

Bidang pemerintahan terbagi menjadi administrasi pemerintahan, aparatur Negara dan organisasi daerah. Secara administratif Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 Kecamatan yaitu Panyipatan, Takisung, Kurau, Bumi Makmur, Bati-Bati, Tambang Ulang, Pelaihari, Bajuin, Batu Ampar, Jorong dan Kintap, 135 Desa dan 5 Kelurahan.

b. Aparatur Negara

Aparatur Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini sebanyak 5360 Orang, untuk golongan I sebanyak 87 orang, golongan II sebanyak 1116 orang, golongan III sebanyak 2924 orang dan golongan IV sebanyak 1233 orang. Secara kualitas upaya peningkatan dilakukan melalui peningkatan disiplin aparatur yang telah dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

c. Organisasi Daerah

Organisasi Daerah Kabupaten Tanah Laut dikepalai oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut yang bertempat di Kantor Bupati Tanah Laut bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku Kepala Sekretariat Daerah. Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 Asisten yaitu Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum dan kelompok Jabatan Fungsional, dimana dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 8 Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membentuk lembaga perangkat daerah berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, yang meliputi : kewenangan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka pada Tahun 2008 telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan terakhir dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun nama-nama perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.26 Tabel Satuan Kerja/Organisasi Perangkat Daerah

No	Nama Satuan Kerja/Organisasi
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat Kabupaten
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	Dinas Kesehatan
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
13	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
14	Dinas Perhubungan

No	Nama Satuan Kerja/Organisasi
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
16	Dinas Pariwisata
17	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
20	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
22	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26	Dinas Sosial
27	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
29	Badan Pendapatan Daerah
30	RSUD H. Boejasin Pelaihari

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Tanah Laut, 2017

Organisasi Perangkat Daerah yang lain di Kabupaten Tanah Laut adalah Kecamatan dan Kelurahan yang juga diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Wilayah pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut terbagi dalam 11 (sebelas) kecamatan dan 5 (lima) Kelurahan sebagai berikut.

Tabel 2.27 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Di Kab. Tanah Laut

1. Kecamatan Panyipatan	7. Kecamatan Batu Ampar
2. Kecamatan Takisung	8. Kecamatan Jorong
3. Kecamatan Kurau	9. Kecamatan Kintap
4. Kecamatan Bati-Bati	10. Kecamatan Bumi Makmur
5. Kecamatan Tambang Ulang	11. Kecamatan Bajuin
6. Kecamatan Pelaihari	
1. Kelurahan Sarang Halang	1. Kelurahan Pabahan
2. Kelurahan Angsau	2. Kelurahan Karang Taruna
3. Kelurahan Pelaihari	

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Tanah Laut, 2017

2.1.3.1.10. Ketenagakerjaan

Dalam teori ekonomi makro, variabel tenaga kerja merupakan variabel terpenting untuk mengukur tingkat output suatu perekonomian. Model-model ekonomi juga selalu akan membedakan perekonomian yang *full employment* dengan perekonomian yang berada dibawah tingkat *full employmet*. Kedua model itu tentu juga harus dibahas dalam pendekatan yang berbeda. Karena itu, dalam pembuatan kebijakan ekonomi, variabel tenaga kerja harus diperhitungkan, agar kebijakan ekonomi yang terbentuk dapat secara komprehensif memecahkan berbagai persoalan ekonomi, yang kerap kali berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan.

Di Kabupaten Tanah Laut masalah ketenagakerjaan masih merupakan fenomena pelik. Apalagi pasar tenaga kerja di Kabupaten Tanah Laut diperkirakan akan semakin terintegrasi di masa mendatang. Kalimantan Selatan khususnya Tanah Laut merupakan wilayah yang mudah dijangkau dari mana pun juga. Akibatnya jelas, arus migrasi maupun urbanisasi menjadi tak terhindarkan. Dengan situasi sedemikian ini, bagaimanapun akan berpengaruh pada struktur ketenagakerjaan, yakni kemungkinan menggelembungnya penduduk usia produktif (usia kerja). Untuk itu, perluasan kesempatan kerja perlu dioptimalkan secara produktif.

2.1.3.1.11. Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial mengemban sasaran meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat. Indikator yang digunakan dalam mencapai sasaran yang diemban tersebut, antara lain (1) sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, (2) PMKS yang memperoleh bantuan sosial; serta (3) penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

2.1.5.2 Fokus Layanan urusan Pilihan

2.1.5.2.1. Pertanian

a. Pertanian Tanaman Pangan

Pembangunan pertanian dalam arti luas mencakup pembangunan tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, peranan sektor pertanian adalah meningkatkan pendapatan sebagian besar masyarakat petani, meningkatkan produksi dan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, mengentaskan penduduk dari kemiskinan, mengurangi kesenjangan pendapatan antar antar daerah dan antar golongan masyarakat, serta dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian memegang peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi terutama untuk meningkatkan taraf hidup petani sebagai kelompok masyarakat yang terbesar, disamping mendukung pertumbuhan industri.

Pembangunan ekonomi sektor pertanian adalah untuk meningkatkan produksi pertanian dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani. Sektor pertanian tanaman pangan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk maka peningkatan kebutuhan pangan juga terus meningkat. Kenyataan ini menuntut pemerintah untuk senantiasa memprioritaskan upaya peningkatan produksi tanaman pangan. Areal pertanian di Kabupaten Tanah Laut sebagian besar digunakan untuk menanam padi, jagung, kedelai serta singkong dan umbi-umbian.

b. Kelautan Dan Perikanan

Tanah Laut sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan laut tentunya kaya akan potensi kelautan. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah produksi hasil laut utamanya ikan.

c. Peternakan

Tingkat keberhasilan populasi ternak sapi potong ini 39% dari populasi awal dan 47,55% dari induk produktif melalui kawin suntik alam dan inseminasi buatan (IB).

Setiap tahunnya tingkat capaian populasi ternak sapi potong diatas dari target yang ditetapkan, karena faktor pemasukan ternak sapi potong di pasar hewan yang cenderung meningkat, yang mana hal ini ditunjang dengan terus ditingkatkannya sarana dan prasarana pasar hewan, kenaikan populasi ternak sapi potong yang signifikan ini juga cenderung meningkatnya realisasi kelahiran IB yang mana pada tahun 2016 target 1.200 ekor tercapai tingkat realisasi kelahiran IB 1.400 ekor.

Populasi ternak sapi potong ini ditunjang juga dengan adanya luas lahan padang penggembalaan dan hijauan pakan ternak yang setiap tahunnya terus bertambah dan tersebar di beberapa Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut.

d. Perkebunan

Perkebunan mempunyai peranan yang cukup besar dalam pengembangan pertanian, jika melihat keadaan geografis Kabupaten Tanah Laut. Tanaman perkebunan yang sudah dikembangkan adalah tanaman karet, kelapa sawit, kelapa hibrida dan lainnya.

Penanaman tanaman perkebunan ini akan semakin besar dirasakan manfaatnya apabila ditunjang dengan keberadaan industri yang menggunakan bahan baku hasil dari perkebunan tersebut dimana jenis tanaman perkebunan yang potensial untuk menjadi tanaman andalan Kabupaten Tanah Laut adalah tanaman kelapa sawit dan karet.

2.1.5.2.2. Industri, Perdagangan dan Koperasi

a. Industri

Pembangunan sektor industri Tanah Laut dititikberatkan pada pengembangan industri kecil dan menengah yang didalamnya termasuk industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan sumber daya yang tersedia baik sumber daya alam maupun

sumber daya manusia disamping dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan. Industri kecil dan menengah mempunyai peranan penting dalam mendukung berlangsungnya pertumbuhan industri, produktivitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan peranana ekspor nonmigas dalam perekonomian Tanah Laut.

Sektor industri merupakan salah satu sektor andalan dalam menopang perekonomian di daerah. Berdasarkan data yang diperoleh yang membedakan kelompok industri dalam tiga kelompok yaitu : industri logam mesin dan kimia, industri aneka dan industri hasil pertanian dan kehutanan.

Jumlah perusahaan industri formal (berizin) dan jumlah tenaga kerja menurut jenis kelompok industri yaitu : Industri hasil pertanian dan kehutanan (IHPK) sebanyak 71 buah dengan tenaga kerja sebanyak 211 orang, Industri Logam Mesin dan Kimia (ILMK) sebanyak 21 buah dengan tenaga kerja sebanyak 63 orang dan Industri Aneka (IA) sebanyak 5 buah dengan tenaga kerja sebanyak 15 orang.

Jumlah perusahaan industri non formal dan jumlah tenaga kerja menurut jenis kelompok industri yaitu : Industri hasil pertanian dan kehutanan (IHPK) sebanyak 706 buah dengan tenaga kerja sebanyak 2.118 orang, Industri logam mesin dan kimia (ILMK) sebanyak 486 buah dengan tenaga kerja sebanyak 1.458 orang, Industri Aneka (IA) sebanyak 135 buah dengan tenaga kerja sebanyak 405 orang

Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa kawasan industri yang tersebar di Wilayah Kabupaten Tanah Laut, diantaranya Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bati Bati, Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap.

b. Perdagangan

Perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Oleh

karena itu pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan ekspor non migas.

Sektor perdagangan dalam perekonomian Tanah Laut menunjukkan perkembangan yang cukup bagus. PDRB sektor perdagangan tumbuh mencapai 8,76 persen sejak pada tahun 2014. Sektor perdagangan merupakan sektor yang dibentuk oleh sektor pertanian, pertambangan, penggalan dan sektor industri, di mana barangbarang yang dihasilkan oleh ketiga sektor tersebut adalah komoditas perdagangan. Sehingga kinerja sektor perdagangan ini dipengaruhi kinerja ketiga sektor tersebut.

Jenis perdagangan di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 442 buah yang terdiri dari perdagangan besar sebanyak 30 buah, perdagangan menengah sebanyak 185 buah, perdagangan kecil dan perdagangan mikro sebanyak 227 buah.

Untuk mendukung industri perdagangan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, penyediaan sarana perdagangan juga merupakan suatu yang amat penting dalam rangka mempercepat perkembangan perekonomian wilayah. Sarana perdagangan yang meliputi pasar baik itu pasar umum maupun pasar desa memegang peran yang sangat strategis. Jumlah pasar desa yang ada saat ini di wilayah Tanah Laut sebanyak 90 buah. Sedangkan pasar umum sebanyak 13 buah, dimana aktivitas pasar mampu memberikan peluang bagi hasil bumi di Tanah Laut.

c. Koperasi

Koperasi adalah salah satu bentuk lembaga profit sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai bentuk usaha. Dalam mengembangkan usahanya koperasi menghadapi kendala utama yang bersifat internal yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Kendala internal tersebut

menimbulkan kendala lain yang lebih khusus yaitu kelemahan dalam permodalan.

Keberadaan koperasi di Kabupaten Tanah Laut jumlah cukup banyak dan tersebar di seluruh kecamatan. Secara keseluruhan terdapat 170 unit koperasi yang terbagi atas koperasi unit desa (KUD) sebanyak 53 unit dan koperasi primer non KUD sebanyak 117 unit.

Melihat potensi koperasi yang tersebar di seluruh kecamatan ini, dan sesuai dengan asas ekonomi kerakyatan yang dewasa ini mendapat perhatian serius dari pemerintah, maka keberadaan koperasi harus terus dikembangkan dengan meningkatkan profesionalitas manajemen para pengurus koperasi.

2.1.5.2.3. Pariwisata

Sejarah perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut sudah berlangsung sejak lama. Sektor ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat dikembangkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun masyarakat berupaya untuk membangun pariwisata dikarenakan potensi wilayah Tanah Laut di sektor pertambangan atau energi mulai berkurang.

Tanah Laut memiliki banyak daya Tarik obyek wisata. Tercatat ada sekitar 25 obyek wisata yang sebagian besar berupa wisata alam. Letak geografis Tanah Laut yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa menjadikan pantai Takisung dan Pantai Batakan sebagai obyek wisata favorit yang banyak dikunjungi setiap akhir pekan dan liburan sekolah. Selain wisata pantai, di Tanah Laut juga terdapat obyek wisata alam lainnya, antara lain Pantai Swarangan, Air Terjun Bajuin, Gunung Kayangan, Batu Lima, Kawasan Goa Marmer, dan Kerbau Rawa.

Didalam RPJMD Kab. Tanah Laut Pariwisata termasuk Kegiatan Prioritas Unggulan untuk perlu dikembangkan karena dilihat dari Potensi panorama alam dan tidak akan habis dimakan usia, Sejarah perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut sudah berlangsung sejak lama. Sektor ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat dikembangkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun masyarakat berupaya untuk membangun pariwisata

dikarenakan potensi wilayah Tanah Laut di sektor pertambangan atau energi mulai berkurang. kemudian icon penyumbang Devisi daerah beralih ke obyek wisata karena biaya/Cost pengembanagn relatif murah berimplikasi dengan outcome berupa pemasukan Pendapatan Daerah dapat dioptimalkan memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah, Faktor keberhasilan kunjungan wisata perlu adanya kerjasama:1.Pemerintah Pusat, Provinsi Kabupaten saling bersenergi untuk mepromosikan obyek wisata Kab. Tanah Laut;

Dalam melaksanakan Pengembangan Pariwisata perlu memperhatikan Pengemabangan Kawasan Strategis berdasarkan Tata Ruang dan Materpalan Pembangunan Eknomi sedangkan utuk Pariwisata fokus di wilayah Kecamatan Pelaihari, Panyipatan Takisung termasuk pada Koridor II mengenai Pengembangan Pariwisata;

Tabel 2.28 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2015 dan Tahun 2016

Indikator Kinerja	Tahun 2015			Indikator Kinerja	Tahun 2016		
	Target	Realisasi	% Capaian		Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Kunjungan Wisatawan	215.000 orang	207.636 Orang	96,57	Jumlah kunjungan wisatawan	218.000	179.114	82,16
Jumlah penerimaan SKPD terhadap PAD (Rp)	548.687.500	444.512.250	81	Jumlah penerimaan SKPD terhadap PAD	553.065.000	395.593.000	71.52
Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan /diikuti	9 Event	9 Event	100	Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan / diikuti	9 Event	9 Event	100

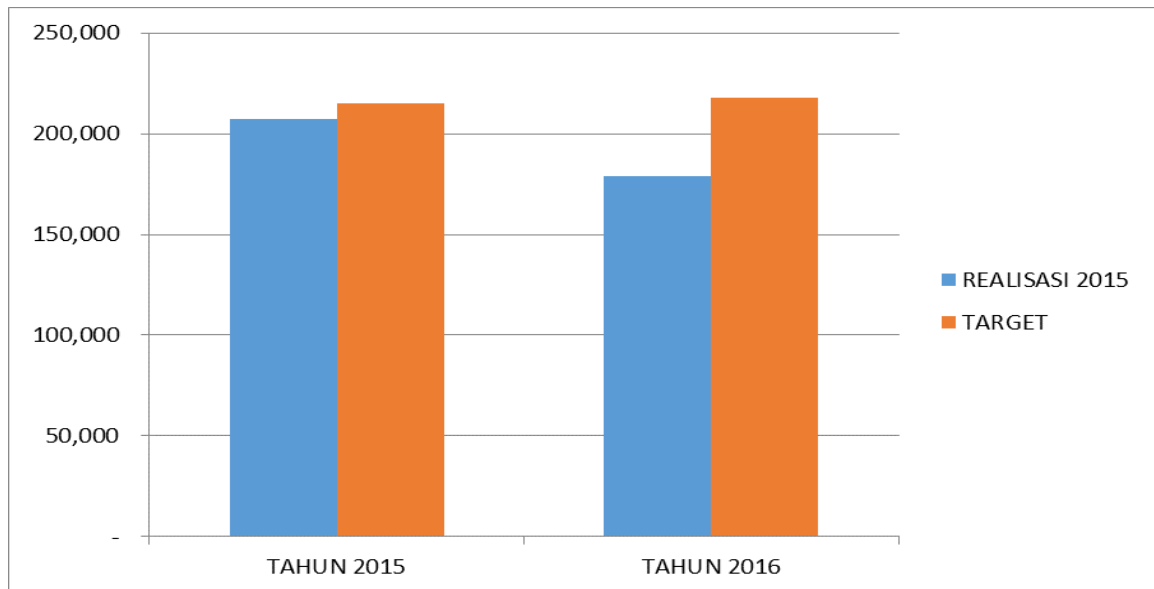
Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut, 2017

ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT PENURUNAN TARGET KUNJUNGAN WISATA BERDAMPAK PADA PENDAPATAN

Realisasi jumlah kunjungan wisata Tahun 2015 sebanyak 207.636 orang (96,57%) sedangkan Tahun 2016 sebanyak 179.114 orang (82,16%) terjadi penurunan jumlah kunjungan yang disebabkan karena beberapa hal antara lain: karena sarana jalan menuju Obyek Wisata kondisinya rusak, keamanan sekitar Obyek Wisata belum kondusif, sehingga pengunjung enggan mendatangi Obyek Wisata,

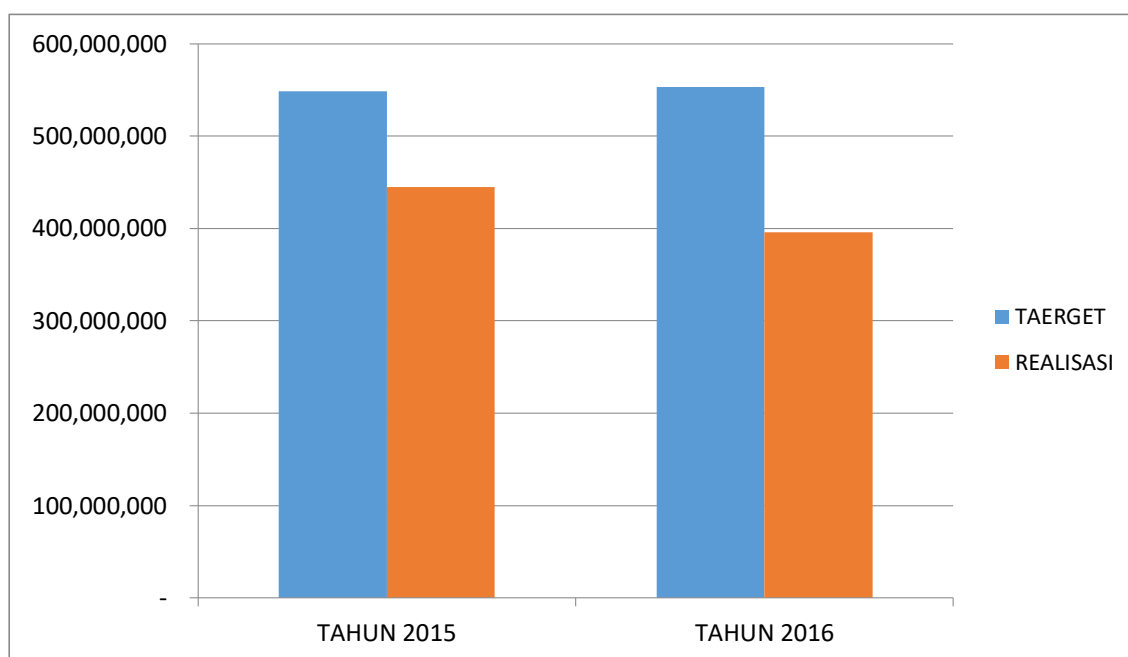
prasarana Obyek Wisata sudah mulai rusak seperti cottage tidak bisa digunakan lagi, status Obyek Wisata Pantai Batakan masih menunggu kejelasan antara pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan BKSDA.

Realisasi PAD pada Dinas Pariwisata Tahun 2015 sebesar Rp. 444.512,250 (81,01%) sedangkan Tahun 2016 sebesar Rp. 395.593.000 (71,52%), sumber pendapatan dari harga tarif karcis Obyek Wisata dan harga tarif retribusi sewa pemakaian kekayaan daerah, tempat rekreasi dan olahraga.



Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut, 2017

Grafik 2.44 Perbandingan Kunjungan Wisata TA. 2015 dan TA. 2016 (Diolah)



Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut, 2017

Grafik 2.45 Perbandingan Pendapatan Daerah Tahun 2015 dan TA.2016 (diolah)

Sampai saat ini terdapat 25 obyek wisata yang dapat dikunjungi yang terbagi dalam jenis wisata pantai, wisata alam, wisata pancing, wisata taman dan wisata sejarah. Adapun obyek wisata tersebut antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.29 Detail Data Potensi Obyek Wisata Yang Akan Dikembangkan Kab. Tanah Laut

NO.	OBYEK WISATA	LOKASI (Desa/Kecamatan)	JENIS WISATA/PONTENSI YANG DITAWARKAN	JARAK DENGAN PELAIHARI
1.	Pantai Takisung	Takisung, Taksisung	Pantai	22 Km
2.	Pantai Batakan	Batkan, Panyipatan	Pantai	40 Km
3.	Pantai Swarangan	Swarangan, Jorong	Pantai	41 Km
4.	Pantai Asmara	Jorong	Pantai	
6.	Batu Lima	Kuala Tambangan, Taksisung	Pantai	42 Km
7.	Air Terjun Bajuin	Sungai Bakar, Bajuin	Alam	10 Km
8.	Air Terjun Balangdaras	Tanjung, Bajuin	Alam	25 Km
9.	Air Terjun Hamindra	Tanjung, Bajuin	Alam	17 Km
10.	Air Terjun Habulu	Tanjung, Bajuin	Alam	18 Km
11.	Gunung Kayangan	Ambungan, Pelaihari	Alam	6 Km
12.	Kawasan Goa marmer	Sei Bakar, Bajuin	Alam	10 Km
13.	Goa Liang baubau	Tanjung, Bajuin	Alam	19 Km
14.	Mina Tirta	Pelaihari	Alam	1 Km
15.	Tanjung Dewa	Tanjung Dewa,	Alam	40 km

NO.	OBYEK WISATA	LOKASI (Desa/Kecamatan)	JENIS WISATA/PONTENSI YANG DITAWARKAN	JARAK DENGAN PELAIHARI
		Panyipatan		
16/	Kerbau Rawa	Banua Raya, Bati- bati,	Alam	26 Km
17.	Benteng Belanda Tabonio	Tabonia, Takisung	Sejarah	25 Km
18.	Pulau Datu Pemulutan	Tanjung Dewa, Panyipatan	Ziarah	38 Km
19.	Datu Insad	Sambangan, Bati- bati	Ziarah	33 Km
20.	Taman Mina Tirta	Pelaihari	Alam buatan	1 Km
21.	Air Terjun Lalaran	Pemalongan, Bajuin	Alam	14 Km
22.	Taman Hutan Kota	Pelaihari	Buatan	1 Km
23.	Bakantan	Swarangan, Jorong	Sungai, Alam	39 Km
24.	Bakantan	Panjaratan Pelaihari	Sungai	15 Km
25.	Makam Keramat Istana	Karang Taruna	Ziarah	6 Km
26	Taman Kijang Kencana	Pelaihari	Buatan	1 Km
26.	Bumi Perkemahan Labirin	Sei Jelai, T. Ulang	Agro wisata	9 Km

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut, 2017

Tabel 2.30 Data Kecamatan Yang Memiliki Potensi Obyek Wisata 6 Kecamatan

NO	KECAMATAN	OBYEK WISATA
1.	Pelaihari	Gunung Kayangan Mina Tirta Taman Hutan Kota Makam Keramat Istana Taman Kijang Kencana
	Takisung	Pantai Takisung Batu Lima Benteng Belanda Tabonio
	Panyipatan	Pantai Batakan Tanjung Dewa Pulau Datu Pemulutan
	Bati-Bati	Kerbau Rawa Datu Insad
	Bajuin	Air Terjun Balangdaras Air Terjun Hamindra Air Terjun Habulu Kawasan Goa marmer Goa Liang baubau Air Terjun Lalaran

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut, 2017

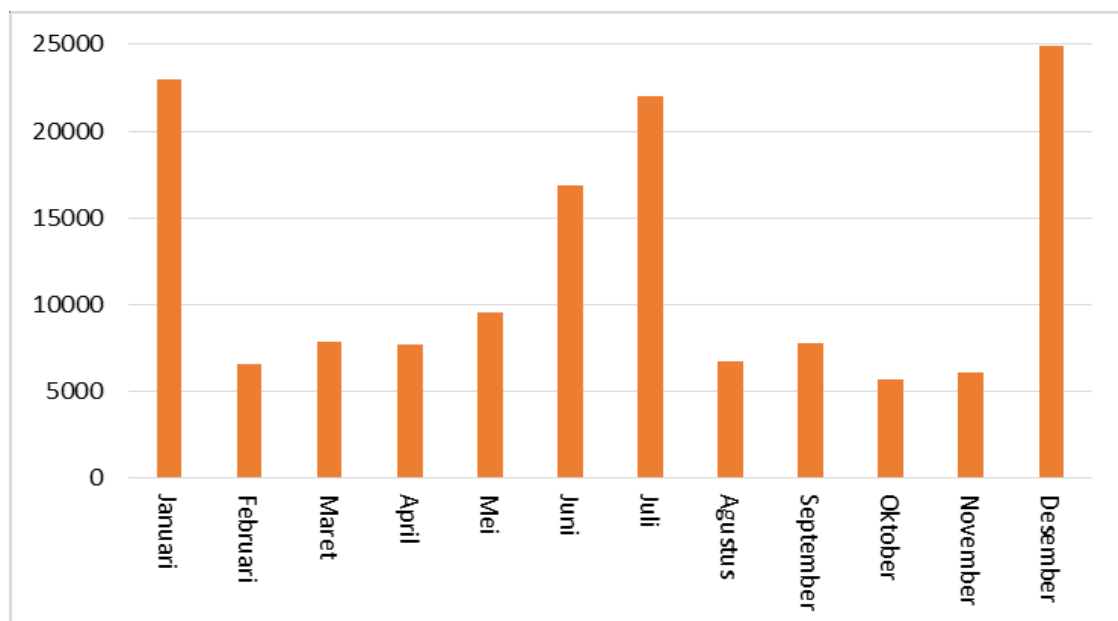
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Keberhasilan Pencapaian Target Kunjungan Wisata adalah sebagai berikut. 1) Promosi kurang optimal sehingga hampir banyak obyek wisata belum dikunjungi oleh wisatawan. 2) Sarana dan Prasarana Infastruktur: Jalan alternatif, Komunikasi, Perhotelan, belum optimalnya kerjasama dengan pihak travel egent'

Adapun solusi yang akan diambil untuk menghadapi factor tersebut di atas adalah sebagai berikut.1) Perlu adanya Strategi Promosi yang tepat. 2) Perlu di Optimalkannya Sarana pendukung guna mendukung strategi promosi.

Tabel 2.31 Jumlah Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Tanah Laut Setiap Bulan

Bulan	P. Takaisung	P.Batakan	P. Swarangan	Air Terjun Bajuin	Gng. Kayangan	Kolam Renang	Batu Lima	Kereta Wisata
Jan	16 225	3 589	-	-	1200	200	-	-
Peb	3 400	-	-	-	380	2.400	-	400
Mart	4 700	-	-	-	320	2.800	-	-
Apr	3 500	1000	-	600	200	2.400	-	-
Mei	7700	-	-	-	500	1.200	-	-
Jun	14.500	500	-	-	1.200	1.000	-	-
Jul	13.778	4.200	-	500	2000	1.500	-	-
Agst	4.800	-	-	-	200	1.700	-	-
Sept	4.100	-	-	-	500	3.200	-	-
Okt	2.600	1.800	-	-	900	4.000	-	-
Nop	3.200	1.300	-	-	60	1.000	-	-
Des	10.220	2.800	-	424	9000	2.434	-	-

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut, 2017



Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut, 2017

Gambar 2.46 Jumlah Pengunjung Obyek Wisata di Kab. Tanah Laut Setiap Bulan

2.1.5.2.4. ASPEK KEPUASAN MASYARAKAT

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 memuat 14 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu.

- a. Prosedur Pelayanan
- b. Persyaratan Pelayanan
- c. Kejelasan Petugas Pelayanan
- d. Kedisiplinan Petugas Pelayanan
- e. Tanggung jawab Petugas Pelayanan
- f. Kemampuan Petugas Pelayanan
- g. Kecepatan Pelayanan
- h. Keadilan Mendapatkan Pelayanan
- i. Kesopanan dan Keramahan Petugas
- j. Kewajaran Biaya Pelayanan
- k. Kepastian Biaya Pelayanan
- l. Kepastian Jadwal Pelayanan
- m. Kenyamanan Lingkungan
- n. Keamanan Pelayanan

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 14 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor rekap **Survei Kepuasan Masyarakat untuk seluruh SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar : 77,67** maka kinerja SKPD berada dalam mutu pelayanan **B** dengan kategori **BAIK**, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 62,51 - 81,25.

Tabel 2.32 Kategorisasi Mutu Pelayanan

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	TIDAK BAIK
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	KURANG BAIK
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	BAIK
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Tanah Laut, 2017

Dari Lampiran dapat dilihat bahwa SKPD yang memiliki Nilai Survey Kepuasan Masyarakat tertinggi adalah Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu dengan nilai 98,82 (Kategori A : Sangat Baik), sedangkan SKPD dengan nilai Survei Kepuasan Masyarakat terendah adalah Dinas Pertambangan dan Energi dengan nilai 61,80 (Kategori C : Kurang Baik). Hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan SKPD pada umumnya sangat baik dan sudah merasa sangat puas dengan unsur-unsur pelayanan tersebut.

2.1.6 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.6.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tersedianya dana yang cukup dengan penyaluran yang baik oleh lembaga keuangan (perbankan). Implementasi otonomi daerah membuat pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan masing-masing daerah, khususnya dalam pembiayaan pembangunan. Disamping itu keberhasilan pembangunan ekonomi peluang meningkatnya penerimaan daerah, penerimaan tersebut selanjutnya dimanfaatkan kembali dalam bentuk pembiayaan pembangunan di berbagai bidang guna meningkatkan kesejahteraan yang makin baik bagi masyarakat. Guna memenuhi pembiayaan pelaksanaan pembangun di Kabupaten Tanah Laut, maka diusahakan terutama dari kemampuan daerah sendiri yang berasal dari PAD, disamping bantuan dari pemerintah propinsi dan pusat baik yang berasal dari dana rupiah maupun bantuan luar negeri. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber dana dalam pembiayaan pembangunan terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD dan lain-lain pendapatan yang sah.

Secara garis besar bahwa kebijakan keuangan umum keuangan daerah Kabupaten Tanah Laut adalah; terkait dengan Pendapatan Daerah pemungutannya didasarkan atas Peraturan Daerah yang berlaku dengan melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Dalam intensifikasi berupaya mengoptimalkan penerimaan dan dalam rangka ekstensifikasi

berupaya merevisi Perda-perda pendapatan yang sudah tidak sejalan dengan UU No 28 tahun 2009 dan penyesuaian tarif Pajak dan retribusi sesuai dengan perkembangan sekarang. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan sumber dana dalam rangka membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat tercukupi. Berkaitan dengan dengan kebijakan belanja telah diuraikan pada sub Bab di atas, namun juga yang perlu disadari bahwa belanja-belanja yang dilaksanakan harus memenuhi akuntabilitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.6.2 Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2016 berdasarkan hasil proyeksi sebesar 339.213 jiwa dengan jumlah laki-laki (jiwa) sebesar 174.895 jiwa dan perempuan sebesar 164.318 jiwa. Dari rasio jenis kelaminnya dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Dilihat dari perbandingan per kecamatan, maka yang terbanyak penduduknya adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 72.870 jiwa, kemudian Kecamatan Bati-Bati berpenduduk 42.050 jiwa. Sedangkan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Kurau yaitu sebanyak 13.114 jiwa.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD

Saat ini adalah baru memasuki tahun empat pelaksanaan RPJMD dan dalam RKPD ini yang direncanakan adalah untuk pelaksanaan pembangunan tahun ke 5 RPJMD. Dalam perjalanannya sudah barang tentu pelaksanaan RPJMD ini perlu dilakukan evaluasi secara mendetail berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Tanah Laut dari berbagai aspek pembangunan berdasarkan fakta dan informasi yang didapat, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Seiring dengan berakhirnya MDGs pada tahun 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio +20 Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs (*sustainable development goals*) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional.

Setelah lebih dari satu tahun perundingan konsultatif yang inklusif dan intensif, Kelompok Kerja Terbuka Majelis Umum untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mengajukan 17 tujuan spesifik dengan 169 target yang saling berkaitan. Negara-negara Anggota PBB telah menyepakati bahwa agenda yang disusun oleh

Kelompok Kerja Terbuka akan menjadi basis utama untuk proses antar-pemerintah pasca-2015.

1. Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya di manapun;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi, dan memajukan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia;
4. Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi bagi yang berkelanjutan bagi semua;
7. Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakkan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara Negara-negara;
11. Membuat kota dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang keberlanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampak-dampaknya;
14. Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan samudera, laut dan sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan

degradasi tanah cadangan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;

16. Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan;

Pelaksanaan pencapaian SDGs yang selanjutnya disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tidak hanya menjadi masalah dunia tetapi juga menjadi komitmen Indonesia untuk melaksanakan agenda tersebut untuk menjadi negara maju. Tidak hanya di level nasional, pemerintah daerah diamanahkan untuk menyusun RAD TPB/SDGs paling lama 12 bulan setelah Perpres tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini ditetapkan. TPB sebagaimana sebagaimana disebutkan dalam Perpres tersebut bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Demikian halnya dengan Kabupaten Tanah Laut, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dipandang sangat relevan dalam memandu gerak langkah pembangunan daerah sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan tetap menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat dan kekayaan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tanah Laut. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut selanjutnya dapat disinkronkan ke dalam bagian permasalahan pembangunan dan isu strategis, strategi dan arah kebijakan, dan program pembangunan, dan indikator kinerja daerah. Secara teknis indikator-indikator SDGs bisa diadopsi sebagai indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tanah

Laut khususnya pada urusan kewenangan yang relevan, diantaranya adalah; urusan pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertanian, kelautan dan perikanan, dan fungsi urusan penunjang pemerintahan.

b. Kawasan Industri Jorong

Pemerintah pusat dalam RPJMN 2015-2019 telah menetapkan Kawasan Industri Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebagai fokus lokasi pengembangan kawasan strategis di Pulau Kalimantan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Kawasan Industri Jorong termasuk salah satu lokasi pembangunan kawasan industri prioritas/kawasan ekonomi khusus. Fokus pembangunan industri di Kawasan Industri Jorong adalah untuk hilirisasi produk-produk hasil perkebunan dan pertanian dan produk baja. Dalam perkembangannya, Kawasan Industri Jorong telah diminati oleh PT Jorong Port Development sebagai investor dimana perusahaan tersebut membutuhkan lahan seluas 1.200 Ha (1.000 Ha untuk kawasan industri dan 200 Ha untuk pelabuhan). Dengan ditetapkannya Kawasan Industri Jorong, Kabupaten Tanah Laut harus memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan tersebut melalui pemberian kemudahan dan insentif bagi investor dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Hal yang tak kalah penting adalah pengembangan Kawasan Industri Jorong tersebut tentunya akan menarik banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga Kabupaten Tanah Laut harus menyiapkan SDM yang unggul untuk mendukung Kawasan Industri Jorong.

c. Transformasi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut

Struktur ekonomi Kabupaten Tanah Laut selama periode 2012-2016 didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, walaupun terus mengalami penurunan kontribusi sepanjang periode tersebut dari

sebesar 36,41% pada tahun 2012 menjadi sebesar 25,05% pada tahun 2016. Dengan masih bergantungnya Kabupaten Tanah Laut pada lapangan usaha pertambangan dan penggalan, maka di masa mendatang hal tersebut akan menjadi permasalahan serius mengingat jenis sumber daya yang bersifat tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*) dan cenderung ekstraktif. Beberapa sektor yang dapat menjadi sektor prioritas di Kabupaten Tanah Laut pada masa mendatang adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan sektor industri pengolahan. Pengembangan kedua sektor tersebut sangat potensial mengingat ditetapkannya Kawasan Industri Jorong sebagai Proyek Strategis Nasional yang berbasis industri hasil perkebunan dan pertanian. Selain itu, pengembangan kedua sektor tersebut sangat potensial mengingat kontribusinya dalam perekonomian Kabupaten Tanah Laut berada pada posisi kedua dan ketiga setelah sektor pertambangan dan penggalan. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2016 adalah sebesar 19,64%, sedangkan sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 12,23%.

d. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah satu masalah pokok pembangunan di Kabupaten Tanah Laut. Di bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Kabupaten Tanah Laut masih relatif rendah dibandingkan angka nasional. Namun yang perlu dilihat adalah bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-2016. Pada tahun 2013, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 4,33% dan terus meningkat setiap tahun menjadi sebesar 4,65% pada tahun 2016. Sementara itu, angka ketimpangan di Kabupaten Tanah Laut juga semakin meningkat walaupun masih dalam kategori ketidakmerataan rendah (Rasio Gini < 0,3). Angka Rasio Gini Kabupaten Tanah Laut terus meningkat dari 0,250 pada tahun 2013 menjadi sebesar 0,272 pada tahun 2015.

Di sisi yang lain, upaya koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan harus dioptimalkan. Hal ini sedemikian karena telah dipahami bahwa permasalahan utama yang menyebabkan kurang efektifnya upaya penanggulangan kemiskinan adalah:

1. Pendekatan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan cenderung seragam dan menyederhanakan permasalahan dan karakteristik kemiskinan.
2. Rendahnya kualitas dan ketersediaan data dan informasi kemiskinan.
3. Minimnya koordinasi antar para pemangku kepentingan dan keterlibatan masyarakat miskin secara aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
4. Penanggulangan kemiskinan masih dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah. Dalam beberapa kasus, pandangan seperti itu menyebabkan masyarakat menjadi tergantung dan sulit keluar dari kemiskinan.
5. Penanggulangan kemiskinan sesungguhnya merupakan persoalan lintas bidang pembangunan, namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah ditengarai masih bersifat sektoral dan belum komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka peningkatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang ada di kabupaten harus semakin lebih dioptimalkan. TKPKD Kabupaten Tanah Laut harus meningkatkan perannya dalam sinergisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dikabupaten maupun sinkronisasi dengan kebijakan provinsi dan nasional.

e. Peningkatan Daya Saing Sektor Pariwisata

Kabupaten Tanah Laut memiliki banyak objek wisata baik pariwisata budaya maupun pariwisata alam. Kawasan pariwisata budaya di Kabupaten Tanah Laut diantaranya adalah Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap, Benteng Tabanio di Kecamatan Takisung, dan Bunker Jepang Desa Sungai Bakar di Kecamatan Bajungin.

Sementara itu, kawasan pariwisata alam di Kabupaten Tanah Laut diantaranya adalah Kawasan Taman Wisata Alam Batakan Desa Batakan di Kecamatan Panyipatan, Kawasan Hutan Lindung Bajuin Desa Sungai Bakar di Kecamatan Bajuin, Kawasan Hutan Kota dan Wisata Gunung Khayangan di Kecamatan Pelaihari, Air Terjun Bajuin di Kecamatan Bajuin, Kawasan Gua Marmer, Gua Semprong, dan Gua Liang Bebau di Kecamatan Bajuin, Pantai Batakan di Kecamatan Panyipatan, Pantai Takisung di Kecamatan Takisung, dan Pantai Swarangan di Kecamatan Jorong.

Beberapa destinasi wisata unggulan di Kabupaten Tanah Laut yang telah telah terkenal di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Pantai Takisung dan Batakan. Dalam rangka peningkatan daya saing pariwisata di tengah jumlah kunjungan wisata yang terus mengalami penurunan, maka diperlukan promosi dan pemasaran destinasi wisata unggulan tersebut. Selain itu, beberapa upaya lain yang dapat dilakukan adalah membangun akses menuju kawasan wisata, sarana pendukung wisata misalnya hotel dan restoran, serta mempersiapkan tenaga kerja pariwisata yang berkualitas. Sehingga harapannya dengan pengembangan ekonomi kreatif dibidang pariwisata akan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Tanah Laut. Prinsip-prinsip pengembangan yang dipakai dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut nanytinya mencakup prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*) dan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism development*). Peningkatan daya saing pariwisata akan memberikan dampak yang luas bagi perekonomian mengingat tingginya multiplier effect yang ditimbulkan dan dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan secara otomatis akan meningkatkan pendapatan daerah melalui PAD.

f. Peningkatan Konektivitas Sentra Produksi Produk Unggulan dan Pelabuhan

Dengan adanya penetapan Kawasan Industri Jorong sebagai Proyek Strategis Nasional dimana selanjutnya akan dibangun

Pelabuhan Jorong, maka diperlukan peningkatan konektivitas antara wilayah sentra produksi dengan pelabuhan. Peningkatan konektivitas tersebut dapat dilakukan dengan pembangunan jalan baru maupun revitalisasi jalan eksisting. Dalam RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036, telah direncanakan sistem jaringan jalan khusus angkutan komoditas sumber daya mineral dan perkebunan yang terdiri atas rencana peningkatan dan pengembangan jalan pada ruas-ruas jalan khusus angkutan komoditas yang mendukung kelancaran arus distribusi dari sentra-sentra sumberdaya mineral dan perkebunan yang dikelola oleh pihak swasta/investor menuju pelabuhan khusus.

- a) daerah pertambangan/ daerah perkebunan di Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut – jalan melintang di bawah jalan lain pada jalan nasional Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut – pelabuhan khusus desa Asam-asam dan desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut yang berada di ± KM 40;
- b) daerah pertambangan/ daerah perkebunan di Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut – jalan melintang di bawah jalan lain pada jalan nasional di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut – pelabuhan khusus desa Muara Kintap, Pandan Sari, Mekar Sari, Sungai Cuka, Pasir Putih, Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut yang berada di ± Km 80;
[1]
[SEP]
- c) jalan khusus angkutan komoditas sumber daya mineral dan perkebunan dapat berubah dan bertambah sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; dan [1]
[SEP]
- d) ruas-ruas jalan khusus angkutan komoditas akan dipersiapkan menjadi cikal bakal jalan umum apabila kontrak investor telah berakhir dan atau adanya kepentingan pengembangan wilayah dan kepentingan umum.

g. Peningkatan Partisipasi Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan

Pendidikan merupakan unsur terpenting dalam peningkatan sumber daya manusia pada suatu daerah. Begitu juga dengan daerah yang baru berkembang seperti Kabupaten Tanah Laut yang sangat membutuhkan tenaga berkualitas untuk memajukan daerah. Pendidikan dilaksanakan selama kita masih menghirup nafas kehidupan, sehingga secara tidak langsung pendidikan adalah urat nadi dalam menghadapi zaman yang sudah maju dan berteknologi seperti sekarang ini. Penyelenggaraan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga semua sektor masyarakat, baik lembaga swadaya masyarakat, yayasan, organisasi keagamaan, maupun badan usaha lainnya.

Pendidikan merupakan salah satu indikator pembangunan suatu wilayah. Dalam buku III RPJMN 2015-2019, dijelaskan bahwa dalam upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah dan memperluas pembangunan maka dapat dilakukan transformasi dan akselerasi pembangunan. Untuk itu, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan melalui pendidikan yang lebih baik dan merata. Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Tanah Laut dapat dikatakan belum memadai yang ditunjukkan dengan data-data sebagai berikut:

- Angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Laut pada jenjang pendidikan dasar (13-15 tahun) mengalami penurunan dari 96,05% pada tahun 2015 menjadi 92,16% pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada 7% penduduk berusia 13-15 tahun di Kabupaten Tanah Laut tidak bersekolah.
- Angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah masih rendah yaitu hanya sebesar 56,88% pada tahun 2016. Hal tersebut berarti masih ada 43% penduduk berusia 16-18 tahun di Kabupaten Tanah Laut tidak bersekolah. Angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan SD sebesar 112,13% dimana hal tersebut

mengindikasikan bahwa terdapat 12,13% penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun yang bersekolah di SD.

- Angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan SMP/MTs masih rendah yaitu sebesar 69,85%. Hal tersebut berarti hanya 69,85% penduduk berusia 7-12 tahun yang bersekolah di SMP/MTs.
- Angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA masih rendah yaitu sebesar 50,57%. Hal tersebut berarti hanya 50,57% penduduk berusia 7-12 tahun yang bersekolah di SMA/SMK/MA.
- Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Tanah Laut belum mencapai target 9 tahun. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016, RLS Kabupaten Tanah Laut baru mencapai 7,30 tahun yang berarti bahwa penduduk Kabupaten Tanah Laut dapat menyelesaikan sekolah hingga kelas 2 SMP (atau berhenti pada kelas 1 SMP).

h. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan konsep pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih merupakan suatu hal yang perlu diimplementasikan pada era otonomi daerah saat ini dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Tanah Laut dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

i. Percepatan Pengembangan Industri Berbasis Komoditas Pertanian Lokal

Berdasarkan data BPS Kabupaten Tanah Laut, sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki posisi dan peran yang sangat strategis bagi perekonomian wilayah karena mampu memberikan sumbangan pada PDRB sebesar 19,64%. Sektor pertanian juga dipandang memiliki kontribusi yang besar untuk mengatasi problem kemiskinan di wilayah Kabupaten Tanah LAut. Jika sektor agro dapat dikelola dengan baik dengan dukungan perbaikan dan penambahan infrastuktur fisik dan ekonomi, peningkatan kapasitas SDM dan dukungan kelembagaan serta kebijakan yang suportif maka produktivitas dan nilai tambah sektor agro dapat meningkat sehingga akan meningkatkan pendapatan pelaku usaha baik sektor primer maupun industri olahannya serta jasa-jasa terkait. Peningkatan pendapatan pelaku usaha sektor-sektor terkait dapat dipastikan akan berdampak pada pengurangan status kemiskinan masyarakat. Kontribusi sektor agro menjadi sangat penting pada pembangunan ekonomi terutama terkait dengan strategi pengurangan kemiskinan karena sektor agro menampung sebagian besar angkatan kerja dan berlokasi di pedesaan yang identik dengan kantong kemiskinan.

Kontribusi sektor agro menjadi sangat penting pada pembangunan ekonomi terutama terkait dengan strategi mengatasi angka pengangguran karena sektor agro dapat menampung angkatan kerja yang berlokasi di pedesaan. Pengembangan industri berbasis agro hulu-hilir juga sangat potensial untuk menampung lebih banyak tenaga kerja di pinggiran kota dan perkotaan. Percepatan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut secara terstruktur perlu didukung dengan pemihakan regulasi dan anggaran bagi keberlanjutan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Kebijakan percepatan pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang terkait dengan sektor agro diwujudkan dalam tiga program utama yaitu:

- Peningkatan ekonomi lokal;
- Peningkatan infrastruktur dasar;

Selain tiga program utama yang terkait dengan tema pembangunan agro, juga perlu didukung dengan dua program penunjang yang terkait yaitu:

- Penguatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan pertanahan;
- Pengembangan kapasitas kelembagaan.

Salah satu prioritas pada pengembangan sektor agro (pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan) dari berbagai aspek dari hulu ke hilir sangat strategis baik dalam konteks lokal, nasional dan global. Tema utama pembangunan global dan nasional yang memberi prioritas pada pencapaian ketahanan pangan (*food security*) telah direspon dengan sangat positif oleh Kabupaten Tanah Laut. Dengan dukungan karakteristik yang sangat kondusif untuk pembangunan sektor agro dan juga kelimpahan kepemilikan sumberdaya hayati terkait agro memberikan peluang yang sangat besar bagi Kabupaten Tanah Laut untuk dapat mewujudkan pembangunan sektor agro yang kompetitif dan berdaya saing.

Pengembangan potensi unggulan bahan baku lokal baik yang merupakan komoditas pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan dapat mendukung pencapaian diversifikasi pangan. Strategi pembangunan agro yang diprioritaskan pada perbaikan dan penambahan infrastruktur fisik dan ekonomi, peningkatan kapasitas SDM dan dukungan kelembagaan serta kebijakan yang suportif maka produktivitas dan nilai tambah sektor agro dapat meningkat sehingga akan meningkatkan pendapatan pelaku usaha baik sektor primer maupun industri olahannya serta jasa-jasa terkait. Selain itu, pengembangan sektor agro di Kabupaten Tanah Laut sangat berpotensi untuk menciptakan surplus produk agro yang menjadi sumber ekspor ke luar provinsi bahkan dapat menjadi komoditas ekspor ke luar negeri pada masa-masa mendatang.

j. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pembangunan suatu wilayah adalah kesehatan. Kesehatan merupakan bentuk investasi pada kualitas sumberdaya manusia. Dengan kondisi kesehatan masyarakat yang baik maka diharapkan kualitas manusia juga semakin baik, yakni masyarakat dapat semakin produktif. Ketersediaan fasilitas kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kondisi bangunan RSUD di Kabupaten Tanah Laut pada saat ini dirasakan belum memadai dalam hal kualitas pelayanan, sehingga pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung baru RSUD H Boejasin yang nantinya akan selesai pada tahun 2018. Tidak hanya fasilitas bangunan RSUD, hal lain yang diperlukan untuk peningkatan pelayanan kesehatan adalah tersedianya alat kesehatan yang memadai dan peningkatan kualitas tenaga medis. Dengan adanya kelengkapan bangunan disertai alat kesehatan yang modern dan tenaga medis yang trampil, maka pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut akan meningkat.

2.3.2 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Pembangunan Tahun 2019 yang merupakan RPJMD ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025 akan menjabarkan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan/ataupun permasalahan yang akan dihadapi. Isu dan masalah mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut (lihat Tabel).

Tabel 2. Prioritas dan Sasaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas Daerah
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat
		Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas Daerah
2	Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan menurunkan Angka Pengangguran	Meningkatnya pendapatan Masyarakat
3	Peningkatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur wilayah
4	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang akuntabel dan Profesionalisme Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel
		Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif

Adapun yang menjadi permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Laut yang umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi, adalah sebagai berikut.

Tabel 2.21 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Menurut Urusan Kewenangan

No.	Urusan Kewenangan	Permasalahan Pembangunan
I.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
1.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Laut pada jenjang pendidikan dasar (13-15 tahun) mengalami penurunan dari 96,05% pada tahun 2015 menjadi 92,16% pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada 7% penduduk berusia 13-15 tahun di Kabupaten Tanah Laut tidak bersekolah ➤ Angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah masih rendah yaitu hanya sebesar 56,88% pada tahun 2016. Hal tersebut berarti masih ada 43% penduduk berusia 16-18 tahun di Kabupaten Tanah Laut tidak bersekolah ➤ Angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan SD sebesar 112,13% dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat 12,13% penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun yang bersekolah di SD

No.	Urusan Kewenangan	Permasalahan Pembangunan
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="692 259 1418 439">➤ Angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan SMP/MTs masih rendah yaitu sebesar 69,85%. Hal tersebut berarti hanya 69,85% penduduk berusia 7-12 tahun yang bersekolah di SMP/MTs <li data-bbox="692 439 1418 618">➤ Angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA masih rendah yaitu sebesar 50,57%. Hal tersebut berarti hanya 50,57% penduduk berusia 7-12 tahun yang bersekolah di SMA/SMK/MA <li data-bbox="692 618 1418 898">➤ Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Tanah Laut belum mencapai target 9 tahun. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016, RLS Kabupaten Tanah Laut baru mencapai 7,30 tahun yang berarti bahwa penduduk Kabupaten Tanah Laut dapat menyelesaikan sekolah hingga kelas 2 SMP (atau berhenti pada kelas 1 SMP) <li data-bbox="692 898 1418 1211">➤ Persebaran jumlah sekolah (terutama pendidikan menengah belum merata). Beberapa kecamatan di Kabupaten Tanah Laut hingga tahun 2016 hanya memiliki 1 unit SMA/SMK/MA seperti Kecamatan Takisung, Bumi Makmur, dan Bajuin. Selain itu, kualitas sarana dan prasarana sekolah terutama yang berada pada kecamatan yang wilayahnya jauh dari ibu kota belum memadai <li data-bbox="692 1211 1418 1357">➤ Masih terdapat sekitar 2,38% penduduk Kabupaten Tanah Laut yang berumur 15 tahun ke atas yang masih belum/tidak dapat membaca dan menulis; <li data-bbox="692 1357 1418 1603">➤ Tidak ada konsep bersama antara provinsi dan kabupaten terkait kerangka besar pendidikan sehingga tidak tercipta sinergitas dalam memajukan pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih tingginya disparitas kualitas pendidikan antar Kabupaten/Kota <li data-bbox="692 1603 1418 1783">➤ Belum optimalnya pengembangan database tenaga pendidik yang telah memperoleh sertifikasi sehingga kualitas tenaga pengajar yang kurang baik akan mempengaruhi output siswa <li data-bbox="692 1783 1418 1957">➤ Belum berkembangnya SMK yang berbasis potensi pengembangan kawasan lokal. Selain itu, implementasi kurikulum lokal pada pembelajaran pendidikan di Kabupaten Tanah Laut belum optimal
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="692 1957 1418 2027">➤ Fasilitas pelayanan kesehatan terutama rumah sakit di Kabupaten Tanah Laut masih

No.	Urusan Kewenangan	Permasalahan Pembangunan
		<p>terpusat di Kecamatan Pelaihari (ibukota kabupaten). Selain itu, fasilitas RSUD yang ada kondisinya belum memadai terutama dalam hal daya tampung jumlah pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="692 405 1418 613">➤ Pembangunan RSUD di Kabupaten Pelaihari secara fisik akan selesai dikerjakan pada tahun 2018. Untuk optimalisasi pelayanan RSUD, diperlukan pengadaan sarana dan prasarana terutama alat kesehatan sehingga pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD menjadi prima <li data-bbox="692 613 1418 792">➤ Perlu adanya kejelasan pengelolaan RSUD eksisting setelah adanya perpindahan layanan di gedung baru sehingga bangunan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Daerah <li data-bbox="692 792 1418 927">➤ Ketersediaan tenaga medis terutama dokter belum merata antar kecamatan dan sebagian besar masih berada di Kecamatan Pelaihari (36,58%). <li data-bbox="692 927 1418 1144">➤ Fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terkreditasi di Kabupaten Tanah Laut masih cukup tinggi yaitu sebesar 29%. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi hanya sebesar 49%. <li data-bbox="692 1144 1418 1496">➤ Belum seluruh balita di Kabupaten Tanah Laut mendapatkan imunisasi lengkap. Persentase balita dengan cakupan imunisasi tertinggi adalah pada imunisasi polio 1 yaitu sebesar 96,70%, diikuti BCG sebesar 95,40%, dan DPT 1 sebesar 89,80%. Dengan masih banyaknya balita yang belum mendapatkan imunisasi lengkap, maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai imunisasi kesehatan pada balita <li data-bbox="692 1496 1418 1608">➤ Masih cukup tingginya prevalensi ibu hamil KEK dimana persentasenya hingga tahun 2016 mencapai 17,5% <li data-bbox="692 1608 1418 1749">➤ Masih tingginya kasus penyakit di Kabupaten Tanah Laut seperti penyakit hipertensi primer (24.303 kasus), ISPA (17.498 kasus), dan Dyspesia (11.674 kasus). <li data-bbox="692 1749 1418 1921">➤ Belum terpenuhinya target SPM pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Tanah Laut sesuai standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan <li data-bbox="692 1921 1418 2029">➤ Banyak masyarakat di Kabupaten Tanah Laut yang belum memiliki kartu kesehatan (Kartu Indonesia Sehat maupun BPJS) sehingga akan

No.	Urusan Kewenangan	Permasalahan Pembangunan
		<p>menyulitkan dalam akses pelayanan fasilitas kesehatan terutama rumah sakit</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih banyak masyarakat belum menerapkan pola hidup bersih dan sehat dimana persentasenya hanya sebesar 40%. Hal tersebut menjadi indikasi penyebab masih tingginya kasus diare di masyarakat (5.572 kasus)
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih terdapat jalan kabupaten di Kabupaten Tanah Laut dalam kondisi rusak. Pada tahun 2016, jalan dalam kondisi rusak sepanjang 37,94 km, sedangkan kondisi rusak berat sepanjang 3,41 km ➤ Masih banyak jalan yang menjadi kewenangan kabupaten perlu ditingkatkan kualitas permukaannya dari kerikil dan tanah menjadi aspal. Panjang jalan dengan permukaan kerikil hingga tahun 2016 sepanjang 917,1 km dan permukaan tanah sepanjang 92,95 km ➤ Belum terbangunnya jalan penghubung antara sentra produksi menuju pelabuhan dan perlunya pembangunan jalan alternatif lingkaran dalam dan luar. Selain itu, perlu adanya pembangunan ruas jalan strategis kabupaten seperti antara ruas Bentok Darat-Imban, Riam Pinang-Riam Kanan, Telaga-Panjatan-Manaran, Lok Serapang-Awang Makmur-Panggung, dan Kunyit-Tiang Aji ➤ Belum optimalnya pemeliharaan saluran irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten ➤ Dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, maka terdapat potensi yang tinggi abrasi kawasan pantai. Wilayah yang berpotensi terkena abrasi berada di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Kurau, Takisung, Jorong, Panyipatan, Kintap, dan Bumi Makmur ➤ Masih tingginya rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yang belum memperoleh sanitasi layak. Persentasenya pada tahun 2016 secara keseluruhan adalah sebesar 62,02% dimana sanitasi tidak layak di perkotaan sebesar 50,76%, sedangkan di perdesaan sebesar 65,89% ➤ Tingginya egosektoral dalam pelaksanaan program pembangunan di samping kurang diperhatikannya perspektif ruang dan perencanaan tata ruang daerah yang telah ditetapkan;

No.	Urusan Kewenangan	Permasalahan Pembangunan
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum memadainya pemahaman pelaku pembangunan daerah terhadap perencanaan yang berbasis pada perspektif tata ruang di wilayah Kabupaten Tanah Laut
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih tingginya kawasan permukiman di Kabupaten Tanah Laut yang termasuk dalam kawasan kumuh dimana luasannya mencapai 340 Ha ➤ Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Tanah Laut dimana jumlahnya hingga tahun 2017 mencapai 17.000 unit rumah ➤ Belum tersedianya legislasi daerah terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman seperti penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun, norma kebijakan bidang perumahan, dan penanganan kawasan kumuh permukiman ➤ Masih terdapat <i>backlog</i> (kekurangan) rumah sekitar 80.000 unit di Kabupaten Tanah Laut
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat karena belum optimalnya pemberantasan penyakit masyarakat. Pada tahun 2014, jumlah tindak pidana sebanyak 193 kasus, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi sebanyak 253 kasus ➤ Masih belum optimalnya penegakan Perda ➤ Masih belum optimalnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu ➤ Adanya ancaman budaya dari luar yang menggerogoti ketenteraman dan kenyamanan masyarakat ➤ Perlunya peningkatan religiusitas masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan ➤ Kabupaten Tanah Laut termasuk kabupaten yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori tinggi dengan keseluruhan skor sebesar 178. Potensi bencana yang tinggi tersebut dapat mengancam ketenteraman hidup masyarakat ➤ Belum optimalnya kapasitas aparat daerah dalam penanggulangan bencana ➤ Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial ➤ Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap

No.	Urusan Kewenangan	Permasalahan Pembangunan
		kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
6.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cakupan PMKS yang menerima bantuan sosial belum memnuhi target SPM dimana persentasenya sebesar 18,47% ➤ Masih kurangnya jumlah tenaga yang terdidik/terlatih dalam menangani masalah kesejahteraan sosial ➤ Belum optimalnya pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial pada masyarakat ➤ Belum optimalnya kelembagaan dan partisipasi penanganan masalah kesejahteraan sosial ➤ Belum tersedianya data yang valid tentang warga komunitas adat terpencil (KAT), karena belum adanya pemetaan sosial ➤ Merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial kemasyarakatan baik di wilayah perkotaan maupun di pesisir
II.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	
1.	Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Tanah Laut masih cukup rendah dimana angkanya pada tahun 2015 sebesar 68,72%. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa masih banyak penduduk pada angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan/menganggur. Dalam kurun waktu 2012-2015, TPAK Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan dari sebesar 74,04% pada tahun 2012 menjadi sebesar 68,72%. ➤ Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tanah Laut terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-2015 dari sebesar 2,99% pada tahun 2013 menjadi sebesar 4,53% pada tahun 2015 ➤ Pencari kerja di Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh lulusan SMA dimana persentasenya pada tahun 2016 sebesar 50% ➤ Belum terealisasinya pemetaan/data dukung kebutuhan tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut sehingga belum dapat direncanakan secara baik kebutuhan tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terbatasnya akses sumber daya dan peran serta perempuan dalam pembangunan. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka IDG yang baru mencapai 68,36 ➤ Rendahnya peranan perempuan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia dalam

No.	Urusan Kewenangan	Permasalahan Pembangunan
		<p>pembangunan. Hal tersebut ditunjukkan dengan rasio IPG terhadap IPM yang nilainya lebih dari 100% yang berarti masih terjadi kesenjangan gender di Kabupaten Tanah Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya pemenuhan hak anak/rendahnya pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak dimana kelas Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam kelas pratama ➤ Masih cukup tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Persentase penduduk perempuan yang menjadi korban kriminalitas di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2016 baik di wilayah perkotaan dan perdesaan sebesar 0,30% ➤ Jika dilihat dari jenis pekerjaannya, maka pekerjaan di sektor informal yang paling banyak ditemukan tenaga kerja anak. Faktor pendidikan dan ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab tingginya angka tenaga kerja di bawah umur di Kabupaten Tanah Laut ➤ Belum optimalnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan berbagai bidang pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Laut. Banyak kegiatan yang diarahkan untuk pengarusutamaan gender diidentikan hanya untuk keterlibatan perempuan saja. Munculnya dikotomi dasar tentang arti pengarusutamaan gender ini secara tidak langsung justru membuat program pemberdayaan dan pengarusutamaan gender tidak dapat berjalan dengan optimal. ➤ Masih kurangnya peranan organisasi perempuan dan lembaga terhadap perlindungan perempuan dan anak ➤ Belum optimalnya SKPD dalam Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ➤ Masih belum optimalnya partisipasi perempuan dalam legislatif dimana persentasenya belum mencapai 30%. Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2016 sebesar 18%
3.	Pangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rata-rata komsumsi kalori baik di perdesaan maupun perkotaan di Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan. Pada tahun 2015, konsumsi kalori di wilayah perkotaan dan perdesaan sebesar 2.312,22 kkal dan pada tahun 2016 menurun menjadi 2.158,41 kkal ➤ Rata-rata komsumsi protein di Kabupaten

No.	Urusan Kewenangan	Permasalahan Pembangunan
		<p>Tanah Laut mengalami penurunan. Pada tahun 2015, konsumsi protein adalah sebesar 65,21 gram dan pada tahun 2016 menurun menjadi 61,99 gram</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Diversifikasi sumber pangan lokal relatif masih terbatas. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat masih terbatas jumlahnya yaitu 98 KRPL pada tahun 2017 ➤ Peningkatan akses pangan masyarakat mensyaratkan akses terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal masih terbatas ➤ Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku/petani pengolah pangan sebagai salah satu penentu kapasitas supply bahan pangan ➤ Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas petugas penyuluh/pendamping pengolahan pangan dan gizi untuk mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan pangan ➤ Masih kurangnya promosi olahan pangan lokal dan kampanye diversifikasi pangan sebagai salah satu kunci dalam pencapaian diversifikasi pangan dan ketahanan pangan daerah ➤ Belum optimalnya fungsi cadangan pemerintah dalam mengendalikan inflasi terutama berkaitan dengan inflasi pangan
4.	Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih cukup tingginya konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut ➤ Belum optimalnya pemetaan tanah hak milik di Kabupaten Tanah Laut ➤ Belum optimalnya optimalnya pelayanan administrasi pertanahan ➤ Masih cukup tingginya tanah di Kabupaten Tanah Laut yang belum bersertifikat
5.	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun aparaturnya terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sehingga berdampak pada kurangnya penegakan aturan di bidang lingkungan hidup ➤ Belum optimalnya pelayanan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan ➤ Belum optimalnya pelayanan penerbitan izin lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ➤ Belum tersusunnya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

No.	Urusan Kewenangan	Permasalahan Pembangunan
		<p>Hidup (RPPLH) dan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya penegakan pelanggaran lingkungan hidup ➤ Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik pencemaran air dan udara ➤ Masih terbatasnya prasarana utilitas berupa penerangan jalan umum dan masih banyak jaringan penerangan jalan umum yang liar ➤ Terbatasnya kapasitas TPA Bakunci dan belum tersedianya Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Tanah Laut ➤ Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana taman dan ruang terbuka hijau (RTH) ➤ Belum tercapainya RTH sebesar 30% dari luas wilayah kota
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan relatif masih kurang ➤ Belum optimalnya data kependudukan di Kabupaten Tanah Laut sehingga masih terdapat perbedaan antara data yang berasal dari perangkat daerah dengan BPS ➤ Kepemilikan e-KTP dan akta kelahiran di Kabupaten Tanah Laut belum optimal. Target secara nasional pada tahun 2019 mencapai 100% penduduk telah terjangkau oleh e-KTP dan memiliki akta kelahiran
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset desa. Masih rendahnya kualitas aparatur di tingkat desa dalam menjalankan fungsi dan pelayanan kepada masyarakat. ➤ Pendapatan desa masih rendah karena belum terbentuk serta dimanfaatkannya BUMDES sebagai sumber pendapatan desa. Belum optimalnya penggunaan dana desa sebagai penggerak perekonomian di masing-masing desa ➤ Belum optimalnya pemetaan potensi desa sehingga usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat desa berjalan di tempat. Kapasitas masyarakat dalam melakukan usaha-usaha produktif masih rendah ➤ Sebagian besar desa di Kabupaten Tanah Laut belum memiliki RPJMD Desa dan RKP Desa ➤ Belum optimalnya pembinaan lembaga

No.	Urusan Kewenangan	Permasalahan Pembangunan
		<p>pemberdayaan masyarakat desa dan kelompok masyarakat pembangunan desa</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya kegiatan pembinaan adat budaya desa. Alokasi dana desa sebagian besar diperuntukan untuk pembangunan fisik desa
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanah Laut. Tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2016 adalah sebesar 1,54% dan lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang sebesar 1,49% ➤ Rendahnya tingkat kesadaran untuk menjadi akseptor KB. Rasio akseptor KB di Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan selama periode 2012-2016. Pada tahun 2012, rasio akseptor KB di Kabupaten Tanah Laut sebesar 82,03% dan pada tahun 2016 menurun menjadi sebesar 78,16% ➤ Belum optimalnya pelayanan kesehatan reproduksi disosialisasikan dan dilaksanakan bagi masyarakat yang mengakibatkan belum terpenuhi layanan Unmet Need dimana persentasenya sebesar 25,22% di Kabupaten Tanah Laut ➤ Belum optimalnya upaya pendewasaan usia perkawinan sehingga pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga tidak optimal
9.	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum terkoneksinya akses jalan dari Pelabuhan Laut Tanjung Dewa menuju sentra produksi ➤ Belum optimalnya fungsi Terminal Tanah Habang Pelaihari. Hal tersebut terjadi karena banyak angkutan umum yang enggan melakukan aktivitas bongkar muat barang dan menaikkan/menurunkan penumpang di terminal ➤ Belum selesainya proyek pembangunan Pelabuhan Swarangan sehingga memperlambat arus barang masuk dan keluar di Kabupaten Tanah Laut ➤ Sarana dan prasarana transportasi umum di Kabupaten Tanah Laut dirasakan kurang memadai sehingga minat masyarakat menggunakan angkutan menjadi rendah. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilitasnya ➤ Belum optimalnya penerimaan PAD dari bidang perhubungan

No.	Urusan Kewenangan	Permasalahan Pembangunan
10.	Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Banyak wilayah yang masih terbatas untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan informasi dan komunikasi bagi masyarakat. Beberapa kecamatan di Kabupaten Tanah Laut belum memiliki sambungan jaringan internet <i>mobile</i> ➤ Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung di berbagai bidang pembangunan daerah. Informasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat ➤ Belum adanya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat ➤ Masih terdapat penduduk yang belum memiliki telepon seluler di Kabupaten Tanah Laut dengan persentase 34,94% ➤ Persentase penduduk yang mengakses internet di Kabupaten Tanah Laut masih rendah yaitu sebesar 22,52%
11.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase koperasi aktif di Kabupaten Tanah Laut masih rendah ➤ Sebagian besar koperasi di Kabupaten Tanah Laut masih bergerak pada kegiatan simpan pinjam ➤ Belum optimalnya pendampingan penyediaan permodalan dan pembiayaan bagi usaha kecil dan promosi produk UKM masih terbatas ➤ Belum terbangunnya jaringan kemitraan antara UKM dengan pelaku usaha lain sebagai induk semang dan tingkat produktivitas UKM masih rendah. Belum tersusunnya data UMKMK potensial yang bermitra dengan PMA/PMDN
12.	Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nilai penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Tanah Laut cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Pada tahun 2013, nilai penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 2,28 triliun menjadi sebesar Rp 37,22 miliar pada tahun 2016 ➤ Rasio daya serap tenaga kerja yang berasal dari penanaman modal asing menurun dari sebesar 0,075 pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,054 pada tahun 2016. Hal yang sama juga terjadi pada rasio penyerapan tenaga kerja dari penanaman modal dalam negeri juga menurun dari sebesar 0,003 (2015) menjadi sebesar 0,002 (2016)

No.	Urusan Kewenangan	Permasalahan Pembangunan
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daya saing Kabupaten Tanah Laut dalam hal PMA antar kabupaten/kota masih tertinggal dibandingkan wilayah lain di Kalimantan Selatan. Posisi Kabupaten Tanah Laut dalam hal PMA berada di posisi 5 ➤ Daya saing Kabupaten Tanah Laut dalam hal PMDN antar kabupaten/kota masih tertinggal dibandingkan wilayah lain di Kalimantan Selatan. Posisi Kabupaten Tanah Laut dalam hal PMDN berada di posisi 6 ➤ Belum adanya regulasi terkait tentang penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut, serta regulasi tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut
13.	Kepemudaan dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga antar kecamatan di Kabupaten Tanah Laut ➤ Minimnya kompetisi olahraga dalam daerah karena keterbatasan SDM perangkat pertandingan ➤ Belum optimalnya pembinaan prestasi olahraga di Kabupaten Tanah Laut sehingga belum muncul atlet unggulan Kabupaten Tanah Laut di tingkat provinsi maupun nasional ➤ Belum optimalnya peran Pemuda Penggerak Pembangunan dan Perdesaan di Kabupaten Tanah Laut ➤ Belum terbentuknya Forum Pemuda Tanah Laut (FPTL)
14.	Statistik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah Belum adanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Tanah Laut yang berisi seluruh data pada setiap aspek pembangunan ➤ Kurangnya kordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah ➤ Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah
15.	Persandian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah ➤ Kurangnya sumberdaya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah
16.	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya pembinaan pegiat seni dan budaya di Kabupaten Tanah Laut ➤ Belum terlaksananya festival tahunan Tanah Laut yang menampilkan kebudayaan Tanah

No.	Urusan Kewenangan	Permasalahan Pembangunan
		Laut
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Tanah Laut. Selain itu, cagar budaya yang ada di Kabupaten Tanah Laut seperti Benteng Belanda Tabanio, Cagar Budaya Desa Riam Andungan, dan Bunker Jepang belum dikelola secara terpadu
17.	Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya pelayanan perpustakaan daerah ➤ Sistem perpustakaan digital di Kabupaten Tanah Laut belum terlaksana. Selain itu, pelayanan perpustakaan masih dilakukan secara manual ➤ Keterbatasan jumlah perpustakaan keliling. Pada tahun 2017, jumlah perpustakaan keliling di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 1 unit
18.	Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum semua SKPD/Pemerintah Desa/BUMD memiliki unit pengelola arsip tersendiri sehingga keberadaan arsip baik dinamis dan statis belum mendapatkan penanganan secara khusus ➤ Kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan di Kabupaten Tanah Laut masih rendah. Pengadaan formasi pegawai belum mengacu kebutuhan personil sesuai disiplin ilmu yang dibutuhkan ➤ Sosialisasi tentang kearsipan belum terlaksana secara maksimal ➤ Fasilitas-fasilitas pendukung kearsipan belum sesuai standar kearsipan baik di depo arsip dan unit kearsipan
III.	Urusan Pilihan	
1.	Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi yang tinggi di bidang perikanan tangkap laut karena wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Namun dengan adanya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mengelola sumber daya tersebut mengalami keterbatasan ➤ Masih kurangnya pemanfaatan dan pengolahan hasil produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap laut di Kabupaten Tanah Laut cenderung fluktuatif walaupun pada tahun 2016 mengalami peningkatan signifikan sebesar 31,59% ➤ Hasil perikanan masih dipasarkan dalam bentuk segar atau belum ditangani dengan

No.	Urusan Kewenangan	Permasalahan Pembangunan
		<p>baik untuk proses penanganan dan pengolahan lebih lanjut. Karena itu, pengembangan industri pascapanen (pengolahan) menjadi kegiatan bisnis yang perlu dikembangkan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih terbatasnya SDM, permodalan, dan infrastruktur di bidang perikanan dan industri perikanan ➤ Belum adanya pengembangan industri pengolahan terpadu di bidang perikanan. Usaha pengolahan ikan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai sumber PAD, penyerap tenaga kerja yang banyak. Oleh karena itu pengembangan industri pengolahan perlu dilakukan secara terpadu dalam satu klaster yang saling terkait (sistem minabisnis) ➤ Masih rendahnya mutu bahan baku industri perikanan ➤ Masih terbatasnya penerapan teknologi tepat guna untuk mengembangkan produk dengan daya saing tinggi berbasis usaha rakyat (masyarakat lokal) di Kabupaten Tanah Laut ➤ Masih terbatasnya akses terhadap pasar produksi. Kebijakan nasional pelarangan alat tangkap menyebabkan banyak kapal yang tidak beroperasi apabila menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan eks asing ➤ Masih banyaknya produk usaha perikanan terutama hasil olahan tanpa label, sehingga mengurangi <i>traceability</i> produk dan nilai tambah yang akan diperoleh daerah/negara ➤ Masih sulitnya pengembangan budidaya perikanan rumput laut dan unggulan lain seperti ikan kerapu terutama berkaitan karena kesulitan pemasaran produk dan ketersediaan benih dan indukan berkualitas ➤ Masih terbatasnya pakan ikan untuk budidaya perikanan. Salah satu masalah budidaya perikanan rakyat adalah masalah pakan ➤ Produk khas Kabupaten Tanah Laut yang berasal komoditas perikanan belum berkembang
2.	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah pengunjung obyek wisata di Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan. Pada tahun 2012, jumlah pengunjung secara keseluruhan sebanyak 196.201 pengunjung dan pada tahun 2016 berkurang menjadi sebanyak 104.145 pengunjung ➤ Daya tarik objek wisata di Kabupaten Tanah

No.	Urusan Kewenangan	Permasalahan Pembangunan
		<p>Laut perlu dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain mempercantik objek wisata, hal lain yang diperlukan adalah peningkatan akses jalan menuju kawasan wisata, sarana pendukung seperti hotel dan restoran, dan mempersiapkan tenaga kerja pariwisata yang berkualitas</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata di Kabupaten Tanah Laut ➤ Belum optimalnya PAD yang diperoleh dari pengembangan sektor pariwisata. Sesungguhnya, dengan cukup banyak kunjungan wisatawan, Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan potensi PAD melalui penarikan berbagai jenis retribusi ➤ Belum sepenuhnya diterapkan prinsip-prinsip pengembangan yang dipakai dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tanah Laut yang mencakup prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan (<i>sustainable tourism development</i>) dan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (<i>community based tourism development</i>)
3.	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sebagian besar lahan sawah di Kabupaten Tanah Laut mengandalkan jaringan non irigasi. Lahan sawah yang mengandalkan jaringan irigasi seluas 6.862 Ha, sedangkan lahan sawah non irigasi seluas 66.982 Ha. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jaringan irigasi teknis sebagian besar belum menjangkau lahan sawah yang ada ➤ Masih terdapat lahan yang belum dimanfaatkan sebagai lahan budidaya dimana luasannya pada tahun 2016 mencapai 8.880 Ha ➤ Produksi dan produktivitas komoditas pertanian pangan dan hortikultura belum optimal ➤ Keterbatasan akses pasar produk pangan ➤ Tidak tersedia gudang penyimpanan produk pertanian ➤ Keterbatasan petani dalam mengakses pupuk bersubsidi ➤ Terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan produktif ke lahan perkebunan atau untuk penggunaan lain ➤ Masih rendahnya kapasitas SDM petani dalam meningkatkan produksi ➤ Kegiatan layanan pelatihan dan pendampingan oleh penyuluh sangat terbatas

No.	Urusan Kewenangan	Permasalahan Pembangunan
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani pekebun untuk mengaplikasikan pupuk yang baik serta perawatan tanaman perkebunan dengan baik ➤ Ketersediaan sumber bibit perkebunan yang berkualitas sangat terbatas (tidak ada kebun induk tanaman perkebunan) ➤ Jumlah petugas penyuluh perkebunan sangat kurang dan terjadinya penurunan mutu genetik ternak ➤ Usaha peternakan belum dilakukan dengan intensif (masih menggunakan cara tradisional dan ternak tidak dikandangkan). Selain itu, lahan penggembalaan peternakan rakyat mengalami penurunan luasan ➤ Belum tersedia lahan untuk penanaman tanaman pakan ternak ➤ Harga pakan ternak mahal/tidak terjangkau petani/peternak; Bahan baku sumber pakan ternak kurang (utamanya jagung) ➤ Jumlah dokter hewan sangat terbatas dan tidak dapat menjangkau seluruh kabupaten. Hal tersebut mengakibatkan masih terjadinya kematian hewan ternak di masyarakat ➤ Distribusi petugas penyuluh sangat tidak merata dan kurang. Selain itu, kapasitas petugas penyuluh masih relatif rendah ➤ Hasil usaha peternakan belum optimal sehingga menurunkan produksi ternak. Selain itu, belum adanya pemetaan potensi agribisnis peternakan sehingga belum menjadi daya tarik bagi investor ➤ Terjadinya pemotongan betina produktif. Belum semua pelaku usaha di rumah potong hewan mengetahui larangan pemotongan betina produktif yang diatur dalam UU Nomor 41 tentang peternakan dan kesehatan hewan ➤ Saat ini sarana dan prasarana yang ada di RPH Sarang Halang belum memenuhi standar baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga diperlukan penambahan sarana dan prasarana agar target pangan asal hewan yang dihasilkan RPH dapat tercapai. Selain itu, daya tampung pasar hewan terbatas
4.	Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi yang tinggi di sektor kehutanan. Namun dengan adanya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mengelola sumber daya tersebut mengalami

No.	Urusan Kewenangan	Permasalahan Pembangunan
		keterbatasan (kewenangan provinsi). Kewenangan kabupaten dalam urusan kehutanan hanya mengurus Taman Hutan Rakyat (Tahura)
5.	Energi dan Sumber Daya Mineral	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi yang tinggi di bidang pertambangan. Namun dengan adanya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mengelola sumber daya tersebut mengalami keterbatasan (kewenangan provinsi) ➤ Belum dimulainya operasionalisasi PLT Bio Gas Berbasis Limbah Sawit (POME) di Kabupaten Tanah Laut karena masih menunggu proses hibah dari pemerintah pusat
6.	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ekspor unggulan di Kabupaten Tanah Laut masih didominasi komoditas tambang ➤ Belum terealisasinya revitalisasi pasar rakyat di berbagai kecamatan. Perlu adanya perbaikan fasilitas pasar rakyat seperti jalan lingkungan, toilet, dan fasilitas lainnya ➤ Bangunan yang ada di pasar lama belum dimanfaatkan secara optimal ➤ Belum optimalnya penerimaan PAD di sektor perdagangan. Salah satu sumber PAD yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang perdagangan adalah rertribusi tera ulang pedagang ➤ Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau serta terhindar dari praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat. Selain itu, hal yang mendorong terjadinya praktik yang tidak sehat tersebut adalah belum maksimalnya tingkat kesadaran konsumen dalam menggunakan haknya sebagai konsumen ➤ Pelaporan arus barang keluar masuk, yang merupakan kewajiban pelaku usaha belum terlaksana dengan baik
7.	Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum terbangunnya kawasan industri Jorong karena masalah pembebasan lahan ➤ Belum terbangunnya sentra IKM terpadu di Kabupaten Tanah Laut seperti yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 bahwa di setiap wilayah Kabupaten terutama di luar Pulau Jawa memiliki minimal satu sentra IKM, yang dapat berada di dalam atau di luar Kawasan Industri

No.	Urusan Kewenangan	Permasalahan Pembangunan
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lemahnya akses permodalan untuk industri kecil dan menengah ➤ Masih banyak potensi hasil-hasil pertanian dan perikanan kelautan yang belum diolah secara maksimal dalam skala industri. Selain itu, kualitas SDM dalam pengolahan produk dan peningkatan kualitas/mutu masih lemah ➤ Kewajiban perusahaan pemegang izin usaha industri baik skala menengah dan besar di Kabupaten Tanah Laut sampai saat ini belum menyampaikan laporan yang terkait dengan nilai investasi, kapasitas terpasang, realisasi produk dan penjualan hasil produk yang dihasilkan
8.	Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya pengelolaan transmigrasi lokal antar kecamatan dan masih kurangnya penataan lokasi transmigrasi menjadi kawasan transmigrasi terpadu ➤ Program transmigrasi yang direncanakan pada tidak bisa berjalan dengan optimal karena terkendala pembebasan lahan seluas 446 hektar di Desa Padang Luas dan Desa Kurau Kematan Kurau yang kepemilikan tanahnya diakui oleh penduduk
IV.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	
1.	Administrasi Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum adanya penegasan batas wilayah antara Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Tanah Bumbu ➤ Jaringan kerjasama yang dilakukan masih terbatas pada wilayah regional ➤ Sarana dan prasarana kecamatan masih belum optimal dalam pelayanan kepada masyarakat ➤ Pemilihan kepala desa belum dilakukan secara serentak sehingga visi dan misi RPJM Desa terkadang tidak selaras dengan visi dan misi dalam RPJMD ➤ Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan selama ini belum sepenuhnya melibatkan <i>civil society</i> ➤ Nilai dan budaya kerja yang profesional, jujur, dan bersih perlu direvitalisasi di setiap jenjang birokrasi (Pembentukan kelompok budaya kerja sebagai wadah diskusi untuk memecahkan permasalahan pekerjaan) ➤ Prinsip <i>money follow function</i>, <i>money follow organization</i> harus mulai ditinggalkan, menjadi <i>money follow programme</i> ➤ Belum optimalnya ketersediaan data yang akurat dan komprehensif untuk pembangunan

No.	Urusan Kewenangan	Permasalahan Pembangunan
		<p>daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah ➤ Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar-unit kerja serta antar-instansi ➤ Belum terbentuknya BUMD yang mengelola Kawasan Industri Jorong ➤ Belum dimulainya penerapan pelaporan kegiatan LPUK berbasis online menggunakan sistem aplikasi ➤ Belum terciptanya pemerataan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ➤ Belum optimalnya kinerja TPID dalam mengendalikan inflasi daerah ➤ Kurangnya pembinaan tenaga pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah agar menjadi tenaga profesional sehingga pelaksanaan pengadaan dapat berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan yaitu efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif dan akuntabel
2.	Perencanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integratif antar wilayah serta sektor perekonomian daerah ➤ Belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan baik pada tingkat daerah maupun OPD ➤ Belum optimalnya kordinasi antar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran horizontal dengan OPD-OPD, maupun dengan pemerintah Pusat dan Provinsi ➤ Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah ➤ Masih belum optimalnya pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan
3.	Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum terintegrasi antara SIMDA Keuangan dengan SIMDA BMD dan SIMDA Pendapatan ➤ Belum ada fakta integritas mulai pimpinan daerah sampai dengan pimpinan SKPD dalam mempertahankan opini WTP ➤ Masih terjadinya perbedaan akun anggaran dengan akun pertanggungjawaban yang masih harus diperbaharui dengan konversi akun ➤ Perbaiki sistem pengendalian internal terkait pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disertai peningkatan dan pengembangan penglolaan pemanfaatn BMD

No.	Urusan Kewenangan	Permasalahan Pembangunan
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan PP nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ➤ Belum adanya pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan pelaporan dana desa ➤ Belum adanya pemahaman yang sama terkait mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ➤ Belum optimalnya pengelolaan Aset Daerah ➤ Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah yang ditandai dengan belum optimalnya kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan daerah ➤ Masih rendahnya kontribusi unit usaha BUMD dalam pengelolaan potensi unggulan daerah terhadap PAD ➤ Belum akuratnya database pajak daerah ➤ Belum optimalnya penggalian potensi dan pemetaan potensi pendapatan daerah
4.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan ➤ Masih rendahnya profesionalisme birokrasi ➤ Belum berkembangnya sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tanah Laut
5.	Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya inovasi pembangunan daerah untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat ➤ Terbatasnya sumber daya aparatur dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah ➤ Belum dimanfaatkannya hasil penelitian sebagai bahan pengambilan kebijakan daerah
6.	Pengawasan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran organisasi perangkat daerah ➤ Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh organisasi perangkat daerah

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat memerlukan terciptanya kondisi-kondisi dasar yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) penciptaan sektor ekonomi yang kokoh serta; (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memberikan kesempatan peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi yang berarti memberikan kesempatan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun peningkatan kegiatan ekonomi tidak akan dapat berjalan apabila stabilitas ekonomi tidak tercipta. Di samping itu, stabilitas ekonomi juga melindungi agar peningkatan pendapatan masyarakat tidak tergerus oleh kenaikan harga. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi merupakan kunci utama peningkatan kesejahteraan rakyat. Meskipun demikian, keberhasilan hal tersebut di atas tidak secara otomatis menjamin terciptanya peningkatan kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat luas. Penguatan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata memerlukan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada kenyataannya perekonomian daerah Kabupaten Tanah Laut sangat bergantung dengan kondisi perekonomian nasional, karena hal-hal wilayah Kabupaten tidak cukup mampu berpengaruh secara nasional, sedangkan variabel ekonomi nasional sangat berpengaruh terhadap variabel ekonomi daerah. Badan

Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2017 tumbuh sebesar 5,01 persen dibandingkan pada kuartal I-2016 sebesar 4,92 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,10 persen. Disusul dari sektor jasa lainnya sebesar 8,01 persen, serta dari sektor transportasi dan pergudangan sebesar 7,65 persen.

Selain itu, ekonomi Indonesia pada kuartal I-2017 terhadap kuartal IV-2016 yang turun sebesar 0,34 persen (q-to-q), dari sisi produksi penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha. Sedangkan dari sisi pengeluaran disebabkan oleh kontraksi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang turun 45,54 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto yang turun 5,42 persen.

Adapun struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I-2017 didominasi oleh kelompok Provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni sebesar 58,49 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,95 persen, dan Pulau Kalimantan Sebesar 8,33 persen.

Dengan melihat kondisi di atas kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tanah Laut adalah dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi sektor swasta dan pengeluaran pemerintah. Perkembangan ekonomi tersebut di atas dapat dijadikan acuan untuk daerah, sehingga kebijakan daerah adalah dengan mengantisipasi melalui perhitungan secara cermat tentang satuan belanja daerah, gaji PNS, sehingga inflasi dapat ditekan atau dikendalikan.

3.1.1 Kondisi Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan

Perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan III- 2017 tumbuh sebesar 6,44% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,03% (yoy). Pada sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi bersumber dari peningkatan konsumsi pemerintah dan investasi. Peningkatan pertumbuhan konsumsi pemerintah utamanya didorong oleh adanya dropping gaji ke-13 yang tertunda pada triwulan sebelumnya dan tidak adanya tekanan fiskal seperti periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu peningkatan investasi didorong oleh investasi bangunan baik pemerintah maupun swasta. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga (RT) dan ekspor tumbuh melambat. Dari sisi penawaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi didorong oleh meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas dan air (LGA), konstruksi dan jasa lainnya. Masuknya masa panen padi lokal serta perbaikan kondisi cuaca mendorong produksi tabaka dan kelapa sawit. Kondisi harga yang masih cukup baik mendorong produksi karet. Meningkatnya produksi kelapa sawit dan karet mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan.

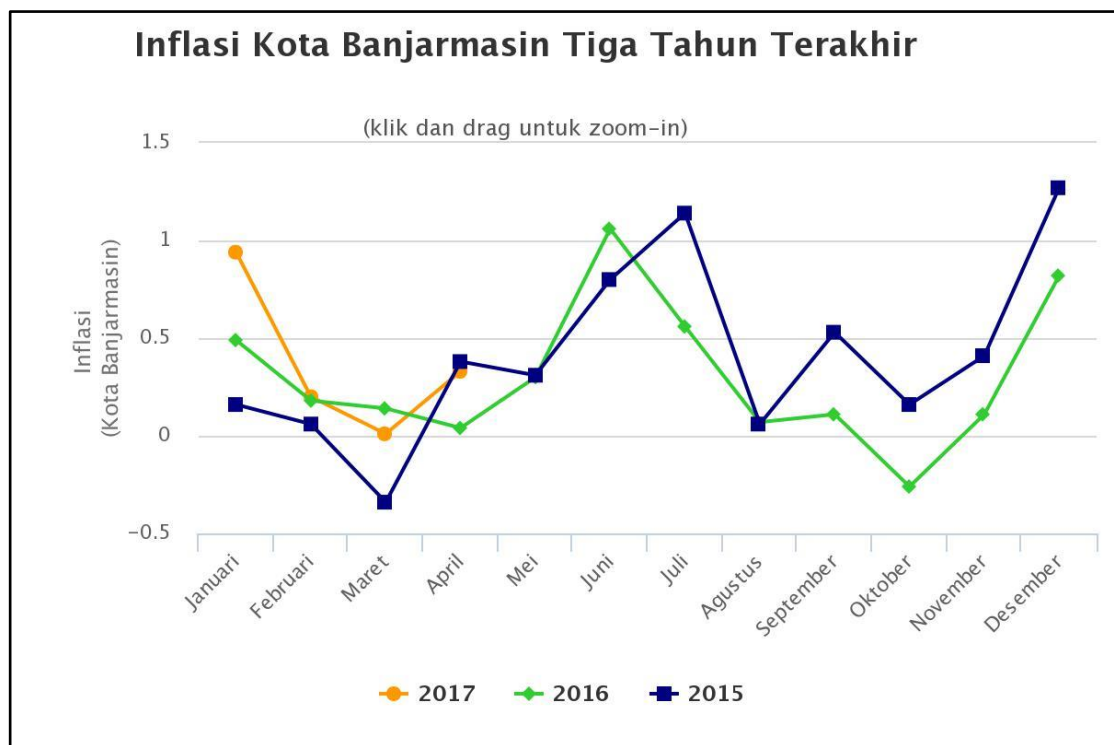
Dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan selatan pada triwulan III-2017 didorong oleh meningkatnya belanja pemerintah dan investasi.

3.1.1.1 PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu Negara. Data inflasi untuk Kabupaten tanah Laut saat ini belum tersedia, sehingga mengambil dari data inflasi wilayah terdekat yaitu Banjarmasin. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi BPS

Kalimantan Selatan perkembangan inflasi selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2015 - 2017 adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 Grafik perkembangan rata-rata inflasi kota Banjarmasin



Bulan April 2017, di Kota Banjarmasin terjadi Inflasi sebesar 0,33 persen. Laju inflasi kumulatif tahun 2017 (April 2017 terhadap Desember 2016) sebesar 1,49 persen dan laju inflasi “*year on year*” adalah 4,33 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kota Banjarmasin antara lain tarip listrik, angkutan udara, ikan gabus, nasi dengan lauk, emas perhiasan. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga dengan andil deflasi tertinggi antara lain bawang merah, daging ayam ras, gula pasir, semangka, sabun detergen bubuk/cair.

Kondisi ini menggambarkan inflasi di Banjarmasin, sehingga dapat juga diartikan bahwa Kabupaten Tanah Laut masih berada pada kondisi yang baik.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut

3.1.2.1. PDRB PER KAPITA

Data PDRB sering digunakan sebagai interpretasi keberhasilan pembangunan perekonomian daerah oleh pemerintah. Adapun data PDRB ini dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan dengan tujuan untuk melihat struktur ekonomi. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar perhitungan. PDRB atas dasar harga konstan ini bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi baik secara global maupun pada masing-masing sektor perekonomian.

Pada tahun 2016 nilai total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Tanah Laut adalah sejumlah 11,4 triliun dimana nilai total PDRB ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 10,81 triliun pada tahun 2015 dan 10,20 triliun pada tahun 2014.

Tabel 3.1. PDRB Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2016 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB ADHB	PDRB ADHK
(1)	(2)	(3)
2013	9.411.306,58	8.328.542,84
2014	10.204.693,64	8.594.166,59
2015*	10.811.707,68	8.841.195,04
2016**	11.400.248,19	9.129.768,95

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB atas dasar harga berlaku ini dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran ekonomi, dan struktur ekonomi yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Nilai PDRB dari tahun ke tahun yang terus meningkat ini menunjukkan adanya perekonomian di Kabupaten Tanah Laut yang terus meningkat dimana semakin terpenuhinya sumber daya ekonomi yang selanjutnya dapat menunjang perkembangan PDRB yang semakin baik setiap tahunnya. Begitu pula dengan pergeseran ekonomi yang dapat dilihat dari nilai PDRB setiap tahunnya dimana nilai PDRB yang semakin meningkat menunjukkan perekonomian di Kabupaten Tanah Laut yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jika dilihat dari struktur ekonominya, nilai PDRB yang semakin besar setiap tahunnya di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan bahwa nilai *share* masing-masing kategori penyusun berkembang secara positif. Namun demikian nilai *share* kategori tertentu bisa saja berkembang negatif tergantung dari pengaruh komponen penyusun kategori tersebut.

Berdasarkan hasil penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2016, dapat dilihat bahwa nilai *share* produk Pertambangan dan Penggalan masih memiliki nilai paling besar kontribusinya sebagai penyusun struktur perekonomian di Kabupaten Tanah Laut sebesar

25,05 persen. Namun pada periode tahun 2012-2016 persentase dari produk ini cenderung menurun jumlah kontribusinya dimana rata-rata kontribusinya menurun sebesar 1,06 persen per tahun. Sementara itu, nilai *share* produk pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar kedua dan terus meningkat setiap tahunnya dalam struktur perekonomian di Kabupaten Tanah Laut dengan rata-rata *share* dari tahun 2013 hingga tahun 2016 sebesar 19,11 persen.

Tabel 3.2. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2016 (Persen)

Kategori	Uraian	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	18,70	18,75	19,35	19,64
B	Pertambangan dan Penggalian	35,15	32,62	28,13	25,05
C	Industri Pengolahan	10,45	10,71	11,37	12,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,05	0,07	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,16	0,17	0,18
F	Konstruksi	5,83	6,20	6,79	7,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,40	9,03	9,73	10,42
H	Transportasi dan Pergudangan	4,89	5,22	5,64	5,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,27	1,36	1,42	1,47

J	Informasi dan Komunikasi	2,45	2,60	2,71	2,84
K	Jasa Keuangan	1,29	1,36	1,42	1,46
L	Real Estate	1,77	1,86	1,94	2,00
M, N	Jasa Perusahaan	0,27	0,29	0,31	0,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,83	5,02	5,63	5,58
P	Jasa Pendidikan	3,11	3,27	3,67	4,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	0,87	0,97	1,04
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,58	0,64	0,70	0,74
Produksi Regional Bruto	Domestik	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Kontribusi terbesar ketiga dalam penyusunan struktur perekonomian di Kabupaten Tanah Laut tahun 2016 adalah dari produk industri pengolahan yaitu sebesar 12,23 persen dilanjutkan dengan kontribusi dari produk perdagangan besar dan eceran sebesar 10,42 persen.

Secara keseluruhan, *share* masing-masing lapangan usaha terus meningkat sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 kecuali pada Pertambangan dan Penggalian yang bergerak sebaliknya. Jika ditelaah lebih lanjut, penyebab dari menurunnya *share* pertambangan bukan tanpa sebab. Munculnya Peraturan Menteri No. 07 Tahun 2017 baru mengenai pembangunan smelter dan pelarangan ekspor bahan mentah membuat perusahaan pertambangan dan penggalian lebih banyak memilih untuk mengurangi kegiatan produksinya, termasuk dari pengurangan tenaga kerja maupun pengurangan output. Tanah Laut sendiri merupakan salah satu penghasil batu bara terbesar di

Kalimantan, namun demikian harga batu bara yang terus merosot juga berpengaruh terhadap hasil produksi yang semakin berkurang.

Jika dibandingkan dengan kenaikan PDRB atas dasar harga berlaku maka PDRB atas dasar harga konstan kenaikannya tidak terlalu besar. Dari nilai total PDRB ini dapat diketahui kenaikan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga pada tahun berjalan sehingga PDRB atas dasar harga konstan dapat dibandingkan antar tahun. PDRB konstan juga dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Hal ini juga merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan terutama dibidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan nilai PDRB konstan pada tahun tertentu dibandingkan dengan PDRB pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016, nilai PDRB konstan sebesar 9,13 triliun sedangkan pada tahun 2015 sebesar 8,84 triliun. Sehingga pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 sebesar 3,26 persen. Pertumbuhan tahun 2016 ini lebih besar jika dibandingkan pertumbuhan nilai konstan tahun 2015 yang tumbuh 2,87 persen.

Tabel 3.3. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2016 (Persen)

Kategori	Uraian	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,83	2,31	2,22	3,84
B	Pertambangan dan Penggalian	4,94	-0,91	-2,22	- 2,33
C	Industri Pengolahan	4,67	4,64	4,33	7,57

Kategori	Uraian	2013	2014	2015*	2016**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,83	36,35	31,67	5,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,64	8,86	5,64	7,43
F	Konstruksi	5,75	6,47	6,34	5,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,54	8,81	8,20	7,88
H	Transportasi dan Pergudangan	7,12	6,76	6,97	6,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,18	6,73	6,20	6,34
J	Informasi dan Komunikasi	6,52	9,36	8,37	8,75
K	Jasa Keuangan	14,02	7,24	4,92	5,71
L	Real Estate	6,73	5,46	5,65	6,47
M, N	Jasa Perusahaan	7,44	6,89	6,58	8,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,81	5,81	8,78	2,05
P	Jasa Pendidikan	7,40	8,14	9,36	9,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,44	6,75	7,53	9,05
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,60	8,24	6,12	7,68
Produksi Regional Bruto	Domestik	5,49	3,19	2,87	3,26

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan data terakhir yang termuat dalam Tanah Laut dalam Angka Tahun 2016 proyeksi penduduk Tanah Laut pada

tahun 2015 sebesar 324.283 jiwa. Seiring dengan kemajuan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut, penambahan penduduk lebih ditentukan adanya migrasi masuk dari luar daerah dibanding dengan total tingkat kelahiran. Sebagian besar alasan migrasi masuk adalah karena alasan ekonomi, baik karena pekerjaan formal maupun adanya kesempatan dengan jenis pekerjaan lain yang timbul karena adanya efek multiplier.

Kabupaten Tanah Laut membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan/atau meningkat dengan tetap memperhatikan pemerataan untuk mampu mengurangi tingkat kemiskinan secara sistematis. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut tahun 2015 adalah sebesar 2,89 persen (tahun dasar 2010). Secara agregat, perekonomian Tanah Laut melambat sejak tahun 2013, yaitu dari 5,49 persen pada tahun 2013 menjadi 3,05 persen pada tahun 2014*, dan 2,89 persen pada tahun 2015**. Perlambatan tersebut diakibatkan karena melambatnya kategori lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan selama ini. Pertambangan batubara adalah salah satunya. Share PDRB kategori

pertambangan batubara yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Tanah Laut. PDRB perkapita tahun 2015 atas dasar harga berlaku sebesar 10.795,029 juta rupiah sedangkan jika dilihat atas dasar harga konstan sebesar 8.830,879 juta rupiah. Dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha dalam menyumbangkan PDRB Kabupaten Tanah Laut, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian mempunyai peran paling besar. Pertambangan dan Penggalian menyumbang 28,17 persen, sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mempunyai peran 19,30 persen.

dari jumlah penduduk antar kabupaten / kota di provinsi Kalimantan Selatan, pada tahun 2015 Kabupaten Tanah Laut

menempati posisi ke empat (324.283 jiwa) setelah Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010, Kabupaten Tanah Laut menempati posisi kedua paling lambat pertumbuhannya yaitu 2,89, yang sebelumnya ada Kabupaten Tabalong dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2.47. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan adalah 3,84. Hal ini menjadi PR besar bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang. Jumlah penduduk miskin suatu daerah menjadi salah satu sorotan dari berbagai pihak.

Kabupaten Tanah Laut menempati urutan ke lima paling sedikit se Provinsi Kalimantan Selatan untuk persentase penduduk miskin dengan persentase sebesar 4,38. Dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbanyak, yaitu 6,77 persen.

Pariwisata di masa mendatang akan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut asalkan dikelola dengan baik. Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi daerah tujuan wisata, karena terdapat banyak obyek wisata yang dapat dikunjungi. Sampai saat ini terdapat 25 obyek wisata yang dapat dikunjungi yang terbagi dalam jenis wisata pantai, wisata alam, wisata pancing, wisata taman dan wisata sejarah. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga jumlah pengunjung obyek wisata tersebut pada tahun 2015 sebesar 144.670 orang. Berdasarkan data tersebut, nampaknya ada beberapa obyek wisata yang belum dikunjungi oleh wisatawan. Hal ini mungkin dikarenakan kurangnya promosi, dan belum memadainya sarana dan prasarana pendukung.

Pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang membutuhkan pertumbuhan investasi yang semakin besar pula. Sumber utama investasi daerah adalah sektor swasta, BUMN, BUMD dan masyarakat serta pemerintah. Pemerintahan yang baik dan bersih, selain berperan sebagai regulator yang mampu menciptakan iklim investasi yang sehat sehingga menarik bagi investor juga mampu memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap investasi yang masuk. Pemerintah diharapkan melanjutkan investasi publik dalam pembangunan prasarana guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan. Sementara peran investasi swasta dan BUMD diharapkan juga terus meningkat.

Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan diharapkan akan dapat menjadi salah satu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut. Pada Tahun 2017 Pelabuhan Swarangan sudah ada Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang merupakan syarat untuk pembebasan lahan berdasarkan *Legal Opinion* Kejaksaan Negeri Pelaihari. Diharapkan hal ini akan lebih mendorong percepatan pengembangan Pelabuhan Swarangan ini.

Kawasan Industri Jorong berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 termasuk salah satu Kawasan Startegis Nasional. Hal ini dikuatkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Dengan adanya perlambatan pertumbuhan sektor pertambangan yang berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi sudah barang tentu pengembangan Pelabuhan dan Kawasan industri ini diharapkan dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang. Sektor ini diharapkan juga berdampak multiplier mendorong pertumbuhan Sektor Jasa. juga dengan melihat pada trend Pendapatan dalam

APBD yang akan cukup sulit mengharapakan dana perimbangan. Sektor PAD harus didorong lebih intensif. PAD akan meningkat seiring dengan meningkatnya Investasi sektor jasa dan sektor usaha **Formal** lainnya.

Target di Tahun 4-5% pertumbuhan merupakan target yang realistis, kecuali ada peningkatan investasi yang cukup signifikan dan hal tersebut diharapkan dipicu oleh adanya Pelabuhan dan Kawasan industri.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kerangka pendanaan untuk tahun 2019 dalam rangka membiayai belanja diproyeksikan sebesar Rp1.355.456.089.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh lima milyar Empat ratus lima puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian Belanja Tidak Langsung diproyeksikan sebesar Rp830.516.958.600,00 (Delapan ratus tiga puluh milyar lima ratus enam belas juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp524.939.130.400,00 (Lima ratus dua puluh empat milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).

Kalau dicermati pada APBD TA 2019, menunjukkan bahwa Jumlah Belanja Langsung lebih kecil dari Belanja Tidak Langsung, walaupun mungkin perbandingan ini bersifat sangat sementara karena belum masuknya alokasi belanja langsung yang didanai dari DAK. Belanja Tidak Langsung mempunyai porsi 61% dari total belanja sementara Belanja Langsung 39 % dari total belanja.

Pada tahun 2019 proyeksi belanja langsung diarahkan pada pemenuhan pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang pada masing-masing SKPD, seperti pemenuhan sarana dan prasarana dan kegiatan prioritas lainnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib masyarakat

diantaranya peningkatan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat lainnya.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Hal itu untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Perencanaan pembangunan tentunya tidak terlepas dari perencanaan (proyeksi) keuangan yang merupakan sumber pendanaan untuk membiayai perencanaan pembangunan tersebut. Itu artinya sebagai apapun sebuah perencanaan pembangunan tanpa didukung pendanaan yang memadai tidak akan ada artinya. Oleh karena itu proyeksi keuangan sebagai kerangka pendanaan bagi rencana pembangunan mutlak harus dilakukan, tidak terkecuali untuk tahun 2019 yang akan datang.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Dalam rangka penyediaan dana untuk membiayai pembangunan yang direncanakan (belanja langsung) dan membiayai belanja tidak langsung (non program dan non kegiatan),

salah satu unsur utama terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah proyeksi tentang pendapatan daerah.

Dengan memperhatikan data target dan realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya, proyeksi pendapatan daerah Tahun 2018, dan asumsi-asumsi yang kemungkinan terjadi, maka untuk tahun 2019 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp996.508.390.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam milyar Lima ratus Delapan Juta Tiga ratus Sembilan puluh Ribu Rupiah) belum termasuk Dana Alokasi Khusus.

Dengan proyeksi pendapatan daerah tahun 2019 sebesar tersebut di atas, apabila memperhatikan rencana pembangunan (belanja langsung) yang diusulkan dan belanja tidak langsung (non program dan non kegiatan) tahun 2019, sudah barang tentu masih tidak sebanding dan tidak mencukupi, dengan kata lain akan terjadi defisit dalam penyusunan anggaran. Hal ini harus ditanggulangi oleh kerangka pendanaan lain di luar pendapatan daerah yang direncanakan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan Penerimaan Pembiayaan Daerah berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA).

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 137 disebutkan : “Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.

- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Penerimaan pembiayaan berupa SILPA untuk menutup defisit anggaran tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 375.047.699.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima milyar empat puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga **Total proyeksi dana yang tersedia yang bersumber dari Pendapatan daerah ditambah dengan penerimaan pembiayaan daerah dari SiLPA adalah sebesar Rp1.355.456.089.000,00** (satu triliun tiga ratus lima puluh lima milyar Empat ratus lima puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Total proyeksi penerimaan daerah sebesar itu akan digunakan untuk pengeluaran belanja wajib/mengikat pada belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan Partai Politik, belanja hibah, belanja Bantuan Sosial, dan belanja tidak terduga yang secara total diproyeksikan sebesar Rp830.516.958.600,00 (delapan ratus tiga puluh milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah). Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut di atas maka skenario kerangka pendanaan untuk pembangunan di tahun 2019 adalah sebagai berikut :

A.	PENDAPATAN	Rp	996.508.390.000,00
1.	PAD	Rp	134.214.872.000,00
2.	DANA PERIMBANGAN	Rp	678.779.367.000,00
3.	LAIN-LAIN PENDPTN DAERAH YG SAH	Rp	183.514.151.000,00
B.	BELANJA	Rp	1.355.456.089.000,00
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp	830.516.958.600,00
2.	BELANJA LANGSUNG	Rp	524.939.130.400,00
(Surplus/Defisit)		Rp	(358.947.699.000,00)
C.	PEMBIAYAAN		
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp	375.047.699.000,00

	a. SiLPA	Rp	375.047.699.000,00
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp	1.100.000.000,00
	a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	Rp	1.100.000.000,00
3.	PEMBIAYAAN NETTO	Rp	373.947.699.000,00
D.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN THN BERKENAAN	Rp	15.000.000.000,00

Berdasarkan simulasi perhitungan tersebut maka total dana untuk kegiatan pembangunan atau pagu indikatif untuk belanja langsung di tahun 2019 adalah sebesar Rp524.939.130.400,00. Hal ini tidak dipandang sebagai suatu hal yang bersifat kaku (*rigid*) mengingat jika memang ada program/kegiatan yang menurut hasil analisa terbaru dan kebutuhannya dipandang sangat **urgen** maka tentulah dapat dilakukan pendanaan terhadap program/kegiatan tersebut dengan konsekwensi ada komponen belanja lain yang harus dikurangi terutama yang terkait dengan program nasional dan prioritas provinsi dengan melihat ketersediaan dana yang ada.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2019 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

1. proyeksi belanja daerah diasumsikan turun sebesar -9.49% dari tahun 2018.
2. perhitungan gaji menggunakan basis 2018 dengan accres 2,5% dan antisipasi kenaikan gaji dan tambahan penghasilan PNS sebesar 12,5%.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah yang akan ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Memprioritaskan belanja wajib yang harus dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik dan belanja barang dan jasa yang wajib/mengikat berkaitan dengan kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan, serta bagi program/kegiatan wajib/mengikat berkaitan dengan pelayanan dasar wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dikeluarkan pada tahun berkenaan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- c. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada Program Penguatan Pembangunan Perdesaan.
- e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga terutama untukantisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
- f. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- g. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung diutamakan untuk membiayai prioritas pembangunan tahun 2019.
- h. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda Provinsi dan Nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.
- i. Peningkatan penatausahaan atas belanja yang dilaksanakan melalui koordinasi, sinkronisasi yang dilaksanakan melalui penyusunan dan penyampaian laporan atas pelaksanaan belanja sesuai ketentuan secara tertib, melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi belanja secara terjadwal.

TABEL. 3.5 PROYEKSI RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

No	Uraian	Anggaran		Bertambah/(Berkurang)	%	Bobot
		2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN DAERAH					
1.1	Pendapatan Asli Daerah					
1.1.1	Pajak Daerah	23,080,000,000.00	20,928,785,000.00	-2,151,215,000.00	-9.32	2.10
1.1.2	Retribusi Daerah	5,717,341,933.00	6,517,624,000.00	800,282,067.00	14.00	0.65
1.1.3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,247,397,477.00	10,402,059,000.00	-845,338,477.00	-7.52	1.04
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	86,364,716,000.00	96,366,404,000.00	10,001,688,000.00	11.58	9.67
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	126,409,455,410.00	134,214,872,000.00	7,805,416,590.00	6.17	13.47
1.2	Dana Perimbangan					
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	209,717,371,200.00	150,089,205,000.00	-59,628,166,200.00	-28.43	15.06
1.2.2	Dana Alokasi Umum	528,690,162,000.00	528,690,162,000.00	0.00	0.00	53.05
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	254,526,799,000.00	0.00	-254,526,799,000.00	-100.00	0.00
	Jumlah Dana Perimbangan	992,934,332,200.00	678,779,367,000.00	-314,154,965,200.00	-31.64	68.12
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah					
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00		0.00
1.3.3	Bagi Hasil Pajak Provinsi	83,000,000,000.00	80,549,072,000.00	-2,450,928,000.00	-2.95	8.08
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	102,965,079,000.00	102,965,079,000.00	0.00	0.00	10.33
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	185,965,079,000.00	183,514,151,000.00	-2,450,928,000.00	-1.32	18.42
	Jumlah Pendapatan Daerah	1,305,308,866,610.00	996,508,390,000.00	-308,800,476,610.00	-23.66	100.00

No	Uraian	Anggaran		Bertambah/(Berkurang)	%	Bobot
		2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7
2.	BELANJA DAERAH					
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja Pegawai	566,228,177,930.00	643,580,322,000.00	77,352,144,070.00	13.66	47.48
2.1.4	Belanja Hibah	47,390,675,500.00	15,000,000,000.00	-32,390,675,500.00	-68.35	1.11
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4,224,400,000.00	3,022,500,000.00	-1,201,900,000.00	-28.45	0.22
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	2,877,234,193.00	2,744,640,900.00	-132,593,293.00	-4.61	0.20
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	168,132,312,320.00	162,169,495,700.00	-5,962,816,620.00	-3.55	11.96
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	0.00	0.00	0.30
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	792,852,799,943.00	830,516,958,600.00	37,664,158,657.00	4.75	61.27
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja Pegawai	21,790,598,100.00	524,939,130,400.00	503,148,532,300.00	2,309.02	38.73
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	341,840,244,369.00		-341,840,244,369.00	-100.00	0.00
2.2.3	Belanja Modal	341,063,762,944.00		-341,063,762,944.00	-100.00	0.00
	Jumlah Belanja Langsung	704,694,605,413.00	524,939,130,400.00	-179,755,475,013.00	-25.51	38.73
	Jumlah Belanja Daerah	1,497,547,405,356.00	1,355,456,089,000.00	-142,091,316,356.00	-9.49	100.00
	Surplus / (Defisit)	-192,238,538,746.00	-358,947,699,000.00	-166,709,160,254.00	86.72	-26.48
3.	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (<i>SilPA</i>) Tahun Anggaran Sebelumnya	434,270,638,105.00	375,047,699,000.00	-59,222,939,105.00	-13.64	27.34
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00	0.00			0.00

No	Uraian	Anggaran		Bertambah/(Berkurang)	%	Bobot
		2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	434,270,638,105.00	375,047,699,000.00	-59,222,939,105.00	-13.64	27.34
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah					
3.2.2	Penyertaan Modal (<i>Investasi</i>) Pemerintah Daerah	1,000,000,000.00	1,100,000,000.00	100,000,000.00	10.00	
	□ Penyertaan Modal :	1,000,000,000.00	1,100,000,000.00	100,000,000.00	10.00	
	□ BPR	1,000,000,000.00	1,100,000,000.00	100,000,000.00	10.00	
	□ Bank Kalsel	0.00	0.00	0.00		
	□ LPS	0.00	0.00	0.00		
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00		
	□ Pembayaran kewajiban pada pihak ketiga	0.00	0.00	0.00		
	□ Pembayaran Kewajiban pada Pihak Ke 3	0.00	0.00	0.00		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1,000,000,000.00	1,100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	
	Pembiayaan Netto	433,270,638,105.00	373,947,699,000.00	-59,322,939,105.00	-13.69	
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Berkenaan	241,032,099,359.00	15,000,000,000.00	-226,032,099,359.00	-93.78	

Catatan :

- Proyeksi belum termasuk DAK

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berkaitan dengan arah kebijakan pembiayaan daerah tentunya harus meliputi dua hal tersebut, baik dari sisi penerimaannya maupun dari sudut pengeluarannya.

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2019 yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah :

Kebijakan daerah terkait dengan penerimaan pembiayaan daerah dikarenakan proyeksi pendapatan untuk tahun 2019 lebih kecil dari proyeksi belanja, sehingga anggaran yang disusun mengalami defisit. Artinya pengeluaran akan lebih besar dari pendapatan. Atas dasar itu maka kebijakan yang ditempuh adalah bagaimana mengamankan belanja yang lebih besar dari pendapatan agar tetap tersedia penyediaan dananya. Ada beberapa jenis penerimaan pembiayaan, yaitu : 1) SiLPA, 2) Pencairan Dana Cadangan, 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, 4) Penerimaan Pinjaman Daerah, 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, 6) Penerimaan Piutang Daerah. Dari 6 (enam) jenis penerimaan pembiayaan tersebut, yang paling memungkinkan untuk mengamankan proyeksi belanja daerah agar tetap terbiayai adalah melalui SiLPA. Pilihan kebijakan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit dari SiLPA adalah yang paling tepat, karena SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut baik karena surplus pendapatan, maupun terjadinya penghematan belanja sehingga dapat

menutup defisit anggaran yang terjadi. Pada tahun 2019 penerimaan pembiayaan dari SiLPA diproyeksikan sebesar Rp375.047.699.000,00.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan daerah berkaitan dengan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp1.100.000.000,- untuk penyertaan modal kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari.

Besarnya SILPA karena surplus pendapatan dan penghematan belanja, akan digunakan untuk menutup defisit anggaran dan dimanfaatkan untuk membiayai program pembangunan yang bersifat prioritas untuk kepentingan masyarakat.

Tabel 3.6 REALISASI DAN PROYEKSI PENDAPATAN TAHUN 2015 S/D TAHUN 2019

Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan

Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2015 s.d tahun 2019

No	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1))
1	2	3	4	5	6	7
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	152,142,659,011.47	148,684,016,493.24	170,817,945,422.00	126,409,455,410.00	157,214,872,000.00
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	20,857,114,355.00	18,819,153,369.50	23,110,088,000.00	23,080,000,000.00	20,928,785,000.00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	5,633,292,680.00	6,973,142,351.00	6,946,438,900.00	5,717,341,933.00	6,517,624,000.00

No	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1))
1	2	3	4	5	6	7
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,765,898,469.00	11,192,883,223.00	11,247,397,477.00	11,247,397,477.00	10,402,059,000.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	116,886,353,507.47	111,698,837,549.74	129,514,021,045.00	86,364,716,000.00	119,366,404,000.00
1.2	DANA PERIMBANGAN	961,047,379,972.00	1,136,058,762,324.00	934,381,405,828.00	992,934,332,200.00	993,306,166,000.00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	420,475,612,972.00	366,007,198,763.00	218,227,007,828.00	209,717,371,200.00	210,089,205,000.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	438,283,639,000.00	538,370,006,633.00	528,690,162,000.00	528,690,162,000.00	528,690,162,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	102,288,128,000.00	231,681,556,928.00	187,464,236,000.00	254,526,799,000.00	254,526,799,000.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	244,778,681,427.00	165,206,681,892.00	234,261,041,205.00	185,965,079,000.00	183,514,151,000.00
1.3.1	Hibah	15,274,159,801.00	4,738,217,988.00	6,049,824,205.00	0.00	0.00
1.3.2	Dana darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	91,206,018,626.00	75,441,197,904.00	75,000,000,000.00	83,000,000,000.00	80,549,072,000.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	132,666,616,000.00	85,027,266,000.00	153,211,217,000.00	102,965,079,000.00	102,965,079,000.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	5,631,887,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1))
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 + 1.2 + 1.3)	1,357,968,720,4 10.47	1,449,949,460,7 09.24	1,339,460,392,4 55.00	1,305,308,866,6 10.00	1,334,035,189,000.0 0

3.2.4 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perencanaan pendapatan daerah tahun 2019 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

1. Penganggaran PAD memperhatikan kondisi perkembangan ekonomi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi penerimaan PAD tahun-tahun sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prakiraan masing masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
2. Dana Perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing masing jenis pajak. DAK belum dicantumkan dalam proyeksi APBD Tahun Anggaran 2018 ini.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Dalam rangka pencapaian proyeksi pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp1.305.308.866.610,00 (Satu triliun Tiga Ratus Lima milyar Tiga Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) tidaklah mudah, perlu ditempuh berbagai kebijakan untuk pencapaiannya. Arah kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Penganggaran PAD dan pemungutannya mengacu pada Peraturan daerah yang berlaku tentang PAD dimaksud, baik pajak daerah maupun retribusi daerah.
- b. Melaksanakan intensifikasi pemungutan sektor pajak daerah dan retribusi daerah diantaranya dengan cara melaksanakan penertiban-penertiban secara terpadu dengan SKPD terkait, terjun langsung melaksanakan penagihan secara terjadwal, melaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi penerimaan pendapatan secara berkala.

- c. Melaksanakan Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah diantaranya dengan cara, melaksanakan pendataan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah baru, melaksanakan evaluasi dan melaksanakan perubahan/pembuatan Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang masih belum sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.
- d. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah melalui rapat-rapat pertemuan, penyebarluasan informasi melalui brosur dan melalui media informasi lainnya.
- e. Meningkatkan sumberdaya aparat pengelola pendapatan daerah dalam rangka peningkatan penatausahaan penerimaan pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku.
- f. Meningkatkan pengawasan atas jalannya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui aparat pengawasan.
- g. Berkaitan dengan penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan, dalam penganggarannya menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sebelum ada ketetapan alokasi tentang dana perimbangan yang akan diterima oleh daerah dari pemerintah pusat.
- h. Terus melaksanakan koordinasi intensif dengan pihak pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyaluran dana perimbangan/dana transfer dengan cara menghimpun dan menyampaikan bukti setor dalam rangka dana bagi hasil, mengikuti rapat rekonsiliasi dana bagi hasil dan dana-dana lainnya seperti DAU, DAK, DBH, penyampaian data lain yang diperlukan dalam rangka perhitungan, percepatan pencairan dana transfer dari pemerintah pusat.

- i. Dalam rangka percepatan pencairan khususnya menyangkut bagi hasil pajak dari Provinsi dilakukan koordinasi dan penyampaian kelengkapan administrasi tepat waktu ke Pemerintah Provinsi.
- j. Meningkatkan penatausahaan penerimaan pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara melaksanakan rekonsiliasi dengan para bendahara penerimaan secara terjadwal.
- k. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian yang memiliki keahlian dalam pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga penyusunan anggaran pendapatan dapat lebih sesuai dengan potensi yang sebenarnya.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN/RPJPD).

Selain itu, setiap daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Strategis Renstra dan bahan masukan untuk finalisasi RKPD, dan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja SKPD sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan bahan bagi penyempurnaan RKPD. Penyusunan berbagai dokumen rencana tahunan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Negara PPN/Bappenas menyiapkan Rancangan awal RPJMN yang memuat merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

4. 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

4.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019): “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2019, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM menjadi 71,98; gini rasio pada kisaran 0,38-0,39; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15 persen, Kalimantan 8,09 persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen Papua 2,01 persen.

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2019 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;

3. peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4. pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
5. stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2019 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut: pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;

2. pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4. pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
5. stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Selanjutnya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dijabarkan kedalam Program Prioritas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. mempercepat pengurangan kemiskinan
 - 1) memperkuat pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran;
 - 2) memperkuat sistem jaminan sosial;
 - 3) memperkuat literasi untuk kesejahteraan;
 - 4) memperkuat reforma agraria; dan

- 5) Pemberian akses kelola sumber daya alam melalui perhutanan sosial.
- b. meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat
 - 1) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - 2) meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
 - 3) mencegah dan pengendalian penyakit
 - 4) mempercepat penurunan *stunting*; dan
 - 5) meningkatkan “gerakan masyarakat hidup sehat”.
- c. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
 - 1) menyediakan pendidik yang berkualitas dan merata;
 - 2) menyediakan afirmasi pendidikan;
 - 3) memperkuat kelembagaan satuan pendidikan; dan
 - 4) meningkatkan kualitas pembelajaran dan akademik.
- d. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
 - 1) menyediakan akses hunian layak dan terjangkau;
 - 2) menyediakan akses infrastruktur dasar pemukiman layak; dan
 - 3) meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman.
- e. meningkatkan tata kelola layanan dasar
 - 1) memperkuat layanan dan rujukan satu pintu;
 - 2) memperkuat integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan
 - 3) mempercepat pencapaian SPM di daerah.

2. Prioritas Nasional 2: Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan konektivitas

- 1) pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional yang mendukung sektor unggulan; dan
 - 2) pengembangan transportasi perkotaan.
- b. mengembangkan telekomunikasi dan informatika
- 1) pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika khususnya di daerah perbatasan dan tertinggal.
- c. mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pengembangan pembangunan desa
- 1) Peningkatan aksesibilitas desa dan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi.
- d. melaksanakan pembangunan daerah afirmasi
- 1) Pengembangan aksesibilitas pada kawasan perbatasan dan tertinggal melalui penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi.
- e. melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu-hilir perikanan
- 1) Peningkatan produksi perikanan melalui pembangunan konektivitas logistik perikanan dan tata kelola kawasan perikanan.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis prioritas nasional kedua, antara lain:

- a. pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional sektor unggulan;
- b. peningkatan keterpaduan transportasi perkotaan dan keselamatan transportasi;
- c. peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informatika yang berdaya saing;
- d. optimalisasi pembangunan kota-kota KTI untuk pertumbuhan ekonomi nasional;

- e. peningkatan aksesibilitas pusat pertumbuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan di daerah tertinggal dan perbatasan;
- f. peningkatan aksesibilitas desa, kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi;
- g. peningkatan kapasitas SDM di daerah dan desa dalam penyediaan sarana prasarana konektivitas;
- h. peningkatan sarana dan prasarana sistem logistik perikanan; dan
- i. peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan perikanan.

3. Prioritas Nasional 3: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri Dan Jasa Produktif

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktifitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana;
- b. mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai/nilai dan pemanfaatan inovasi;
- c. meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi dan penguatan kemitraan;
- d. mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerjasama dunia usaha dan kewirausahaan;
- e. mengembangkan IPTEK dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM dan IPTEK, pengembangan litbang keilmuan.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis prioritas nasional ketiga, antara lain:

- a. peningkatan nilai tambah ekonomi dari hasil pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri;
- c. optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif;
- d. peningkatan produktifitas tenaga kerja; dan
- e. optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah.

4. Prioritas Nasional 4: Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan

Pada prioritas nasional ini mengarahkan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber-sumber energi, pangan dan air yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air ini dilakukan melalui pelestarian lingkungan dengan beberapa arah kebijakan yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. meningkatkan produksi energi primer;
- b. meningkatkan penerapan energi baru terbarukan dalam bauran energi;
- c. meningkatkan aksesibilitas air;
- d. meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik;
- e. mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri;
- f. meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan;
- g. memperkuat distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat;

- h. meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi;
- i. memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air;
- j. meningkatkan perlindungan sumber daya air dan ekosistemnya;
- k. meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata;
- l. mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS; dan
- m. meningkatkan kesadaran sumberdaya air.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis prioritas nasional keempat, antara lain:

a. Pemenuhan kebutuhan energi

Kebutuhan energi primer akan meningkat dari 1.555 BOE di tahun 2015 menjadi 2.086 juta *Barrel of Equivalent* (BOE) di tahun 2019 atau meningkat 7,4 persen.

b. Pemenuhan kebutuhan pangan

Kebutuhan konsumsi pangan masyarakat yang terus meningkat.

c. Pemantapan ketahanan sumber daya air

- 1) pemenuhan kebutuhan air yang belum terpenuhi untuk rumah tangga, industri dan pertanian; dan
- 2) suplai air minum.

d. Upaya pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Penguatan langkah untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

e. Perencanaan pembangunan rendah karbon

Penguatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang RAN penurunan emisi gas rumah kaca.

5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas Keamanan Nasional Dan Kesuksesan Pemilu

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. meningkatkan kamtibmas dan keamanan siber

- 1) meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan kepolisian;
- 2) menyelesaikan konflik sosial;
- 3) meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba;
- 4) meningkatkan pengamanan aktivitas siber; dan
- 5) meningkatkan penanganan terorisme.

b. menjamin kesuksesan pemilu

- 1) meningkatkan kualitas lembaga demokrasi;
- 2) menjamin terlaksananya hak memilih dan dipilih;
- 3) mewujudkan birokrasi yang netral dalam Pemilu 2019; dan
- 4) melaksanakan tahapan pemilu yang berkualitas.

c. memperkuat pertahanan wilayah nasional

- 1) mengamankan wilayah yuridikasi nasional;
- 2) pengamanan kawasan perbatasan dan kedaulatan negara; dan
- 3) penguatan pertahanan berdaya gentar tinggi.

d. meningkatkan Kepastian hukum dan reformasi birokrasi

- 1) meningkatkan kualitas penegakan hukum;
- 2) meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- 3) meningkatkan pelaksanaan *e-Government*;
- 4) mengoptimalkan *Talent Management Nasional*;
- 5) meningkatkan pengawasan program prioritas nasional.

e. memperkuat efektivitas diplomasi

- 1) memperkuat perlindungan dan pelayanan WNI di luar negeri;
- 2) memperkuat diplomasi maritim, politik, dan keamanan;
- 3) memperkuat diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional; dan
- 4) pemantapan peran Indonesia di ASEAN.

4.1.2 Prioritas Pembangunan Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2019

Tema dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 “**BERGERAK MENUJU PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA UNTUK KALSEL MAPAN**”

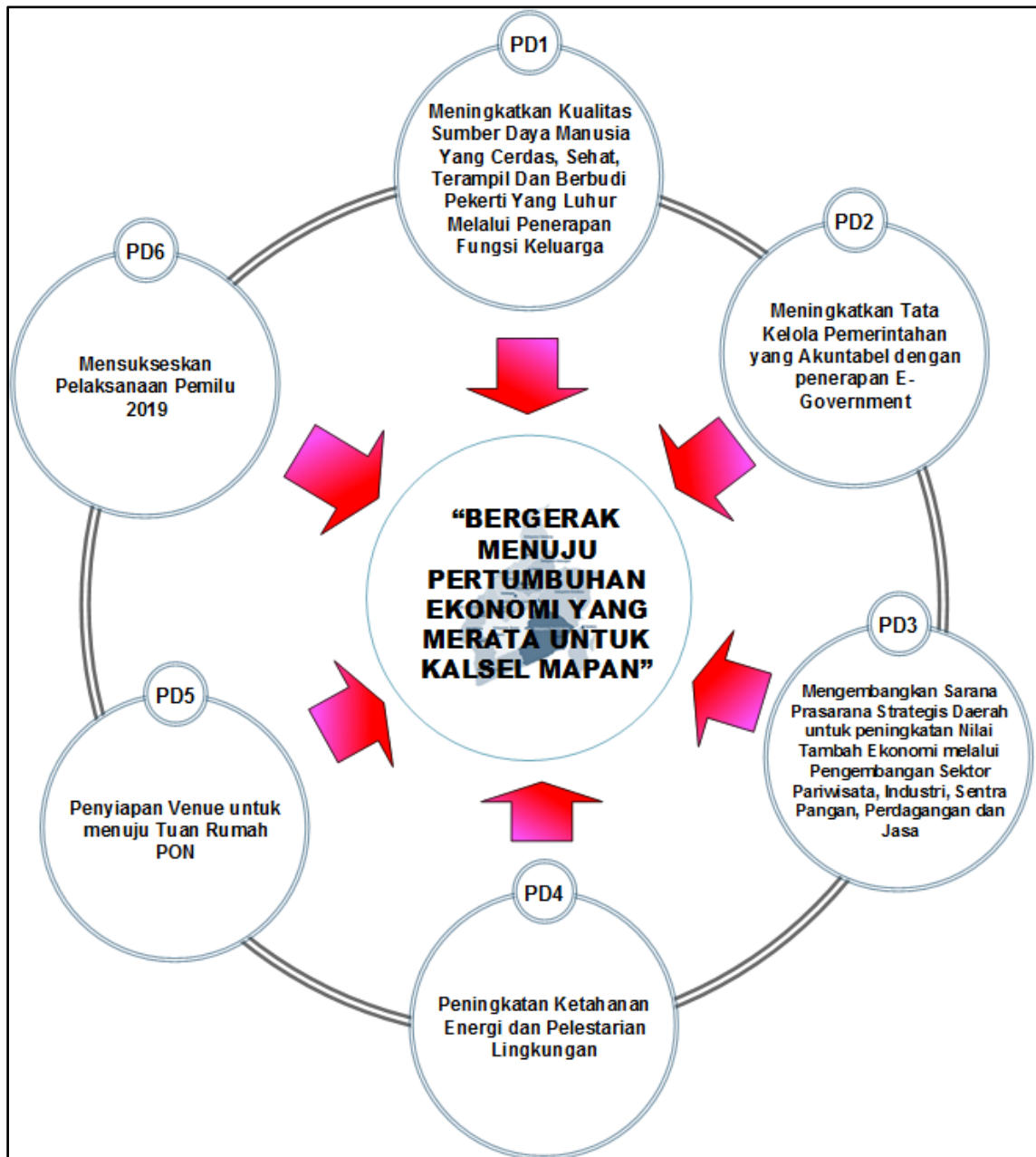
RKPD Tahun 2019 Provinsi ini meliputi 6 prioritas pembangunan sebagai berikut :

Dari Tema tersebut diatas terdapat 3 kata kunci (*keywords*) yang mengandung makna sebagai berikut:

1. **Bergerak** merupakan motto dari Gubernur untuk memberikan semangat kepada seluruh komponen masyarakat di Kalimantan Selatan untuk selalu menjadi aktor perubahan. Selalu bergerak dari satu titik ke titik lainnya yang lebih tinggi yang menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan berusaha untuk berubah menjadi yang lebih baik dari tahun ketahun. Bergerak juga mempunyai akronim “*Berjuang Gelorakan Rakyat*” yang mempunyai makna bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan berjuang sepenuh kekuatan dan kemampuan untuk kepentingan rakyat seperti peningkatan kualitas SDM masyarakat, peningkatan daya beli masyarakat, dan peningkatan kualitas lingkungan untuk masyarakat.

2. **Pertumbuhan ekonomi yang merata** hal ini dimaknai dengan upaya membangun perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan yang inklusif melalui pengembangan sektor-sektor unggulan antara lain: Pertanian dalam arti luas, Perindustrian, Perdagangan serta Pariwisata yang memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan sektor lainnya. Pembangunan sektor-sektor ekonomi dengan melihat pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten/Kota dan menggali potensi-potensi sumber daya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*).

3. ***Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan)*** merupakan tujuan dari pembangunan Kalimantan Selatan, melalui pembangunan seluruh sektor kehidupan secara merata antar wilayah diharapkan akan terwujud kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidup berdasarkan kekuatan sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian baik secara ekonomi, sosial, yang dapat dilihat dari kemandirian pembiayaan pembangunan, ketahanan pangan dan energi. Selain itu juga akan membuat Kalimantan Selatan menjadi provinsi yang maju dan terdepan khususnya di wilayah Pulau Kalimantan dan Indonesia secara umumnya.



4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019

Tema dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 **“KEBANGKITAN UMKM DAN PRODUK UNGGULAN TANAH LAUT ”**.

Dalam pelaksanaan pembangunan hal yang dihadapi adalah adanya ketersediaan sumber dana yang jumlahnya tidak tak terbatas. Diantara pilihan-pilihan kebijakan yang ada sudah barang tentu ada hal-hal yang harus dipilih untuk dikedepankan sebagai prioritas karena jika

semuanya dilaksanakan dengan menggunakan dana yang ada dengan membagi secara “merata”, akan berpotensi target yang dicanangkan sulit untuk dicapai atau dengan kata lain sulit untuk “melihat” hasil yang riil dari pembangunan yang dilaksanakan. Berdasarkan analisa dan penelaahan terhadap Visi dan Misi RPJPD, RPJMD KABUPATEN, RPJMD PROVINSI, Prioritas Nasional dan Provinsi, masukan dari forum konsultasi publik, serta isu dan kondisi riil terbaru maka dirumuskanlah hal yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2019. Prioritas pembangunan daerah tahun 2019 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun 2019 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) PROVINSI, RPJPD DAN RPJMD TEKNOKRATIK.

Menelaah pada RPJMD teknokratik Kabupaten Tanah Laut maka ada 9 yang menjadi isu strategik yang akan menjadi arah dan prioritas yaitu :

1. Transformasi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut.
2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
3. Peningkatan Daya Saing Sektor Pariwisata.
4. Peningkatan Konektivitas Sentra Produksi Produk Unggulan dan Pelabuhan.
5. Peningkatan Partisipasi Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan.
6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik.
7. Percepatan Pengembangan Industri Berbasis Komoditas Pertanian Lokal.
8. Pengembangan Kawasan Industri Jorong.
9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

Ada 4 (empat) Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran
3. Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur wilayah

4. Peningkatan Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesionalisme Pelayanan Publik

Sasaran yang akan dicapai dalam pencapaian prioritas antara lain :

1. Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatnya Pelestarian/pengembangan budaya dan generasi muda
4. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
5. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur wilayah
6. Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel
7. Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif

Tabel 4.1. Matrik Keterhubungan Program Pembangunan Nasional dan Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalsel 2019	Prioritas Kabupaten Tanah Laut 2019	Program
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif	Mengembangkan sarana prasarana strategis Daerah untuk Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor Pariwisata, Industri, Sentra Pangan, Perdagangan dan Jasa.	Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan menurunkan Angka Pengangguran	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja
			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
			Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
			Program fasilitasi pemasaran produk unggulan daerah
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
			Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
			Program peningkatan realisasi perijinan dan non perijinan pelaku jenis usaha

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalsel 2019	Prioritas Kabupaten Tanah Laut 2019	Program
			Program peningkatan realisasi pelaku perizinan dan non perijinan jenis non usaha
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
			Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
			Program peningkatan produksi hasil peternakan
			Program perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
			Program perlindungan tanaman pertanian/perkebunan
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
			Program Pengembangan Kemitraan
			Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalsel 2019	Prioritas Kabupaten Tanah Laut 2019	Program
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap
			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
			Program pengelolaan pasar daerah
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
			Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
			Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
			Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
			Program Penataan Struktur Industri
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Terampil dan berbudi Pekerti yang luhur melalui penerapan fungsi keluarga	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pendidikan Anak Usia Dini
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
			Program Pendidikan Non Formal
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
			Program Jamkesmas
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Pengawasan Obat dan Makanan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalsel 2019	Prioritas Kabupaten Tanah Laut 2019	Program
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
			Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
			Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
			Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalsel 2019	Prioritas Kabupaten Tanah Laut 2019	Program
			Program Peningkatan Pengendalian Polusi
			Program pengembangan dan peningkatan kawasan tanpa rokok
			Program Pengendalian Penduduk
			Program Penataan Administrasi Kependudukan
			Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
			Program Keluarga Berencana
			Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
			Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
			Program pembinaan anak terlantar
			Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
			Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalsel 2019	Prioritas Kabupaten Tanah Laut 2019	Program
			Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya
			Program Pengembangan Nilai Budaya
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
			Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
			Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
			Program peningkatan peran serta kepemudaan
			Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
			Program Pengembangan Olahraga Rekreasi
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
			Program pengembangan wawasan kebangsaan
			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
			Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
			Program pendidikan politik masyarakat
			Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalsel 2019	Prioritas Kabupaten Tanah Laut 2019	Program
			Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
			Program peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (GG)
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
			Program pendidikan kedinasan
			Program pembinaan dan pengembangan aparatur
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Desa/Kelurahan
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
			Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
			Program Penataan Daerah Otonomi Baru
			Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
			Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalsel 2019	Prioritas Kabupaten Tanah Laut 2019	Program
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
			Program peningkatan pelayanan perijinan
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
			Program Bina Adat dan Budaya Desa
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
			Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
			Program kerjasama informasi dengan mas media
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Kominfo
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	Peningkatan ketahanan energy dan pelestarian lingkungan	Peningkatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalsel 2019	Prioritas Kabupaten Tanah Laut 2019	Program
Pemantapan ketahanan energy, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan			Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
			Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
			Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
			Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
			Program Keciaptakaryaan
			Program Pengembangan Teknologi Konstruksi
			Program Pengaturan Jasa Konstruksi
			Program Pengembangan Perumahan
			Program Lingkungan Sehat Perumahan
			Program peningkatan sarana dan prasarana keindahan kota
			Program Perencanaan Tata Ruang
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalsel 2019	Prioritas Kabupaten Tanah Laut 2019	Program
			Program Penataan Tata Guna Tanah
Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan penerapan e-government	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang akuntabel dan Profesionalisme Pelayanan Publik	Program Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			Program Pengembangan Data/Informasi
			Program Kerjasama Pembangunan
	Menyukseskan pelaksanaan pemilu 2019		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
			Program Perencanaan Sosial dan Budaya
			Program Penelitian dan Pengembangan
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
			Pogram peningkatan pelayanan angkutan
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
			Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
			Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalsel 2019	Prioritas Kabupaten Tanah Laut 2019	Program
			Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
			Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
			Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
			Perlindungan Masyarakat
			Program Pengamanan dan Penertiban Perda
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat
			Program peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan
			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tabel 4.2 Keterkaitan SPM dengan Program Penmbangunan di Kabupaten Tanah Laut

SPM	Sasaran	Program
Bidang Pendidikan	Pendidikan anak usia dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	Pendidikan dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Pendidikan kesetaraan	Program Pendidikan Non Formal
Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil;	Program Jamkesmas
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin;	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	Pelayanan kesehatan balita;	Program Pengawasan Obat dan Makanan
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif;	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

SPM	Sasaran	Program
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus</i>), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
		Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

SPM	Sasaran	Program
		Program Peningkatan Pengendalian Polusi
		Program pengembangan dan peningkatan kawasan tanpa rokok
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	
Bidang Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	
Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
	pelayanan informasi rawan bencana	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

SPM	Sasaran	Program
	pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
	pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
		Program pengembangan wawasan kebangsaan
		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;	Program pembinaan anak terlantar
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Program pembinaan panti asuhan / panti jompo
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

SPM	Sasaran	Program
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perencanaan pada hakikatnya adalah pemilihan saat ini terhadap kondisi masa depan yang kita hendaki, beserta langkah-langkah yang kita perlukan untuk mewujudkan kondisi - kondisi tersebut. Jadi sebenarnya perencanaan adalah seni "memilih" dari beberapa program/kegiatan yang ada. Dalam melakukan pilihan ini hal yang perlu diperhatikan dan dicermati adalah berkaitan dengan "metode". Metode inilah yang diatur oleh ketentuan dan regulasi tersebut. Hal inilah yang melatar belakangi adanya penentuan "skala prioritas" dalam perencanaan pembangunan karena jika tidak ada prioritas maka penggunaan dana yang "terbatas" tadi akan menjadi tidak efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Penyusunan Program/kegiatan mengacu pada isu strategis, prioritas dan kegiatan yang memperhatikan RPJPD, RPJMD Provinsi serta hasil musrenbang yang akan diakomodir. Rencana kerja tentunya mengacu pada empat prioritas pembangunan kabupaten Tanah Laut selain juga untuk menjaga ritme pemerintahan serta untuk program prioritas diarahkan untuk mewujudkan tema "**Kebangkitan UMKM dan Produk Unggulan Kabupaten Tanah Laut**", disajikan secara lebih terperinci rencana program dan kegiatan prioritas daerah untuk tahun 2019 yang terlihat pada lampiran.

Tabel 5.1 Program dan kegiatan berdasarkan urusan

No	Urusan RKPD	Program	Kegiatan	Rp
	Wajib			
0	Non Urusan	1	681	125,085,362,135.00
1	Pendidikan	6	44	51,361,259,765.00
2	Kesehatan	19	107	178,625,442,215.00
3	Pekerjaan Umum	11	25	41,260,595,055.00

No	Urusan RKPD	Program	Kegiatan	Rp
4	Perumahan Rakyat	3	8	1,075,001,500.00
5	Penataan Ruang	3	7	13,917,425,980.00
6	Perencanaan Pembangunan	10	108	5,796,203,596.00
7	Perhubungan	6	15	4,213,477,201.00
8	Lingkungan Hidup	6	22	14,842,928,380.00
9	Pertanahan	4	14	457,100,640.00
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	2	15	538,154,685.00
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	26	1,323,280,565.00
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	3	8	562,833,000.00
13	Sosial	7	21	3,098,264,120.00
14	Ketenagakerjaan	3	17	1,734,162,300.00
15	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5	24	2,646,230,200.00
16	Penanaman Modal	3	6	350,100,000.00
17	Kebudayaan	3	5	642,171,825.00
18	Kepemudaan dan Olahraga	7	55	4,413,361,510.00
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	9	76	10,408,570,695.00
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	25	408	68,157,824,712.00
21	Ketahanan Pangan	1	12	2,443,796,460.00
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	41	4,466,005,020.00
23	Statistik	1	5	101,608,200.00

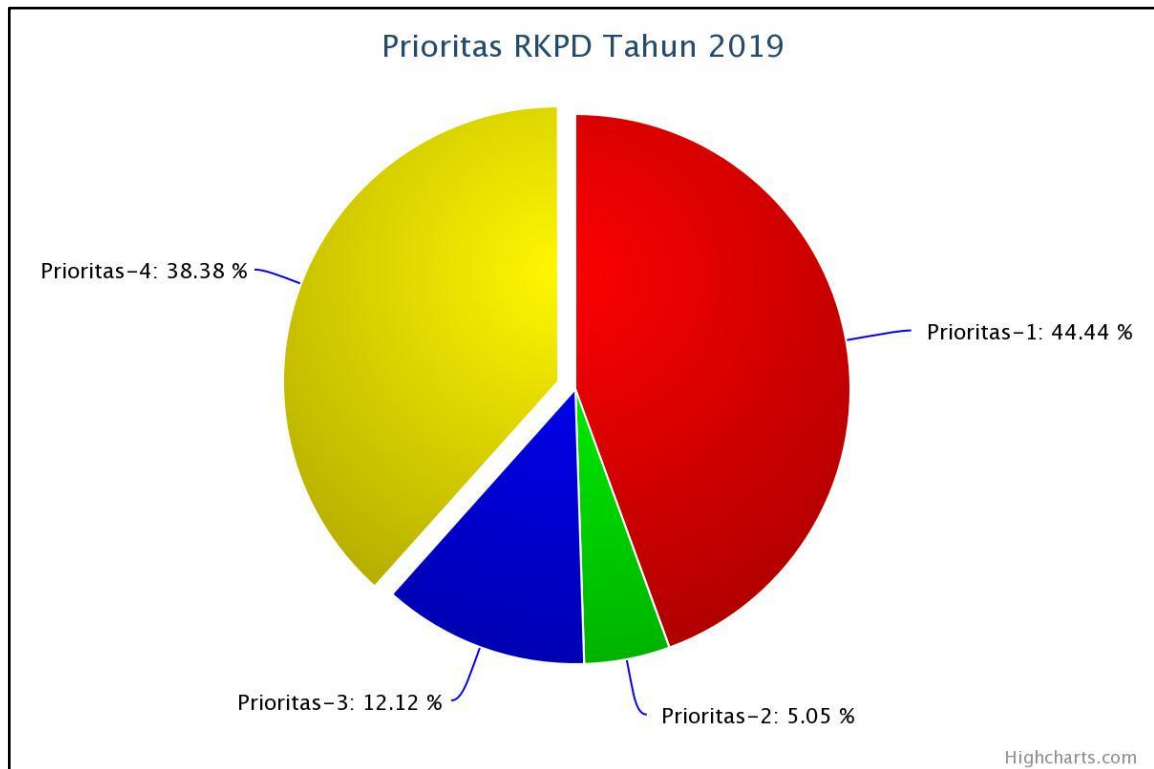
No	Urusan RKPD	Program	Kegiatan	Rp
24	Kearsipan	3	10	257,651,370.00
25	Komunikasi dan Informatika	3	18	4,746,903,588.00
26	Perpustakaan	1	6	471,136,680.00
0	Pilihan			
27	Pertanian	11	31	12,136,297,873.00
28	Kehutanan	0	0	-
29	Pariwisata	3	12	6,141,485,150.00
30	Kelautan dan Perikanan	4	9	1,374,496,250.00
31	Perdagangan	4	10	544,385,920.00
32	Industri	4	5	1,687,072,950.00
Total				564,880,589,540

Tabel 5.2 Pagu Berdasarkan Prioritas RKPD

No	Prioritas RKPD	Program	Kegiatan	Rp	%
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	60	331	249.222.283.853	44%
2	Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan menurunkan Angka Pengangguran	40	130	28,978,209,103	5%
3	Peningkatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah	22	60	69.104.700.745	12%
4	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang akuntabel dan Profesionalisme Pelayanan Publik	58	1.330	217.343.357.839	38%

No	Prioritas RKPD	Program	Kegiatan	Rp	%
-	TOTAL	180	1.851	564,880,589,540	

Gambar. Prioritas RKPD Tahun 2019



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan bagi suatu tahun perencanaan. Hal ini ditunjukkan menunjukkan pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir tahun perencanaan dapat dicapai.

Indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah ini terdiri dari indikator makro serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan memberikan gambaran pencapaian kinerja tahunan.

Tabel 6.1 Target Indikator Makro Tahun 2019

No.	Uraian	Target
1.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	4,00%
2.	Penanganan Kemiskinan	4,00%
3.	Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah	8,00 %
4.	Peningkatan Infrastruktur, Sanitasi dan air. minum layak	menuju universal akses : (100 - 0 - 100)
5.	Penurunan Angka Pengangguran (TPT)	3,00 %

Secara umum indikator yang akan dicapai untuk memenuhi arah permendagri terlihat dalam matrik berikut ini :

No.	INDIKATOR
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1	Pertumbuhan PDRB
2	Laju inflasi
3	PDRB per kapita
4	Indeks Gini
5	Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia
6	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

No.	INDIKATOR
7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
8	Rasio kesenjangan kemiskinan
9	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
11	Angka melek huruf
12	Angka rata-rata lama sekolah
13	Angka usia harapan hidup
14	Persentase balita gizi buruk
15	Persentase balita gizi buruk
16	Cakupan Desa Siaga Aktif
17	Angka partisipasi angkatan kerja
18	Tingkat partisipasi angkatan kerja
19	Tingkat pengangguran terbuka
20	Rasio penduduk yang bekerja
21	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja
22	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas
23	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja
24	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
25	Indeks Kepuasan Masyarakat
26	Persentase PAD terhadap pendapatan
27	Opini BPK
28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)
29	Penguatan cadangan pangan
30	Penanganan daerah rawan pangan
31	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
32	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB
33	Produksi sektor pertanian
34	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB
35	Produksi sektor perkebunan
36	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB
37	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
38	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB
39	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
40	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
41	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

No.	INDIKATOR
42	Pertumbuhan Industri
43	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB
II.	ASPEK DAYA SAING DAERAH
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
1	
2	Nilai tukar petani
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita
4	Produktivitas total daerah
5	Angka kriminalitas yang tertangani
6	Rasio ketergantungan
II.	ASPEK PELAYANAN UMUM
	Layanan Urusan Wajib Dasar
1	Pendidikan
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1.2	Angka partisipasi kasar
1.3	Angka pendidikan yang ditamatkan
1.4	Angka Partisipasi Murni
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
1.5	Angka partisipasi sekolah
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B
1.5.3	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C
1.6.	Angka Putus Sekolah:
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
1.6.3	
1.7.	Angka Kelulusan:
1.7.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI
1.7.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

No.	INDIKATOR
1.8.	Angka Melanjutkan (AM):
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
1.9.	Fasilitas Pendidikan:
1.9.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik
1.9.3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar
1.9.4	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah
1.9.5	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar
1.9.6	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah
1.9.7	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar
1.9.8	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata
1.9.9	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar
1.9.10	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki
1.9.11	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
1.9.12	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
2	Kesehatan
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup
2.6	Rasio posyandu per satuan balita
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk

No.	INDIKATOR
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
2.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)
2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani
2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
2.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
2.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS
2.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
2.25	Penderita diare yang ditangani
2.26	Angka kejadian Malaria
2.27	Tingkat kematian akibat malaria
2.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida
2.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat
2.30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi
2.31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir
2.32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS
2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
2.34	Cakupan kunjungan bayi
2.35	Cakupan puskesmas
2.36	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
2.37	Cakupan pelayanan nifas
2.38	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

No.	INDIKATOR
2.39	Cakupan pelayanan anak balita
2.40	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin
2.41	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat
2.42	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
2.43	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)
2.44	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1	Pekerjaan Umum:
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
3.1.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk
3.1.3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4
3.1.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)
3.1.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)
3.1.6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar
3.1.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi
3.1.8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
3.1.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
3.1.10	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor
3.1.11	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
3.1.12	Rasio Jaringan Irigasi
3.1.13	Persentase penduduk berakses air minum
3.1.14	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan
3.1.15	Persentase areal kawasan kumuh
3.1.16	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
3.2.	Penataan Ruang:

No.	INDIKATOR
3.2.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
3.2.2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
3.2.3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
3.2.4	Ruang publik yang berubah peruntukannya
3.2.5	Ketaatan terhadap RTRW
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
4.1	Rasio rumah layak huni
4.2	Rasio permukiman layak huni
4.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni
4.4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
4.5	Persentase pemukiman yang tertata
4.6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh
4.7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
4.8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan
4.9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
5.5	Persentase Penegakan PERDA
6.	Sosial

No.	INDIKATOR
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
6.2	Persentase PMKS yang tertangani
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
6.4	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial
6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
Layanan Urusan Wajib Non Dasar	
1.	Tenaga Kerja
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
1.4	Keselamatan dan perlindungan
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
1.7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan

No.	INDIKATOR
1.8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta
2.4	Rasio KDRT
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

No.	INDIKATOR
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA
2.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi
2.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun
2.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian
3.	Pangan
	Ketersediaan pangan utama
	Ketersediaan energi dan protein perkapita
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
4.	Pertanahan
	Persentase luas lahan bersertifikat
	Penyelesaian kasus tanah Negara
	Penyelesaian izin lokasi
5.	Lingkungan Hidup
	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota
	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota
	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan

No.	INDIKATOR
	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota
	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA
	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional
	Penetapan hak MHA
	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan
	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat
	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
	Timbulan sampah yang ditangani
	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R
	Persentase cakupan area pelayanan
	Persentase jumlah sampah yang tertangani
	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota
	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan

No.	INDIKATOR
	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk
	Rasio bayi berakte kelahiran
	Rasio pasangan berakte nikah
	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
	Cakupan penerbitan akta kelahiran
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
	Persentase LSM aktif
	Persentase LPM Berprestasi
	Persentase PKK aktif
	Persentase Posyandu aktif
	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB

No.	INDIKATOR
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk
	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan
	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan
	Rata-rata jumlah anak per keluarga
	Ratio Akseptor KB
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

No.	INDIKATOR
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri
	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan
	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa
	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga
	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
	Rata-rata usia kawin pertama wanita
	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes
9.	Perhubungan
	Jumlah arus penumpang angkutan umum
	Rasio ijin trayek
	Jumlah uji kir angkutan umum
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
	Persentase layanan angkutan darat

No.	INDIKATOR
	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum
	Pemasangan Rambu-rambu
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun
10	Komunikasi dan Informatika
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
	Cakupan Layanan Telekomunikasi
	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
	Proporsi rumah tangga dengan akses internet
	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi
11.	Penanaman Modal
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
	Rasio daya serap tenaga kerja
12.	Kepemudaan dan Olah Raga
	Persentase organisasi pemuda yang aktif
	Persentase wirausaha muda
	Cakupan pembinaan olahraga
	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi
	Cakupan pembinaan atlet muda
	Jumlah atlet berprestasi
	Jumlah prestasi olahraga
13.	Statistik

No.	INDIKATOR
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi
	Buku "kabupaten dalam angka"
	Buku "PDRB"
14.	Persandian
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah
15.	Kebudayaan
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu
16.	Perpustakaan
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
	Rasio perpustakaan persatuan penduduk
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan
	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat
17	Kearsipan
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan
	Layanan Urusan Pilihan
1.	Pariwisata

No.	INDIKATOR
	Kunjungan wisata
	Lama kunjungan Wisata
	PAD sektor pariwisata
2.	Pertanian
	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB
	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB
	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
	Cakupan bina kelompok petani
3.	Perdagangan
	Ekspor Bersih Perdagangan
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
4.	Perindustrian
	Cakupan bina kelompok pengrajin
5.	Transmigrasi
	Persentase transmigran swakarsa
6.	Kelautan dan Perikanan
	Produksi perikanan
	Konsumsi ikan
	Cakupan bina kelompok nelayan
	Produksi perikanan kelompok nelayan
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial
	Nilai tukar nelayan
	Penunjang Urusan
1.	Perencanaan Pembangunan

No.	INDIKATOR
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
2.	Keuangan
	Opini BPK terhadap laporan keuangan
	Persentase SILPA
	Persentase SILPA terhadap APBD
	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana
	Persentase belanja pendidikan (20%)
	Persentase belanja kesehatan (10%)
	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung
	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa
	Penetapan APBD
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah
	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah
	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah
4.	Penelitian dan pengembangan

No.	INDIKATOR
	Persentase implementasi rencana kelitbangan.
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.
5.	Pengawasan
	Persentase tindak lanjut temuan
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
	Opini Pengawasan eksternal atas kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan
	Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai sekurang-kurangnya "B"
	Tingkat Maturitas SPIP
	Tingkat Kapabilitas APIP
	Sekretariat Dewan
	Prosentase Kegiatan Rapat yang difasilitasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
	Prosentase Kegiatan Kunjungan kerja, Konsultasi, Koordinasi dan Pendalaman tugas Anggota DPRD yang di Fasilitasi
	Prosentase Anggota Dewan yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD

**Tabel 6.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan / Rumus Perhitungan	SKPD Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Kebersihan dan Lingkungan	1	Jumlah penghargaan yang diperoleh	Penilaian terhadap kebersihan pada tahun n	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan LH
		2	Indeks Pencemaran Udara - emisi - ambient	Tingkat kualitas udara berdasarkan hasil pengujian pada tahun n	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan LH
2	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat terhadap PDRB	1	Jumlah pendapatan perkapita per tahun	$\frac{\text{Jumlah Pendapatan Perkapita Tahun } n - (\text{Tahun } n-1)}{\text{Jumlah pendapatan Perkapita Tahun } n-1} \times 100\%$	Dinas Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	1	Jumlah Pengunjung Wisata	$\frac{\text{Jumlah Pengunjung Wisata}}{\text{Target pengunjung wisata}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan / Rumus Perhitungan	SKPD Penanggung Jawab
		2	Jumlah obyek wisata yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah obyek wisata yang dikembangkan}}{\text{Obyek wisata yang dikembangkan}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata
		3	Destinasi Wisata	Rata-rata destinasi wisata dalam satu tahun	Dinas Pariwisata
4	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	1	Angka Kelulusan	$\frac{\text{Jumlah siswa yang lulus}}{\text{Jumlah Siswa}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Angka melek huruf	$\frac{\text{Jumlah anak usia > 15 yang melek huruf}}{\text{Jumlah Anak usia > 15}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3	Angka Partisipasi Murni (APM)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Rumus Perhitungan	SKPD Penanggung Jawab	
			- PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak didik PAUD usia 0-6 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-6 tahun}} \times 100 \%$	
			- SD/MI	$\frac{\text{Jumlah siswa (SD,MI) usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100 \%$	
			- SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa (SMP, MTs) usia 13-15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100 \%$	
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Rumus Perhitungan	SKPD Penanggung Jawab
		- PAUD	Jumlah anak didik PAUD $\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0-6 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-6 tahun}} \times 100\%$	
		- SD/MI	$\frac{\text{Jumlah seluruh siswa SD,MI}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$	
		- SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah seluruh siswa SMP, MTs}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100\%$	
5	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	1 Umur Harapan Hidup	Survey BPS Kabupaten Tanah Laut	Dinas Kesehatan

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Rumus Perhitungan	SKPD Penanggung Jawab
		2 Angka Kematian Bayi	$\frac{\text{Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan
		3 Angka Kematian Ibu	$\frac{\text{Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan
		4 Prevalensi Gizi Kurang	$\frac{\text{Jumlah balita gizi kurang yang disurvei (sampel) disuatu wilayah pada periode waktu tertentu}}{\text{Jumlah balita yang disurvei (sampel) disuatu wilayah pada periode waktu yang sama}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan
6	Meningkatnya Infrastruktur Daerah	1 persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	$\frac{\text{Jaringan Irigasi yang berfungsi baik}}{\text{Luas irigasi}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanian

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan / Rumus Perhitungan	SKPD Penanggung Jawab
		2	Persentase panjang Jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		3	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang sungai Kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang sungai}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		4	Jembatan dalam kondisi baik	Jumlah jembatan dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		5	Persentase Penyediaan Prasarana Air Baku	$\frac{\text{Total kapasitas Ikk lt/Det}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
7	Meningkatnya daya saing Tenaga kerja	1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah Penduduk 15}} \times 100 \%$	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan / Rumus Perhitungan	SKPD Penanggung Jawab
8	Menurunnya angka kemiskinan	1	Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	$\frac{\text{Jumlah PMKS Tahun } n-1 - \text{Jumlah PMKS Tahun } n}{\text{Jumlah PMKS Tahun } n} \times 100 \%$	Dinas Sosial
9	Meningkatnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa	1	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun n	Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
		2	Nilai SAKIP Kabupaten Tanah Laut ke Tingkat yang lebih baik	Nilai Minimal "B"	Sekretariat Daerah
		3	Nilai LPPD Kab. Tanah Laut ke tingkat yang lebih baik	$\frac{\text{nilai tahun } n - \text{nilai tahun } (n-1)}{\text{nilai tahun } (n-1)} \times 100 \%$	Sekretariat Daerah
		4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey	Sekretariat Daerah

Tabel 6.3 INDIKATOR SASARAN POKOK dan TARGET RENJA SKPD 2019

No.	SKPD	Indikator sasaran pokok SKPD tahun 2019	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Setwan	Prosentase Kegiatan Rapat yang difasilitasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	79%
2		Prosentase Kegiatan Kunjungan kerja, Konsultasi, Koordinasi dan Pendalaman tugas Anggota DRPD yang di Fasilitasi	79%
3	Inspektorat	Persentase tindak lanjut temuan	60%
4	Bappeda	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	80%

No.	SKPD	Indikator sasaran pokok SKPD tahun 2019	Target
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka kriminalitas yang tertangani	0
7	Dinas Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	10.00%
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Angka melek huruf	99.88
9	Dinas Kesehatan	Umur Harapan Hidup	69.4
		Angka Kematian Bayi	11
		Angka Kematian Ibu	35
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No.	SKPD	Indikator sasaran pokok SKPD tahun 2019	Target
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
12	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase tingkat penurunan angka kelahiran total (Fertility Rate/TFR) per WUS (15-49thn).	2,5
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	100 %
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	

No.	SKPD	Indikator sasaran pokok SKPD tahun 2019	Target
15	Dinas Perpustakaan dan kearsipan		
16	Sekretariat Daerah Bagian Umum	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan terhadap pimpinan daerah dan sekretariat daerah	
17	Disnakerin	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	20 Orang
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	80 wirausaha
		Besarnya kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	15 Perjanjian
		Besarnya Tenaga Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	20 %
		Besarnya Pekerja/Buruh yang menjadi peserta jamsostek	15 %
		Cakupan bina kelompok pengrajin	140 Orang
18	DiskopUKDag	Persentase koperasi aktif	15 Koperasi
19	Disnakkeswan	Meningkatnya populasi ternak	5 %

No.	SKPD	Indikator sasaran pokok SKPD tahun 2019	Target
20	Distanhortibun	Peningkatan produksi tanaman pangan	5 %
21	DisKPkan	Ketersediaan pangan utama	2 Kebun percontohan
22	Bapenda	Prosentase PAD terhadap Pendapatan	11,50%
23	Dinas Pariwisata	Jumlah Pengunjung wisata	280.000 orang
		Meningkatnya Jumlah penerimaan sektor pariwisata	50,382,500,000
		Meningkatnya Jumlah penerimaan sektor pariwisata	4 event
		Jumlah tersedia Sarana Prasarana pada obyek wisata	2 OW
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia pelaku Usaha Jasa Kepariwisataaan dan Manusia Pokdarwis	2 Kegiatan
24	BPKAD	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
		Meningkatkan kualitas pelayananPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sangat Baik

No.	SKPD	Indikator sasaran pokok SKPD tahun 2019	Target
		Persentase pengelolaan keuangan SKPD yg berbasis akrual sesuai ketentuan	100%
		Persentase jumlah SKPD yg melaporkan laporan sesuai ketentuan	100%
		Persentase Jumlah dokumen pendapatan dan piutang yg tersusun sesuai ketentuan	100%
		Persentase jumlah Laporan Kas SKPD sesuai ketentuan	100%
		Meningkatkan penyusunan Perda dan Perbup APBD yg disusun sesuai ketentuan	100%
		Persentase Kualitas pelayanan SP2D yg tepat waktu	100%
		Meningkatkan kualitas pelayanan pembiayaan Hibah/Bansos, dana bagi hasil, bantuan keuangan dan penyertaan modal.	100%
		Persentase BMD yg diamankan dan terpelihara	95%
		Persentase BMD Pemkab Tala yg dimanfaatkan	95%

No.	SKPD	Indikator sasaran pokok SKPD tahun 2019	Target
		Persentase Peningkatan kebutuhan BMD	95%
		Persentase BMD yg tercatat pada neraca	100%
		Persentase BMD yg dihapuskan	100%
25	DPMPTSP	Jumlah Nilai Investasi Daerah	5%
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Meningkatkan Infrastruktur Daerah	
27	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Meningkatnya Prestasi Kepemudaan di Kabupaten Tanah Laut	100 %
28	Dinas Komunikasi dan informasi	Terwujudnya pelayanan informasi bagi masyarakat	100 %
29	Dinas Perhubungan	Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan terkendali	
30	Kecamatan Bajuin	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan yang ada di Kecamatan	100%

No.	SKPD	Indikator sasaran pokok SKPD tahun 2019	Target
31	Kecamatan Bati - Bati	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan yang ada di Kecamatan	100%
32	Kecamatan Batu Ampar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan yang ada di Kecamatan	100%
33	Kecamatan Bumi Makmur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan yang ada di Kecamatan	100%
34	Kecamatan Jorong	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan yang ada di Kecamatan	100%
35	Kecamatan Kintap	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan yang ada di Kecamatan	100%
36	Kecamatan Kurau	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan yang ada di Kecamatan	100%
37	Kecamatan Panyipatan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan yang ada di Kecamatan	100%
38	Kecamatan Pelaihari	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan yang ada di Kecamatan	100%
39	Kecamatan Takisung	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan yang ada di Kecamatan	100%
40	Kecamatan Tambang Ulang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan yang ada di Kecamatan	100%
41	Kelurahan Angsau	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan yang ada di Kelurahan	100%
42	Kelurahan Karang Taruna	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan yang ada di Kelurahan	100%
43	Kelurahan Pabahanan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan yang ada di Kelurahan	100%

No.	SKPD	Indikator sasaran pokok SKPD tahun 2019	Target
44	Kelurahan Pelaihari	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan yang ada di Kelurahan	100%
45	Kelurahan Sarang Halang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan yang ada di Kelurahan	100%

BAB VII P E N U T U P

Demikianlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 ini disusun. Dengan harapan RKPD ini akan berproses sebagaimana mestinya, sehingga apa-apa yang telah direncanakan, bisa terwujudkan sebagaimana yang diharapkan. Dokumen RKPD ini disusun melalui proses penelaahan dan analisis terhadap Isu strategis, masalah mendesak, Evaluasi terhadap Pencapaian dan target RPJPD dan RPJMD Provinsi serta RPJMD Teknokratik, masukan dari berbagai pihak yang telah dilaksanakan melalui musrenbang desa/kelurahan, musrenbang RKPD di Kecamatan, dan Forum SKPD, Musrenbang RKPD Kabupaten serta pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Satu hal yang menjadi bentuk terobosan dari RKPD Tahun 2019 ini adalah berkaitan dengan efektivitas sebuah perencanaan. Selama ini ada suatu anggapan bahwa sebuah dokumen perencanaan adalah suatu bahan yang bersifat umum tanpa berpengaruh nyata terhadap implementasi. Seringkali perencanaan yang disusun bersifat normatif di mana hal itu sudah menjadi tujuan dan harapan di kehidupan manusia sampai pada masa datang yang tidak bisa ditentukan kapan berakhirnya. Perencanaan hanya disusun untuk mengakomodir semua usulan SKPD tanpa ada fokus tentang apa yang akan dibangun, dan hasilnya tidak jelas terukur.

Proses Perencanaan yang dilaksanakan tetap mengedepankan aturan dan regulasi yang dibuat, suatu inovasi yang dilakukan Pemerintah Daerah merupakan suatu seni dalam melakukan perencanaan sehingga perencanaan dapat menghasilkan suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga kemajuan suatu daerah sangat tergantung pada perencanaan yang disusun secara berkesinambungan.

Dengan ditetapkannya RKPD ini tidak hanya dipandang sebagai proses formalitas sebuah perencanaan semata, namun merupakan acuan

substantif dan payung hukum yang memadai untuk melakukan proses pembangunan. Perlu implementasi yang baik untuk mewujudkan keberhasilan yang sesungguhnya. Hal ini merupakan salah satu ikhtiar kita untuk memulai sesuatu dengan kesungguhan untuk menuju suatu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk mencapai tujuan akhir kita bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengedepankan pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

Lampiran II

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

Nomor : Tahun 2017

Tanggal :Mei 2017

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pendidikan									
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	Program Pendidikan Anak Usia Dini		Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	44%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	SKPD			Jumlah jenis 4 Jenis	4 Jenis	45,000,000	100,000,000		
			Pengadaan mebeluer sekolah	SKPD			Jumlah mebeluer 5 Jenis	5 Jenis	90,000,000	80,000,000		
			Penambahan ruang kelas sekolah	SKPD			Jumlah 1 RKB (musrenbang) 1 RKB Jumlah 6 RKB	1 RKB 6 RKB	1,313,100,000	1,000,000,000		
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	SKPD			Jumlah TK 4 Tk	4 Tk	396,000,000	730,000,000		
			Penyelenggaraan akreditasi PAUD				Jumlah lembaga 60 lembaga	60 lembaga	150,000,000	150,000,000		
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	88.51					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyelenggaraan pengembangan budaya mutu SD/MI dan SMP/MTS	SKPD			jumlah sekolah 140 Sekolah	140 Sekolah	-	800,000,000		
			Penyediaan bantuan bagi siswa tidak mampu / berprestasi jenjang SD dan SMP Sederajat	SKPD			Jumlah siswa penerima bantuan SMP 1.027 siswa Jumlah siswa penerima bantuan SD 3.737	1.027 siswa 3.737	3,631,140,000	4,034,600,000		
			Pembangunan gedung sekolah	SKPD			Jumlah Gedung Sekolah (Musrenbang) 8 SD	8 SD	1,558,347,300	8,400,000,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan pepustakaan sekolah	SKPD			Jumlah perpustakaan (musrenbang) 1 SMP Jumlah perpustakaan (musrenbang) 1 SD	1 SMP 1 SD	512,450,940	600,000,000	
			Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	SKPD			jumlah sekolah (musrenbang) 5 SD	5 SD	498,995,181	584,600,000	
			Pengadaan mebeluer sekolah	SKPD			Jumlah mebeluer 400 Lokal Jumlah mebeluer 520 Pabrkasi	400 Lokal 520 Pabrkasi	899,990,910	2,550,000,000	
			Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	SKPD			Jumlah rumah dinas yang dibangun (musrenbang) 1 SD	1 SD	200,240,530	200,000,000	
			Pengadaan perlengkapan sekolah	SKPD			Jumlah sekolah 40 Sekolah	40 Sekolah	3,200,000,000	5,550,000,000	
			Penambahan ruang kelas sekolah	SKPD			Jumlah ruang kelas (musrenbang) 7 SD Jumlah ruang kelas 1 RKB	7 SD 1 RKB	2,811,106,960	1,242,450,000	
			Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	SKPD			Jumlah rumah dinas (musrenbang) 1 SD	1 SD	198,406,656	300,000,000	
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	SKPD			Jumlah ruang kelas yang direhab 0 xx Jumlah ruang kelas yang direhab (musrenbang) 7 SD	0 xx 7 SD	2,392,924,248	6,310,655,600	
			Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	SKPD			Terlaksananya pembangunan lab (musrenbang) 1 SMP	1 SMP	261,264,105	858,000,000	
			Pelatihan Penyusunan kurikulum	SKPD			Jumlah Peserta 160 orang	160 orang	135,000,000	150,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	SKPD			Jumlah sekolah 49 Sekolah	49 Sekolah	2,165,625,000	2,500,000,000	
			Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)	SKPD			Jumlah sekolah yang menerima 238 Sekolah	238 Sekolah	3,017,254,500	3,400,000,000	
			Penyelenggaraan Paket A Setara SD	SKPD			Jumlah lembaga kelompok belajar paket A 47 Kelompok	47 Kelompok	297,000,000	330,000,000	
			Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	SKPD			Jumlah lembaga kelompok belajar paket B 28 kelompok	28 kelompok	396,000,000	440,000,000	
			Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	SKPD			Jumlah sarana (musrenbang) 1 SMP	1 SMP	197,337,780	200,000,000	
			Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	SKPD			Jumlah lomba 8 lomba	8 lomba	630,000,000	600,000,000	
			Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	SKPD			jumlah sekolah yang akan diakreditasi 125 sekolah	125 sekolah	225,607,500	250,675,000	
			Penyelenggaraan ujian SD/MI	SKPD			Jumlah peserta ujian nasional 6.900 Siswa	6.900 Siswa	1,800,000,000	1,800,000,000	
			Penyelenggaraan ujian nasional SMP/MTs	SKPD			Jumlah peserta ujian nasional 5.000 siswa	5.000 siswa	1,800,000,000	1,800,000,000	
			Pembangunan pagar sekolah	SKPD			Jumlah sekolah (musrenbang) 2 SD	2 SD	190,887,500	300,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	SKPD			Jumlah taman, lapangan upacara, lapangan olahraga, dan fasilitas parkir (musrenbang) 6 SD Jumlah taman, lapangan upacara, lapangan olahraga, dan fasilitas parkir 1 Paket	6 SD 1 Paket	1,223,042,490	448,210,500	
			Penyelenggaraan ujian kesetaraan Paket A	SKPD			Jumlah peserta ujian Paket A 150 siswa	150 siswa	50,999,900	100,000,000	
			Penyelenggaraan ujian nasional kesetaraan Paket B	SKPD			Jumlah peserta ujian nasional Paket B 850 siswa	850 siswa	194,999,800	200,000,000	
			Program Pendidikan Menengah		Angka rata-rata lama sekolah	7.5					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyelenggaraan paket C setara SMU	SKPD			Jumlah lembaga kelompok belajar paket C 65 KB	65 KB	1,161,000,000	2,000,000,000	
			Penyelenggaraan ujian nasional kesetaraan Paket C	SKPD			Jumlah peserta ujian nasional 1.050 siswa	1.050 siswa	404,000,200	500,000,000	
			Program Pendidikan Non Formal		Tercapainya prestasi tenaga pendidik	100%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jambore pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal	SKPD			Jumlah peserta 16 lomba	16 lomba	90,000,000	100,000,000	
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Tercapainya kualifikasi tenaga pendidik sesuai standar yang dibutuhkan	100%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembinaan Tenaga Budaya dan Pelaku Seni	SKPD			Jumlah Kegiatan 3 Kali	3 Kali	180,000,000	300,000,000	
			Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	SKPD			Jumlah peserta 340 orang	340 orang	60,232,000	70,000,000	
			Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	SKPD			jumlah peserta 99 orang	99 orang	507,439,890	800,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	SKPD			Jumlah peserta 100 orang	100 orang	148,257,900	-	
			pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	SKPD			Jumlah Peserta 100 Orang	100 Orang	424,658,475	600,000,000	
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		Tersedianya data pendidikan yang terbaru dan valid	100%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	SKPD			Jumlah PAK 400 orang	400 orang	242,950,000	100,000,000	
			Penyusunan data/profil kependidikan	SKPD			Jumlah dokumen 1 dok	1 dok	45,000,000	50,000,000	
			Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	SKPD			Jumlah dokumen 2 dokumen	2 dokumen	180,000,000	200,000,000	
			Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	SKPD			Jumlah sekolah 289 Sekolah	289 Sekolah	135,000,000	150,000,000	
			Program Pendidikan Non Formal		Tercapainya kinerja tenaga pendidik sesuai yang ditargetkan	100%					Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Kabupaten			Jumlah Guru TKA/TPA, Madin/MIS dan Ponpes yang diberikan insentif 2.850 orang	2.850 orang	17,300,000,000	20,760,000,000	
			Kesehatan								
		Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Umur Harapan Hidup	69.4					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	SKPD, Pelaihari, Pelaihari			Jumlah rapat kegiatan TB paru 3 Kali Jumlah rapat kegiatan PPI 3 Kali Jumlah rapat evaluasi unit pengaduan masyarakat 3 Kali Jumlah rapat kegiatan ponek 3 Kali Jumlah rapat evaluasi penanggulangan resistensi 3 Kali Jumlah rapat kegiatan HIV 3 Kali Jumlah rapat koordinasi pelayanan di RS 19 Kali Jumlah pelayanan pemeriksaan kesehatan haji tahap II 1 Kali	3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 19 Kali 1 Kali	45,000,000	50,000,000	
			Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	SKPD, Pelaihari, Angsau			Jumlah dokumen pengawasan kualitas lingkungan rumah sakit 12 Dokumen	12 Dokumen	225,000,000	65,000,000	
			Pendamping Penyelenggaraan Jamkesmas	SKPD, Pelaihari, Angsau			Jumlah Laporan pendampingan JKN/BPJS Kesehatan 12 Bulan	12 Bulan	45,000,000	50,000,000	
			Pelayanan pengobatan gratis pasien kelas III	SKPD, Pelaihari, Angsau			Jumlah pelayanan pengobatan gratis pasien kelas III 8.750 Jiwa	8.750 Jiwa	10,000,000,000	11,000,000,000	
			Peningkatan kesehatan masyarakat	SKPD, Pelaihari, Angsau			Tersedia dokumen keperawatan 2 Dokumen	2 Dokumen	157,500,000	175,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		Tercapainya tingkat kesadaran masyarakat pola hidup sehat	80%					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat (Dana KTR)	SKPD, Pelaihari, Angsau			Instruktur senam 16 Kali Dialog interaktif penyuluhan kesmas 12 Kali Siaran radio 12 Kali Pembuatan naskah 12 Kali	16 Kali 12 Kali 12 Kali	67,500,000	75,000,000	
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Tercapainya kualifikasi tenaga kesehatan sesuai standar yang dibutuhkan	100%					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	SKPD, Pelaihari, Angsau			Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 2 Paket Materai 3000 dan 6000 180 Lembar Fotocopy 25.000 Lembar Catridge tinta printer 5 Buah Keyboard komputer 2 Pak Spanduk 5 Buah	2 Paket 180 Lembar 25.000 Lembar 5 Buah 2 Pak 5 Buah	225,000,000	250,000,000	
			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata		Berfungsinya secara baik Rumah Sakit Tipe D di Kitap	100%					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan rumah sakit	SKPD, Pelaihari, Angsau			Jumlah penyempurnaan gedung RS 7.200 M2 Jumlah penambahan pagar RS 1.200 M2 Jumlah penambahan daya listrik 1 Paket Jumlah penambahan tempat parkir 5.000 M2 Jumlah Pembebasan Lahan 10.000 M2	7.200 M2 1.200 M2 1 Paket 5.000 M2 10.000 M2	30,600,000,000	-	
			Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit	SKPD, Pelaihari, Angsau			makanan/minuman pasien kelas III 12 Bulan Jumlah makan dan minum penambah daya tahan tubuh petugas kebersihan radiologi dan laboratorium 12 Bulan Jumlah bahan dan alat pembersih untuk laundry 22 Jenis	12 Bulan 12 Bulan 22 Jenis	1,914,045,326	2,500,000,000	
			Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata		Berfungsinya secara baik peralatan kesehatan	100%					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	SKPD, Pelaihari, Angsau			Pemeliharaan alat kesehatan 3 Jenis Kalibrasi alat kesehatan Teknisi 1 Jenis pemeliharaan alat kesehatan / IPAL / Incenerator 12 Bulan Tenaga ahli 60 o/k/j	3 Jenis 1 Jenis 12 Bulan 60 o/k/j	675,000,000	1,500,000,000	
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		Terfasilitasinya secara baik asuransi kesehatan masyarakat	100%					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	SKPD, Pelaihari, Angsau			Fotocopy 30.000 Lembar Belanja kelengkapan komputer 3 Buah Belanja paket pengiriman 1 Tahun Belanja Materai 75 Lembar	30.000 Lembar 3 Buah 1 Tahun 75 Lembar	18,000,000	20,000,000	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Tercapainya kinerja RSUD H. Boejasin sesuai Target yang ditetapkan	100%					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	SKPD, Pelaihari, Angsau			Penerapan PPK BLUD 12 Bulan	12 Bulan	51,546,127,216	55,987,231,650	
			Program Jamkesmas		Persentase kepesertaan JKN BPJS mandiri	60 %					Dinas Kesehatan
			Jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya	Kabupaten			Jumlah peserta JKN 160.916 jiwa	160.916 jiwa	1,000,000,000	1,000,000,000	
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		Persentase obat yang memenuhi standar mutu khasiat dan keamanan	100 %					Dinas Kesehatan
			Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Kabupaten			Jumlah pengadaan obat dan BMHP 1 Paket	1 Paket	1,808,424,000	2,000,000,000	
			Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kintap			Jumlah pengadaan obat dan BMHP 1 paket	1 paket	1,350,000,000	2,000,000,000	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Tercapainya Target Umur harapan hidup, indeks kepuasan masyarakat, persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	100 %					Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelayanan dan pembiayaan kesehatan masyarakat	Kabupaten, SKPD			Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan dasar 187.872 orang	187.872 orang	40,340,712,000	20,000,000,000	
			Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan usia produktif	Kabupaten, SKPD			Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan program Kesehatan usia produktif 19 puskesmas	19 puskesmas	27,000,000	30,000,000	
			Peningkatan kapasitas pelayanan krisis kesehatan dan SPGDT PCS 199	Kabupaten, SKPD			Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tanggap Bencana Bagi Masyarakat 150 lokasi	150 lokasi	297,859,500	430,955,000	
			Peningkatan dan pengembangan kesehatan kerja dan olah raga	Kabupaten			Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan pengungsi korban bencana 19 puskesmas	19 puskesmas	35,100,000	75,000,000	
			Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Kabupaten			Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan pengungsi korban bencana 20 kegiatan	20 kegiatan	56,247,750	124,995,000	
			Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Kabupaten			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan tradisional 19 puskesmas Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program pengembangan kesehatan 0 puskesmas	19 puskesmas 0 puskesmas	40,500,000	80,520,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Kabupaten			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan peralatan standar 19 puskesmas	19 puskesmas	135,045,000	200,000,000	
			Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Kabupaten			Jumlah desa STBM 27 desa	27 desa	83,546,100	200,000,000	
			Peningkatan pelayanan kesehatan remaja dan UKS	Kabupaten			Jumlah sekolah yang mendapat Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar 6 sekolah Jumlah Pemeriksaan Anemi Darah bagi siswa remaja Putri 4 kali Jumlah Puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap anak 19 puskesmas	6 sekolah 4 kali 19 puskesmas	105,750,000	117,500,000	
			Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Kabupaten			Jumlah penemuan penderita penyakit menular langsung serta penyakit tular vektor dan zoonosis 7.263 kasus	7.263 kasus	39,999,600	45,000,000	
			Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	Kabupaten			Jumlah pengadaan alkes 4 paket	4 paket	900,000,000	1,000,000,000	
			Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	Pelaihari			Jumlah pengadaan alkes PMI 6 Paket	6 Paket	2,181,000,000	2,181,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan kesehatan masyarakat	Kabupaten			Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan survey kepuasan 19 puskesmas Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan PIS PK 19 puskesmas	19 puskesmas 19 puskesmas	117,000,000	140,000,000	
			Program Pengawasan Obat dan Makanan		persentase desa/ kelurahan mengalami kejadian luar biasa	100 %					Dinas Kesehatan
			Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Kabupaten			Jumlah TPM terdata 3 kali Jumlah infeksi kesehatan makanan minuman 5.021 buah	3 kali 5.021 buah	31,050,000	34,500,000	
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; Persentase Desa siaga aktif	100 %					Dinas Kesehatan
			Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (Dana KTR)	Kabupaten			Jumlah Promosi Kesehatan dengan Berbagai media 22 macam	22 macam	450,000,000	500,000,000	
			Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat (Dana KTR)	Kabupaten			Jumlah Rumah tangga berPHBS 8.000 buah	8.000 buah	83,061,000	92,290,000	
			Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	Kabupaten			Jumlah desa siaga aktif 135 desa	135 desa	56,245,500	62,495,000	
			Peningkatan kemitraan bagi upaya kesehatan berbasis masyarakat	Kabupaten			Jumlah pembinaan kemitraan dengan UKBM (saka bhakti Husada) 8 kali	8 kali	191,389,500	462,655,000	
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat		prevalensi balita gizi kurang	10 %					Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Kabupaten			Jumlah peta informasi kurang gizi 1 dokumen	1 dokumen	9,765,000	10,850,000	
			Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Kabupaten			Jumlah Balita dan bumil mendapat PMT 232 orang	232 orang	179,409,000	199,344,000	
			Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Kabupaten			Jumlah Pelacakan dan pemantauan kasus Balita Gizi buruk dan Bumil KEK. 116 orang Jumlah Bumil KEK yang ditangani 116 orang Jumlah Anak Gizi kurang yang ditangani 116 orang	116 orang 116 orang 116 orang	60,102,000	85,049,900	
			Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Kabupaten			Jumlah kader pendamping Kadarzi 28 orang Jumlah penilaian kinerja TPG Puskesmas 1 kali	28 orang 1 kali	21,375,000	25,000,000	
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		Presentase capaian target Cakupan desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyeiidikan Epidimiologi < 24 jam; Cakupan desa/Kelurahan UCI; Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberculuse; Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko terinfeksi HIV	100%					Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Kabupaten			Jumlah Penyemprotan / Fogging (Pengasapan) 75 fokus	75 fokus	135,000,000	150,000,000	
			Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Kabupaten			Jumlah penemuan penderita penyakit menular langsung (TB, HIV, Kusta, ISPA, Diare, Prambusia) dan penyakit Tular Vektor dan Zonosis lainnya 7.616 kasus	7.616 kasus	84,999,600	119,444,000	
			Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	Kabupaten			Jumlah penemuan penderita penyakit menular langsung (TB, HIV, Kusta, ISPA, Diare, Prambusia) dan penyakit Tular Vektor dan Zonosis lainnya 7.616 kasus	7.616 kasus	29,415,600	35,000,000	
			Peningkatan imunisasi	Kabupaten			Jumlah Balita yang diberikan Imunisasi dasar lengkap 7.019 balita	7.019 balita	125,343,000	156,400,000	
			Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Kabupaten			Jumlah Jemaah Haji diperiksa 250 JCH Jumlah Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan KLB 14 kejadian	250 JCH 14 kejadian	104,908,500	125,565,000	
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Tercapainya Target terakreditasi puskesmas	100%					Dinas Kesehatan
			Pengumpulan data kematian CRVS(Civil registration dan vital statistic)	Kabupaten, SKPD			Jumlah Kematian di masyarakat di data 1.000 kematian	1.000 kematian	34,650,000	38,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Kabupaten			Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai izin 20 buah Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi 20 fasyankes	20 buah 20 fasyankes	517,608,000	400,000,000	
			Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Kabupaten			Jumlah dokumen pemutakhiran data pelayanan kesehatan yang disusun sesuai standar 2 dokumen	2 dokumen	13,720,500	20,195,000	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten			Jumlah dokumen pelaporan yang disusun sesuai standar 12 buah	12 buah	24,421,500	27,135,000	
			Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya		Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya	87 %					Dinas Kesehatan
			Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya	Kabupaten, SKPD			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 18 buah	18 buah	3,316,320,000	5,300,000,000	
			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata		Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit terpenuhi	100 %					Dinas Kesehatan
			Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Kintap			Jumlah Pengolahan limbah padat dan cair 2 unit	2 unit	2,700,000,000	3,000,000,000	
			Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Kintap			Jumlah pengadaan alat kesehatan rumah sakit 1 paket	1 paket	3,600,000,000	4,000,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Kintap			Jumlah ambulance 1 unit	1 unit	540,000,000	600,000,000	
			Pengadaan mebeuleur rumah sakit	Kintap			Jumlah sarana dan prasarana fasyankes 1 paket	1 paket	270,000,000	300,000,000	
			Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Kintap			Jumlah sarana dan prasarana fasyankes yang tersedia 1 paket	1 paket	686,700,000	763,000,000	
			Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Kintap			Jumlah bahan logistik 1 tahun	1 tahun	720,000,000	800,000,000	
			Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	Kintap			Jumlah sarana dan prasarana fasyankes yang tersedia 1 tahun	1 tahun	270,000,000	300,000,000	
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		Persentase penanganan desa/Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa.	100 %					Dinas Kesehatan
			Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Kabupaten, SKPD			Jumlah kerjasama dengan institusi (kemitraan dalam pencegahan penyakit menular) 3 buah	3 buah	41,925,600	46,584,000	
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		Persentase pelayanan Kesehatan anak Balita; Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	100 %					Dinas Kesehatan
			Peningkatan kapasitas petugas dalam perawatan anak balita	Kabupaten, SKPD			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan MTBS 19 puskesmas ;jumlah pembinaan Kualitas Pelayanan Program Kes Anak 19 puskesmas	19 puskesmas 19 puskesmas	102,150,000	127,823,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	60 %					Dinas Kesehatan
			Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Kabupaten			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan Usia 19 puskesmas	19 puskesmas	88,200,000	132,600,000	
			Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan		Tingkat ketaatan terhadap standar kesehatan produk makanan	100%					Dinas Kesehatan
			Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Kabupaten			Jumlah pemeriksaan sampel makanan dan obat 19 puskesmas Jumlah Tempat Pengelola Makanan yang ikut pelatihan Higiene sanitasi Makanan 40 buah	19 puskesmas 40 buah	28,300,500	100,000,000	
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		Angka Kematian Ibu ; Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100 %					Dinas Kesehatan
			Peningkatan kapasitas petugas dalam penanganan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan KB	Kabupaten, SKPD			Jumlah Akseptor KB Baru 7.685 peserta Jumlah Pertolongan persalinan sesuai standar 5.431 bulin	7.685 peserta 5.431 bulin	110,763,000	140,288,300	
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular		Persentase Pelayanan Penyakit Tidak Menular	100 %					Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Screening/ deteksi dini penyakit tidak menular	Kabupaten, SKPD			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pandu PTM 19 puskesmas umlah deteksi dini RF PTM (HT, DM, IVA, Sadanis) 13.500 orang Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM 75 posbindu	19 puskesmas 13.500 orang 75 posbindu	127,417,500	141,575,000	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan		Persentase Puskesmas yang sudah terakreditasi	100 %					Dinas Kesehatan
			Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan rujukan	Kabupaten, SKPD			Jumlah monitoring perizinan fasyankes di Kabupaten Tanah Laut 35 fasyankes Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai izin 42 fasyankes	35 fasyankes 42 fasyankes	67,500,000	75,000,000	
			Program Jamkesmas		Cakupan kepesertaan JKN	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Panyipatan
			Jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya	Panyipatan			Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta JKN; Jumlah Pembayaran Jasa Medis; Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi; Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/diperbaiki 100 %	100%	582,421,511	458,590,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		persentase upaya kesehatan masyarakat	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Panyipatan
			Peningkatan kesehatan masyarakat	Panyipatan			jumlah pembinaan dan pelayanan kesehatan masyarakat 1 tahun	1 tahun	135,000,000	170,000,000	
			Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya		Persentase Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Panyipatan
			Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling	Panyipatan			Jumlah sarana dan parasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara /diperbaiki 2 buah	2 buah	11,700,000	17,000,000	
			Program Jamkesmas		Cakupan kepesertaan JKN	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Batakan
			Jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya	Panyipatan			Jumlah sarana dan pras	14 unit 79 jenis 1 tahun 1 tahun	889,188,250	889,188,250	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase upaya kesehatan masyarakat	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Batakan
			Peningkatan kesehatan masyarakat	Panyipatan			Jumlah pembinaan dan pelayanan kesehatan masyarakat 1 tahun	1 tahun	59,310,000	90,000,000	
			Program Jamkesmas		Cakupan kepesertaan JKN	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Takisung

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya	Takisung			Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta JKN 1 tahun Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/diperbaiki 21 jenis Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 56 jenis Jumlah Pembayaran Jasa Medis 1 tahun	1 tahun 21 jenis 56 jenis 1 tahun	1,602,932,937	1,602,932,937	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase upaya kesehatan masyarakat	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Takisung
			Peningkatan kesehatan masyarakat	Takisung			Jumlah pembinaan dan pelayanan kesehatan masyarakat 1 tahun	1 tahun	135,000,000	150,000,000	
			Program Jamkesmas		Cakupan kepesertaan JKN	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kurau
			Jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya	SKPD, Kurau			Jumlah pembayaran jasa medis 1 Tahun Jumlah sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang terpenuhi 54 Jenis Jumlah sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang dipelihara/diperbaiki 10 Jenis Jumlah pelayanan dasar peserta JKN 1 Tahun	1 Tahun 54 Jenis 10 Jenis 1 Tahun	518,423,439	518,423,439	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase upaya kesehatan masyarakat	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kurau

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya	SKPD, Kurau			Jumlah pembinaan dan pelayanan dan pembinaan kesehatan masyarakat 1 Tahun	1 Tahun	27,495,000	195,000,000	
			Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya		Persentase pengadaan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kurau
			Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya	SKPD, Kurau			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/diperbaiki 2 Unit	2 Unit	32,053,500	22,000,000	
			Program Jamkesmas		Cakupan Kepeserataan JKN	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Padang Luas
			Jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya	Kurau			Jumlah Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dipelihara / diperbaiki 25 Jenis Jumlah Pelayanan Kesehatan dasar peserta JKN 1 tahun Jumlah Pembayaran Jasa Medis 1 tahun Jumlah Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpenuhi 59 Jenis	25 Jenis 1 tahun 1 tahun 59 Jenis	454,551,971	500,000,000	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Padang Luas
			Peningkatan kesehatan masyarakat	Kurau			Jumlah Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 tahun	1 tahun	88,200,000	210,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Jamkesmas		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bati Bati
			Jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya	Bati-Bati			Jumlah Pembayaran Jasa Medis 1 Tahun Jumlah Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dipelihara / Diperbaiki 9 Unit Jumlah Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpenuhi 73 Jenis Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Jaminan Kesehatan Nasional 1 Tahun	1 Tahun 9 Unit 73 Jenis 1 Tahun	1,689,481,660	1,689,481,660	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Prosentase Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bati Bati
			Peningkatan kesehatan masyarakat	Bati-Bati			Jumlah Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Tahun	1 Tahun	100,170,000	300,000,000	
			Program Jamkesmas		Cakupan kepesertaan JKN	100 100					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kait Kait
			Jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya	Bati-Bati			Jumlah pelayanan kesehatan dasar peserta JKN; Jumlah pembayaran Jasa Medis 1 tahun	1 tahun	383,756,858	383,756,858	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Tercapainya tingkat kesadaran masyarakat pola hidup sehat	100%					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kait Kait
			Peningkatan kesehatan masyarakat	Bati-Bati			Jumlah pembinaan dan pelayanan kesehatan masyarakat 1 tahun	1 tahun	90,000,000	150,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Jamkesmas		cakupan kepesertaan JKN	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tambang Ulang
			Jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya	SKPD, Tambang Ulang			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 60 jenis Jumlah Pembayaran Jasa Medis 1 tahun Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/diperbaiki 22 jenis Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta JKN 1 tahun	60 jenis 1 tahun 22 jenis 1 tahun	653,796,595	653,796,595	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Tercapainya tingkat kesadaran masyarakat pola hidup sehat	100%					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tambang Ulang
			Peningkatan kesehatan masyarakat	Tambang Ulang			Jumlah pembinaan dan pelayanan kesehatan masyarakat 1 tahun	1 tahun	135,000,000	250,000,000	
			Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya		Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara /diperbaiki	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tambang Ulang
			Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling	Tambang Ulang			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara /diperbaiki 2 unit	2 unit	19,800,000	36,000,000	
			Program Jamkesmas		cakupan kepesertaan JKN	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Pelahari

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya	Pelaihari			jumlah sarana dan pasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang di pelihara/diperbaiki 4 jenis jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 93 jenis jumlah pelayanan kesehatan dasar peserta JKN 1 tahun jumlah pembayaran jasa medis 1 tahun	4 jenis 93 jenis 1 tahun 1 tahun	1,985,655,356	1,985,655,356	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Tercapainya tingkat kesadaran masyarakat pola hidup sehat	100%					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Pelaihari
			Peningkatan kesehatan masyarakat	Pelaihari			jumlah pembinaan dan pelayanan kesehatan masyarakat 1 tahun	1 tahun	99,000,000	134,670,800	
			Program Jamkesmas		Cakupan kepesertaan JKN	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Riam
			Jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya	Pelaihari			Jumlah pelayanan kesehatan dasar peserta JKN; Jumlah pembayaran Jasa Medis 1 Tahun	1 Tahun	270,422,850	270,422,850	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Tercapainya tingkat kesadaran masyarakat pola hidup sehat	100%					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Riam
			Peningkatan kesehatan masyarakat	Pelaihari			Jumlah Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Tahun	1 Tahun	63,000,000	70,000,000	
			Program Jamkesmas		Cakupan Kepesertaan JKN	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tirta Jaya

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya	Bajuin			Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta JKN 1 Tahun Jumlah Pembayaran Jasa Medis 1 Tahun Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/diperbaiki 5 Unit Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 59 Jenis	1 Tahun 1 Tahun 5 Unit 59 Jenis	339,500,064	339,500,064	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Presentasi Upaya kesehatan masyarakat	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tirta Jaya
			Peningkatan kesehatan masyarakat	Bajuin			Jumlah pembinaan dan pelayanan kesehatan masyarakat 1 Tahun	1 Tahun	110,000,000	157,817,300	
			Program Jamkesmas		Cakupan Kepesertaan JKN	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tanjung Habulu
			Jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya	Bajuin			Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar peserta JKN 1 tahun Jumlah Pembayaran Jasa Medis 1 tahun	1 tahun 1 tahun	282,736,267	282,736,267	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentasi Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tanjung Habulu
			Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya	Bajuin			Jumlah pembinaan dan pelayanan kesehatan masyarakat 1 tahun	1 tahun	135,000,000	150,000,000	
			Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya		Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/diperbaiki	2 unit					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tanjung Habulu

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan rutin/berkala sarana puskesmas keliling	Bajuin			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/diperbaiki 2 unit	2 unit	19,800,000	22,000,000	
			Program Jamkesmas		cakupan kepesertaan JKN	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tajau Pecah
			Jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya	Batu Ampar			jumlah pelayanan kesehatan dasar peserta jkn; jumlah pembayaran jasa medis; jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi; jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/diperbaiki 100 tahun	100 tahun	1,280,799,675	1,300,000,000	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Tercapinya pelayanan sesuai SOP	100%					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tajau Pecah
			Peningkatan kesehatan masyarakat	Batu Ampar			Jumlah keluarga mendapat pelayanan kesehatan melalui pendekatan keluarga 1.900 ok	1.900 ok	130,081,500	252,000,000	
			Program Jamkesmas		Cakupan kepesertaan JKN	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Jorong

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya	SKPD, Jorong			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/diperbaiki 15 jenis Jumlah Pembayaran Jasa Medis 1 tahun jumlah pelayanan kesehatan dasar peserta JKN 1 tahun Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 78 jenis	15 jenis 1 tahun 1 tahun 78 jenis	586,196,020	586,196,020	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase upaya kesehatan masyarakat	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Jorong
			Peningkatan kesehatan masyarakat	SKPD, Jorong			Terlaksananya pertemuan/sosialisasi bidang pelayanan kesehatan dasar 1 tahun Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelayanan kesehatan dasar 1 tahun	1 tahun 1 tahun	299,108,700	365,577,000	
			Program Jamkesmas		Cakupan Kepesertaan JKN	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Asam Asam
			Jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya	Kabupaten, Jorong			#####	58 Jenis 1 Tahun 1 Tahun 24 Unit	938,286,805	938,286,805	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Asam Asam

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan kesehatan masyarakat	Kabupaten, Jorong			Jumlah Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Tahun	1 Tahun	458,098,200	250,000,000	
			Program Jamkesmas		Jumlah Pembayaran Jasa Medis; Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi; Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/diperbaiki; Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta JKN	100 %; 100 %; 100 %; 100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kintap
			Jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya	Kintap			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/diperbaiki 5 jenis Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta JKN 1 tahun Jumlah Pembayaran Jasa Medi 1 tahun Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 37 jenis	5 jenis 1 tahun 1 tahun 37 jenis	2,097,714,955	2,097,714,955	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kintap
			Peningkatan kesehatan masyarakat	Kintap			Jumlah pembinaan dan pelayanan kesehatan masyarakat 1 tahun	1 tahun	72,000,000	400,000,000	
			Program Jamkesmas		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Cuka

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya	SKPD, Kintap			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (jenis) 57 Jumlah Pembayaran Jasa Medis (tahun) 1 Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/diperbaiki (jenis) 5 Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta JKN (tahun) 1	57 1 5 1	626,013,500	626,013,500	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase upaya kesehatan masyarakat	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Cuka
			Peningkatan kesehatan masyarakat	SKPD, Kintap			Jumlah pembinaan dan pelayanan kesehatan masyarakat 1 tahun	1 tahun	100,674,000	221,171,500	
			Program Jamkesmas		cakupan kepesertaan JKN	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Angsau
			Jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya	Kabupaten, Pelaihari, Angsau, Sarang Halang			Jumlah Pelayanan Dasar Peserta JKN 1 Tahun Jumlah Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpenuhi 1.108 Buah Jumlah Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang dipelihara / diperbaiki 10 Unit Jumlah Pembayaran Jasa Medis 1 Tahun	1 Tahun 1.108 Buah 10 Unit 1 Tahun	1,285,248,900	1,285,248,900	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Angsau
			Peningkatan kesehatan masyarakat	Kabupaten, Pelaihari, Angsau, Sarang Halang			Jumlah Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Tahun	1 Tahun	69,093,000	76,760,000	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase upaya kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan
			Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Kesehatan	Kabupaten			Jumlah pengujian laboratorium kesehatan yang dilaksanakan 2.500 Sampel	2.500 Sampel	208,098,000	231,220,000	
			Program Pengawasan Obat dan Makanan		Persentase penurunan peredaran bahan makanan berbahaya	100 %					Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan
			Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Kabupaten			Jumlah sampel makanan minuman yang diperiksa 200 Sampel	200 Sampel	21,438,000	23,820,000	
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		Cakupan Distribusi Alat Kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan Instalasi Farmasi
			Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Kabupaten			Jumlah distribusi obat dan perbekalan kesehatan 19 Puskesmas	19 Puskesmas	160,200,000	178,000,000	
			Program Jamkesmas		cakupan kepesertaan JKN	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bumi Makmur

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya	Bumi Makmur			jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/diperbaiki 12 jenis jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 26 jenis JUmlah pelayanan kesehatan dasar 1 tahun jumlah pembayaran jasa medis 1 tahun	12 jenis 26 jenis 1 tahun 1 tahun	408,540,470	500,000,000	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Presentase upaya kesehatan masyarakat	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bumi Makmur
			Peningkatan kesehatan masyarakat	Bumi Makmur			Jumlah pembinaan dan pelayanan kesehatan masyarakat 1 tahun	1 tahun	100,207,440	134,647,150	
			Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya		persentase pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bumi Makmur
			Pemeliharaan rutin/berkala sarana puskesmas keliling	Bumi Makmur			jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/perbaiki 1 Unit	1 Unit	12,150,000	16,500,000	
			Pekerjaan Umum								
	Peningkatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur wilayah	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Tercapainya Penataan Ruang Kabupaten	100 %					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Kabupaten, Pelaihari, Bati-Bati			Tersedianya desain perencanaan jalan lingkungan kecamatan pelaihari dan bati-bati 2 Kecamatan Tersusunnya dokumen perencanaan jalan lingkungan an dokumen inventarisasi PSU 3 Dokumen	2 Kecamatan 3 Dokumen	180,000,000	100,000,000	
			Rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan	Takisung, Pelaihari			Terpeliharannya jalan lingkungan perumahan di kecamatan pelaihari dan takisung 2 Kecamatan Tersusunnya dokumen pengawasan jalan lingkungan 2 Dokumen	2 Kecamatan 2 Dokumen	2,139,532,800	4,000,000,000	
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Terlaksananya Perencanaan pembangunan Jalan Tersusun; jumlah Terlaksananya pembangunan jalan ; Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jembatan; Jumlah Terlaksananya pembangunan jembatan	6 Dok; 33.331 m; 5 Dok; 54 Unit					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Perencanaan pembangunan jalan	Kabupaten			Terlaksananya Perencanaan pembangunan Jalan Tersusun 6 Dok	6 Dok	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan jalan	Kabupaten, Batu Ampar, Kurau			jumlah Terlaksananya pembangunan jalan 5.831 m	5.831 m	4,138,677,000	-	
			Perencanaan pembangunan jembatan	Kabupaten			Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jembatan 5 Dok	5 Dok	-	-	
			Pembangunan jembatan	Kabupaten, Kurau, Pelaihari, Takisung, Tambang Ulang, Bajuin, Batu Ampar, Jorong, Kintap			Jumlah Terlaksananya pembangunan jembatan 14 Unit	14 Unit	3,375,000,000	-	
			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		Pembangunan drainase di perkotaan dan desa	18.326,75 m'					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Kabupaten			Jumlah prasarana drainase/gorong-gorong 0 dok Jumlah prasarana drainase/gorong-gorong 8.050,14 m	0 dok 8.050,14 m	7,232,400,000	-	
			Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong		Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	4.475 meter					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Kabupaten, Bumi Makmur, Jorong, Kintap, Bajuin, Kurau, Bati-Bati, Panyipatan, Batu Ampar, Pelaihari, Takisung, Tambang Ulang			Jumlah pembuatan penahan abrasi pantai 0 paket Jumlah pembuatan talud 4 paket Jumlah pembuatan siring sungai 4 paket Jumlah pembuatan siring pasangan batu 0 paket	0 paket 4 paket 4 paket 0 paket	3,870,000,000	4,730,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kabupaten Tanah Laut; Jumlah Terlaksananya Rehabilitasi/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kabupaten Tanah Laut	10 Dok; 41.956 m					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Kabupaten			Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kabupaten Tanah Laut 10 Dok	10 Dok	-	-	
			Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Kabupaten, Bumi Makmur, Jorong, Kintap, Kurau, Pelaihari, Takisung, Tambang Ulang			Jumlah Terlaksananya Rehabilitasi/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kabupaten Tanah Laut 13.231 m	13.231 m	6,820,242,255	-	
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya		Optimalisasi Jaringan yang Telah Dibangun dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi; Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A); Perencanaan pembangunan jaringan irigasi; Pembangunan pintu air; Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	13.500 Meter; 20 Pertemuan; 56 Dokumen; 3.771 Meter; 38.700 meter					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Kabupaten, Bumi Makmur, Jorong, Kintap, Kurau, Bajuin, Panyipatan, Pelaihari, Bati-Bati, Tambang Ulang, Batu Ampar			Jumlah Terlaksananya Pengawasan Optimalisasi Jaringan yang Telah Dibangun dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1 paket Jumlah Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Irigasi dan Rawa 4 paket Jumlah Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi dan Rawa 2 paket	1 paket 4 paket 2 paket	1,773,000,000	2,167,000,000	
			Pemberdayaan petani pemakai air (P3A)	Kabupaten, Pelaihari, Bajuin, Takisung, Bati-Bati, Tambang Ulang, Batu Ampar, Bumi Makmur, Jorong, Kintap, Kurau, Panyipatan			Jumlah Terlaksananya pembinaan rutin P3A 20 Pertemuan Jumlah terlaksananya laporan dokumen rutin pembinaan P3A 1 Dokumen	20 Pertemuan 1 Dokumen	-	-	
			Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Kabupaten, Panyipatan, Pelaihari, Takisung, Bati-Bati, Tambang Ulang, Batu Ampar, Bajuin, Bumi Makmur, Jorong, Kintap, Kurau			Jumlah normalisasi saluran/sungai 3 paket Jumlah pembangunan/rehab tanggul 0 paket Jumlah pembuatan saluran/sungai 0 paket	3 paket 0 paket 0 paket	1,935,000,000	2,365,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan pintu air	Kabupaten, Bati-Bati, Batu Ampar, Bumi Makmur, Jorong, Takisung, Kintap, Tambang Ulang, Kurau, Panyipatan, Bajuin, Pelaihari			Jumlah Pembangunan Bendung 0 paket Jumlah Pembangunan Pintu Air dan Bangunan Pelengkap Irigasi Lainnya 3 paket Jumlah pembangunan jembatan pertanian 7 paket	0 paket 3 paket 7 paket	2,340,000,000	2,860,000,000	
			Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Kabupaten, Takisung, Bajuin, Tambang Ulang, Bati-Bati, Batu Ampar, Bumi Makmur, Pelaihari, Kintap, Kurau, Panyipatan			Jumlah Tersusunnya Dokumen Perencanaan SDA untuk Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Irigasi Lainnya 0 Dokumen Jumlah Berfungsinya peralatan untuk kegiatan terkait sumber daya air 0 Unit	0 Dokumen 0 Unit	-	-	
			Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya		Berfungsinya secara optimal Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya sesuai peruntukkan lainnya	100%					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	Kabupaten, Batu Ampar, Tambang Ulang, Bumi Makmur, Jorong, Kintap, Kurau, Panyipatan, Pelaihari, Bajuin, Takisung, Bati-Bati			Jumlah pembangunan dan rehab embung 2 paket	2 paket	900,000,000	1,100,000,000	
			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		Kinerja pengelolaan air minum yang baik; Kinerja pengelolaan air limbah yang baik; Kinerja pengelolaan air minum yang baik	16 Jaringan; 8 paket; 645 SR					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Kabupaten			Jumlah terbangunnya sarana air bersih berupa sumur bor dan jaringan perpipaan 6 jaringan	6 jaringan	4,410,000,000	-	
			Pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengelolaan sanitasi (Pendamping PAMSIMAS)	Kabupaten			Jumlah Peningkatan sarana air bersih dan sanitasi masyarakat perdesaan 850 SR	850 SR	1,530,000,000	-	
			Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Kabupaten			Jumlah pembangunan fasilitas air limbah 3 paket Jumlah pembangunan fasilitas air limbah 0 dok	3 paket 0 dok	554,400,000	-	
			Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		Tercapainya Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1 tahun					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Pendamping PNPM mandiri perkotaan (P2KP)	Kabupaten			Jumlah Terlaksananya Pendampingan KOTAKU 3 dok Jumlah Terlaksananya Pendampingan KOTAKU 1 tahun	3 dok 1 tahun	-	-	
			Program Keciaptakaryaan		Terbangunnya bangunan gedung kantor milik pemerintah; Meningkatkan kualitas bangunan kantor/rumah dinas yang terbangun	38 Paket; 1 paket					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Pembangunan Gedung Kantor	Kabupaten			Jumlah terbangunnya Gedung Kantor 7 Paket	7 Paket	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kabupaten			Jumlah terpeliharanya gedung kantor 1 paket	1 paket	-	-	
			Program Pengaturan Jasa Konstruksi		Meningkatnya pengetahuan dan kinerja personil badan usaha jasa konstruksi	7 kali					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Pembinaan badan usaha jasa konstruksi	Kabupaten			Pelatihan PJTBU 1 kali Mobile Training Unit (MTU) 1 kali Pelatihan Tenaga Tingkat Terampil 1 kali Bimtek/Sosialisasi Peningkatan pengetahuan, kompetensi terkait per-UU Jasa Konstruksi serta pelaksanaan dan pengendalian kontrak, Penerima Hasil Pekerjaan, Pendampingan Hukum 4 kali Peningkatan pengetahuan dan kinerja personil badan usaha jasa konstruksi 290 orang	1 kali 1 kali 1 kali 4 kali 290 orang	-	-	
			Program Pengembangan Teknologi Konstruksi		persentase tercapainya pelayanan laboratorium pengujian material yang bersertifikasi	20 persen					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan UPT Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Identifikasi dan Informasi teknik konstruksi	SKPD			umlah Data dan informasi inventarisasi bahan dan teknik konstruksi 1 dokumen	1 dokumen	45,675,000	56,000,000		
			Optimalisasi laboratorium pengujian	SKPD			Jumlah penyediaan sumber daya dan peralatan laboratorium pengujian 12 bulan	12 bulan	16,668,000	21,000,000		
			Perumahan Rakyat									
			Program Pengembangan Perumahan		Diacunya dokumen review RP3KP	100%					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
			Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Kabupaten			Tersusunnya review RP3KP untuk perencanaan bidang perumahan tahun 2019 1 Dokumen	1 Dokumen	270,000,000	500,000,000		
			Program Lingkungan Sehat Perumahan		Tercapainya Penataan Ruang Kabupaten	100 %					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
			Peningkatan rumah sederhana	Kabupaten			Terfasilitasinya Tim Teknis bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS	100 rumah	100,000,000	1,600,000,000		
			Peningkatan rumah sederhana (DAK)	Pelaihari			Terlaksananya pelaporan dan monitoring pelaksanaan bedah rumah 8 Dokumen	8 Dokumen	90,000,000	200,000,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pengembangan Perumahan		Terimplementasinya masterplan penanganan kawasan kumuh Kabupaten Tanah Laut	100 %					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Kabupaten			Terlaksananya penyusunan masterplan penanganan kawasan kumuh Kabupaten Tanah Laut 1 Dokumen	1 Dokumen	278,221,500	200,000,000	
			Program Lingkungan Sehat Perumahan		Tercapainya pelaksanaan koordinasi perencanaan lingkungan perumahan sehat melalui peningkatan akses air minum dan sanitasi dasar	100 %					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	Kabupaten			Jumlah rumusan hasil rapat koordinasi kelompok kerja pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi nasional Kab. Tanah Laut 6 Dokumen	6 Dokumen	44,280,000	110,000,000	
			Program Pengembangan Perumahan		Tercapainya kondisi rumah yang layak huni	100%					Kintap
			Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu				Jumlah rehabilitasi rumah masyarakat kurang mampu 4 Unit	4 Unit	90,000,000	110,000,000	
	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang akuntabel dan Profesionalisme Pelayanan Publik	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Program Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	80%					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran	Kabupaten			Jumlah pencegahan dan pengendalian kebakaran yang dilaksanakan 1 Tahun	1 Tahun	81,000,000	142,500,000		
			Pengendalian Kebakaran	Kabupaten, SKPD			Jumlah kejadian kebakaran pemukiman yang tertangani 1 Tahun	1 Tahun	121,500,000	240,000,000		
			Penataan Ruang									
	Peningkatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur wilayah	Program peningkatan sarana dan prasarana keindahan kota		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Keindahan Kota	100 %					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
			Pemeliharaan jaringan dan penerangan jalan umum	Kabupaten			Terpeliharanya Kap Lampu PJU dan PJU yang tersebar di Kabupaten Tanah Laut 1 Tahun	1 Tahun	12,401,149,500	13,779,055,000		
			Penyediaan sarana dan prasarana keindahan kota	Kabupaten			Terpeliharanya jumlah tugu, gerbang, dan bangunan taman 1 Tahun	1 Tahun	432,387,760	726,361,700		
			Program Perencanaan Tata Ruang		Jumlah tersusunnya dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ); Jumlah kecamatan wilayah sosialisasi; Jumlah terlaksananya rapat koordinasi perencanaan tata ruang Kabupaten Tanah Laut; Jumlah rekomendasi tata ruang yang diterbitkan	1 Dokumen; 7 Kecamatan; 6 Kali Rapat; 40 Dokumen rekomendasi tata ruang					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Bajuin, Batu Ampar, Bumi Makmur, Kurau, Panyipatan, Pelaihari, Tambang Ulang			Persentase tingkat pemahaman peserta sosialisasi 100 % Jumlah kecamatan wilayah sosialisasi 7 Kecamatan	100 % 7 Kecamatan	19,512,000	24,932,000	
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Kabupaten, Bajuin, Batu Ampar, Bumi Makmur, Kurau, Panyipatan, Pelaihari, Tambang Ulang			Persentase tingkat pemahaman peserta sosialisasi 100 % Jumlah kecamatan wilayah sosialisasi 7 Kecamatan	100 % 7 Kecamatan	56,677,320	-	
			Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Pelaihari			Jumlah tersusunnya dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) 1 Paket dokumen	1 Paket dokumen	1,007,699,400	1,287,615,900	
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Jumlah data untuk penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan tata ruang; Jumlah survey dan pemetaan pemanfaatan ruang kabupaten yang dilaksanakan	40 Dokumen berita acara; 20 Laporan hasil survey dan peta					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Kabupaten			Jumlah data untuk penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan tata ruang 40 Dokumen Berita Acara	40 Dokumen Berita Acara	-	-	
			Survey dan pemetaan	Kabupaten			Jumlah survey dan pemetaan pemanfaatan ruang kabupaten yang dilaksanakan 20 Laporan hasil survey dan peta	20 Laporan hasil survey dan peta	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perencanaan Pembangunan								
	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang akuntabel dan Profesionalisme Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Tersusunnya jumlah renja, LKPJ, LPPD dan Laporan Lakip 4 Dokumen	4 Dokumen	23,424,861	26,027,623	
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD			Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen	1 Dokumen	22,500,000	25,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya tertib administrasi keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Tersusunnya laporan capaian Kinerja Berupa Laporan keuangan akhir tahun/ CALK 5 Dokumen Tersusunnya laporan capaian Kinerja Berupa Laporan Keuangan Bulanan (Bend. Pengeluaran) 24 Dokumen Tersusunnya laporan capaian Kinerja Berupa Laporan Asset/ Barang 12 Dokumen Tersusunnya laporan capaian Kinerja Berupa Laporan Pajak Bulanan 36 Dokumen Tersusunnya laporan capaian Kinerja Berupa Laporan Kinerja Bulanan 36 Dokumen	5 Dokumen 24 Dokumen 12 Dokumen 36 Dokumen 36 Dokumen	10,985,400	14,000,000	
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		Terimplementasinya dokumen rencana pengembangan wilayah kawasan strategis dan cepat tumbuh	100 %					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Kabupaten			Kajian Perencanaan Penataan Pengembangan Kawasan Pedesaan Kecamatan Bumi Makmur - Kurau dan Study kelayakan jalan tembus tuju jamur sampai desa tungkaran 2 Dokumen	2 Dokumen	672,669,000	1,000,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		Tercapainya Kriteria kompetensi SDM Perencanaan Bappeda	100 %					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	SKPD			Jumlah peserta review LAKIP 51 Pegawai Bappeda Jumlah peserta review penyusunan SDGs 49 Kasubbag Perencanaan Jumlah peserta review Peningkatan IPM 49 Kasubbag Perencanaan Jumlah peserta review Penurunan Kemiskinan 49 Kasubbag Perencanaan Jumlah peserta review Peningkatan Inovasi daerah 49 Kasubbag Perencanaan Jumlah terikutinya bimtek, workshop dan sejenisnya 51 Aparatur	51 Pegawai Bappeda 49 Kasubbag Perencanaan 49 Kasubbag Perencanaan 49 Kasubbag Perencanaan 49 Kasubbag Perencanaan 51 Aparatur	231,093,000	140,000,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Kriteria Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan; Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target	100 %; 80 %					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	SKPD			Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah 12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten, SKPD			Jumlah laporan monev yang tersusun 4 Dokumen Jumlah rapat monev yang dilaksanakan 4 Kali	4 Dokumen 4 Kali	72,328,680	120,000,000	
			Pengendalian pelaksanaan Dana Alokasi Khusus	Kabupaten			Jumlah Laporan DAK yang tersusun 4 Dokumen Jumlah rapat DAK yang dilaksanakan 4 Kali Jumlah usulan DAK yang tersampaikan 10 Bidang	4 Dokumen 4 Kali 10 Bidang	21,987,000	100,000,000	
			penanggulangan kemiskinan daerah	Kabupaten			Jumlah rumusan hasil rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Laut 2 Dokumen Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) 2 Dokumen Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	184,809,500	268,000,000	
			Penetapan RPJMD	Kabupaten			Jumlah tersusunnya Draft Perda RPJMD 2018 -2023 1 Dokumen	1 Dokumen	206,379,000	300,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Kabupaten			Jumlah Tersusunnya Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019 sesuai ketentuan yang berlaku 1 Dokumen Jumlah Tersusunnya Dokumen RKPD Tahun 2020 yang mengacu pada dokumen perencanaan dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	900,000,000	950,000,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Tercapainya koordinasi dan fasilitasi Perencanaan lingkup Bidang Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan yang berlaku	100 %					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi perencanaan pengembangan Kawasan Industri	Kabupaten			Jumlah Rapat fasilitasi dan Koordinasi Transisi Rencana Penutupan Tambang (RPT) 10 Kali	10 Kali	26,019,000	130,000,000	
			Pengembangan usaha sumber daya alam dan ekonomi kreatif	Kabupaten			#####	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	49,084,380	150,000,000	
			perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Kabupaten			Jumlah rumusan hasil rapat koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan SDA 10 Dokumen	10 Dokumen	96,390,000	170,000,000	
			Program Perencanaan Sosial dan Budaya		Tercapainya koordinasi dan fasilitasi lingkup Bidang Sosial dan Budaya sesuai ketentuan yang berlaku	100 %					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pelaksanaan program PISEW	Kabupaten			Terlaksananya fasilitasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah RISE II 1 Kecamatan KSK (jorong)	1 Kecamatan KSK (jorong)	32,506,000	155,000,000	
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Kabupaten			Jumlah rumusan hasil rapat koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 1 Dokumen	1 Dokumen	31,773,600	280,000,000	
			Program Penelitian dan Pengembangan		Terimplementasinya hasil kajian dan pengembangan	100 %					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Kabupaten			Jumlah Kajian Kebutuhan Kelitbangan Daerah pada Kab. Tanah Laut 1 Dokumen Jumlah Penyusunan Kajian Pemanfaatan Kawasan Lahan Rawa di Kec. Bati-Bati dan Kec. Tambang Ulang 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	275,634,000	400,000,000	
			Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sosial budaya	Kabupaten			Jumlah Masterplan Kedaulatan Pangan Kabupaten Tanah Laut 1 Dokumen Jumlah Penyusunan Kajian Struktur Kemiskinan Daerah 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	950,000,000	650,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya tertib administrasi keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Laporan bulanan Bendahara 12 dokuman Laporan Kinerja keuangan 12 dokumen Jumlah laporan capaian kinerja keuangan yang dibuat 12 bulan	12 dokuman 12 dokumen 12 bulan	12,000,000	47,113,050	
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD			Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dibuat 3 dokuman	3 dokuman	5,286,600	5,850,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tercapainya kriteria penyusunan dokumen perencanaan skpd sesuai ketentuan yang berlaku	100%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat 4 dokumen	4 dokumen	10,575,000	31,177,937	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya kriteria pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 persen					Dinas Perhubungan
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Laporan :LPPD/LKPJ,Lapkin,Laporan Keuangan (bulanan,semester,laporan akhir tahun -CALK) 16 Dokumen	16 Dokumen	4,800,000	6,205,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya kriteria pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 persen					Inspektorat Kabupaten

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Jumlah laporan kinerja keuangan, LAKIP dan LKPJ 4 Laporan	4 Laporan	3,150,000	25,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya kriteria pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 persen					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan 12 12 bulan	12 bulan	6,300,000	7,000,000	
			Penyusunan LKPJ dan LPPD serta LAKIP	SKPD			Terlaksananya penyusunan LKPJ dan LPPD serta LAKIP SKPD 3 Dokumen	3 Dokumen	4,500,000	5,000,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tercapainya kriteria penyusunan dokumen perencanaan skpd sesuai ketentuan yang berlaku	100%					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	SKPD			Tersedianya dokumen renstra dan renja SKPD 2 Dokumen	2 Dokumen	6,300,000	5,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya kriteria pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 persen					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan khtisar realisasi kinerja SKPD 4 dokumen	4 dokumen	12,300,000	18,700,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pengembangan Data/Informasi		Tersedianya data desa dan kelurahan yang terbaru dan valid	100%					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Penyusunan profile daerah	Kabupaten			Tersedianya data yang akurat melalui updating yang akan dilaksanakan oleh desa dan kelurahan melalui sistem internet 135 Desa dan Kelurahan	135 Desa dan Kelurahan	450,837,900	551,024,100	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya kriteria pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 persen					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Jumlah tersusun nya laporan kinerja dan laporan bendahar 48 Laporan	48 Laporan	7,000,000	7,000,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tercapainya Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	0					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	SKPD			Jumlah tersusunnya dokumen renstra / renja, RKA, DPA, RKA ABT, DPA ABT 5 Dokumen	5 Dokumen	7,000,000	7,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya kriteria pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 persen					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD, Pelaihari, Angsau			Jumlah laporan keuangan bulanan 2 Dokumen Jumlah laporan keuangan semesteran 2 Dokumen Jumlah laporan keurangan tahunan 2 Laporan Keuangan Akhir Jumlah laporan keuangan triwulan 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan Keuangan Akhir 2 Dokumen	18,000,000	20,000,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tercapainya kriteria penyusunan dokumen perencanaan skpd sesuai ketentuan yang berlaku	100%					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	SKPD, Pelaihari, Angsau			Jumlah dokumen tersedianya rencana kerja dan rencana strategis di RSUD Hadji Boejasin 7 Dokumen	7 Dokumen	10,000,000	35,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya tertib administrasi keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100%					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Jumlah laporan keuangan Tahunan, Semesteran, Triwulan & Bulanan 4 Laporan	4 Laporan	6,750,000	9,750,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tercapainya kriteria penyusunan dokumen perencanaan skpd sesuai ketentuan yang berlaku	100%					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	SKPD			Jumlah dok. penyusunan rencana kerja, rencana strategis, lap. kinerja, lkpj/lppd dan rka 5 Dokumen	5 Dokumen	-	5,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Terpenuhinya kriteria penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku	100%					Sekretariat DPRD
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten			Terlaksananya penyusunan laporan SKPD yaitu SPJ Fungsional, Lakip, Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Tahun 2019 serta Laporan Kinerja SKPD Sekretariat DPRD 4 dokumen	4 dokumen	36,540,000	40,600,000	
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kabupaten			Terlaksananya Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun SKPD 1 dokumen	1 dokumen	6,696,000	7,440,000	
			Penyelenggaraan administrasi anggaran, perbendaharaan dan verifikasi laporan sekretariat DPRD	Kabupaten			Terlaksananya penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD 12 bulan	12 bulan	13,500,000	15,000,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Terpenuhinya kriteria penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%					Sekretariat DPRD

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	Kabupaten			Terlaksananya penyusunan Renja SKPD 2 dokumen	2 dokumen	10,000,000	15,200,000	
			Penyusunan Rencana Kerja dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kabupaten			Terlaksananya perumusan dan penyusunan rencana kerja DPRD 2 dokumen	2 dokumen	6,300,000	7,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Terpenuhinya kriteria penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku	100%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20 laporan keuangan, 20 lakip, 20 LKPJ, 40 RKA, 40 DPA, 20 laporan kegiatan	20 laporan keuangan, 20 lakip, 20 LKPJ, 40 RKA, 40 DPA, 20 laporan kegiatan	3,780,000	4,410,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten			Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD bulanan, semesteran, rencana kerja, penetapan kinerja, LAKIP, LKPJ, Calk SKPD 8 dokumen	8 dokumen	13,499,820	20,000,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Terpenuhinya kriteria penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	Kabupaten			Jumlah tersusunnya dokumen Renstra SKPD, Jumlah tersusunnya dokumen renja SKPD 2 dokumen	2 dokumen	7,500,000	20,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan Kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Kabupaten, SKPD			Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai standar 1 dokumen	1 dokumen	18,000,000	20,000,000	
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kabupaten, SKPD			Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai standar 1 dokumen	1 dokumen	18,900,000	21,000,000	
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kabupaten, SKPD			Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai standar 1 dokumen	1 dokumen	15,750,000	17,500,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Terpenuhinya kriteria penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%					Dinas Kesehatan
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	Kabupaten			Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar 3 dokumen	3 dokumen	15,000,000	27,665,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Terpenuhinya kriteria penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku	100%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten			Jumlah Dokumen 7 Dokumen	7 Dokumen	27,000,000	30,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya Penyusunan sistem pelaporan kinerja yang Akuntabel	12 Dokumen					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Jumlah penyusunan sistem pelaporan kinerja yang akuntabel 12 Dokumen	12 Dokumen	3,710,000	4,100,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tercapainya Penyusunan Renja dan Renstra SKPD	7 Dokumen					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	SKPD			Jumlah penyusunan Renja dan Renstra SKPD 7 Dok	7 Dok	6,300,000	8,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu dan Akuntabel	100%					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD			Jumlah Laporan Bulanan tersusun 48 Dokumen Jumlah Laporan Triwulan tersusun 16 Dokumen Jumlah Laporan Akhir Tahun tersusun 6 Dokumen	48 Dokumen 16 Dokumen 6 Dokumen	30,204,000	-	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tercapainya kriteria penyusunan dokumen perencanaan skpd sesuai ketentuan yang berlaku	100%					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang Tersusun 2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	-	
			Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		Terselesaikannya Batas Daerah Kabupaten Tanah Laut	100 presentase					Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	Kabupaten			Terselesaikannya batas daerah Kabupaten Tanah Laut 2 kasus	2 kasus	19,364,400	-	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut	100 presentase					Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan
			Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten			Jumlah dokumen LPPD yang disusun 1 dokumen	1 dokumen	65,514,150	-	
			Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Kabupaten			Jumlah dokumen LKPJ yang disusun 1 dokumen	1 dokumen	51,817,050	-	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase pemenuhan perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	100 Persen					Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD, Pelaihari			#####	12 dokumen 4 dokumen 2 unit 1 dokumen	5,724,720	-	
			Program Pengembangan Data/Informasi		Persentase SKPD yang terintegrasi dalam pusat data	100 persen					Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyusunan profile daerah	Kabupaten			Junlah laporan data statistik (Profil Hasil Pembangunan/Data Terpadu) Kabupaten Tanah Laut 1 dokumen	1 dokumen	66,066,390	-	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu dan Akuntabel	100%					Dinas Sosial

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD			Jumlah penyusunan laporan akhir tahun (lakip,LKPJ dan LPPD) 3 Dokumen	3 Dokumen	6,300,000	65,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu dan Akuntabel	100%					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			jumlah rancangan Awal Rencana Kegiatan Anggaran sebelum Verifikasi(Pra RKA di Bappeda) 8 dokumen jumlah alat tulis kantor 5 jenis jumlah rancangan Sesuai Kebutuhan/Rencana Kegiatan Anggaran sesudah Verifikasi di Bappeda 8 dokumen jumlah Belanja Cetak Draf RKA sebelum Verifikasi (Eksistensi) di DPPKA 8 dokumen jumlah Draf RKA sesudah Verifikasi (Eksistensi) di DPPKA 8 dokumen jumlah Cetak DPA 15 dokumen	8 dokumen 5 jenis 8 dokumen 8 dokumen 15 dokumen	5,635,800	-	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tercapainya kriteria penyusunan dokumen perencanaan skpd sesuai ketentuan yang berlaku	100%					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	SKPD			jumlah renstra akhir 10 dokumen jumlah renstra awal 5 dokumen	10 dokumen 5 dokumen	5,292,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya pemenuhan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	5 Dokumen					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Tersusunnya laporan capaian kinerja berupa laporan kinerja tahunan 5 Dokumen	5 Dokumen	6,300,000	10,000,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tercapainya kriteria penyusunan dokumen perencanaan skpd sesuai ketentuan yang berlaku	100%					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	SKPD			Tersusunnya rencana strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) 2 Dokumen	2 Dokumen	6,300,000	10,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7 Dokumen					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan tersusunnya LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Keuangan 7 Dokumen	7 Dokumen	27,140,400	37,695,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tercapainya kriteria penyusunan dokumen perencanaan skpd sesuai ketentuan yang berlaku	100%					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	SKPD			Tersusunnya renstra, rencana kerja SKPD, RKA dan DPA SKPD 4 Dokumen	4 Dokumen	7,500,000	23,600,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %					Badan Pendapatan Daerah
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Jumlah penyusunan laporan SKPD 5 Dokumen	5 Dokumen	5,400,000	6,500,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah	100 100					Badan Pendapatan Daerah
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 3 Dokumen	3 Dokumen	4,950,000	6,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya pemenuhan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	100%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD 13 Dokumen	13 Dokumen	5,220,000	6,000,000	
			Penyusunan LKPJ dan LPPD serta LAKIP	SKPD			Terlaksananya Penyusunan laporan SKPD : LKPJ dan LPPD, LAKIP serta Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 Dokumen	4 Dokumen	3,555,000	4,000,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tercapainya kriteria penyusunan dokumen perencanaan skpd sesuai ketentuan yang berlaku	100%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	SKPD			Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD 3 Dokumen	3 Dokumen	7,470,000	8,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Kerjasama Pembangunan		Persentase tindak lanjut laporan hasil pembangunan	20 %					Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Pembangunan
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten			Tersusunnya dokumen laporan Monev Pembangunan 1 Dokumen	1 Dokumen	202,500,000	270,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatkan Kualitas Pengendalian Intern Lingkup Sekretariat Daerah	100 Persentase					Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha dan Keuangan
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6 dokumen	6 dokumen	28,161,000	32,854,500	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan					Dinas Pariwisata
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Hasil : Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12 bulan	12 bulan	6,300,000	10,000,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tercapainya kriteria penyusunan dokumen perencanaan skpd sesuai ketentuan yang berlaku	100%					Dinas Pariwisata

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	SKPD			Keluaran : Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023 & Rencana Kerja SKPD tahun.2020 & Rencana Kerja APBD-P TA.2019 Hasil : Tersedianya Dokumen rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023 & Rencana Kerja SKPD tahun.2020 & Rencana Kerja APBD-P TA.2019 12 bulan	12 bulan	6,300,000	10,000,000	
			Program Kerjasama Pembangunan		Tercapainya kinerja pelayanan Pelayanan Sistem Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku	100%					Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Kabupaten, SKPD			Jumlah Fasilitasi Pelayanan Sistem Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang dilaksanakan 12 Bulan	12 Bulan	225,000,000	250,000,000	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten, Luar Daerah, SKPD			Jumlah Dokumen Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Pengadaan Barang/ Jasa Secara Berkala sesuai ketentuan yang berlaku 4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	135,000,000	200,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; LAPKIN, RKA, DPA, Anggaran Kas, Lap. Emonev, Lap. Eplanning	84 %; 82 %					Kurau
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Penyusunan Laporan Terlaksananya Pelaporan Kinerja SKPD 34 Dokumen	34 Dokumen	4,729,500	5,255,000	
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Terlaksananya Pelaporan Kinerja SKPD 26 Dokumen	26 Dokumen	3,307,500	3,675,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Kecamatan; Jumlah Dokumen Perencanaan terdiri dari Restra SKPD Tahun 2019 -2023, Renja SKPD Tahun 2019 dan Perubahan Tahu 2019	82 %; 82 %					Kurau
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD				Jumlah Dokumen Perencanaan terdiri dari Restra SKPD Tahun 2019 -2023, Renja SKPD Tahun 2019 dan Perubahan Tahu 2019 3 Dokumen	3 Dokumen	1,998,450	2,220,500	
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan				Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Kecamatan 1 Kali	1 Kali	11,398,500	12,665,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya pemenuhan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	100%					Bajuin

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Terlaksana penyusunan laporan SKPD 1 tahun	1 tahun	1,729,800	2,114,200	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tercapainya kesepakatan urutan prioritas pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%					Bajuin
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan				Terlaksananya musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan □ □ tahun	1 tahun	6,898,500	8,431,500	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100 %					Jorong
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD 3 dokumen	3 dokumen	868,500	965,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase peningkatan perencanaan pembangunan daerah	100 %					Jorong
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD				Jumlah dokumen penyusunan Renja , rentra dan laporan tahunan 3 dokumen	3 dokumen	1,281,600	3,500,000	
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan				Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan 1 kali	1 kali	20,090,700	25,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tercapainya kesepakatan urutan prioritas pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%					Batu Ampar
					Tercapainya kriteria penyusunan dokumen perencanaan skpd sesuai ketentuan yang berlaku	100%					
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan				Terlaksananya Pra Musrenbang dan Musrenbang tingkat kecamatan 2 kegiatan	2 kegiatan	18,297,000	21,000,000	
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD				Terlaksananya penyusunan dokumen berupa Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) SKPD, Renja Perubahan SKPD dan Penyusunan Pra RKA 6 dokumen	6 dokumen	2,583,000	3,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %					Panyipatan
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah laporan kinerja dan keuangan SKPD 12 dokumen	12 dokumen	8,100,000	9,000,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah	100 %					Panyipatan
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD				Jumlah dokumen renja SKPD, Renstra 2019-2023 3 dokumen	3 dokumen	9,000,000	8,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan				Terselenggaranya Musrenbang RKPD tingkat kecamatan 1 kali	1 kali	22,500,000	25,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %					Pelaihari
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				jumlah terlaksananya penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja dan dokumentasi SKPD 12 bulan	12 bulan	6,300,000	7,000,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tercapainya kesepakatan urutan prioritas pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%					Pelaihari
					Tercapainya kriteria penyusunan dokumen perencanaan skpd sesuai ketentuan yang berlaku	100%					
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan				Jumlah terlaksananya musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan dan pra musrenbang tingkat kecamatan 2 kali	2 kali	18,000,000	20,000,000	
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD				Jumlah terlaksananya penyusunan Renja/Renstra SKPD 2 dokumen	2 dokumen	3,600,000	4,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya pemenuhan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	100%					Tambang Ulang
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah dokumen pelaporan keuangan 6 dokumen keuangan	6 dokumen keuangan	5,400,000	9,000,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen penyusunan Renstra dan Renja SKPD ; Jumlah usulan desa dalam dokumen	2 Dokumen; 1 Dokumen					Tambang Ulang
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD				Jumlah dokumen penyusunan Renstra dan Renja SKPD 2 Dokumen	2 Dokumen	4,012,200	6,458,000	
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan				Jumlah usulan desa dalam dokumen 1 dokumen	1 dokumen	9,738,000	12,820,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya pemenuhan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	100%					Bati-Bati
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah tersusunnya dokumen perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan 6 Dokumen	6 Dokumen	9,000,000	12,000,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	82 %					Bati-Bati
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan Bati-Bati 1 Dokumen	1 Dokumen	18,000,000	20,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya pemenuhan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	100%					Bumi Makmur
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 4 Dokumen	4 Dokumen	667,800	742,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tercapainya kesepakatan urutan prioritas pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%					Bumi Makmur
					Tercapainya kriteria penyusunan dokumen perencanaan skpd sesuai ketentuan yang berlaku	100%					
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD				Jumlah rencana kerja berupa program dan kegiatan yang tersusun untuk tahun berikutnya 3 Dokumen	3 Dokumen	2,192,400	2,436,000	
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan				Terlaksananya kesepakatan usulan prioritas desa untuk Musyawarah Rencana Pembangunan di tingkat Kecamatan 1 Kali	1 Kali	18,723,600	22,000,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya pemenuhan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel	100%					Kintap

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD 19 Laporan	19 Laporan	3,959,400	4,839,300	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Tercapainya kesepakatan urutan prioritas pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%					Kintap
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan				Terlaksananya perencanaan pembangunan Daerah di Kecamatan Kintap 1 Kali	1 Kali	13,500,000	16,500,000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkanya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %					Takisung
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah Penyusunan Laporan kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja dan laporan Akhir Tahun 18 Dokumen	18 Dokumen	3,599,820	4,199,790	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %					Takisung
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD				Terlaksananya penyusunan Renja SKPD 2 Dokumenn	2 Dokumenn	3,599,775	4,199,738	
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan				Jumlah penyusunan dokumen pra musrenbang dan dokumen hasil musrenbang 1 kali	1 kali	14,476,500	16,469,250	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan	80 kegiatan					Karang Taruna	
			Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Karang Taruna			Jumlah Tersusunnya Laporan Hasil Musrenbang tingkat Kelurahan Karang Taruna 1 Dokumen	1 Dokumen	4,500,000	5,500,000		
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Terlaksananya Musrenbang RPJMD tingkat Kelurahan Pabahanan	85 kali					Pabahanan	
			Penyelenggaraan musrenbang RPJPD	Pabahanan			Terlaksananya Musrenbang RPJMD tingkat Kelurahan Pabahanan 1 kali	1 kali	5,621,400	7,500,000		
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan	80 kegiatan					Kel. Pelaihari	
			Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Pelaihari			Jumlah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan 1 kegiatan	1 kegiatan	6,426,000	7,140,000		
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	4.700.000 100%					Sarang Halang	
			Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Sarang Halang			Terlaksananya musrenbang tingkat kelurahan 1 kali	1 kali	4,230,000	6,000,000		
			Perhubungan									
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Tercapainya Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	5 Dokumen , Lokasi, %					Dinas Perhubungan	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	SKPD			Dokumen Rencana Induk Jaringan Jalan /RIJJ 1 Dokumen Dokumen Review DED dan Andalalin Terminal Pelaihari 2 Dokumen Tersusunnya : Dokumen study kelayakan (FS) Balai Pengujian Kendaraan Bernotor 1 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	550,000,000	650,000,000	
			Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Kabupaten			Terlaksananya pembinaan ,pengawasan, pengelola dan lokasi parkir se Kabupaten Tanah Laut 40 Lokasi	40 Lokasi	135,071,000	137,000,000	
			Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	SKPD			Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di terminal 80 %	80%	82,389,701	115,777,400	
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		Tercapainya Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	15 Unit Alat PKB					Dinas Perhubungan
			Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	SKPD			Jumlah terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor 15 Unit alat PKB	15 Unit alat PKB	184,330,000	173,780,000	
			Pogram peningkatan pelayanan angkutan		Tercapainya Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	5.200 Kendaraan					Dinas Perhubungan
			Penyuluhan bagi sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	SKPD					-	105,800,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sosialisasi penyuluhan/ketertiban lalu lintas dan angkutan	SKPD			Jumlah peserta penyuluhan sosialisasi dan pemilihan akut/pejalan kaki/pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas 75 orang	75 orang	89,400,000	99,000,000	
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten			Terlaksananya monitoring kegiatan kepelabuhanan di wilayah Kabupaten Tanah Laut 15,1 Terminal khusus, pelabuhan umum	15,1 Terminal khusus, pelabuhan umum	20,255,000	25,920,000	
			Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	SKPD			Jumlah Kendaraan laik jalan 5.200 Kendaraan wajib uji Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di PKB 80 %	5.200 Kendaraan wajib uji 80 %	266,155,000	275,000,000	
			Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	SKPD			Jumlah pengawasan kendaraan angkutan (Uji Petik) 24 kali	24 kali	934,374,000	864,566,000	
			Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal	SKPD			Terpeliharanya kebersihan di lingkungan terminal 12 bulan	12 bulan	32,800,000	35,000,000	
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		Tercapainya Program pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	2 Unit					Dinas Perhubungan
			Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	Kabupaten					-	70,000,000	
			Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas		Tercapainya Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas	50 Buah					Dinas Perhubungan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Kabupaten			-Pemeliharaan rambu standart 250 Buah - Road barrier 15 Buah terpasangnya : -Rambu standart 50 Buah - RPPJ 2 Buah -Pemeliharaan traffic light, warning light, comvek mirror 1 Tahun Jumlah rambu yang terpelihara dan terpasang : 0 Buah	250 Buah 15 Buah 50 Buah 2 Buah 1 Tahun 0 Buah	304,900,000	920,855,000		
			Pengadaan marka jalan	Kabupaten			Terlaksananya pengadaan marka jalan 15.500 m1	15.500 m1	794,840,000	865,720,000		
			Pengadaan rambu-rambu lalu lintas laut	Kabupaten, Panyipatan			Jumlah rambu rambu lalu lintas sungai terpasang 5 Buah rambu	5 Buah rambu	67,162,500	85,000,000		
			Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		Tercapainya Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1 Unit					Dinas Perhubungan	
			Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Kabupaten			Alat Uji lampu utama dan Up grade alat PKB 1 Unit	1 Unit	751,800,000	1,282,550,000		
			Lingkungan Hidup									
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Program pengembangan dan peningkatan kawasan tanpa rokok		Persentase Kawasan Tanpa Rokok	100 %					Dinas Kesehatan	
			Pengembangan kawasan tanpa rokok (Dana KTR)	Kabupaten, SKPD			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kawasan tanpa rokok 19 puskesmas	19 puskesmas	1,878,065,000	1,878,065,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur wilayah	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Tercapainya Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup	100 %					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Pelaksanaan penilaian kota sehat/ adipura	Kabupaten			Tersusunnya Laporan Non-Fisik Adipura 1 Dokumen Koordinasi penanganan Kota Pelaihari yang bersih dan sehat/ Adipura 1 Tahun	1 Dokumen 1 Tahun	405,000,000	450,000,000	
			Penyusunan AMDAL	Kabupaten			Terlaksananya penerbitan rekomendasi dan kelayakan lingkungan serta SPPL 20 Buah/SPPL Terlaksananya penilaian dokumen AMDAL dan UKL-UPL 15 Buah	20 Buah/SPPL 15 Buah	90,000,000	150,000,000	
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Kabupaten			Terlaksananya Adiwiyata di Kabupaten Tanah Laut 20 Dokumen Sekolah Adiwiyata Terlaksananya Sekolah Berwawasan Lingkungan 20 Sekolah Adiwiyata	20 Dokumen Sekolah Adiwiyata 20 Sekolah Adiwiyata	360,000,000	400,000,000	
			Pengembangan laboratorium lingkungan	Kabupaten			Terlaksananya operasional UPT Laboratorium lingkungan 12 Bulan	12 Bulan	266,679,540	296,310,600	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengujian dan pelayanan laboratorium lingkungan	Kabupaten			Terlaksananya kegiatan pengujian dan pelayanan laboratorium lingkungan 25 kali pengujian	25 kali pengujian	855,000,000	950,000,000	
			Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Kabupaten			Terlaksananya pengelolaan pengaduan di bidang lingkungan hidup 100 % dari pengaduan yang masuk	100 % dari pengaduan yang masuk	112,500,000	250,000,000	
			Pemantauan Kualitas Lingkungan	Kabupaten			Tersusunnya laporan uji kualitas udara ambien 2 Dokumen Laporan Tersusunnya laporan uji kualitas air 2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan 2 Dokumen Laporan	270,000,000	350,000,000	
			Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Kabupaten			Terlaksananya pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup 60 Perusahaan	60 Perusahaan	315,000,000	370,000,000	
			Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Kabupaten			Terlaksananya proses perizinan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dan pembuangan limbah cair (IPLC) 12 Izin PPLH	12 Izin PPLH	270,000,000	300,000,000	
			Pengkajian dampak lingkungan	Kabupaten			Tersusunnya hasil kajian Identifikasi Kerusakan Lahan akibat Produksi Biomassa 1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	135,000,000	350,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Tercapainya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	100 %					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Kabupaten			Tersusunnya profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Tanah Laut 1 Dokumen Terlaksananya kegiatan program kampung iklim (PROKLIM) 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	270,000,000	600,000,000	
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Meningkatkan Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup	100 %					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Pengembangan data dan informasi lingkungan	Kabupaten			#####	2 dokumen (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Dokumen RPPLH) 2 dokumen (Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan dokumen indeks kualitas LH)	315,000,000	500,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pengendalian Polusi		Tercapainya Peningkatan Pengendalian Polusi	100 %					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	Kabupaten			Tersusunnya laporan uji emisi/polusi udara akibat aktivitas industri 2 Dokumen	2 Dokumen	135,000,000	300,000,000	
			Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Kabupaten			Tersusunnya laporan pengujian kadar polusi limbah cair 2 Dokumen	2 Dokumen	135,000,000	300,000,000	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	100 %					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Kabupaten			Tersedianya Suku Cadang Kendaraan Bermotor 1 Tahun Terbelinya bahan bakar minyak gas dan pelumas 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	4,234,221,540	4,704,690,600	
			Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Kabupaten			Terlaksananya kegiatan-kegiatan tim koordinasi penanggung jawab kebersihan kota pelatihari 1 Tahun	1 Tahun	270,738,810	300,820,900	
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kabupaten			Tercapainya pemenuhan operasional kebersihan kota 1 Tahun	1 Tahun	486,995,220	541,105,800	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Kabupaten			Tersedianya pakaian keselamatan kerja aparat 1 Tahun Terpenuhinya belanja bahan bakar minyak, gas dan pelumas 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	3,940,632,770	4,378,480,856		
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Tingkat pemahaman peserta sosialisasi atau pelatihan	85%					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Kabupaten			Terlaksananya sosialisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 1 Kali pelatihan / 3 Desa	1 Kali pelatihan / 3 Desa	22,500,000	27,500,000		
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Berfungsinya tempat sampah secara optimal	100%					Bajuin	
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan				Terbuatnya tempat sampah 1 tahun	1 tahun	32,400,000	39,600,000		
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan	0 5 Tahun (tahun ke 1 rpjmd)					Takisung	
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan				Jumlah terbayarnya tempat sampah untuk 12 Desa 12 buah	12 buah	43,195,500	50,394,750		
			Pertanahan									
			Program Penataan Tata Guna Tanah		Terinventarisasi tanah Pemerintah Daerah dan Fasilitas Umum	10 Dokumen Inventarisasi					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
			Inventarisasi tanah pemerintah daerah dan fasilitas umum	Kabupaten			Terlaksananya Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah dan Fasilitas Umum di Wilayah Kabupaten Tanah Laut 10 Dokumen Inventarisasi	10 Dokumen Inventarisasi	89,314,830	-		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang akuntabel dan Profesionalisme Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan		Konflik antara pengguna tanah	5 konflik pertanahan					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kabupaten			Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik Pertanahan 5 Konflik Pertanahan	5 Konflik Pertanahan	110,808,450	-	
			Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		Tanah Negara di wilayah Kabupaten Tanah Laut	10 Dokumen					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Kabupaten			Terlaksananya penyusunan dokumen identifikasi pemanfaatan tanah negara 10 Dokumen	10 Dokumen	154,580,760	-	
			Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		terlaksananya penyuluhan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	84 %					Kurau
			Penyuluhan hukum pertanahan				terlaksananya penyuluhan hukum pertanahan 1 Kegiatan	1 Kegiatan	8,855,100	10,000,000	
			Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		Persentase peningkatan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	100 %					Jorong
			Penyuluhan hukum pertanahan				Jumlah peserta pelatihan / sosialisasi 50 orang	50 orang	6,907,500	8,300,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		Terlaksananya Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	9.025.000 Tahun					Batu Ampar
			Penyuluhan hukum pertanahan				Terlaksananya sosialisasi hukum pertanahan 1 kegiatan	1 kegiatan	8,122,500	9,025,000	
			Program pembangunan sistem pendaftaran tanah		Meningkatkan sistem pendaftaran tanah yang baik	100 %					Panyipatan
			Penyusunan sistem pendaftaran tanah				Jumlah peserta sosialisasi sistem pendaftaran tanah 60 orang	60 orang	10,800,000	12,000,000	
			Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan		Meningkatkan penyelesaian konflik-konflik pertanahan	100 %					Panyipatan
			Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik pertanahan				Terlaksananya penyelesaian konflik pertanahan 12 bulan	12 bulan	4,500,000	5,000,000	
			Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		Meningkatkan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	100 %					Panyipatan
			Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				Jumlah data tanah kas desa 1 dokumen	1 dokumen	6,300,000	7,000,000	
			Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan		Persentase penyelesaian konflik-konflik pertanahan	100 %					Pelaihari
			Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik pertanahan				Jumlah terselenggaranya fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan 2 kali	2 kali	17,716,500	19,685,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		Persentase penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	100 %					Pelaihari	
			Penyuluhan hukum pertanahan				Jumlah terlaksananya sosialisasi/penyuluhan hukum pertanahan 70 orang	70 orang	13,500,000	15,000,000		
			Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		Jumlah peserta sosialisasi pertanahan	40 Orang					Tambang Ulang	
			Penyuluhan hukum pertanahan				Jumlah peserta sosialisasi pertanahan 40 Orang	40 Orang	9,000,000	12,000,000		
			Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		Tingkat pemahaman peserta pelatihan	85%					Kintap	
			Penyuluhan hukum pertanahan				Jumlah peserta penyuluhan hukum pertanahan 50 Orang	50 Orang	10,305,000	12,595,000		
			Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan		Peserta yang mengikuti sosialisasi penyelesaian konflik pertanahan	80 orang					Kel. Pelaihari	
			penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Pelaihari			Peserta yang mengikuti sosialisasi pertanahan 45 orang	45 orang	6,390,000	7,550,000		
			Kependudukan dan Catatan Sipil									
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Tercapainya pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku	100%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil	Bumi Makmur, Jorong, Tambang Ulang, Kintap, Kurau, Panyipatan, Pelaihari, Bajuin, Takisung, Bati-Bati, Batu Ampar			Jumlah Pelayanan Langsung yang dilaksanakan 50 desa	50 desa	45,000,000	60,000,000	
			Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan	Kintap, Tambang Ulang, Kurau, Panyipatan, Bajuin, Pelaihari, Bati-Bati, Takisung, Batu Ampar, Bumi Makmur, Jorong			Jumlah pasangan yang melaksanakan pencatatan perkawinan 25 pasang	25 pasang	18,000,000	25,000,000	
			Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Kabupaten			Jumlah pameran pembangunan yang diikuti 1 kali	1 kali	30,000,000	35,000,000	
			Pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu (DAK)	Kabupaten			Jumlah penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan 12 bulan	12 bulan	1,000	1	
			Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	SKPD, Bajuin, Bati-Bati, Tambang Ulang, Batu Ampar, Bumi Makmur, Panyipatan, Jorong, Pelaihari, Kintap, Takisung, Kurau			Jumlah Jaringan dan Perangkat Online yang Terpelihara 13 tower/2 repeater	13 tower/2 repeater	200,700,000	825,557,700	
			Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	SKPD, Bajuin, Bati-Bati, Batu Ampar, Takisung, Bumi Makmur, Jorong, Kintap, Pelaihari, Kurau, Tambang Ulang, Panyipatan			Jumlah pelayanan langsung yang dilaksanakan 50 desa	50 desa	169,390,000	200,000,000	
			Pengembangan data base kependudukan	Bajuin, Jorong, Kurau, Bati-Bati, Panyipatan, Batu Ampar, Kintap, Pelaihari, Tambang Ulang, Takisung, Bumi Makmur			Terlaksananya monitoring pengelolaan database kependudukan 12 bulan	12 bulan	9,000,000	12,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Penataan Administrasi Kependudukan		Persentase peningkatan penataan administrasi kependudukan	100 %					Jorong
			Sosialisasi kebijakan kependudukan				Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 45 orang	45 orang	6,151,500	7,000,000	
			Program Penataan Administrasi Kependudukan		Meningkatkan penataan administrasi kependudukan	100 %					Panyipatan
			Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan				Laporan informasi kependudukan yang tersusun 12 bulan	12 bulan	4,500,000	5,000,000	
			Program Penataan Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen penataan kependudukan yang disusun oleh aparat desa	1 Dokumen					Tambang Ulang
			Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan				Jumlah dokumen penataan kependudukan yang disusun oleh aparat desa 1 Dokumen	1 Dokumen	9,000,000	12,000,000	
			Program Penataan Administrasi Kependudukan		Meningkatkan Kualitas administrasi kependudukan di Kecamatan Bati-Bati	82 %					Bati-Bati
			Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan				jumlah data administrasi kependudukan Tahun 2019 di Kecamatan Bati-Bati 4 Dokumen	4 Dokumen	18,000,000	25,000,000	
			Program Penataan Administrasi Kependudukan		Meningkatnya penataan administrasi kependudukan	0					Bumi Makmur
			Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan				Jumlah buku profil kependudukan 6 Dokumen	6 Dokumen	16,200,000	18,000,000	
			Program Penataan Administrasi Kependudukan		meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan	0 5 tahun (tahun ke 1 RPJMD)					Takisung

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil				Terlaksananya pelatihan petugas/aparat desa dalam penataan adm. kependudukan 48 orang	48 orang	7,199,775	8,399,738	
			Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan				Jumlah Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 12 Dokumen	12 Dokumen	2,699,730	3,149,685	
		Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Program Pengendalian Penduduk		Tercapainya program pengendalian penduduk	12 bulan					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pembinaan Koalisi Kependudukan	SKPD			Jumlah peserta sosialisasi kependudukan 90 orang	90 orang	22,252,500	27,197,500	
			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
		Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Persentase PKK Aktif	100%					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pembinaan pelaksanaan kesejahteraan keluarga (PKK)	Kabupaten			Terpenuhinya pembinaan kesejahteraan keluarga di Tanah Laut 147 Lembaga	147 Lembaga	487,955,363	596,389,889	
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Persentase Peran Perempuan dalam pembangunan	135 Desa					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan dan penilaian lomba desa P2WKSS	SKPD			Jumlah Desa P2WKSS yang dibina 1 pembinaan desa	1 pembinaan desa	84,600,000	103,400,000	
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif (DPRD)	30 %					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	SKPD			Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina 5 Organisasi Perempuan , 8 Kegiatan	5 Organisasi Perempuan , 8 Kegiatan	89,281,164	-	
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Persentase Kelembagaan Gender yang aktif	100 %					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A)	SKPD			Jumlah pendampingan kasus kekerasan Perempuan dan Anak P2TP2A 55 penanganan kasus	55 penanganan kasus	149,381,163	182,576,977	
			Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	SKPD			Bimbingan Teknis Penguatan Pemahaman bagi unsur Pelaksana Kota Layak Anak (KLA) 100 Orang	100 Orang	31,532,625	35,036,250	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	SKPD			Jumlah peserta Jambore FAD Kab. Tanah Laut dan pendampingan HAN 100 peserta jambore FAD	100 peserta jambore FAD	70,373,700	86,012,300	
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		terlaksananya dan pembinaan organisasi perempuan	82 %					Kurau
			Kegiatan pembinaan organisasi perempuan						22,500,000	30,000,000	
			Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan		Tingkat pemahaman peserta pelatihan	90%					Bajuin
			Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak				Jumlah peserta pelatihan 1 tahun	1 tahun	5,841,000	7,139,000	
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Persentase peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	100 %					Jorong
			Kegiatan pembinaan organisasi perempuan				Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 11 desa	11 desa	20,655,000	24,500,000	
			Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera				Terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 0	0	17,758,800	2,050,000	
			Peningkatan peranan ibu rumah tangga dalam pembangunan				Jumlah peserta yg mengikuti sosialisasi 75 orang	75 orang	9,533,700	9,500,000	
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Terlaksananya Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	25.110.000 Tahun					Batu Ampar

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan pembinaan organisasi perempuan				Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan 6 pembinaan	6 pembinaan	22,599,000	30,000,000	
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Meningkatkan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	100 %					Panyipatan
			Kegiatan pembinaan organisasi perempuan				Jumlah peserta pembinaan organisasi perempuan 60 orang	60 orang	11,700,000	13,000,000	
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Persentase peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	100 %					Pelaihari
			Kegiatan pembinaan organisasi perempuan				Jumlah terlaksananya sosialisasi dan pembinaan organisasi perempuan 720 orang	720 orang	32,724,000	45,000,000	
			Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan		Jumlah peserta sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	270 Orang					Tambang Ulang
			Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak				Jumlah peserta sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dalam pembangunan 270 orang	270 orang	20,250,000	25,000,000	
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	82 1					Bati-Bati

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan pembinaan organisasi perempuan				Jumlah pembinaan Organisasi Perempuan di Kecamatan Bati-Bati 10 Kali kegiatan	10 Kali kegiatan	23,400,000	26,000,000	
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Meningkatnya peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	0					Bumi Makmur
			Kegiatan pembinaan organisasi perempuan				Pelaksanaan Pokja PKK 5 Kali	5 Kali	16,200,000	18,000,000	
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Tingkat pemahaman peserta pelatihan	90%					Kintap
			Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender				Jumlah peserta yang terlatih dalam peran serta kesetaraan jender 60 Orang	60 Orang	9,900,000	12,100,000	
			Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera				Jumlah Peserta Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera 60 Orang	60 Orang	9,630,000	11,770,000	
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Tingkat pemahaman peserta pelatihan	90%					Takisung
			Kegiatan pembinaan organisasi perempuan				Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan 4 Kali	4 Kali	13,499,775	15,749,738	
			Peningkatan peranan ibu rumah tangga dalam pembangunan				Terlaksananya pendidikan ibu rumah tangga dan remaja tentang perlindungan wanita dalam hukum 48 Orang	48 Orang	7,199,775	8,399,738	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	20 %					Angsau
			Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Angsau			Jumlah Pertemuan Dalam Rangka Pembinaan Organisasi Perempuan 10 Kali	10 Kali	27,589,500	35,000,000	
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembinaan organisasi perempuan	80 Orang					Karang Taruna
			Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Karang Taruna			Jumlah Pertemuan Dalam Rangka Pembinaan Organisasi Perempuan 1 Orang	1 Orang	45,000,000	60,000,000	
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Organisasi Perempuan yang terbina	85 kali pertemuan					Pabahanan
			Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Pabahanan			Organisasi Perempuan yang terbina 10 kali pertemuan	10 kali pertemuan	32,121,000	35,690,000	
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembinaan organisasi perempuan	80 orang					Kel. Pelaihari
			Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Pelaihari			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembinaan organisasi perempuan 200 orang	200 orang	29,331,000	32,590,000	
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		tercapainya peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	36.360.000 100%					Sarang Halang

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Sarang Halang			Jumlah pelatihan/sosialisasi/pembinaan organisasi perempuan 12 Kali	12 Kali	32,724,000	38,000,000	
			Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
			Program Keluarga Berencana		Tercapainya Pelayanan Keluarga Berencana	100 %					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Advokasi Pelayanan KIE	SKPD			Jumlah media pelayanan KIE KB melalui media massa, media luar ruang, media elektronik dan media cetak 4 media	4 media	22,500,000	27,500,000	
			Pembinaan Keluarga Berencana	SKPD			Jumlah Pembinaan Program KB di Kecamatan 2 kali pembinaan di 11 kecamatan Jumlah Pelayanan Kontrasepsi kepada peserta KB 600 aks Implant, 40 IUD, 64 MOW, 10 MOP, 300 Pelepasan Implant & 20 Pelepasan IUD, 5 Aks Pelayanan Komplikasi	2 kali pembinaan di 11 kecamatan 600 aks Implant, 40 IUD, 64 MOW, 10 MOP, 300 Pelepasan Implant & 20 Pelepasan IUD, 5 Aks Pelayanan Komplikasi	330,336,000	403,744,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		Tercapainya Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	100 %					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pemberdayaan ekonomi keluarga	SKPD			Jumlah pelaksanaan Lomba UPPKS dan Orientasi UPPKS 1 keg lomba, 1 keg orientasi UPPKS Jumlah Pembinaan Program Pemberdayaan Keluarga di Kecamatan 2 kali pembinaan di 11 kec	1 keg lomba, 1 keg orientasi UPPKS 2 kali pembinaan di 11 kec	30,611,700	37,414,300	
			Pembinaan petugas pengelola program KB dan keluarga sejahtera	SKPD			Jumlah pelaksanaan lomba PKB, Keluarga hebat, PPKBD dan Kelompok BKB 4 keg lomba Jumlah pembinaan program Ketahanan Keluarga di Kecamatan 2 kali pembinaan di 11 kec	4 keg lomba 2 kali pembinaan di 11 kec	44,137,800	53,946,200	
			Pengelolaan program KB di masyarakat	SKPD			Jumlah peserta pertemuan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk bersama mitra kerja 45 Mitra Kerja	45 Mitra Kerja	22,500,000	27,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan data dan informasi program KB	SKPD			Jumlah peserta pertemuan pembekalan pelaksanaan pendataan keluarga di 11 kecamatan 190 orang peserta (PKB, PPKBD dan kader peserta)	190 orang peserta (PKB, PPKBD dan kader peserta)	27,000,000	33,000,000	
			Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat peduli KB	SKPD			Jumlah peserta pertemuan pelatihan pencatatan dan pelaporan data Dallap dan Pelkon dari 11 Kecamatan 56 orang (PKB, Petugas Klinik)	56 orang (PKB, Petugas Klinik)	18,000,000	22,000,000	
			Program pengembangan pusat pelayanan Informasi dan konseling KRR		Tercapainya program pengembangan PIK dan Konseling KRR	100 %					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	SKPD			Jumlah fasilitas pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya dari 11 kecamatan 100 orang (PIK Remaja dan Konselor Sebaya)	100 orang (PIK Remaja dan Konselor Sebaya)	67,747,500	82,802,500	
			Sosial								
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Terlaksananya sistem penanganan pasca bencana yang efektif dan efisien	1 Jumlah					Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Kabupaten			Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Pasca Bencana 11 Kecamatan	11 Kecamatan	72,000,000	96,000,000	
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Tercapainya kriteria pemberian hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%					Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten			Jumlah Lembaga Keagamaan yang diberikan bantuan 75 organisasi	75 organisasi	40,500,000	54,000,000	
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	10%					Dinas Sosial
			Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Kabupaten			Jumlah Pendamping Sosial Basis Datta Terpadu dan Bantuan Pangan Non Tunai 150 orang	150 orang	90,000,000	250,000,000	
			Penunjang program keluarga harapan	Kabupaten			Terfasilitasinya pendistribusian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar untuk PKH dan terfasilitasinya pembinaan petugas pendamping dan operator PKH 249 orang	249 orang	292,860,000	1,500,000,000	
			Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	Kabupaten			Terwujudnya basis data masyarakat berpenghasilan rendah di tiap Desa dan Kelurahan. 146 Desa/Kelurahan	146 Desa/Kelurahan	324,000,000	725,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Keluarga Miskin	, Kabupaten()			Terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga miskin 616 orang	616 orang	612,304,000	-	
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Persentase panti sosial skala kab/kota yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	75%					Dinas Sosial
					Persentase Wahana Kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	30%					
			Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Kabupaten			Eks NAPI, Orang Terlantar, Korban Bencana, Mayat Terlantar, Perlindungan bagi Anak. 139 orang	139 orang	183,476,700	615,000,000	
			Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Kabupaten			3 lokasi tempat rehabilitasi 3 lokasi	3 lokasi	22,590,000	70,000,000	
			Program pembinaan anak terlantar		Tingkat pemahaman peserta pelatihan	90%					Dinas Sosial
			Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Kabupaten			Jumlah anak terlantar yang mengikuti Praktek Belajar Kerja 20 orang/anak	20 orang/anak	101,781,000	115,000,000	
			Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, yang telah menerima jaminan sosial	17%					Dinas Sosial
			Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang cacat	Kabupaten			Jumlah penyandang cacat yang terpenuhi kebutuhannya. 40 orang	40 orang	119,155,000	100,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Kabupaten			Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mengikuti pelatihan keterampilan 20 orang	20 orang	133,321,000	150,000,000	
			Program pembinaan panti asuhan /panti jompo		Persentase lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	17%					Dinas Sosial
			Pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar	Kabupaten			Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. 80 orang	80 orang	421,040,000	150,000,000	
			Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		Tingkat pemahaman peserta pelatihan	90%					Dinas Sosial
			Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Kabupaten			Jumlah tuna sosial dan eks NAPI yang telah diberikan pendidikan dan keterampilan. 40 orang	40 orang	44,151,300	160,000,000	
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Tercapainya partisipasi ormas	100%					Dinas Sosial
			Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Kabupaten			Jumlah Orsos, Karang Taruna dan Lembaga Penyelenggara Kessos yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 33 TKSK,PSM,KT	33 TKSK,PSM,KT	251,500,410	300,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelestarian Nilai - Nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Kabupaten			Terfasilitasinya pembinaan penanaman pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial 3,3 kali,makam	3,3 kali,makam	207,765,000	250,000,000	
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Tingkat pemahaman peserta pelatihan	90%					Bajuin
			Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya				Jumlah peserta pelatihan 1 tahun	1 tahun	7,683,750	9,391,250	
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100 %					Pelaihari
			Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat				Jumlah sosialisasi 50 orang	50 orang	54,000,000	60,000,000	
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Tingkat pemahaman peserta pelatihan	90%					Tambang Ulang
			Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin				Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan dan ayam 45 Orang	45 Orang	9,450,000	12,500,000	
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Tetanganinya tanggap cepat darurat bidang sosial sesuai dengan SOP yang berlaku	100%					Kintap
			Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa				Terlaksananya penanganan tanggap cepat darurat 1 Tahun	1 Tahun	58,499,460	71,499,340	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Tingkat pemahaman peserta pelatihan	90%					Kintap
			Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha				Jumlah Pelatihan Pengembangan Usaha bagi Organisasi Kemudaan 60 Orang	60 Orang	9,000,000	11,000,000	
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	0 5 Tahun (tahun ke 1 RPJMD)					Takisung
			Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin				Terlaksana pelatihan pembuatan pentol ikan dan gerobak pentol bagi warga miskin 24 orang	24 orang	43,186,500	50,384,250	
			Ketenagakerjaan								
	Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan menurunkan Angka Pengangguran	Meningkatnya pendapatan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		Terwujudnya pencari kerja yang terampil dan kompeten	288 orang					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian UPT Balai Latihan Kerja
			Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	SKPD			Tersedianya peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja 1 Workshop	1 Workshop	30,600,000	39,100,000	
			Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Kabupaten, Luar Daerah			Meningkatnya kapasitas instruktur BLK 10 Orang	10 Orang	45,000,000	57,500,000	
			Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Kurau, Panyipatan, Takisung, Kintap, Tambang Ulang, Bati-Bati, Bumi Makmur			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 176 Orang	176 Orang	576,000,000	736,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK	SKPD			Optimalisasi sarana dan prasarana BLK 1 Set sumur bor	1 Set sumur bor	72,000,000	92,000,000	
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1 Tahun					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Luar Daerah, Kabupaten			Terlaksananya penyusunan database tenaga kerja daerah Kab. Tanah Laut 1 Dokumen	1 Dokumen	42,030,000	50,700,000	
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja		Meningkatnya peluang kesempatan kerja dan penempatan bagi tenaga kerja	875 Orang					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Kabupaten			Tersusunnya informasi bursa tenaga kerja melalui penerapan sistem bursa kerja online 1 Tahun	1 Tahun	16,410,150	21,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Luar Daerah, Kabupaten			Terselenggaranya pameran kesempatan kerja (Job Fair), jumlah pelayanan pembuatan kartu AK1/bagi pencari kerja. Terlaksananya penempatan tenaga kerja melalui pameran kesempatan kerja (Job Fair). Terselenggaranya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi siswa SMK/Mahasiswa PT dalam rangka memasuki dunia kerja. Terselenggaranya sosialisasi peraturan pemerintah tentang penempatan tenaga kerja bagi setiap perusahaan. Terselenggaranya sosialisasi penerapan bursa kerja khusus pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja (LPK). terselenggaranya sosialisasi penempatan dan perlindungan PMI dalam pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2017 bagi aparat desa dan	800 Orang	303,829,650	351,000,000	
			Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Luar Daerah, Kabupaten			Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan bagi calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) 75 Orang	75 Orang	24,756,300	30,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Kabupaten, Luar Daerah			Terseleenggaranya pemagangan mandiri maupun pemagangan berbasis pengguna dan pelatihan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) 3 Pelatihan	3 Pelatihan	128,059,200	200,000,000	
			Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Kabupaten			Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu kelembagaan dan pelatihan kewirausahaan 10 Pelatihan	10 Pelatihan	76,828,500	105,000,000	
			Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Kabupaten			Terlaksananya pelatihan berbasis masyarakat bagi wirausaha baruterhadap akses pendanaan 7 Pelatihan	7 Pelatihan	97,059,600	125,000,000	
			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Terciptanya hubungan industrial yang harmonis serta perlindungan tenaga kerja yang berkeadilan	21 Kasus, Sosialisasi, Dokumen					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Kabupaten			Terfasilitasinya prosedur penyelesaian perselisihan hubungan perindustrian 15 Kasus	15 Kasus	72,000,000	105,000,000	
			Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Kabupaten			Terciptanya masyarakat yang memahami aturan ketenagakerjaan 6 Sosialisasi	6 Sosialisasi	117,846,000	150,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten			Terpetakannya profil perusahaan di Kabupaten Tanah Laut 1 Dokumen	1 Dokumen	15,471,000	21,500,000		
			Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Kabupaten			Terfasilitasinya perlindungan hukum kepada masyarakat mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan 1 Dokumen	1 Dokumen	38,880,000	58,000,000		
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja		Jumlah peserta pelatihan pembuatan kerupuk, kue kering dan pembuatan sasirangan	162 Orang					Tambang Ulang	
			Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan				Jumlah peserta pelatihan pembuatan kerupuk, kue kering dan pembuatan sasirangan 162 Orang	162 Orang	49,950,000	57,500,000		
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja		Meningkatnya kualitas Kesempatan Kerja	0 5 tahun (tahun ke 1 RPJMD)					Takisung	
			Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan				Terlaksananya pelatihan pembuatan sasirangan dan pembuatan kue 72 Orang	72 Orang	27,441,900	32,089,050		
			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Tercapainya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	0					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	
			Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	SKPD			Jumlah pelatihan kewirausahaan koperasi dan UKM 3 pelatihan	3 pelatihan	18,427,500	20,475,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Kabupaten			Jumlah Bimtek Penyusunan ART dan Persus Koperasi Bagi Pengurus Koperasi 1 kegiatan	1 kegiatan	27,000,000	30,000,000	
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Berfungsinya sarana pemasaran produk mikro kecil menengah untuk peningkatan perekonomian masyarakat	100%					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
			Pengembangan sarana pemasaran produk mikro kecil menengah	Bati-Bati			Jumlah penyediaan gerobak UMKM 40 buah Jumlah Pembangunan Pusat Kerajinan Anyaman Purun 1 unit Jumlah pembangunan tugu ikon UMKM 2 unit	40 buah 1 unit 2 unit	1,169,988,300	-	
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Tercapainya Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi	100%					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
			Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Kabupaten			Jumlah terlaksananya Bimtek penyusunan ART dan Persus Koperasi Bagi Pengurus Koperasi 1 kegiatan	1 kegiatan	27,000,000	30,000,000	
			Program fasilitasi pemasaran produk unggulan daerah		Terlaksananya Fasilitasi Pemasaran Produk Unggulan Daerah	100%					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
			Penyebarluasan informasi produk unggulan, andalan dan potensi daerah	Kabupaten			Jumlah penyelenggaraan Pameran yang di ikuti 2 Kali	2 Kali	35,739,000	39,710,000	
			Program fasilitasi pemasaran produk unggulan daerah		Terpromosikannya produk IKM	8 pameran					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyebarluasan informasi produk unggulan, andalan dan potensi daerah	Luar Daerah, Kabupaten			Terikutinya pameran produk IKM 8 kali	8 kali	505,893,000	730,000,000	
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Persentase tindak lanjut laporan monev penyaluran KUR	20 %					Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Pembangunan
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten			Tersusunnya dokumen laporan Monev Penyaluran KUR 1 Dokumen	1 Dokumen	25,200,000	33,600,000	
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		terlaksananya pameran pembangunan	84 %					Kurau
			Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				terlaksananya pameran pembangunan 1 Kali	1 Kali	22,747,500	30,000,000	
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Tercapainya target Jumlah Transaksi UMKM pada Saat Pameran	100%					Bajuin
			Pengembangan sarana promosi hasil produksi				Terlaksana pameran pembangunan 1 tahun	1 tahun	35,554,500	43,455,500	
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Persentase peningkatan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	100 %					Jorong
			Pengembangan sarana promosi hasil produksi				Terlaksananya pameran pembangunan produksi hasil masyarakat 1 kali	1 kali	27,260,100	34,000,000	
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Terlaksananya Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	40.770.000 Tahun					Batu Ampar

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan sarana promosi hasil produksi				Terlaksananya pengembangan sarana promosi hasil produksi berupa pameran pembangunan 1 kegiatan	1 kegiatan	36,693,000	42,000,000	
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Meningkatkan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	100 %					Panyipatan
			Pengembangan sarana promosi hasil produksi				Terlaksananya kegiatan pameran/ expo 1 kali	1 kali	36,000,000	40,000,000	
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Persentase pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	100 %					Pelaihari
			Pengembangan sarana promosi hasil produksi				Jumlah terlaksananya pameran pembangunan hasil produksi masyarakat 1 kali	1 kali	45,000,000	50,000,000	
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Terfasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi melalui pameran pembangunan	1 Kali Kegiatan					Tambang Ulang
			Pengembangan sarana promosi hasil produksi				Terfasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi melalui pameran pembangunan 1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	45,000,000	55,000,000	
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Meningkatkan pemasaran Hasil produksi UKM melalui publikasi mas media / pameran	83 %					Bati-Bati

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan sarana promosi hasil produksi				Jumlah promosi hasil produksi melalui keikutsertaan dalam pameran pembangunan 1 Kali kegiatan	1 Kali kegiatan	21,150,000	30,000,000	
			Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif		Peningkatan pengembangan usaha kecil menengah	0					Bumi Makmur
			Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah				Jumlah Promosi Hasil Bumi 1 Kali	1 Kali	65,272,500	75,000,000	
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Peningkatan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	0					Bumi Makmur
			Pengembangan sarana promosi hasil produksi				Terlaksananya Pameran Pembangunan Hasil Produksi Masyarakat 1 Kali	1 Kali	25,200,000	30,000,000	
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Jumlah Transaksi selama pameran	80% dari target yang ditetapkan					Kintap
			Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah				Terselenggaranya promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 1 Kali	1 Kali	27,000,000	33,000,000	
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Jumlah Transaksi selama kegiatan promosi	80% dari target yang ditetapkan					Takisung
			Pengembangan sarana promosi hasil produksi				Jumlah terlaksananya fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi 1 kali	1 kali	40,495,500	47,244,750	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi	100%					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyelenggaraan pameran investasi	SKPD			Terikutinya Pameran investasi di Kabupaten 1 Kali	1 Kali	36,000,000	45,000,000	
			Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	SKPD			Terlaksanannya koordinasi Penanaman Modal antara pusat, Provinsi dan Kabupaten 5 OK Terlaksanannya koordinasi Penanaman Modal antara Provinsi dan Kabupaten 10 OK	5 OK 10 OK	27,000,000	35,000,000	
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Meningkatnya Iklim Investasi dan realisasi investasi	0 5 Tahun RPJMD					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal	SKPD			Terlaksanannya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal 15 buah kesepakatan	15 buah kesepakatan	36,000,000	40,000,000	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD			Terlaksanannya monitoring dan evaluasi pelaporan 1 Kabupaten	1 Kabupaten	36,000,000	50,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah		Diacunya dokumen Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi untuk kebijakan bidang investasi	100%					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	SKPD			Terlaksananya kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 1 Dokumen	1 Dokumen	126,000,000	140,000,000		
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Persentase tindak lanjut pelaksanaan promosi potensi dan produk unggulan daerah	20 %					Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Pembangunan	
			Pengembangan potensi unggulan daerah	Luar Daerah, Kabupaten			Terlaksananya fasilitasi promosi produk dan potensi unggulan daerah 4 Kegiatan	4 Kegiatan	89,100,000	118,800,000		
			Kebudayaan									
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		Tercapainya tingkat partisipasi peserta sesuai yang ditargetkan	100%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penyelenggaraan festival budaya daerah	SKPD			Jumlah event 8 event	8 event	495,000,000	400,000,000		
			Program Pengembangan Nilai Budaya		Berfungsinya secara optimal bangunan sesuai peruntukannya	100%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	SKPD			Jumlah bangunan 2 bangunan	2 bangunan	45,000,000	-		
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Tecapainya atensi audiens sesuai target yang ditetapkan	100%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	SKPD			terpromosikannya budaya daerah 1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	-		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	100%					Bumi Makmur	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya				Terwujudnya Pelestarian Budaya Daerah 11 Desa	11 Desa	36,000,000	40,000,000		
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya		meningkatnya usaha pelestarian budaya daerah	100%					Takisung	
			Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah				Terlaksananya kegiatan lomba habsyi dan lomba tarian daerah 2 lomba	2 lomba	21,171,825	24,150,000		
			Kepemudaan dan Olahraga									
		Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	Program Pengembangan Olahraga Rekreasi		Tercapainya prestasi olahraga non-prestasi sesuai target yang ditetapkan	100%					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi	SKPD			Terbinanya cabang Olahraga Non-prestasi 2 kegiatan	2 kegiatan	-	420,000,000		
		Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		Tecapainya atensi audiens sesuai target yang ditetapkan	100%					Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	
			Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Kabupaten			Jumlah kegiatan SKJ PNS di lingkup Pemda Kab. Tanah Laut 42 kali	42 kali	135,000,000	180,000,000		
			Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda		Diacunya dokumen Kajian untuk kebijakan bidang kepemudaan	100%					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Pendataan potensi kepemudaan	SKPD			Tersusunnya program kepemudaan □ □ dokumen	1 dokumen	-	660,000,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	SKPD			Terlaksananya Lomba Da'i Remaja 12 bulan	12 bulan	-	120,000,000	
			Program peningkatan peran serta kepemudaan		Tercapainya peningkatan peran serta kepemudaan	35 OKP					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Pembinaan organisasi kepemudaan	SKPD			Jumlah organisasi kepemudaan (OKP) yang terbina 35 OKP	35 OKP	202,500,000	900,000,000	
			Peningkatan pengetahuan mengenang para pahlawan (napak tilas jejak pahlawan)	Kabupaten			Jumlah napaktilas tingkat kabupaten dan tingkat provinsi yang dilaksanakan 3 kali	3 kali	126,000,000	250,000,000	
			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	SKPD			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan untuk melaksanakan paskibraka 39 Orang	39 Orang	765,000,000	1,500,000,000	
			Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	SKPD			Jumlah prestasi hasil karya tulis ilmiah di kalangan pemuda 12 bulan	12 bulan	-	120,000,000	
			Pameran prestasi hasil karya pemuda	SKPD			Jumlah prestasi hasil karya pemuda 20 hasil karya	20 hasil karya	133,198,470	185,000,000	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD			Jumlah dokumen dari hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan 12 Bulan	12 Bulan	95,611,500	135,000,000	
			Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		Terlatihnya pemuda dan mampu berwirausaha	5 wirausaha					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	SKPD			Jumlah wirausaha yang terlatih 5 wirausaha	5 wirausaha	108,664,290	984,850,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		Tercapainya program pembinaan dan pemasarakatan olah raga	25 Cabor					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah	SKPD			Tersedianya pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 9 Cabor	9 Cabor	687,847,500	1,157,500,000	
			Kegiatan pembinaan olah raga berkembang di masyarakat atau olah raga tradisional	SKPD			Tersedianya pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat atau olah raga tradisional 7 Cabor	7 Cabor	-	125,000,000	
			Kegiatan pembinaan olah raga berkembang di masyarakat atau olah raga tradisional	SKPD			Tersedianya pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat atau olah raga tradisional 7 Cabor	7 Cabor	100,000,000	240,000,000	
			Kegiatan Pemasalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	SKPD			Jumlah Pekerjaan Even Olahraga Massal 1 kegiatan	1 kegiatan	-	180,000,000	
			Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	SKPD			Tersedianya Data Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah 1 dokumen	1 dokumen	-	125,000,000	
			Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	SKPD			Tersedianya atlet berbakat dan berprestasi 6 Cabor	6 Cabor	315,000,000	900,000,000	
			Peningkatan jumlah dan kualitas serta kopetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga	SKPD			Tersedianya Peningkatan jumlah dan Kualitas serta Kopetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga 20 orang	20 orang	-	180,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah	SKPD			Tersedianya Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah 30 cabor	30 cabor	-	120,000,000	
			Pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat	SKPD			Tersedianya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat atau olahraga tradisional 7 Cabor	7 Cabor	-	125,000,000	
			Pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat	SKPD			Terlaksananya pembibitan dan Pembinaan olahragawan berbakat 3 kegiatan	3 kegiatan	-	180,000,000	
			Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	SKPD			terlaksananya kesegaran dan kebugaran bagi pelajar dan masyarakat 4 kegiatan	4 kegiatan	-	180,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		Tercapainya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	6 Saprasi					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	SKPD			Terlaksananya pemeliharaan rutin/sarana dan prasarana olahraga 6 Saprasi	6 Saprasi	315,000,000	900,000,000	
			Program peningkatan peran serta kepemudaan		terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan kepada pemuda melalui pelatihan dasar kepemimpinan	82 %					Kurau

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan				terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan kepada pemuda melalui pelatihan dasar paskibra 1 Kegiatan	1 Kegiatan	84,286,800	93,652,000	
			Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		Terlaksananya upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	84 %					Kurau
			Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda				Terlaksananya pelaksanaan pelatihan bagi pelaku UMKM 1 Kali	1 Kali	16,522,200	20,000,000	
			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		Tercapainya Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani	82 %					Kurau
			Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi				Tercapainya Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani 0	0	45,000,000	50,000,000	
			Program peningkatan peran serta kepemudaan		Terlaksananya pengibaran bendera merah putih sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku	100%					Bajuin
			Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan				Jumlah anggota paskibra 1 tahun	1 tahun	73,462,500	89,787,500	
			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		Tecapainya atensi audiens sesuai target yang ditetapkan	100%					Bajuin
			Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga				Terlaksananya pertandingan sepak bola antar desa dan lomba cerdas cermat antar desa 1 tahun	1 tahun	75,946,500	92,823,500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan kebugaran jasmani dan rekreasi				Terlaksananya senam kebugaran jasmani dan jalan sehat 1 tahun	1 tahun	82,980,000	101,420,000	
			Program peningkatan peran serta kepemudaan		Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	100 %					Jorong
			Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan				Jumlah peserta paskibra 50 orang	50 orang	42,075,000	50,000,000	
			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		Persentase peningkatan pembinaan dan pemasarakatan olahraga	100 %					Jorong
			Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga				Terlaksananya lomba sepak bola tingkat kecamatan 1 musim	1 musim	66,735,000	-	
			Peningkatan kebugaran jasmani dan rekreasi				Jumlah yang mengikuti senam pagi 20 orang	20 orang	8,290,800	10,500,000	
			Program peningkatan peran serta kepemudaan		Terlaksananya pengibaran bendera merah putih sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku	100%					Batu Ampar
			Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan				Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan kepada pemuda melalui pelatihan dasar Paskibra 10 latihan	10 latihan	84,168,000	95,000,000	
			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		Terlaksananya Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	66.730.000 Tahun					Batu Ampar

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi				Terlaksananya jalan sehat 1 kali Terlaksananya senam kesegaran jasmani 40 senam	1 kali 40 senam	60,057,000	70,000,000	
			Program peningkatan peran serta kepemudaan		Meningkatkan peran serta kepemudaan	100 %					Panyipatan
			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan				Jumlah peserta Paskibra Kecamatan yang dilatih 25 orang	25 orang	58,500,000	65,000,000	
			Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		Meningkatkan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	100 %					Panyipatan
			Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda				Jumlah pemuda dan pemudi yang dilatih 60 orang	60 orang	9,000,000	10,000,000	
			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		Meningkatkan pembinaan dan pemasarakatan olahraga; Meningkatkan pembinaan dan pemasarakatan olahraga	100 %; 100 %					Panyipatan
			Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga				Jumlah kompetisi olahraga 2 cabang olahraga	2 cabang olahraga	45,000,000	60,000,000	
			Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi				Jumlah senam massal 1 kali Jumlah kegiatan senam rutin 11 kali	1 kali 11 kali	28,800,000	35,000,000	
			Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		Persentase peningkatan upaya kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	100 %					Pelaihari

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelatihan ketrampilan bagi pemuda				Jumlah terlaksananya sosialisasi /pelatihan berupa pembuatan tas, dompet, dari benang wol, jarum, gunting, lem tembak, kain perca/kain satin, resleting, dll 50 orang	50 orang	9,000,000	10,000,000	
			Program peningkatan peran serta kepemudaan		Jumlah peserta paskibraka	30 Orang					Tambang Ulang
			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan				Jumlah peserta paskibraka 30 Orang	30 Orang	46,800,000	55,000,000	
			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		Terlaksananya senam kesegaran jasmani	12 Bulan					Tambang Ulang
			Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi				Terlaksananya senam kesegaran jasmani 12 Bulan	12 Bulan	27,000,000	32,000,000	
			Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda		Meningkatkan Jiwa Kepemimpinan bagi Pemuda melalui Pendidikan dan latihan dasar Paskibra	83 %					Bati-Bati
			Pelatihan dan pembangunan organisasi kepemudaan				Jumlah Peserta Paskibra Kecamatan Bati-Bati 32 Orang/peserta	32 Orang/peserta	48,600,000	60,000,000	
			Program peningkatan peran serta kepemudaan		Meningkatnya Peran Serta pemuda dalam pembangunan	0					Bumi Makmur
			Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan				Jumlah pemuda dalam Pelatihan Dasar Paskibra 28 Orang	28 Orang	38,790,000	43,500,000	
			Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		Meningkatnya Pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	0					Bumi Makmur

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda				Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pelatihan 220 Orang	220 Orang	60,795,000	70,000,000	
			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		Tercapainya Pembinaan dan pemasarakatan olah raga	0					Bumi Makmur
			Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi				Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemasarakatan olah raga 1 Tahun	1 Tahun	16,897,500	19,000,000	
			Program peningkatan peran serta kepemudaan		Terlaksananya pengibaran bendera merah putih sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku	100%					Kintap
					Tercapainya target partisipasi bakti sosial	100%					
			Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan				Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan 35 Orang	35 Orang	90,000,000	110,000,000	
			Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan				jumlah kegiatan bakti sosial kepemudaan 6 Kali	6 Kali	27,000,000	33,000,000	
			Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda		Tercapainya Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	100%					Takisung
			Pelatihan dan pembangunan organisasi kepemudaan				Terlaksananya pelatihan pembuatan sablon bagi pemuda 36 Orang	36 Orang	11,520,000	13,440,000	
			Program peningkatan peran serta kepemudaan		meningkatnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan	0 5 tahun (tahun ke 1 RPJMD)					Takisung

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan				Jumlah terlaksananya petihan dasar kepemimpinan (Paskibraka) 37 Orang	37 Orang	77,961,600	92,530,200	
			Pameran prestasi hasil karya pemuda				Terlaksananya pameran hasil karya pemuda dan lomba pentas seni 1 Kali/lomba	1 Kali/lomba	76,641,300	87,971,100	
			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		Terfasilitasi secara baik kegiatan Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga di Kecamatan	100%					Takisung
			Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat				Jumlah terlaksananya senam kesegaran jasmani 20 kali	20 kali	16,200,000	19,900,000	
			Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga				Jumlah terlaksananya kegiatan kompetisi olahraga (Bola Voly, Seoak Bola, Bulu Tangkis dan Belogo) 4 lomba	4 lomba	55,624,500	64,632,750	
			Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi				Terlaksananya senam kesegaran Jasmani dan senam bersama masyarakat 25 kali	25 kali	27,900,000	32,550,000	
	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang akuntabel dan Profesionalisme Pelayanan Publik	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba		Meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	100 %					Panyipatan
			Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda				Jumlah peserta penyuluhan bahaya narkoba bagi pemuda dan pemudi 60 orang	60 orang	9,000,000	12,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba		meningkatnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	0 5 tahun (tahun ke 1 RPJMD)					Takisung
			Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda				Terlaksananya upaya pencegahan bahaya narkoba bagi pemuda 4 kali	4 kali	8,986,050	10,483,725	
			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
			Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	80%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Persentase Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) terhadap daerah yang terdampak bencana	90%					
			Peringatan dini bencana	Takisung, Bati-Bati, Tambang Ulang, Batu Ampar, Bumi Makmur, Jorong, Kintap, Kurau, Panyipatan, Pelaihari, Bajuin			Jumlah Peringatan Dini Bencana 11 Kecamatan	11 Kecamatan	49,500,000	750,000,000	
			Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Kabupaten			Jumlah Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk pada saat Tanggap Darurat 71 Buah	71 Buah	81,000,000	175,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelatihan kewaspadaan dini bencana	Bati-Bati, Bumi Makmur, Kintap, Kurau, Pelaihari			Jumlah Pelatihan Kewaspadaan Dini Bencana 5 Kecamatan	5 Kecamatan	52,200,000	60,000,000	
			Pelatihan pengendalian dan penanggulangan wilayah pasca bencana alam	Bati-Bati, Bumi Makmur, Jorong, Kintap			Jumlah Pelatihan Pengendalian dan Penanggulangan Wilayah Pasca Bencana 4 Kali (Kecamatan)	4 Kali (Kecamatan)	49,500,000	165,000,000	
			Perlindungan Masyarakat		Kurangnya Dampak Asap Kebakaran Hutan dan Lahan bagi masyarakat	1 Tahun					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Bumi Makmur, Jorong, Kintap, Kurau, Panyipatan, Pelaihari, Bajuin, Takisung, Bati-Bati, Tambang Ulang, Batu Ampar			Jumlah Koordinasi dengan Kecamatan, Damkar Swasta, Instansi terkait, dan Masyarakat dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan 11 Kecamatan	11 Kecamatan	76,500,000	372,000,000	
			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Tercapainya kondisi kamanan yang kondusif pada pada pelaksanaan PiLeg & PiPres	100%					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Pengendalian keamanan lingkungan	Kabupaten			Jumlah honorarium anggota Linmas pada pelaksanaan PiLeg & PiPres yang terbayar 2 Kali	2 Kali	494,999,100	64,922,000	
			Program Pengamanan dan Penertiban Perda		Persentase Penegakan PERDA	73%					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Penegakan perda dan kebijakan kepala daerah	Kabupaten, SKPD			Jumlah penegakan peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah 1 Tahun	1 Tahun	126,000,000	182,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan kepala daerah	Kabupaten, SKPD			Jumlah sosialisasi peraturan dan kebijakan kepala daerah 3 Kali Jumlah pembinaan, pengawasan Perda dan Perkada, 1 Tahun	3 Kali 1 Tahun	85,499,100	123,498,700	
			Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	45%					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
					Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	72,2%					
			Pengamanan kegiatan pemerintah daerah	Kabupaten, SKPD			Jumlah pengamanan kegiatan pemerintah daerah 1 Tahun Jumlah pengamanan Pilkades serentak 1 Kali	1 Tahun 1 Kali	471,640,500	777,244,000	
			Pengendalian dan penindakan Kamrانتibmas	Kabupaten			Jumlah pengendalian dan penindakan kamrانتibmas 1 Tahun	1 Tahun	153,000,000	221,000,000	
			Pengembangan kapasitas aparatur	SKPD			Jumlah pengembangan Kapasitas Aparatur yang dilaksanakan 1 Tahun	1 Tahun	135,000,000	195,000,000	
			Program pengembangan wawasan kebangsaan		Tercapainya pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di masyarakat	100 kecamatan					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Kabupaten			Jumlah sosialisasi dalam hal kerukunan antar umat beragama, etnis dan golongan di Kab. Tanah Laut 3 kali rapat tim, kegiatan	3 kali rapat tim, kegiatan	77,175,000	100,000,000	
			Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kabupaten			Jumlah penyuluhan kepada masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 2 kali	2 kali	66,505,500	100,000,000	
			Penyuluhan wawasan kebangsaan bagi pemuda	Kabupaten			Jumlah penyuluhan bagi pemuda (Pelajar SLTA / Organisasi pemuda) di wilayah kabupaten tanah laut di 11 kecamatan 11 kecamatan	11 kecamatan	218,699,955	322,857,000	
			Penguatan penghayatan ideologi Pancasila di kalangan pemuda	Kabupaten			Jumlah sosialisasi penguatan penghayatan ideologi pancasila dikalangan pemuda, pelajar dan masyarakat dan 3 kali pelaksanaan apel wawasan kebangsaan 1 kali	1 kali	52,339,500	200,000,000	
			Forum peningkatan kesadaran bela Negara dan Ketahanan Ideologi Negara RI	Kabupaten			Dilaksanakannya forum peningkatan kesadaran bela negara dan ketahanan ideologi negara RI dikalangan pemuda/pelajar 2 kali (pertemuan,rapat PPWK)	2 kali (pertemuan,rapat PPWK)	64,489,500	100,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		Persentase tercapainya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penyakit masyarakat	100 kecamatan					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Kabupaten			Jumlah penyuluhan pencegahan & pemberantasan berkembangnya peredaran miras dan narkoba 2 kali	2 kali	42,588,000	100,000,000	
			Program pendidikan politik masyarakat		Persentase tercapainya peningkatan pengetahuan tentang politik bagi masyarakat maupun pengurus parpol, LSM dan Orkemas	100 kali					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Penyuluhan kepada masyarakat	Kabupaten			Jumlah penyuluhan pendidikan politik di kabupaten tanah laut bagi masyarakat dan pemilih pemula, jumlah dokumen parpol hasil verifikasi dan rekomendasi 12 kali kegiatan	12 kali kegiatan	225,000,000	250,000,000	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten			Jumlah pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	180,000,000	200,000,000	
			Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Persentase tercapainya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penyakit masyarakat	100 kali					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kabupaten			Jumlah rapat tim kewaspadaan dini pemerintah daerah dan terlaksananya pengamanan di pesisir pantai 12 kali rapat	12 kali rapat	352,487,700	400,000,000	
			Rapat koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)	Kabupaten			Terlaksananya rapat koordinasi FKDM dan sosialisasi peningkatan kemampuan kewaspadaan deteksi dini bagi masyarakat 16 kali (rapat dan sosialisasi)	16 kali (rapat dan sosialisasi)	125,685,000	150,000,000	
			Program pengembangan wawasan kebangsaan		Tercapainya kinerja Ustadz, Guru guru Agama, Santri dan Pendamping yang dikirim ke Luar Negeri	100%					Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
					Terfasilitasi secara baik kegiatan keagamaan	100%					
			Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Kabupaten			Jumlah Ustadz, Guru guru Agama, Santri dan Pendamping yang dikirim ke Luar Negeri 20 orang	20 orang	630,000,000	780,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Kabupaten			terlaksananya kegiatan hari-hari penting keagamaan 4 kali Terlaksananya pengajian rutin setiap hari kamis di Musholla Al-Ikhlas Pemda Tanah Laut 48 kali terlaksananya buka bersama /safari ramadhan Bupati/Wakil Bupati , Pejabat Pemkab dengan masyarakat 12 kegiatan terfasilitasinya pelepasan dan penyambutan Jemaah Haji Kab. Tanah Laut 2 kali terbayarnya ONH TPHD dan TKHD 2 orang terlaksananya pengajian rutin setiap hari pada bulan Ramadhan lingkup Pemkab Tanah Laut 17 kali	4 kali 48 kali 12 kegiatan 2 kali 2 orang 17 kali		585,000,000	840,000,000	
			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		Tercapainya target prestasi pada MTQ Tk. Propinsi	100%						Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
					Tercapainya kinerja Petugas Khotib Mesjid yang baik dan sesuai dengan norma yang berlaku	100%						
			Kegiatan pentas seni dan budaya, festival lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Kabupaten			Terlaksananya pengiriman kafilah Kab. Tala mengikuti MTQ Tk. Propinsi 1 keg	1 keg	1,246,500,000	1,662,000,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Kabupaten			Jumlah Penyuluh Agama yang diberikan insentif 240 orang Jumlah Petugas Khotib Mesjid yang diberikan insentif 500 orang	240 orang 500 orang	1,947,600,000	2,596,800,000	
			Program pengembangan wawasan kebangsaan		Tercapainya Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Kabupaten sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku	100%					Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan
			Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kabupaten			Rapat Persiapan Peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut 10 kali	10 kali	135,000,000	-	
			Program pendidikan politik masyarakat		Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan pemerintah daerah dalam Pemilu	100 Presentase					Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten			Jumlah laporan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres 1 dokumen	1 dokumen	97,265,430	-	
			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		tercapainya tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan; tercapainya pelatihan dan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan; tercapainya pengendalian keamanan lingkungan	82 %; 84 %; 84 %					Kurau

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan				tercapainya tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Kegiatan	1 Kegiatan	26,396,100	30,000,000	
			Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan				tercapainya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Kegiatan	1 Kegiatan	37,934,100	45,000,000	
			Pengendalian keamanan lingkungan				tercapainya pengendalian keamanan lingkungan 1 Kegiatan	1 Kegiatan	29,755,800	35,000,000	
			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		Terseleksinya Qori dan Qori'ah yang berkualitas; Terjalinnnya rasa solidaritas dan silaturahmi antara pejabat pemerintah dan masyarakat	82 %; 84 %					Kurau
			Kegiatan pentas seni dan budaya, festival lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				terseleksinya Qori dan Qori-ah yang berkualitas 1 Kegiatan	1 Kegiatan	70,200,000	80,000,000	
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat				Terjalinnnya rasa solidaritas dan silaturahmi antara pejabat pemerintah dengan masyarakat 1 Kali	1 Kali	22,500,000	25,000,000	
			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		Terseleksinya Qori dan Qori'ah yang berkualitas; Terjalinnnya rasa solidaritas dan silaturahmi antara pejabat pemerintah dan masyarakat	100 %; 100 %					Bajuin

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan pentas seni dan budaya, festival lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				Terlaksananya pengiriman kafilah kegiatan MTQ kecamatan 1 tahun	1 tahun	73,255,140	89,534,060	
			Kegiatan peningkatan silaturahmi antar instansi dan masyarakat (Safari Ramadhan)				Terlaksananya buka bersama/safari ramadhan Bupati,Wakil Bupati,Pejabat Pemkab dengan Masyarakat 1 tahun	1 tahun	41,346,000	50,534,000	
			Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		Tingkat pemahaman peserta penyuluhan	90%					Bajuin
			Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba				terlaksana penyuluhan tentang minuman kerasdan narkoba 1 tahun	1 tahun	6,426,000	7,854,000	
			Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Tingkat pemahaman peserta sosialisasi	90%					Bajuin
			Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan				Terlaksana sosialisasi pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1 tahun	1 tahun	6,466,500	7,903,500	
			Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah				Terlaksananya siskamswakarsa di daerah 1 tahun	1 tahun	6,547,500	8,002,500	
			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 %					Jorong

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan				Jumlah peserta pelatihan keamanan dan kenyamanan lingkungan 62 orang	62 orang	7,775,100	9,500,000	
			Peningkatan kerjasama dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan				Terlaksananya kerjasama dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 11 desa	11 desa	37,585,800	41,762,000	
			Program pengembangan wawasan kebangsaan		Persentase peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan	100 %					Jorong
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat				Terlaksananya Buka Bersama/Safari Ramadhan Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pemkab dengan masyarakat 0	0	41,175,000	46,700,000	
			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		Persentase peningkatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	100 %					Jorong
			Kegiatan pentas seni dan budaya, festival lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				Jumlah peserta STQ / MTQ 0	0	71,928,000	80,500,000	
			Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		Persentase peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	100 %					Jorong
			Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba				Jumlah peserta Penyuluhan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 0	0	6,454,800	8,600,000	
			Program pengembangan wawasan kebangsaan		Terlaksananya Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	8.636.000 Tahun					Batu Ampar

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama				Terlaksananya sosialisasi tentang toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama 1 kegiatan sosialisasi	1 kegiatan sosialisasi	7,772,400	9,000,000	
			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		Terlaksananya Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	156.665.000 Tahun					Batu Ampar
			Kegiatan pentas seni dan budaya, festival lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				Terkirimnya Kafilah Kecamatan Batu Ampar dalam mengikuti STQ/MTQ Kecamatan 1 kegiatan	1 kegiatan	109,165,500	123,000,000	
			Kegiatan peningkatan silaturahmi antar instansi dan masyarakat (Safari Ramadhan)				Terlaksananya Peningkatan Silaturahmi antar Instansi dan Masyarakat berupa (safari ramadhan) 1 kegiatan	1 kegiatan	31,833,000	37,000,000	
			Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		Terlaksananya Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	9.335.000 Tahun					Batu Ampar
			Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba				terlaksananya sosialisasi mengenai pencegahan peredaran penggunaan Miras/ Narkoba 1 kegiatan sosialisasi	1 kegiatan sosialisasi	8,401,500	10,000,000	
			Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Terlaksananya Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	57.005.000 Tahun					Batu Ampar

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan				Terlaksananya patroli antara aparat kecamatan bersama Satpol.PP Kabupaten,Polsek dan Pos Ramil dalam Pencegahan Kejahatan dan Penyakit Masyarakat 6 kegiatan	6 kegiatan	42,732,000	48,000,000	
			Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah				Terlaksananya sosialisasi dalam pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 1 kegiatan	1 kegiatan	8,572,500	9,525,000	
			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 %					Panyipatan
			Peningkatan kerjasama dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan				Jumlah koordinasi lintas sektoral dalam rangka monitoring keamanan dan kenyamanan lingkungan 12 bulan	12 bulan	22,500,000	25,000,000	
			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		Meningkatkan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	100 %					Panyipatan
			Kegiatan pentas seni dan budaya, festival lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				Terlaksananya kegiatan MTQ tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan dengan baik dan lancar 2 kegiatan	2 kegiatan	967,500,000	75,000,000	
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat				Terlaksananya kegiatan safari ramadhan 1 kegiatan	1 kegiatan	45,000,000	50,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 %						Pelaihari
			Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan				Jumlah terlaksananya sosialisasi/pelatihan kepada hansip/linmas 1 kali	1 kali	10,521,000	11,690,000		
			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		Persentase kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan	100 %						Pelaihari
			Kegiatan pentas seni dan budaya, festival lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				Jumlah terkirimnya kafilah dalam kegiatan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut 1 kali	1 kali	85,500,000	95,000,000		
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat				Jumlah terlaksananya buka bersama/safari ramadhan Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Pemkab dengan Masyarakat 1 kali	1 kali	54,000,000	-		
			Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Persenase pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100 %						Pelaihari
			Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan				Jumlah terlaksananya kerjasama antar aparat keamanan kecamatan pelaihari untuk pencegahan kejahatan 11 kali	11 kali	57,297,600	63,664,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		Jumlah Kafilah yang dikirim ; Terlaksananya buka puasa bersama/safari ramadhan Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pemkab dengan masyarakat	35 Orang; 1 Kali Kegiatan						Tambang Ulang
			Kegiatan pentas seni dan budaya, festival lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				Jumlah Kafilah yang dikirim 35 Orang	35 Orang	58,500,000	70,000,000		
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat				Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	27,000,000	33,000,000		
			Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		Jumlah peserta sosialisasi mengenai pencegahan peredaran penggunaan miras/narkoba	70 Orang						Tambang Ulang
			Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba				Jumlah peserta sosialisasi mengenai pencegahan peredaran penggunaan miras/narkoba 70 Orang	70 Orang	11,250,000	14,500,000		
			Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Terlaksananya rapat koordinasi antara aparat kecamatan bersama satpol PP Kabupaten, Polsek Dan Pos Ramil dalam pencegahan Kejahatan dan Penyakit Masyarakat	6 Kali Kegiatan						Tambang Ulang

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan				Terlaksananya rapat koordinasi antara aparat kecamatan bersama satpol PP Kabupaten, Polsek Dan Pos Ramil dalam pencegahan Kejahatan dan Penyakit Masyarakat 6 Kali Kegiatan	6 Kali Kegiatan	42,984,000	49,760,000	
			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	82 %					Bati-Bati
			Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan				Jumlah Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 140 Orang	140 Orang	18,000,000	20,000,000	
			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		Terseleksinya Qori dan Qori'ah yang berkualitas; Terjalinnnya rasa solidaritas dan silaturahmi antara pejabat pemerintah dan masyarakat	100 %; 100 %					Bati-Bati
			Kegiatan pentas seni dan budaya, festival lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				Jumlah kepesertaan kafilah Kecamatan Bati-Bati dalam MTQ Tingkat Kabupaten 45 Orang peserta	45 Orang peserta	57,600,000	70,000,000	
			Kegiatan peningkatan silaturrahi antar instansi dan masyarakat (Safari Ramadhan)				Jumlah Terlaksananya Buka Puasa Bersama /Safari Ramadhan Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pemerintah dengan Masyarakat 1 Kali kegiatan	1 Kali kegiatan	32,580,000	40,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat	82 %					Bati-Bati
			Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan				Jumlah terlaksananya kerjasama antar aparat Keamanan untuk pencegahan tindak kejahatan 12 Bulan	12 Bulan	21,150,000	30,000,000	
			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Tingkat pemahaman peserta pelatihan	90%					Bumi Makmur
			Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan				Jumlah satuan linmas desa yang dilatih 44 Orang	44 Orang	7,672,500	8,600,000	
			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		Terseleksinya Qori dan Qori'ah yang berkualitas; Terjalinnnya rasa solidaritas dan silaturahmi antara pejabat pemerintah dan masyarakat	100 %; 100 %					Bumi Makmur
			Kegiatan pentas seni dan budaya, festival lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				STQ/MTQ Kecamatan dan Kabupaten 2 Kegiatan	2 Kegiatan	96,772,500	110,000,000	
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat				Terlaksananya Buka Bersama / Safari Ramadhan Bupati / Wakil Bupati, Pejabat Pemerintah Kabupaten dengan Masyarakat 1 Kali	1 Kali	21,600,000	26,000,000	
			Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Tercapainya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%					Bumi Makmur

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)				Terlaksananya koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 8 Bulan	8 Bulan	23,382,000	25,980,000	
			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Tingkat pemahaman peserta pelatihan	90%					Kintap
			Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan				Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 80 Orang	80 Orang	11,703,600	14,304,000	
			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		Terseleksinya Qori dan Qori'ah yang berkualitas; Terjalinnnya rasa solidaritas dan silaturahmi antara pejabat pemerintah dan masyarakat	100 %; 100 %					Kintap
			Kegiatan pentas seni dan budaya, festival lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				Terlaksananya seleksi dan pengiriman Kafilah STQ-MTQ 1 Kali	1 Kali	87,435,450	106,856,550	
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat				Jumlah peserta kegiatan peningkatan solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 600 Orang	600 Orang	27,000,000	33,000,000	
			Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		Tingkat pemahaman peserta penyuluhan	90%					Kintap
			Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba				Jumlah peserta penyuluhan pemberantasan penyakit Masyarakat 60 Orang	60 Orang	9,900,000	12,100,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	0 5 tahun (tahun ke 1 RPJMD)					Takisung	
			Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan				Terlaksananya Pelatihan Siskamling 48 orang	48 orang	7,199,550	8,399,475		
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan				Terlaksananya kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 12 laporan	12 laporan	2,626,650	3,064,425		
			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan masyarakat	0 5 tahun (tahun ke 1 RPJMD)					Takisung	
			Kegiatan pentas seni dan budaya, festival lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				jumlah terkirimnya kafilah MTQ Kecamatan Takisung pada MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut 45 orang	45 orang	54,224,820	63,262,290		
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat				Jumlah Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan 1 kegiatan	1 kegiatan	25,884,000	30,198,000		
			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Jumlah pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	80 orang					Kel. Pelaihari	
			Penyiapan tenaga pengendali kamanan dan kenyamanan lingkungan	Pelaihari			Jumlah pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 45 orang	45 orang	6,390,000	7,550,000		
			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawalan dan Persandian									
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		Tercapainya pelayanan informasi publik bidang pendidikan	100%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	SKPD			Jumlah kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan	45,000,000	420,000,000		
	Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan menurunkan Angka Pengangguran	Meningkatnya pendapatan Masyarakat	Program peningkatan realisasi perijinan dan non perijinan pelaku jenis usaha		Tercapainya verifikasi perijinan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku	100%					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan jenis usaha	SKPD			Terlaksananya penerbitan perizinan dan non perizinan jenis usaha 2.500 Izin	2.500 Izin	36,000,000	40,000,000		
			Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perijinan dan non perijinan jenis usaha	SKPD			Terlaksananya koordinasi antar tim teknis perizinan dan non perizinan jenis usaha 12 Bulan	12 Bulan	9,000,000	10,000,000		
				Program peningkatan realisasi pelaku perizinan dan non perijinan jenis non usaha		Tercapainya verifikasi terhadap permohonan perijinan dan non perizinan jenis non usaha sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku	100%					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan jenis non usaha	SKPD			Terlaksananya penerbitan perizinan dan non perizinan non usaha 435 Izin	435 Izin	36,000,000	40,000,000		
			Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perijinan dan non perijinan jenis non usaha	SKPD			Terlaksananya Koordinasi antar Tim teknis perizinan dan non perizinan non usaha 12 Bulan	12 Bulan	9,000,000	10,000,000		
	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang akuntabel dan Profesionalisme Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah		Tercapainya tertib adminitasi pengelolaan aset SKPD/Daerah	100 %					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan tabulasi data aset tetap	SKPD, Batu Ampar, Bumi Makmur, Jorong, Kintap, Kurau, Panyipatan, Takisung, Bajuin, Tambang Ulang, Bati-Bati			Terlaksananya Penyusunan Tabulasi Data Aset Tetap (10 Kecamatan) 12 Bulan	12 Bulan	31,500,000	35,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Jumlah penyediaan peralatan pemeliharaan gedung kantor/ rumah dinas/asrama Diklat 12 Bulan	12 Bulan	21,600,000	26,400,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase ketaatan pemakaian pakain dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			Jumlah pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya 55 Stell PDH	55 Stell PDH	-	-	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya Kriteria kompetensi SDM	100%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Workshop/kursus singkat untuk PNS	SKPD			Jumlah peserta Pembekalan kepada PNS tentang kondisi mental, fisik, dan keuangan di hari tua 40 Orang	40 Orang	1,073,700	570,584,300	
			Program pendidikan kedinasan		Tercapainya Kriteria kompetensi SDM bidang kepegawaian	100%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	SKPD			Jumlah Pegawai Dilingkungan BKPSDM Kab. Tala yang Mengikuti Diklat dengan pola Penyertaan 50 Orang	50 Orang	180,000,000	220,000,000	
			Pendidikan penjenjangan struktural	SKPD			Terlaksananya Penyertaan Diklat Pim II, PIM III dan PIM IV, Penyertaan diklat prajabatan	16 Orang, 226 Orang	344,831,310	421,460,000	
			Program pembinaan dan pengembangan aparatur		Tersusunnya komposisi, formasi dan susunan pejabat yang profesional dan kompeten sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
					Terselesaikannya penanganan kasus yang terkait PNS	100%					
					Tercapainya Target penyelesaian Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%					
			Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	SKPD			Jumlah mutasi dan promosi jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional 650 Orang Jumlah Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana dan jabatan fungsional 500 Orang Jumlah Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 800 Orang	650 Orang 500 Orang 800 Orang	472,001,400	576,900,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan formasi PNS	SKPD			Laporan hasil formasi PNS 1 Dokumen	1 Dokumen	15,345,000	18,755,000	
			Penyelenggaraan tes kemampuan, pengembangan karier pegawai, penyertaan ujian dinas, dan ujian penyesuaian ijazah	SKPD			Jumlah Laporan Pelaksanaan tes kemampuan pengembangan Karier pegawai 1 Dokumen Jumlah Peserta Tes Kemampuan Pengembangan Karier Pegawai, Penyertaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah, dan Asesment 92 Orang	1 Dokumen 92 Orang	342,009,000	418,000,000	
			Seleksi penerimaan calon PNS	SKPD			Jumlah Peserta Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS 200 Orang	200 Orang	323,919,000	396,000,000	
			Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	SKPD			Jumlah dokumen dalam pelayanan publikasi dan informasi kepegawaian 4 Dokumen	4 Dokumen	351,720,000	403,150,000	
			Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	SKPD			Jumlah kasus - kasus pelanggaran disiplin PNS 20 Kasus Jumlah pelayanan konseling bagi PNS 6 Kali Jumlah PNS yang pensiun 100 Orang	20 Kasus 6 Kali 100 Orang	42,190,110	51,565,700	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemberian bantuan tugas belajar, ijin belajar, dan ikatan dinas	SKPD			Jumlah pemberian bantuan bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar dan Ijin Belajar 20 Orang	20 Orang	1,724,526,990	2,107,755,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang kinerja SKPD	100 %					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Terlaksananya perawatan kendaraan dinas, pembelian BBM dan perpanjangan STNK kendaraan bermotor roda 2 13 Unit Roda 2 Terlaksananya perawatan kendaraan dinas, pembelian BBM dan perpanjangan STNK kendaraan bermotor roda 4 4 Unit Roda 4	13 Unit Roda 2 4 Unit Roda 4	139,513,500	190,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD			Terlaksananya perbaikan peralatan gedung kantor berupa : komputer/laptop/notebook, printer, AC, server, genset, Solar cell dan CCTV 12 Bulan	12 Bulan	47,880,000	57,000,000	
			Pembangunan gedung kantor	SKPD			Terlaksananya pembangunan gedung kantor 1 Paket	1 Paket	-	35,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD			Terlaksananya rehab berat/ sedang gedung kantor 1 Paket	1 Paket	-	10,000,000	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD			Terlaksananya pengadaan Papan data kepegawaian 2 Buah Terlaksananya pengadaan handycam 1 Set Terlaksananya pengadaan baliho/ tempat spanduk 1 Buah Terlaksananya pengadaan Laptop 3 Buah Terlaksananya pengadaan Printer multifunction/ mobile 2 Buah	2 Buah 1 Set 1 Buah 3 Buah 2 Buah	34,740,000	80,000,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tercapainya disiplin berpakaian bagi Aparat Bappeda sesuai ketentuan yang berlaku	100 %					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			Jumlah penyediaan pakaian dinas aparatur 40 Stel	40 Stel	-	27,000,000	
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Tercapainya pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian	100 %					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi	Kabupaten			Jumlah laporan pelaksanaan RAD-PPK yang tersusun 4 Dokumen Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan 4 Kali	4 Dokumen 4 Kali	9,427,500	40,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pengadaan mebeleur	SKPD			Jumlah mebeleur yang terbeli 3 macam	3 macam	77,832,000	250,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Jumlah bangunan kantor yang terpelihara 1 buah Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung kantor 1 unit	1 buah 1 unit	15,606,000	35,135,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah kendaraan roda 4 dan 2 yang terpelihara 12 buah/12 bulan	12 buah/12 bulan	112,500,000	125,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD			Jumlah peralatan kantor yang terpelihara 5 macam peralatan kantor/ 12 bulan	5 macam peralatan kantor/ 12 bulan	46,737,000	80,000,000	
			Pembangunan gedung kantor	Pelaihari, Angsau			Jumlah ruang interior pelayanan yang dibuat 1 buah	1 buah	-	350,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase ketaatan pemakaian pakain dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			Jumlah pakaian kerja yang dibuat 1 jenis PDH 53 stel	1 jenis 53 stel	-	21,292,250	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya Kriteria kompetensi SDM	100%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pendidikan dan pelatihan formal	Luar Daerah			Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti 7 kali	7 kali	45,000,000	368,381,400	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya Kriteria kompetensi SDM bidang perhubungan	100%					Dinas Perhubungan
			Pendidikan dan pelatihan formal	Luar Daerah, SKPD			Terdidiknya pegawai Dishub Kabupaten Tanah Laut 14 Orang	14 Orang	191,000,000	200,000,000	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah		Tercapainya tertib adminitasi pengelolaan aset SKPD/Daerah	100 %					Dinas Perhubungan
			Penyusunan tabulasi data aset tetap	SKPD			Terlaksananya kegiatan penyusunan tabulasi data aset tetap 2 Dokumen	2 Dokumen	7,000,000	8,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		berfungsinya kendaraan dinas sesuai dengan peruntukannya untuk mendukung kinerja skpd	100%					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 Tahun	1 Tahun	132,300,000	150,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					Inspektorat Kabupaten
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Jumlah volume bangunan yang dipelihara 2 ruangan	2 ruangan	22,500,000	200,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	SKPD			Jumlah mobil jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala 4 Unit	4 Unit	91,530,000	75,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah kendaraan dinas 6 unit	6 unit	9,000,000	10,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 4 jenis	4 jenis	36,000,000	25,000,000	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD			Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 3 jenis	3 jenis	54,000,000	350,000,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tercapainya disiplin aparatur dalam hal berpakaian beserta kelengkapannya	100 persen					Inspektorat Kabupaten
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			Jumlah Pakaian dinas yang diadakan 45 stel	45 stel	-	22,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (GG)		Tingkat maturitas SPIP, Tingkat Akuntabilitas SAKIP, Kriteria ketaatan hukum terhadap pelaksanaan kegiatan, Tingkat ketaatan terhadap larangan pungli	100 persen					Inspektorat Kabupaten
			Sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP)	SKPD			Terlaksananya monev Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 9 SKPD	9 SKPD	191,945,700	350,000,000	
			Evaluasi, Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD	SKPD			Terlaksananya evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD 40 SKPD	40 SKPD	48,987,000	75,000,000	
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	SKPD			Terlaksananya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan 6 kali	6 kali	472,500,000	850,000,000	
			Saber Pungli				Terlaksananya kegiatan Saber Pungli 7 kali	7 kali	472,433,400	750,000,000	
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Tercapainya pengendalian internal untuk mendukung WTP	100 persen					Inspektorat Kabupaten
			Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	SKPD			Jumlah Laporan Hasil pengawasan/monev/reviu dan pengawasan lainnya 79 laporan	79 laporan	800,000,000	1,200,000,000	
			Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	SKPD			tertanganinya kasus pengaduan di lingkungan Pemda 5 dokumen	5 dokumen	27,000,000	100,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Inventarisasi temuan pengawasan	SKPD			Tersedia dan terinventarisasinya data temuan hasil pengawasan bernasis Sistem Informasi Pengawasan 4 dokumen	4 dokumen	27,000,000	125,000,000	
			Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	SKPD			Terlaksananya tindak lanjut temuan hasil pengawasan 250 rekomendasi	250 rekomendasi	234,000,000	300,000,000	
			Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	SKPD			Terlaksananya evaluasi berkala hasil temuan pengawasan 4 kali	4 kali	81,000,000	90,000,000	
			Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		Tercapainya kompetensi sumber daya aparatur pengawasan dan aparatur lainnya	100 persen					Inspektorat Kabupaten
			Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	SKPD			Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Pengawasan 20 orang	20 orang	251,252,100	450,000,000	
			Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	SKPD			Jumlag SDM yang mengikuti pelatihan tehnis pengawasan akuntabilitas kinerja 90 orang	90 orang	45,000,000	55,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0 5 Tahun RPJMD					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Terlaksananya pengecatan berkala gedung kantor 1 Unit	1 Unit	36,000,000	40,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mesin foto copy dan pintu 12 Bulan	12 Bulan	13,500,000	10,000,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya Disiplin Aparatur	0 5 Tahun RPJMD					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD					-	19,250,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya Kriteria kompetensi SDM	100%					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	SKPD			Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk 4 Kecamatan dan 1 kali Kabupaten 5 Kali	5 Kali	90,000,000	100,000,000	
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD			Terikutinya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 10 OK	10 OK	45,000,000	50,000,000	
			Program peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan		tercapainya layanan informasi dan pengaduan, Pelaporan dan mutu layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	100%					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Tingkat Kepuasan Masyarakat	80%					

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan sistem pelayanan dan inovasi pelayanan perijinan dan non perijinan	SKPD			Terlaksananya pengembangan sistem dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan untuk Penandatanganan Elektronik 1 Paket	1 Paket	36,000,000	40,000,000	
			Penyusunan/revisi standar operasional prosedur	SKPD			Terlaksananya penyusunan standart operasional prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan 1 Dokumen	1 Dokumen	54,000,000	-	
			Penyusunan data dan bahan pelaporan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan	SKPD			Terlaksananya penyusunan data dan bahan pelaporan perizinan dan non perizinan 1 Dokumen	1 Dokumen	18,000,000	20,000,000	
			Penyebarluasan informasi pelayanan publik	SKPD			Terlaksananya penyebarluasan informasi pelayanan publik untuk pembuatan Baliho, leaflet dan jingle 12 Bulan	12 Bulan	36,000,000	60,000,000	
			Survey kepuasan masyarakat	SKPD			Terlaksananya survey kepuasan masyarakat 1 Kali 1 Dokumen	1 Dokumen	6,750,000	7,500,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun					Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor, Jumlah Perencanaan Pemeliharaan Gedung Kantor, Jumlah Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor 3 Unit, Dokumen	3 Unit, Dokumen	24,300,000	100,000,000	
			Pembangunan gedung kantor	SKPD			Jumlah Bangunan Gedung Kantor 1 Buah	1 Buah	-	450,000,000	
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Biaya Kirim Mobil Tangki Air 3 Buah	3 Buah	25,000,000	3,500,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah biaya pemeliharaan dan perpanjangan STNK untuk kendaraan dinas yang ada 14 roda dua/empat	14 roda dua/empat	117,000,000	143,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD			Jumlah kebutuhan pemeliharaan terhadap peralatan gedung kantor 6 jenis	6 jenis	18,000,000	22,000,000	
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Tercapainya tertib adminitasi pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa	Kabupaten			Terlaksananya evaluasi raperdes tentang APBDesa 130 Desa	130 Desa	39,132,600	56,494,460	
			Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan aset desa	Kabupaten			Terbinanya pengelolaan aset desa 130 Desa	130 Desa	67,826,140	85,343,060	
			Evaluasi tingkat perkembangan desa	Kabupaten			Terwujudnya penilaian dan pemeringkatan tingkat perkembangan desa dan kelurahan 12 Desa dan Kelurahan	12 Desa dan Kelurahan	147,343,698	180,086,742	
			Pendampingan pengelolaan keuangan desa	Kabupaten			Terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan desa 130 Desa	130 Desa	349,692,100	570,921,032	
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Desa/Kelurahan		Tercapainya Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa	Kabupaten			Terlaksananya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa 130 Desa	130 Desa	106,228,011	129,834,235	
			Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi dalam.....	Kabupaten			Terlaksananya percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi dalam daerah 2 Desa	2 Desa	191,324,511	237,507,735	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan pelaksanaan penataan kewenangan desa	Kabupaten			Terlaksananya pembinaan pelaksanaan penataan kewenangan desa 130 Desa	130 Desa	109,493,211	133,825,035	
			Pembinaan penyusunan LPPD	Kabupaten			Terlaksananya pembinaan penyusunan LPPD 130 Desa	130 Desa	71,929,011	87,913,235	
			Pembinaan penataan SOTK desa	Kabupaten			Terlaksananya pembinaan penataan SOTK desa 130 Desa	130 Desa	113,736,711	100,350,535	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara 11 Unit	11 Unit	24,750,000	30,250,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 12 Unit	12 Unit	2,880,000	3,520,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tercapainya Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	0					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Jumlah terbayar kan dan pembelian bahan bangunan 12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	45,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik 17 buah	17 buah	100,000,000	110,025,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terlaksananya Bimtek / Diklat Aparatur	0					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah terbayar nya Bimtek 20.000.000 RP	20.000.000 RP	18,000,000	20,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Pengadaan mebeleur	SKPD, Pelaihari, Angsau			Jumlah pengadaan kursi pejabat yang dibeli 15 Buah Jumlah pengadaan kursi rapat yang dibeli 800 Buah Jumlah kursi kerja pejabat yang dibeli 200 Buah Jumlah pengadaan lemari arsip pejab 100 Buah Jumlah pengadaan kursi tamu di ruang pejabat yang dibeli 300 Buah	15 Buah 800 Buah 200 Buah 100 Buah 300 Buah	1,610,800,000	350,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Pelaihari, Angsau			Jumlah pemeliharaan berkala gedung kantor 1 Tahun	1 Tahun	450,000,000	1,500,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD, Pelaihari, Angsau			Jumlah pemeliharaan televis 40 Buah Jumlah pemeliharaan jaringan air bersih 1 Tahun Jumlah pemeliharaan jaringan telpon RS 1 Tahun Jumlah pemeliharaan AC + Preon 350 Buah Jumlah Pemeliharaan jaringan listrik RS 1 Tahun Jumlah pemeliharaan printer 124 Buah Jumlah pemeliharaan komputer 124 Buah Jumlah pemeliharaan notebook/laptop 20 Buah Jumlah pemeliharaan genset 2 Buah	40 Buah 1 Tahun 350 Buah 1 Tahun 124 Buah 124 Buah 20 Buah 2 Buah	540,000,000	900,000,000	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD, Pelaihari, Angsau			Jumlah terbayarnya belanja modal pengadaan komputer 24 Buah Jumlah terbayarnya belanja modal pengadaan UPS 24 Buah Jumlah terbayarnya belanja modal pengadaan printer 24 Buah Jumlah terbayarnya belanja spanduk 20 Buah Jumlah terbayarnya belanja telepon/aephone 30 Buah Jumlah terbayarnya belanja kelengkapan komputer 48 Buah	24 Buah 24 Buah 24 Buah 20 Buah 30 Buah 48 Buah	202,500,000	400,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya Kriteria kompetensi SDM	100%					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD, Pelaihari, Angsau			Jumlah bimtek karyawan 3 Jenis Bimtek	3 Jenis Bimtek	270,000,000	-	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Pembuatan tempat parkir	SKPD			Jumlah tempat parkir 3 Unit Mobil Damkar yang tersedia 1 Paket	1 Paket	95,940,000	275,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1 Paket	1 Paket	-	250,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 22 Buah	22 Buah	292,050,000	401,974,300	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD			Jumlah rehab sedang / berat gedung pos pemadam kebakaran 1 Paket	1 Paket	71,801,010	250,000,000	
			Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah rehab sedang/berat kendaraan dinas/operasional Unit Pemadam Kebakaran 1 Unit	1 Unit	9,450,000	20,000,000	
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terbeli 1 Buah	1 Buah	-	750,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD			Jumlah pengadaan peralatan mini komputer, peralatan jaringan dan peralatan personal komputer 4 Item	4 Item	4,500,000	6,500,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase ketaatan pemakaian pakain dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD			Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan beserta perlengkapannya 1 Paket	0	-	255,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana bagi Aparatur dan Anggota DPRD untuk menunjang kinerja SKPD	0					Sekretariat DPRD
			Pengadaan mebeleur	Kabupaten			Terlaksananya pengadaan Meubelair 4 sofa, 1 set kursi rapat	4 sofa, 1 set kursi rapat	180,000,000	150,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Kabupaten			Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rumah jabatan pimpinan DPRD 3 unit rumah jabatan	3 unit rumah jabatan	135,000,000	150,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten			Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 9 unit gedung bangunan	9 unit gedung bangunan	180,000,000	200,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Kabupaten			Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan mobil jabatan 4 unit mobil jabatan	4 unit mobil jabatan	108,000,000	120,000,000	
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kabupaten			Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional untuk Pimpinan dan sekretaris DPRD 4 unit kendaraan roda 4	4 unit kendaraan roda 4	-	-	
			Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kabupaten			Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan Pimpinan DPRD 4 set peralatan dapur rumah tangga, 4 bh kulkas, 4 bh mesin cuci, 4 unit kompor gas, 4 unit tabung gas, 4 set peralatan makan, 4 set peralatan dapur lainnya, 4 set peralatan kamar tidur	4 set peralatan dapur rumah tangga, 4 bh kulkas, 4 bh mesin cuci, 4 unit kompor gas, 4 unit tabung gas, 4 set peralatan makan, 4 set peralatan dapur lainnya, 4 set peralatan kamar tidur	90,000,000	100,000,000	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten			Terlaksananya pengadaan perlengkapan Gedung kantor 1 unit AC standing & 10 bh AC Split 4 bh LCD, 3 bh layar LCD	1 unit AC standing & 10 bh AC Split 4 bh LCD, 3 bh layar LCD	135,000,000	500,000,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Terpenuhinya Kebutuhan pakaian DPRD sesuai dengan standart yang berlaku	100%					Sekretariat DPRD

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Terusunnya data pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%					
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kabupaten			Terlaksananya penyediaan pakaian sipil harian, pakaian dinas harian, pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap dan pakaian adat 35 org anggota DPRD, 36 org ASN dan 34 PTT	35 org anggota DPRD, 36 org ASN dan 34 PTT	220,987,500	450,000,000	
			Penyusunan administrasi pengelolaan kepegawaian SKPD	Kabupaten			Terpenuhinya data pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD kab. Tala 2 dokumen	2 dokumen	17,100,000	19,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terpenuhinya kriteria standar wawasan dan pengetahuan aparat sekretariat DPRD	100%					Sekretariat DPRD
			Pendidikan dan pelatihan formal	Luar Daerah			Terlaksananya peningkatan kualitas SDM pada Sekretariat DPRD 15 kali pengiriman peserta	15 kali pengiriman peserta	60,750,000	67,500,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		Terpenuhinya kualitas fasilitasi terhadap pelayanan kegiatan DPRD dalam menunjang kinerja DPRD secara terukur	100%					Sekretariat DPRD
			Pembahasan rancangan peraturan daerah	Luar Daerah			Terlaksananya Pembahasan rancangan Peraturan Daerah 15 Raperda	15 Raperda	2,857,527,000	3,500,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan program, penjadwalan dan agenda kegiatan kunjungan kerja, rapat-rapat dan kegiatan lainnya	Kabupaten			Terlaksananya penyusunan dan penjadwalan agenda kegiatan DPRD 12 dokumen	12 dokumen	21,600,000	25,000,000	
			Pelaksanaan Fungsi Penganggaran	Kabupaten			Terlaksananya proses penyusunan, perumusan dan pembahasan rencana anggaran dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten tanah laut dengan pihak legeslatif secara optimal, efektif dan efisien 3 dokumen	3 dokumen	141,300,000	157,000,000	
			Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD	Kabupaten			Terlaksananya penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati secara optimal, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang berlaku 3 dokumen	3 dokumen	130,500,000	145,000,000	
			Fasilitas Bimbingan Teknis DPRD	Luar Daerah, Kabupaten			Terlaksananya kegiatan pendalaman tugas Pimpinan dan anggota DPRD 6 kali kegiatan	6 kali kegiatan	3,776,495,400	4,316,882,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat koordinasi dan konsultasi pimpinan DPRD beserta pimpinan alat kelengkapan DPRD	Luar Daerah			Terlaksananya kegiatan rapat kerja pimpinan DPRD beserta alat kelengkapan DPRD 24 kali kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	24 kali kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	222,717,600	247,464,000	
			Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Kabupaten			Terlaksananya Hearing / dialog dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama 5 kali kegiatan	5 kali kegiatan	49,500,000	70,000,000	
			Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Kabupaten			Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan DPRD 36 kali kegiatan rapat	36 kali kegiatan rapat	39,058,200	44,000,000	
			Rapat-rapat paripurna	Kabupaten			Terlaksananya rapat-rapat paripurna dan rapat paripurna istimewa 40 kali rapat	40 kali rapat	111,148,200	200,000,000	
			Kegiatan Reses	Kabupaten			Terlaksananya Kegiatan reses anggota DPRD 3 kali kegiatan reses	3 kali kegiatan reses	588,453,345	870,000,000	
			Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Kabupaten			Jumlah rekomendasi terhadap hasil pengawasan pembangunan 4 kali kegiatan	4 kali kegiatan	68,256,000	75,840,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Luar Daerah			Terlaksananya Konsultasi/koordinasi/kunjungan kerja / peningkatan wawasan bagi pimpinan dan anggota DPRD untuk menunjang kinerja DPRD 1.925 kali kegiatan DPRD luar daerah dan dalam daerah dalam provinsi	1.925 kali kegiatan DPRD luar daerah dan dalam provinsi	16,391,429,200	21,000,000,000	
			Pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	Kabupaten			Terpeenuhinya Pemeliharaan kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD 35 orang anggota DPRD	35 orang anggota DPRD	78,750,000	87,500,000	
			Program pembinaan dan pengembangan aparatur		Terpeenuhinya kemampuan aparatur sekretariat DPRD dalam pelayanan sesuai dokumen standar operasional prosedur (SOP)	100%					Sekretariat DPRD
			Penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur SKPD	Kabupaten			Terlaksananya Penyusunan dan pendokumentasian SOP pada Sekretariat DPRD 1 dokumen	1 dokumen	2,700,000	3,000,000	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Tercapainya tertib adminitasi pengelolaan aset SKPD/Daerah	100 %					Sekretariat DPRD
			Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Kabupaten			Terlaksananya pengelolaan dan penataan aset barang milik daerah pada SKPD Sekretariat DPRD Kab. Tala 1 dokumen	1 dokumen	4,500,000	5,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 buah gedung	2 buah gedung	21,892,500	25,541,250	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 3 buah dan 2 buah	3 buah dan 2 buah	62,968,500	73,463,250	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya Kriteria kompetensi SDM	100%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD			Jumlah pendidikan dan pelatihan formal 12 bulan	12 bulan	36,000,000	42,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pembangunan gedung kantor	Kabupaten			Terbangunnya 1 (satu) unit papan nama kantor 1 unit papan nama kantor	1 unit papan nama kantor	7,000,000	-	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase peningkatan disiplin aparatur / keseragaman pakaian	100 %					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kabupaten			Jumlah pakaian dinas harian bagi PNS / Non PNS yang diadakan 37 stell	37 stell	28,350,000	-	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase peningkatan aparatur	100 %					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten			Jumlah peserta sosialisasi bantuan keuangan parpol dan sosialisasi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum 3 kali	3 kali	130,945,500	150,000,000	
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten			Jumlah penyertaan diklat bagi PNSD 12 orang/bulan	12 orang/bulan	54,000,000	60,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %					Dinas Kesehatan
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten, SKPD			Jumlah sarana dan parasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/diperbaiki 30 buah	30 buah	3,106,800,000	2,301,333,333	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten, SKPD			Jumlah sarana dan parasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/diperbaiki 35 buah	35 buah	225,000,000	250,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kintap			Jumlah sarana dan parasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara /diperbaiki 4 unit	4 unit	90,000,000	100,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten, SKPD			Jumlah sarana dan parasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara /diperbaiki 11 jenis	11 jenis	45,000,000	50,000,000	
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kintap			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 1 buah	1 buah	250,000,000	250,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten, SKPD			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 13 jenis	13 jenis	547,650,000	608,500,000	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pelaihari			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (PMI) 1 Paket	1 Paket	234,945,000	261,050,000	
			Program pendidikan kedinasan		Persentase Puskesmas yang memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan
			Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Kabupaten, SKPD			Jumlah kursus singkat dan pelatihan 1 tahun Jumlah Pelaksanaan Uji Kompetensi Propesi 2 kali	1 tahun 2 kali	282,032,910	650,000,000	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan Kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan
			Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Kabupaten, SKPD			Jumlah dokumen pencatatan aset yang disusun sesuai standar 6 dokumen	6 dokumen	51,300,000	57,000,000	
			Program pembinaan dan pengembangan aparatur		Persentase Puskesmas yang sudah terkreditasi	100 %					Dinas Kesehatan
			Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis	Kabupaten, SKPD			Jumlah pembinaan dan pengembangan aparatur sesuai standar kepegawaian 19 puskesmas	19 puskesmas	81,000,000	155,000,000	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan Kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan tabulasi data aset tetap	Kabupaten, SKPD			Jumlah dokumen pencatatan aset yang disusun sesuai standar 1 dokumen	1 dokumen	54,000,000	178,430,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Panyipatan
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Panyipatan			Jumlah sarana dan parasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara /diperbaiki 1 tahun	1 tahun	13,500,000	15,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Panyipatan			Jumlah sarana dan parasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara /diperbaiki 4 buah	4 buah	6,300,000	7,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Panyipatan			Jumlah sarana dan parasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara /diperbaiki 8 jenis	8 jenis	9,000,000	10,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kurau
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Kurau			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/diperbaiki 4 Jenis	4 Jenis	8,586,000	3,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD, Kurau			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/diperbaiki 4 Jenis	4 Jenis	10,620,000	20,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tambang Ulang
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tambang Ulang			Jumlah sarana dan parasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara /diperbaiki 14 unit	14 unit	10,800,000	12,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tambang Ulang			Jumlah sarana dan parasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara /diperbaiki 1 paket	1 paket	8,100,000	9,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tambang Ulang			Jumlah sarana dan parasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara /diperbaiki 5 Jenis	5 Jenis	8,100,000	9,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tanjung Habulu
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bajuin			Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang terpenuhi 1 buah	1 buah	14,400,000	16,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bajuin			Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang terpenuhi 8 buah	8 buah	13,500,000	15,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bajuin			Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang terpenuhi 11 buah	11 buah	13,500,000	15,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/diperbaiki 2 Unit	2 Unit	2,340,000	2,600,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kabupaten			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/diperbaiki (AC) 4 Unit	4 Unit	1,260,000	1,400,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/diperbaiki (PC dan printer) 4 Unit	4 Unit	3,195,000	3,550,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Dinas Kesehatan Instalasi Farmasi
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/ diperbaiki (kendaraan dinas) 2 unit	2 unit	13,500,000	15,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan mebeleur				Jumlah mebeluer 15 Buah	15 Buah	90,000,000	-	
			Pembangunan gedung kantor				tersedianya gedung arsip & wc 2 Unit	2 Unit	325,000,000	200,000,000	
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional				Tersedianya kendaraan dinas 1 unit	1 unit	-	90,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya Kriteria kompetensi SDM	100%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD			Jumlah Peserta 60 orang	60 orang	270,000,000	300,000,000	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah		Tercapainya tertib adminitasi pengelolaan aset SKPD/Daerah	100 %					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyusunan tabulasi data aset tetap	SKPD			Jumlah laporan 9 dokumen	9 dokumen	180,000,000	1,060,791,480	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan		Tercapainya kriteria penyusunan dokumen LAKIP sesuai dgn ketentuan yang berlaku	100%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja	SKPD			Jumlah laporan 1 dokumen	1 dokumen	27,000,000	30,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tercapainya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Pengadaan mebeleur	SKPD			Jumlah pengadaan Kursi Rapat 36 Buah Jumlah pengadaan Meja Rapat 16 Buah	36 Buah 16 Buah	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Batu Ampar, Panyipatan, Takisung, Sarang Halang			Jumlah bahan baku pemeliharaan gedung kantor yang dibeli 7 Item Jumlah upah tukang yang dibayar 5 OH	7 Item 5 OH	6,750,000	25,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah penyediaan bahan bakar roda 3 1 tahun Jumlah penyediaan bahan bakar roda 4 1 tahun Jumlah penggantian suku cadang roda 4 5 unit Jumlah penyediaan jasa service roda 2 13 unit Jumlah penyediaan jasa service roda 3 1 unit Jumlah penyediaan jasa service roda 4 5 unit	1 tahun 1 tahun 5 unit 13 unit 1 unit 5 unit	67,500,000	190,000,000	
			Pembangunan gedung kantor	SKPD			Jumlah Pembangunan Tempat Ibadah 1 Unit Jumlah Pembangunan Aula Pertemuan 1 Unit	1 Unit 1 Unit	-	-	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tercapainya Disiplin Aparatur	100 %					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD			Jumlah Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu 72 Stel	72 Stel	-	35,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya Kualitas Sumber Daya Aparatur	5 Orang					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luar Daerah, SKPD			Jumlah bimbingan teknis bagi ASN 3 orang	3 orang	8,000,000	20,000,000	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah		Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah	100 %					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan aset daerah	Kabupaten, SKPD			Jumlah data ternak aset daerah yang besumber dari APBD dan non APBD 1.280 ekor Jumlah aset ternak daerah yang bergulir dimasyarakat dan jumlah aset ternak yang telah dikembalikan ke daerah 20 ekor Jumlah aset ternak daerah yang telah dikembalikan ke daerah 30 ekor	1.280 ekor 20 ekor 30 ekor	18,000,000	54,500,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedia 12 Bulan	12 Bulan	341,905,500	-	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD			Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor 2 Buah	2 Buah	1,300,000,000	-	
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah kendaraan dinas/operasional (mobil) terbeli 2 unit Jumlah kendaraan dinas/operasional (sepeda motor) terbeli 3 unit	2 unit 3 unit	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12 Bulan					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah Kontribusi Kepesertaan/Bimbingan Teknis Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tersedia 12 Bulan	12 Bulan	45,000,000	-	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Adanya Harga satuan Konstruksi Tahun 2019	4 dokumen					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Penyusunan standar satuan harga	Kabupaten			Jumlah Dokumen satuan harga Konstruksi 3 dok	3 dok	-	-	
			Program pembinaan dan pengembangan aparatur		Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	12 Bulan					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	SKPD			Jumlah Rencana Pembinaan Karir PNS Berkala Terlaksana 16 Buku Jumlah Rencana Pembinaan Karir PNS DUK Terlaksana 16 Buku Jumlah Rencana Pembinaan Karir PNS Pensiun Terlaksana 16 Buku Jumlah Rencana Pembinaan Karir PNS Nominatif Terlaksana 16 Buku Jumlah Rencana Pembinaan Karir PNS Pangkat Terlaksana 16 Buku	16 Buku 16 Buku 16 Buku 16 Buku	2,520,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah		Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	12 Bulan					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Penyusunan tabulasi data aset tetap	SKPD			Jumlah Penyusunan Tabulasi Data Aset Tetap dari Pelaksanaan Sensus BMD Terlaksana 10 Buku	10 Buku	27,549,000	-	
			Program Penataan Daerah Otonomi Baru		Terdokumentasikan Nama Rupa Bumi dan Unsur Pemerintahan	1 Dokumen					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Toponimi/penamaan rupa unsur administrasi pemerintahan	Kabupaten			Tersusunnya Dokumen Nama Rupa Bumi Kabupaten Tanah Laut 1 Dokumen	1 Dokumen	86,998,500	-	
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Terfasilitasi penanganan kasus aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	1 Tahun					Sekretariat Daerah Bagian Hukum
			Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Kabupaten, Luar Daerah, SKPD			Terfasilitasi penanganan kasus aparatur dilingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut 1 Tahun	1 Tahun	196,200,000	239,800,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		Terbentuknya Keputusan Bupati; Terbentuknya Peraturan Bupati; Tercapainya Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten (Propemperda) Tahun 2019; Terbentuknya Perda Kabupaten; Terbentuknya Instruksi Bupati Tanah Laut; Terlaksananya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Laut (Website Bagian Hukum); Terkodifikasi dan terpublikasikannya Produk Hukum Daerah; Terlaksananya kegiatan sosialisasi / seminar hukum.	1 Buah; 1 Tahun; 1 Tahun; 1 Tahun; 1 Tahun; 550 Eks; 4 Kali						Sekretariat Daerah Bagian Hukum
			Publikasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten, SKPD			Terlaksananya kegiatan sosialisasi / seminar hukum. 4 kali terkodifikasi dan terpublikasikannya Produk Hukum Daerah 550 eks Terlaksananya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Laut (Website Bagian Hukum) 1 tahun	4 kali 550 eks 1 tahun	194,399,910	237,599,890		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Kabupaten, SKPD			Terselesaikannya Peraturan Bupati 1 Tahun Terlaksanakannya Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten (Propemperda) Tahun 2019 1 Tahun Terselesaikannya Instruksi Bupati Tanah Laut 1 Tahun Terselesaikannya Keputusan Bupati 1 Tahun Terselesaikannya Perda Kabupaten 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	194,400,000	237,600,000	
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Terpenuhinya pelayanan keprotokolanan sesuai dengan SOP yang berlaku	100%					Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
			Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Luar Daerah, Kabupaten, SKPD			Terlaksananya Pelayanan Keprotokolanan 12 Bulan	12 Bulan	340,028,550	434,480,925	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					Sekretariat Daerah Bagian Umum
			Pengadaan mebeleur	SKPD			Jumlah Aset milik setda yang terkelola dan tercatat dengan baik 17 jenis	17 jenis	559,935,000	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Jumlah Aset milik setda yang terkelola dan tercatat dengan baik 9.916 m2	9.916 m2	602,649,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1	1	2,165,137,671	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD			Jumlah Aset Milik Setda yang terkelola dan tercatat dengan baik 25 Jenis	25 Jenis	283,747,500	-	
			Pembangunan gedung kantor	SKPD			Jumlah Aset milik setda yang terkelola dan tercatat dengan baik 680 m2	680 m2	-	-	
			Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	SKPD			Jumlah pelayanan rumah tangga Pimpinan 1.025 m2	1.025 m2	721,969,200	-	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD			Jumlah Aset milik setda yang terkelola dan tercatat dengan baik 294 m2	294 m2	634,008,600	-	
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional	SKPD			Meningkatkan pengelolaan aset di lingkup setda 3 Jenis	3 Jenis	-	-	
			Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	SKPD			Jumlah pelayanan rumah tangga Pimpinan 13 Jenis	13 Jenis	259,506,000	-	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD			Jumlah Aset milik setda yang terkelola dan tercatat dengan baik 17 Jenis	17 Jenis	88,155,000	-	
			Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	SKPD			Jumlah pelayanan rumah tangga Pimpinan 20 jenis	20 jenis	419,985,000	-	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD			Jumlah Aset milik setda yang terkelola dan tercatat dengan baik 25 Jenis	25 Jenis	518,355,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah		Tercapainya tertib administrasi pengelolaan aset SKPD/Daerah sesuai dengan norma dan standar yang berlaku	100 %					Sekretariat Daerah Bagian Umum
			Penyusunan tabulasi data aset tetap	SKPD			Jumlah Aset Milik Setda yang terkelola dan tercatat dengan baik 1 Dokumen	1 Dokumen	308,759,968	-	
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Tercapainya peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	100 presentase					Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan
			Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Kabupaten			Jumlah Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah 38 kali	38 kali	117,000,000	-	
			Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Kabupaten			Jumlah penerimaan Kunjungan Kerja 5 kali	5 kali	17,100,000	-	
			Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Kabupaten			Jumlah koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 6 kali	6 kali	315,900,000	-	
			Program pembinaan dan pengembangan aparatur		Tercapainya pembinaan administrasi pemerintahan kecamatan	100 presentase					Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten			Jumlah pembinaan kecamatan 11 kali	11 kali	99,000,000	-	
			Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		Tertindaklanjutnya dokumen kerjasama yang dibuat	100%					Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Kabupaten			Jumlah Kerjasama Pemerintahan 3 dokumen kerjasama	3 dokumen kerjasama	45,000,000	-	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kinerja skpd	100%					Dinas Pariwisata UPT. Obyek Wisata Pantai Takisung
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Output : Tersedianya bahan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Outcame : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan	12 bulan	8,127,000	9,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Output : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Outcame : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 bulan	12 bulan	7,281,000	9,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Hasil : Tersedianya Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor 12 bulan	12 bulan	-	8,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor Hasil : Tersedianya perlengkapan gedung kantor 12 bulan	12 bulan	-	5,000,000	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Peralatan Gedung kantor Hasil : Tersedianya Peralatan Gedung kantor 12 bulan	12 bulan	-	10,000,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tesedianya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12 bulan					Dinas Pariwisata UPT. Obyek Wisata Pantai Takisung
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Tersedianya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12 bulan	12 bulan	-	5,000,000	
			Program pembinaan dan pengembangan aparatur		Jumlah dokumen evaluasi jabatan yang tersusun	40 dokumen					Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
			Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	SKPD			Jumlah dokumen evaluasi jabatan yang tersusun 40 Dokumen	40 Dokumen	44,930,700	55,000,000	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan		Tercapainya target kinerja reformasi birokrasi sesuai dengan standar dan norma yang berlaku	100%					Sekretariat Daerah Bagian Organisasi

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Tercapainya nilai SAKIP Kabupaten	B+					
			Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Kelembagaan	SKPD			Jumlah Revisi RaPerda Kelembagaan SKPD/Revisi Perbub UPT 1 Dokumen	1 Dokumen	60,435,000	77,000,000	
			Evaluasi dan Monitoring Kinerja Pelayanan Publik	SKPD			Jumlah Laporan SKM yang tersusun 2 Dokumen	2 Dokumen	27,000,000	35,000,000	
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur	SKPD			Jumlah SOP SKPD yang tersusun 17 Dokumen	17 Dokumen	29,088,000	35,000,000	
			Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	SKPD			Jumlah Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi yang tersusun 2 Dokumen	2 Dokumen	32,314,500	65,000,000	
			Pembuatan Tupoksi dan Uraian Tugas	SKPD			Jumlah Perbub Tupoksi dan Uraian Tugas SKPD yang tersusun 5 Dokumen	5 Dokumen	40,500,000	55,000,000	
			Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja	SKPD			Jumlah Dokumen Lakip Kabupaten 2018 dan Perjanjian Kinerja 2019 2 Dokumen	2 Dokumen	45,000,000	52,000,000	
			Pembuatan ID Card Pegawai	SKPD			Jumlah Kartu Tanda Pengenal PNS I ID Card yang dicetak 5.000 Buah	5.000 Buah	89,370,000	25,000,000	
			Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	SKPD			Jumlah Reviu Indikator Kinerja Utama yang tersusun 2 Dokumen	2 Dokumen	27,567,000	55,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Analisis Jabatan Pejabat Struktural	SKPD			Jumlah Dokumen Analisis Jabatan yang tersusun 40 Dokumen	40 Dokumen	41,703,300	55,000,000	
			Penyusunan Analisis Beban Kerja	SKPD			Jumlah dokumen analisis beban kerja yang tersusun 40 Dokumen	40 Dokumen	41,703,300	55,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bumi Makmur
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bumi Makmur			jumlah sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang dipelihara/diperbaiki 5 unit	5 unit	2,262,600	9,834,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bumi Makmur			jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/diperbaiki 6 jenis	6 jenis	2,925,000	5,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya Kriteria kompetensi SDM sesuai standar dan norma yang berlaku	20 persen					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan UPT Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah bimbingan teknis tenaga laboratorium pengujian ke PU an terlaksana 8 orang	8 orang	42,300,000	52,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya Kriteria kompetensi SDM sesuai standar dan norma yang berlaku	100 persen					Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pendidikan dan pelatihan formal	Luar Daerah, Kabupaten			Jumlah belanja kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal yang terbayarkan 10 orang	10 orang	45,000,000	-	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah		Tercapainya tertib adminitasi pengelolaan aset SKPD/Daerah	100 persen					Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyusunan tabulasi data aset tetap	SKPD, Pelaihari			Jumlah laporan triwulan 4 dokumen Jumlah laporan semester 2 dokumen	4 dokumen 2 dokumen	4,500,000	-	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Sosial
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Kabupaten			jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan (DA 297 L) 1 buah	1 buah	38,610,000	22,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional Roda 4, roda 6 dan roda 2 4 buah	4 buah	46,800,000	60,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Pengecatan Pagar halaman kantor, pengecatan gedung kantor, perbikan atap, perbaikan plafon dan drainase kantor 1 bangunan kantor	1 bangunan kantor	74,400,000	-	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tercapainya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Terpeliharanya bangunan gedung kantor 1 Tahun	1 Tahun	15,300,000	21,500,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	SKPD			Tercapainya pemenuhan pemeliharaan perbaikan dan penggantian suku cadang pemakaian BBM serta legalitas pemakaian mobil jabatan 1 Tahun	1 Tahun	13,500,000	20,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Tercapainya pemenuhan pemeliharaan perbaikan dan penggantian suku cadang pemakaian BBM serta legalitas pemakaian kendaraan roda 2 dan 4 1 Tahun	1 Tahun	49,500,000	70,500,000	
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional	SKPD			Tersedianya kendaraan dinas/operasional 5 Unit	5 Unit	-	400,000,000	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD			Terlaksananya pengadaan peralatan kantor 54 Unit	54 Unit	200,000,000	200,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya disiplin ASN	70 Pcs					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			Tersedianya pakaian dinas bagi ASN dinas 70 Pcs	70 Pcs	-	45,500,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya kapasitas SDM ASN	4 Orang					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Pendidikan dan pelatihan formal	Luar Daerah, SKPD			Terikutinya Diklat bagi ASN 4 Orang	4 Orang	18,000,000	30,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3 unit					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Paket	1 Paket	27,436,500	38,100,000	
			Pembangunan gedung kantor	SKPD			Terlaksananya rehab pagar gedung pemuda, rehab halaman gedung pemuda dan WC stadion pertasi kencana 3 Macam	3 Macam	-	435,000,000	
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional	SKPD			Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas roda 4 dan 2 3 unit	3 unit	-	296,425,000	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD			Terlaksananya penyediaan gorden, karpet, mesin potong rumput, printer dan kursi rapat 5 macam	5 macam	114,885,000	160,000,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur	72 Stell					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian dan Sepatu Safety <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 72 Stell	72 Stell	-	64,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan kedinasan	30 Orang					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis PNS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 30 Orang	30 Orang	304,713,000	423,212,500	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah		Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	2 Dokumen					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Penyusunan tabulasi data aset tetap	SKPD			Terlaksananya Penyusunan Tabulasi Data Aset Tetap dari Pelaksanaan Sensus BMD <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dokumen	2 Dokumen	11,250,000	15,625,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %					Badan Pendapatan Daerah
			Pengadaan mebeleur	SKPD			Jumlah pengadaan mebeleur kantor 4 Jenis mebeleur	4 Jenis mebeleur	31,635,000	50,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Jumlah gedung yang dipelihara 1 Gedung	1 Gedung	45,000,000	55,000,000	
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah pengadaan kendaraan roda 4 1 Unit	1 Unit	-	40,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD			Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 8 Jenis	8 Jenis	120,645,000	140,000,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur Dalam Hal Berpakaian Dinas	100 %					Badan Pendapatan Daerah
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD					-	-	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %					Badan Pendapatan Daerah
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luar Daerah, Kabupaten, SKPD			Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan 30 ASN	30 ASN	121,500,000	150,000,000	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	20 %					Badan Pendapatan Daerah
					Prosentase PAD terhadap Pendapatan	11,50%					
			Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah	Kabupaten			Jumlah penerimaan dari retribusi daerah 5.500.000.000 Rupiah	5.500.000.000 Rupiah	225,000,000	300,000,000	
			Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain dan perencanaan pendapatan daerah	Kabupaten, Luar Daerah, SKPD			Jumlah dokumen perencanaan pendapatan 2 Dokumen Jumlah penerimaan dari pendapatan lain-lain 837.500.000.000 Rupiah	2 Dokumen 837.500.000.000 Rupiah	63,900,000	75,000,000	
			Intensifikasi dan ekstensifikasi perhitungan dan penetapan pajak daerah	Kabupaten			Jumlah perhitungan dan penetapan pajak daerah 2.500 Penetapan	2.500 Penetapan	90,000,000	125,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Intensifikasi dan ekstensifikasi perhitungan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB	Kabupaten			Jumlah perhitungan dan penetapan BPHTB 600 STTS Jumlah perhitungan dan penetapan PBB-P2 140.000 SPPT	600 STTS 140.000 SPPT	899,325,000	1,000,000,000	
			Intensifikasi dan ekstensifikasi penagihan PBB-P2 dan BPHTB	Kabupaten			Jumlah penagihan PBB-P2 3.600.000.000 Rupiah	3.600.000.000 Rupiah	357,750,000	400,000,000	
			Intensifikasi dan ekstensifikasi pendataan, pendaftaran dan keberatan PBB-P2 dan BPHTB	Kabupaten			Jumlah pemutakhiran data PBB-P2 dan BPHTB 15.000 Wajib Pajak	15.000 Wajib Pajak	765,000,000	900,000,000	
			Intensifikasi dan ekstensifikasi pendataan, pendaftaran dan keberatan pajak daerah	Kabupaten			Jumlah termutakhirnya data pajak daerah 1 Dokumen Jumlah jenis pajak daerah 9 Jenis	1 Dokumen 9 Jenis	270,000,000	450,000,000	
			Intensifikasi dan ekstensifikasi penagihan pajak daerah	Kabupaten			Jumlah pajak daerah yang tertagih 16.850.000.000 Rupiah	16.850.000.000 0 Rupiah	225,000,000	300,000,000	
			Peningkatan administrasi dan pembinaan penatausahaan pendapatan daerah	SKPD			Jumlah pelaporan administrasi pendapatan daerah 3 Dokumen	3 Dokumen	90,000,000	125,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Pengadaan mebeleur	SKPD			Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Kantor 4 jenis mebeleur	4 jenis mebeleur	45,000,000	25,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1 Gedung kantor BPKAD	1 Gedung kantor BPKAD	90,000,000	100,000,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase ketaatan pemakaian pakain dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 70 Org ASN BPKAD	70 Org ASN BPKAD	-	36,700,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya Kriteria kompetensi SDM	100%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD			Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 10 ASN BPKAD	10 ASN BPKAD	45,000,000	50,000,000	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Meningkatkan kualitas pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sangat Baik					
					Tercapainya penyusunan Perda APBD dan Perubahan APBD tepat waktu dan sesuai dengan standar dan norma yang berlaku	100%					

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	SKPD			Terlaksananya Penyusunan Laporan keuangan Pemkab Tanah Laut yang acountable dan dapat diterima oleh publik. 7 Dokumen	7 Dokumen	215,812,800	250,000,000	
			Peningkatan manajemen aset/barang daerah	SKPD			Terlaksananya penerbitan dan pengamanan terhadap BMD, terlaksananya rekonsiliasi realisasi pemeliharaan BMD, terlaksananya penelusuran tanah milik daerah yg blm tercatat di KIB dan yg belum jelas status kepemilikannya 5 Jenis	5 Jenis	511,890,660	550,000,000	
			Penyusunan standar satuan harga	SKPD			Terlaksananya Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Keperluan Pemerintah Kab. Tanah Laut 1 Dokumen	1 Dokumen	121,057,650	135,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah	SKPD			Terlaksana dan terfasilitasinya penerbitan SP2D, tersusunnya Perbup, SK. Bupati, SE Bupati, Laporan DAU Gaji, Taperum, IWP BPJS Kesehatan dan Laporan IWP Taspen, JKK, JKM Taspen serta terlaksananya pembinaan thd penatausahaan keuangan SKP 9 Dokumen	9 Dokumen	166,500,000	185,000,000	
			Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD, Laporan Keuangan semesteran dan Prognosis realisasi anggaran, serta laporan keuangan akhir tahun.	SKPD			Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan , Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Prognosis. 3 Dokumen	3 Dokumen	18,870,300	25,000,000	
			Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	SKPD			Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan SIKD berdasarkan akuntansi berbasis akrual 1 Dokumen	1 Dokumen	219,721,950	255,159,000	
			Peningkatan Administrasi Pembiayaan Daerah	SKPD			Terlaksananya Administrasi Dana Hibah, Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 1 Dokumen	1 Dokumen	110,340,000	125,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan raperda dan raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD	SKPD			Terlaksananya Penyusunan APBD dan Perubahan APBD 12 Dokumen	12 Dokumen	1,113,529,410	1,250,000,000	
			Pengelolaan akuntansi pendapatan dan piutang	SKPD			Terlaksananya Pengelolaan Akuntansi Pendapatan dan Piutang 2 Dokumen	2 Dokumen	293,683,050	350,000,000	
			Pengelolaan akuntansi belanja dan beban	SKPD			Terlaksananya Pengelolaan Akuntansi Belanja dan Beban 2 Dokumen	2 Dokumen	216,758,790	245,000,000	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah		Tercapainya tertib admintasi pengelolaan aset Daerah sesuai dengan norma dan standar yang berlaku	100 %					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Penyusunan tabulasi data aset tetap	SKPD			Terlaksananya Penyusunan Tabulasi Data Aset Tetap dan pelaksanaan Money BMD 21 Dokumen	21 Dokumen	506,852,325	500,000,000	
			Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset daerah	SKPD			Terlaksananya Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset daerah 4 Dokumen	4 Dokumen	76,495,500	85,000,000	
			Perencanaan dan pengadaan aset daerah	SKPD			Terlaksananya Penyusunan RKBMD dan RKPBM TA 2020, Laporan Triwulan Barang Persediaan TA 2019, Laporan Stock Opname Tahun 2018 4 Dokumen	4 Dokumen	109,483,110	122,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan pemanfaatan aset daerah	SKPD			erlaksananya rekonsiliasi, monitoring dan penilaian pemanfaatan BMD dan penggunaan BMD serta inventarisasi pemanfaatan BMD 4 Dokumen	4 Dokumen	148,423,500	165,000,000	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase tindak lanjut laporan hasil pengendalian dan pembinaan BUMD	20 %					Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Pembangunan
			Peningkatan manajemen investasi daerah	Kabupaten			Tersusunnya laporan hasil pengendalian dan pembinaan BUMD 1 Dokumen	1 Dokumen	237,393,000	321,799,400	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatkan Pelayanan Ketatausahaan dan Keuangan, Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda	100 Persentase					Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha dan Keuangan
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			Jumlah PDH;PSL;PDH;PDU;PSR 145 stel	145 stel	-	146,370,000	
			Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD			Jumlah pakaian kerja lapangan 100 stel	100 stel	-	28,350,000	
			Program pembinaan dan pengembangan aparatur		Meningkatkan Pelayanan Ketatausahaan dan Keuangan, Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda	100 Persentase					Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha dan Keuangan
			Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	SKPD			Jumlah laporan dan keperluan administrasi terkait kepegawaian 8 jenis	8 jenis	18,198,000	21,231,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan					Dinas Pariwisata
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Hasil : Tersedianya Bahan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan	12 bulan	4,185,000	5,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Hasil : Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 bulan	12 bulan	62,392,500	70,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Hasil : Tersedianya Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor 12 bulan	12 bulan	8,136,000	10,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan dinas dan Operasional Hasil : Tersedianya Kendaraan dinas /Operasional 1 Unit	1 Unit	-	250,000,000	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor Hasil : Tersedianya perlengkapan gedung kantor 12 bulan	12 bulan	-	10,000,000	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Peralatan Gedung kantor Hasil : Tersedianya Peralatan Gedung kantor 2 jenis	2 jenis	-	20,000,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tercapainya Peningkatan disiplin Aparatur	0 Stell					Dinas Pariwisata
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 12 bulan	12 bulan	-	15,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	12 bulan					Dinas Pariwisata

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Hasil : Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 12 bulan	12 bulan	-	15,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya Kriteria kompetensi SDM sesuai dengan norma dan standar yang berlaku	100%					Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luar Daerah, Kabupaten			Jumlah SDM Pengelola PBJP dan Anggota Pokja yang sesuai Peraturan Presiden RI tentang PBJP 20 OK	20 OK	225,000,000	300,000,000	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Tercapainya pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah secara terbuka dan transparan	150 paket					Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Pengadaan barang/jasa pemerintah	Kabupaten, SKPD			Jumlah Paket Lelang yang selesai dan sesuai aturan yang berlaku 150 Paket	150 Paket	198,720,000	250,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Kurau
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas				Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /berkala Rumah Dinas 1 Tahun	1 Tahun	18,247,500	20,275,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terlaksananya Perbaikan Gedung Kantor 1 Tahun	1 Tahun	32,116,500	38,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Terlaksananya Pembayaran Jasa Service penggantian Suku Cadang BBM dan STNK Mobil 1 Tahun	1 Tahun	58,635,000	70,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Terlaksananya Pembayaran Jasa service, Penggantian Suku Cadang BBM dan STNK Kendaraan 1 Tahun	1 Tahun	27,720,000	35,000,000	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				Terpenuhi perbaikan Pagar Kantor Kecamatan 1 Tahun	1 Tahun	14,175,000	20,000,000	
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional				terbelinya kendaraan dinas roda 2 2 Unit	2 Unit	-	40,000,000	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor				terbelinya pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Tahun	1 Tahun	5,287,500	6,000,000	
			Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas				terlaksananya pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas 1 Tahun	1 Tahun	46,260,000	51,400,000	
			Pengadaan peralatan gedung kantor				Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 1 Tahun	1 Tahun	155,002,500	175,000,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Persentase ketaatan pemakaian pakain dinas sesuai dengan norma dan standar yang berlaku					Kurau

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				terlaksananya penyediaan pakaian dinas dan atributnya untuk aparatur kecamatan 26 Orang	26 Orang	-	9,360,000	
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				terlaksananya penyediaan pakaian hari-hari tertentu untuk aparatur kecamatan 1 Orang	1 Orang	-	2,500,000	
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa sesuai dengan norma dan standar yang berlaku	86 %; 84 %					Kurau
			Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa				Jumlah peraturan desa yang di evaluasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0	31,614,300	35,127,000	
			Pendampingan pengelolaan keuangan desa				terlaksananya pendamping pengelolaan desa 1 Kali	1 Kali	30,211,200	33,568,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					Bajuin
			Pengadaan mebeleur				Terbelinya sofa,kursi dan meja 1 tahun	1 tahun	35,595,000	43,505,000	
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional (DAK)				Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda dua 1 tahun	1 tahun	-	67,705,000	
			Pembuatan taman dan pengadaan tanaman hias				Terbuatnya Taman Kantor 1 tahun	1 tahun	44,685,000	54,615,000	
			Pembuatan tempat parkir				Terbuatnya Tempat parkir kantor 1 tahun	1 tahun	44,685,000	54,615,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Terpelihara perlengkapan dan mesin 1 tahun	1 tahun	5,166,000	6,314,000	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				Terlaksananya Rehab ruang kerja kantor 1 tahun	1 tahun	14,085,000	17,215,000	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Terbelinya pemotong rumput dorong 1 tahun	1 tahun	16,920,000	20,680,000	
			Pengadaan peralatan gedung kantor				terbelinya leptop dan printer 1 tahun	1 tahun	22,815,000	27,885,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase ketaatan pemakaian pakain dinas sesuai dengan norma dan standar yang berlaku	100%					Bajuin
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				Terpenuhinya pakaian dinas harian 1 tahun	1 tahun	-	16,450,500	
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Tercapainya tertib adminitasi pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%					Bajuin
			Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa				Rancangan peraturan desa tentang APBdes terevaluasi 1 tahun	1 tahun	54,900,000	67,100,000	
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		Tingkat pemahaman peserta sosialisasi	90%					Bajuin
			Sosialisasi Pelayanan bagi Aparat Desa				Jumlah peserta sosialisasi pelayanan bagi aparat desa 1 tahun	1 tahun	6,079,500	7,430,500	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Jorong

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2, 3 dan 4 1 tahun	1 tahun	82,377,000	95,500,000	
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional				Telaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2 3 unit	3 unit	-	-	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Terlaksananya penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor 5 macam	5 macam	137,385,000	70,000,000	
			Pengadaan peralatan gedung kantor				Terlaksananya penyediaan Peralatan Gedung Kantor 7 macam	7 macam	128,475,000	50,000,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase peningkatan disiplin aparatur	100 %					Jorong
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Terlaksananya Penyediaan Pakaian dinas harian(PDH) beserta kelengkapannya 22 stel	22 stel	-	13,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %					Jorong
			Pendidikan dan pelatihan formal				Jumlah diklat yang diikuti 6 orang	6 orang	21,600,000	24,000,000	
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Persentase peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100 %					Jorong

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa				Ter evaluasiRancangan peraturan desa 0	0	48,664,800	55,500,000	
			Pendampingan pengelolaan keuangan desa				Jumlah peserta sosialisasi peningkatan pengelolaan keuangan pemerintah desa 0	0	6,759,900	8,000,000	
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		Persentase peningkatan pelayanan masyarakat	100 %					Jorong
			Pengelolaan survei kepuasan masyarakat				Jumlah dokumen indeks kepuasan masyarakat 0	0	5,962,500	7,500,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	198.820.000 Tahun					Batu Ampar
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Terlaksananya pembayaran jasa service, penggantian suku cadanga, BBM dan STNK mobil jabatan 2 unit	2 unit	53,838,000	65,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Terlaksananya pembayaran jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan STNK kendaraan dinas operasional 8 unit	8 unit	25,200,000	36,500,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terlaksananya pemeliharaan komputer, laptop, printer, AC dan mesin genset 5 jenis	5 jenis	11,250,000	13,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				Terlaksananya rehab plafon , teralis, pintu dan jendela Kantor Kecamatan Batu Ampar 2 paket kegiatan	2 paket kegiatan	46,575,000	-	
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional				Terbelinya kendaraan dinas operasional roda 2 2 unit	2 unit	-	-	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.800.000 Tahun					Batu Ampar
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				Terbelinya Pakaian khusus hari-hari tertentu untuk aparatur kecamatan 30 buah/stell	30 buah/stell	-	-	
			Program pendidikan kedinasan		Terlaksananya Program Pendidikan Kedinasan	34.160.000 Tahun					Batu Ampar
			Peningkatan keterampilan dan profesionalisme				Terlaksananya bimtek/ pelatihan aparatur kecamatan 12 bulan	12 bulan	30,744,000	34,160,000	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah		Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	2.535.000 Tahun					Batu Ampar
			Penyusunan tabulasi data aset tetap				Terlaksananya penyusunan dan pendataan aset berupa KIR, KIB dan Buku Inventaris 2 dokumen	2 dokumen	2,281,500	5,000,000	
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Terlaksananya Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	173.007.500 Tahun					Batu Ampar

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa				Terbina dan terevaluasi Peraturan Desa tentang APBD Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi 14 raperdes	14 raperdes	43,159,500	47,000,000	
			Pendampingan pengelolaan keuangan desa				Terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan desa (alokasi dana desa) 14 desa	14 desa	112,547,250	80,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Panyipatan
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Jumlah Rehab Berat Gedung PKK 1 unit	1 unit	90,000,000	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				jumlah mobil / kendaraan dinas yang terpelihara 8 unit	8 unit	108,000,000	170,000,000	
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional				Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang terbeli 3 unit	3 unit	-	44,000,000	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor				jaringan internet yang tersedia 1 set	1 set	22,500,000	15,000,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatkan disiplin aparatur	100 %					Panyipatan
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				jumlah pakaian dinas 23 stel	23 stel	-	13,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %					Panyipatan
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				jumlah peserta yang mengikuti bimtek 4 orang	4 orang	18,000,000	20,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100 %					Panyipatan
			Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa				Jumlah RAPBDesa terevaluasi 10 desa	10 desa	81,000,000	90,000,000	
			Pendampingan pengelolaan keuangan desa				Jumlah desa yang terdampingi dalam pengelolaan keuangan 10 desa	10 desa	45,000,000	50,000,000	
			Program pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat		Meningkatkan pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat	100 %					Panyipatan
			Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat				Penangan pengaduan masyarakat 12 bulan	12 bulan	3,600,000	4,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Pelaihari
			Pengadaan mebeleur				Jumlah terbelinya kebutuhan meubeuler kantor kecamatan pelaihari 11 jenis dan mebeleur rumah dinas 5 jenis 16 jenis	16 jenis	133,020,000	147,800,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas				Jumlah terlaksananya pemeliharaan rumah dinas 2 kegiatan	2 kegiatan	28,800,000	32,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Jumlah terlaksananya pembayaran jasa service, penggantian suku cadang, BBM mobil jabatan 2 unit	2 unit	31,050,000	34,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				jumlah terlaksananya pembayaran jasa service, penggantian suku cadang, BBM kendaraan dinas operasional roda 2 7 unit	7 unit	11,232,000	12,480,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Jumlah terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 27 unit	27 unit	12,240,000	13,600,000	
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional				Jumlah terbelinya 3 unit kendaraan dinas operasional roda 2 3 unit	3 unit	-	82,100,000	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Jumlah terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 3 jenis	3 jenis	48,870,000	54,300,000	
			Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas				Jumlah terlaksananya pengadaan perlatan rumah jabatan/dinas 3 jenis	3 jenis	855,000	950,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase peningkatan disiplin aparatur kecamatan	100 %					Pelaihari
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah terlaksananya penyediaan pakaian dinas dan atributnya untuk aparatur kecamatan 27 stel	27 stel	-	16,775,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase peningkatan kapasitas aparatur	100 %					Pelaihari

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pendidikan dan pelatihan formal				Jumlah terlaksananya diklat/bimbingan teknis/pelatihan aparatur kecamatan 8 kali	8 kali	28,800,000	32,000,000	
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Persentase pembinaan dan pengelolaan keuangan desa	100 %					Pelaihari
			Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa				Jumlah terevaluasinya rancangan peraturan desa tentang APBDesa 15 desa	15 desa	76,500,000	85,000,000	
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		persentase peningkatan pelayanan masyarakat	100 %					Pelaihari
			Pengelolaan survei kepuasan masyarakat				Jumlah dokumen pengelolaan survei kepuasan masyarakat 1 dokumen	1 dokumen	13,500,000	15,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Jumlah kebutuhan peralatan kantor <input type="checkbox"/> Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara; Jumlah kendaraan yang terpelihara; Jumlah mobil jabatan yang terpelihara; Jumlah rumah dinas yang terpelihara; Terlaksananya secara rutin/berkala pemeliharaan gedung kantor	3 Buah; 99 Buah Peralatan; 22 Buah Peralatan; 7 Buah Kendaraan Roda Dua; 2 Buah Mobil; 1 Buah; 1 Paket					Tambang Ulang

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas				Jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 Buah	1 Buah	5,400,000	9,000,000	
			Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor				Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara 22 Buah Peralatan	22 Buah Peralatan	9,000,000	13,000,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terlaksananya secara rutin/berkala pemeliharaan gedung kantor <input type="checkbox"/> Paket <input checked="" type="checkbox"/> Paket	1 Paket	27,450,000	32,500,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Jumlah mobil jabatan yang terpelihara 2 Buah	2 Buah	45,360,000	53,400,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan yang terpelihara 7 Buah Kendaraan Roda Dua	7 Buah Kendaraan Roda Dua	22,950,000	28,500,000	
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional				Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional 3 Buah Roda Dua	3 Buah Roda Dua	-	20,000,000	
			Pengadaan peralatan gedung kantor				Jumlah kebutuhan peralatan kantor 99 buah peralatan	99 buah peralatan	127,800,000	145,000,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Jumlah baju dinas PSL, baju safari PTT dan PDUB aparaturn kecamatan <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	16 stell				Tambang Ulang
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah baju dinas PSL, baju safari PTT dan PDUB aparaturn kecamatan 16 Stell	16 Stell	-	16,650,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah peserta sosialisasi pendampingan keuangan desa desa (Alokasi Dana Desa) ; Jumlah peserta evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa □ □	45 Orang; 140 Orang					Tambang Ulang
			Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa				Jumlah peserta evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa 140 Orang	140 Orang	18,540,000	22,600,000	
			Pendampingan pengelolaan keuangan desa				Jumlah peserta sosialisasi pendampingan keuangan desa desa (Alokasi Dana Desa) 45 Orang	45 Orang	29,326,500	34,585,000	
			Program peningkatan pelayanan perijinan		Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat; Jumlah peserta kegiatan penyebarluasan informasi pelayanan publik	1 Dokumen; 65 Orang					Tambang Ulang
			Penyebarluasan informasi pelayanan publik				Jumlah peserta kegiatan penyebarluasan informasi pelayanan publik 65 Orang	65 Orang	12,195,000	15,550,000	
			Pengukuran indeks kepuasan masyarakat				Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat 1 Dokumen	1 Dokumen	2,700,000	4,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	88 %					Bati-Bati

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terlaksananya Penggantian atap gedung kantor 1 Paket	1 Paket	156,960,000	50,000,000	
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional				Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 untuk Operasional Kantor 2 Unit	2 Unit	-	40,000,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatkan Disiplin Aparatur	82 %					Bati-Bati
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 30 Stell	30 Stell	-	16,150,000	
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari tertentu 2 Stell	2 Stell	-	3,150,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	82 %					Bati-Bati
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat dan Bimtek Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan 5 Orang/Kali	5 Orang/Kali	27,000,000	32,500,000	
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	80 %					Bati-Bati
			Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa				Jumlah Peraturan Desa Tentang APBDesa 14 PerDes	14 PerDes	63,000,000	70,000,000	
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	83 %					Bati-Bati

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Implementasi Pelaksanaan Good Governance				Jumlah kebutuhan penunjang peningkatan kualitas pelayanan publik 12 Bulan	12 Bulan	18,000,000	25,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0					Bumi Makmur
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional				Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas 5 Buah	5 Buah	-	-	
			Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas				Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah dinas 12 Bulan	12 Bulan	4,725,000	6,000,000	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 12 Bulan	12 Bulan	4,140,000	4,600,000	
			Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas				Terlaksananya pembelian tempat tidur, lemari pakaian, meja makan, lemari makan, kompor gas, tabung gas, Televisi dan AC 1 Tahun	1 Tahun	14,845,500	16,500,000	
			Pengadaan peralatan gedung kantor				Terlaksananya pembelian LCD, Laptop, AC dan Kursi rapat 1 Tahun	1 Tahun	73,125,000	81,250,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya disiplin apatur	0					Bumi Makmur
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Terbelinya pakaian dinas beserta perlengkapannya 24 Stel	24 Stel	-	9,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	0					Bumi Makmur
			Pendidikan dan pelatihan formal				Terlaksananya pendidikan dan pelatihan □ Tahun	1 Tahun	16,200,000	20,000,000	
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Tercapainya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0					Bumi Makmur
			Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa				Jumlah Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa 11 Desa	11 Desa	22,752,000	27,000,000	
			Pendampingan pengelolaan keuangan desa				Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 11 Desa	11 Desa	10,800,000	13,000,000	
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		Peningkatan Penataan Peraturan Perundang undangan	0					Bumi Makmur
			sosialisasi peraturan perundang-undangan				Jumlah peserta dalam sosialisasi peraturan perundang undangan 50 Orang	50 Orang	7,744,500	8,605,000	
			Program peningkatan pelayanan perijinan		Tingkat Kepuasan Masyarakat	85%					Bumi Makmur
			Penyebarluasan informasi pelayanan publik				Jumlah penyebarluasan informasi pelayanan publik yang ada di kecamatan melalui sosialisasi, brosur dan spanduk 1 Kali	1 Kali	10,800,000	12,000,000	
			Pengukuran indeks kepuasan masyarakat				Jumlah dokumen IKM dalam pengukuran terhadap pelayanan publik 1 Dokumen	1 Dokumen	6,750,000	7,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Kintap
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 Bulan	12 Bulan	63,513,000	77,627,000	
			Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan				Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah dinas camat 1 Unit	1 Unit	64,837,890	79,246,300	
			Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas				Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1 Unit	1 Unit	45,000,000	55,000,000	
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional				Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional 1 Unit	1 Unit	-	27,500,000	
			Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas				Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah dinas 1 Kali	1 Kali	9,000,000	11,000,000	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 12 Bulan	12 Bulan	42,570,000	50,000,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase ketaatan pemakaian pakain dinas sesuai dengan norma dan standar yang berlaku	100%					Kintap
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				Jumlah Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 25 Stel	25 Stel	-	11,715,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Tingkat pemahaman peserta sosialisasi	90%					Kintap
			Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah				Jumlah peserta sosialisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah 50 Orang	50 Orang	9,630,000	11,700,000	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah		Tercapainya tertib adminitasi pengelolaan aset SKPD sesuai dengan norma dan standar yang berlaku	100 %					Kintap
			Penyusunan tabulasi data aset tetap				Jumlah penyusunan tabulasi data aset tetap 1 Dokumen	1 Dokumen	2,340,000	2,860,000	
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Tercapainya tertib adminitasi pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%					Kintap
			Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa				Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan desa 12 Bulan	12 Bulan	31,545,000	38,555,000	
			Pendampingan pengelolaan keuangan desa				Terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan desa 12 Bulan	12 Bulan	38,358,000	46,882,000	
			Program pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat		Tertindaklanjuti hasil aduan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	100%					Kintap
			Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat				Terbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 12 Bulan	12 Bulan	18,000,000	22,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program peningkatan pelayanan perijinan		Diacunya dokumen IKM sebagai bahan pengukuran kinerja SKPD	100%						Kintap
			Pengukuran indeks kepuasan masyarakat				Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pengukuran Terhadap Pelayanan Publik 1 Dokumen	1 Dokumen	7,200,000	8,800,000		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang kinerja SKPD	100%						Takisung
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas				Jumlah terbayarnya pemeliharaan rutin berkala Rumah Dinas 12 Bulan	12 Bulan	1,485,000	1,732,500		
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah terbayarnya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional (Roda 2) 4 kali/tahun Jumlah terbayarnya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional (Roda 4) 2 kali/tahun	4 kali/tahun 2 kali/tahun	44,325,000	51,712,500		
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas				Jumlah terbayarnya pemeliharaan rutin berkala rumah dinas 1 unit	1 unit	11,263,500	13,140,750		
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional				jumlah terbayarnya 1 unit kendaraan dinas 2 unit	2 unit	-	52,500,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas				jumlah terbayarnya pengadaan perlengkapan rumah dinas (lemari dinding, ac, dan lemari) 3 jenis	3 jenis	15,840,000	18,480,000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase ketaatan pemakaian pakain dinas sesuai dengan norma dan standar yang berlaku	100%					Takisung
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Terbayarnya pakaian dinas beserta kelengkapannya 25 Stel	25 Stel	-	15,750,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0 5 tahun (tahun ke 1 RPJMD)					Takisung
			Pendidikan dan pelatihan formal				jumlah terlaksananya kepesertaan pendidikan dan pelatihan formal 4 orang	4 orang	18,000,000	21,000,000	
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa sesuai dengan norma dan standar yang berlaku	100%					Takisung
			Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa				Jumlah rancangan Peraturan desa tentang APBDesa terevaluasi 12 Raperdes	12 Raperdes	41,724,000	48,678,000	
			Pendampingan pengelolaan keuangan desa				terlaksananya pembinaan administrasi pengelolaan keuangan desa 24 dokumen	24 dokumen	4,266,000	7,187,250	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	0 5 tahun (tahun ke 1 RPJMD)					Takisung
			Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan				Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan sosialisasi pelayanan 12 Bulan	12 Bulan	24,299,910	28,349,895	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					Angsau
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Angsau			Jumlah Lemari Arsip (Kayu) 1 Unit	1 Unit	2,520,000	20,000,000	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Angsau			Jumlah pengadaan laptop dan printer 1 Unit	1 Unit	13,230,000	20,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tercapainya kondisi kantor yang memadai	100%					Karang Taruna
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Karang Taruna			Jumlah Terbelinya Bahan Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun	1 Tahun	4,050,000	5,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					Pabahanan
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Pabahanan			Terbelinya pengadaan peralatan gedung kantor berupa Komputer 1 unit, Printer 1 unit dan Laptop 1 unit 3 Jenis	3 Jenis	17,775,000	20,000,000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					Kel. Pelaihari

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Pelaihari			Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 2 jenis	2 jenis	6,615,000	13,350,000		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	80 stel					Kel. Pelaihari	
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pelaihari			Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10 stel	10 stel	-	3,975,000		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					Sarang Halang	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sarang Halang			Jumlah Gedung Kantor terpelihara 1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	6,907,050	10,000,000		
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sarang Halang			jumlah perlengkapan gedung kantor 4 Jenis	4 Jenis	3,195,000	15,000,000		
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Sarang Halang			Jumlah Peralatan Gedung Kantor 7 Jenis	7 Jenis	32,040,000	15,000,000		
			Ketahanan Pangan									
	Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan menurunkan Angka Pengangguran	Meningkatnya pendapatan Masyarakat	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)		Tercapainya Peningkatan produksi tanaman pangan, Horti dan perkebunan sesuai target yang ditetapkan	100%					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Kabupaten			Jumlah kegiatan pasar tani 8 Kali Jumlah pengadaan perontok padi 20 Unit Jumlah koordinasi/ sinkronisasi kegiatan pasca panen tanaman pangan di tingkat kecamatan 8 Kali Jumlah penyediaan kemasan/ kantong plastik beras 3.000 Lembar Jumlah media promosi hasil tanaman pangan di tingkat lokal dan nasional 2 Kali Jumlah laporan informasi pasar tanaman pangan 1 Dokumen Jumlah pembinaan usaha penggilingan padi di Kabupaten Tanah Laut 3 Kali Jumlah fasilitasi kegiatan pasca panen di tingkat kecamatan 20 Kali	8 Kali 20 Unit 8 Kali 3.000 Lembar 2 Kali 1 Dokumen 3 Kali 20 Kali	810,000,000	989,999,999	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan perbenihan/perbibitan	Kabupaten			Jumlah Display tanaman padi dan kedelai 4 Kali Jumlah koordinasi forum perbenihan tanaman pangan 2 Kali Jumlah koordinasi penyusunan kebutuhan benih tanaman pangan 2 Kali pelatihan teknis penangkaran padi dan kedelai 2 Kali Jumlah bimbingan teknis lapangan penangkar tanaman pangan 1 Kali Jumlah pendaftaran varietas padi lokal si Buyung dan lainnya 1 Kali	4 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Kali	135,000,000	165,000,000	
			Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Kabupaten			Jumlah Pertemuan Sosialisasi STD-B 20 Kali	20 Kali	112,491,000	137,489,000	
			Pengendalian hama dan penyakit perkebunan	Kabupaten			Jumlah Pengadaan Pengadaan Bahan Kimia (Pupuk KCL) Pemulihan KAS 44 Ha Jumlah Peningkatan SDM Penangkar Kelapa Sawit & Karet 50 Orang Jumlah Peningkatan SDM Petani SL - PHT Perkebunan 2 Kelompok Jumlah Peningkatan SDM Petugas Brigade Kebakaran Perkebunan 20 Orang	44 Ha 50 Orang 2 Kelompok 20 Orang	-	192,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan produksi produktivitas, dan mutu produk tanaman pangan	Kabupaten			Jumlah Sosialisasi GP.PTT atau PIP/PAT tingkat Kecamatan 11 Kali Jumlah pertemuan tim UPSUS PAJALE Kabupaten dan Kecamatan 10 Kali Jumlah program upaya khusus peningkatan produksi kedelai 9.500 Ha Jumlah program upaya khusus peningkatan produksi jagung 27.004 Ha Jumlah program khusus peningkatan produksi padi 57.280 Ha Jumlah temu lapang penerapan teknologi peningkatan produksi padi/jagung/kedelai 15 Kali Jumlah pelatihan pembuatan pupuk organik 2 Kali Jumlah bimbingan teknis penerapan teknologi tanam 1 Kali	11 Kali 10 Kali 9.500 Ha 27.004 Ha 57.280 Ha 15 Kali 2 Kali 1 Kali	180,000,000	220,000,000	
			Pengembangan pembenihan/pembibitan tanaman hortikultura	Kabupaten			#####	2 Paket 3 Kegiatan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 2 Kali 10 Buah	193,500,000	236,500,000	
			Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman hortikultura	Kabupaten			#####	1 Paket 7 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali	198,000,000	242,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)		Tercapainya target ketahanan pangan daerah	100%					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Pengembangan desa mandiri pangan	Kabupaten			Jumlah Desa binaan dan Monitoring Kelompok Afinitas 17 desa Jumlah Pelatihan Keterampilan 3 kecamatan	17 desa 3 kecamatan	58,891,500	-		
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan	Kabupaten, SKPD			jumlah laporan monitoring dan evaluasi 1 laporan jumlah monitoring evaluasi 11 kecamatan	1 laporan 11 kecamatan	67,071,960	-		
			Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Kabupaten			Jumlah perolehan skor Pola Pangan Harapan (PPH) 86 % Jumlah kegiatan pemantauan pola konsumsi pangan masyarakat 1.100 responden	86 % 1.100 responden	29,745,000	-		
			Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan				jumlah kegiatan LCM B2SA Tk. kabupaten dan terikutinya LCM B2SA Tk. Provinsi dan Tk. Nasional 3 kali	3 kali	62,397,000	-		
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Tercapainya pengelolaan Bumdes yang baik sesuai dengan standar dan norma yang berlaku	100%					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan dan fasilitasi pengembangan ekonomi kawasan perdesaan	Kabupaten			Tersedianya sarana prasarana sosial ekonomi dikawasan transmigrasi 3 Kecamatan	3 Kecamatan	40,977,900	50,084,100	
			Pemetaan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan	Kabupaten			Terfasilitasinya pembuatan database pemetaan usaha ekonomi masyarakat pedesaan 2 Desa di Kecamatan	2 Desa di Kecamatan	22,500,000	27,500,000	
			Pembinaan dan fasilitasi pembentukan BUMDES	Kabupaten			Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pembentukan Bumdes 65 Bumdes	65 Bumdes	137,700,000	168,300,000	
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		Tersusnya dokumen perencanaan desa yang baik dan tepat sesuai dengan standar norma yang berlaku	100%					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Terfasilitasnya kegiatan inovasi TTG untuk pembangunan di desa	100%					
			Pencanangan bulan bakti gotong royong dan satuan gerak PKK	Kabupaten					27,000,000	33,000,000	
			Pembinaan penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa	Kabupaten			Terlaksananya kegiatan penyusunan RPJM dan RKP 130 Desa	130 Desa	22,500,000	27,500,000	
			Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Batapung Tawar)	Kabupaten			Terwujudnya proses penyerapan aspirasi dengan tindakan kebersamaan dan gotong royong 3 Desa	3 Desa	90,000,000	110,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Gelar Kreasi dan Inovasi Teknologi tepat guna	Kabupaten			Meningkatnya produktifitas usaha dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan teknologi 1 Gelar TTG Nasional Meningkatnya produktifitas usaha dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan teknologi 1 Kali Lomba Inovasi Meningkatnya produktifitas usaha dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan teknologi 2 Kali Sosialisasi	1 Gelar TTG Nasional 1 Kali Lomba Inovasi 2 Kali Sosialisasi	90,000,000	110,000,000	
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		Tercapainya perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda	20 Orang					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	SKPD			Jumlah sarjana/pemuda dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan dipedesaan melalui pemuda sarjana penggerak pembangunan di pedesaan (PSP3) 20 Orang	20 Orang	225,025,740	350,000,000	
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Persentase tindak lanjut laporan hasil pembinaan LPUK	20 %					Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Pembangunan
			Pengembangan permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	Kabupaten			Tersusunnya laporan hasil pembinaan LPUK 1 Dokumen	1 Dokumen	29,234,700	38,979,600	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		Tercapainya evaluasi perkembangan desa; Terlaksananya Pelaksanaan Gelar Kreasi dan Inovasi TTG	84 %; 84 %					Kurau
			Evaluasi perkembangan desa				Tercapainya evaluasi perkembangan desa 1 Kegiatan	1 Kegiatan	43,029,900	50,000,000	
			Gelar kreasi dan inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG)				Terlaksananya Pelaksanaan Gelar Kreasi dan Inovasi TTG 1 Tahun	1 Tahun	21,447,000	23,830,000	
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		berjalannya secara baik dan berkelanjutan kegiatan yang telah diberi stimulan	100%					Bajuin
			Pemberian stimulan pembangunan desa				Jumlah kegiatan 1 tahun	1 tahun	27,306,000	33,374,000	
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100 %					Jorong
			Pemberian stimulan pembangunan desa				Jumlah lomba yang dilaksanakan dikecamatan 1 kali	1 kali	26,185,500	29,500,000	
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		Terlaksananya Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	49.970.000 Tahun					Batu Ampar
			Pemberian stimulan pembangunan desa				Terpenuhinya Pemberian Stimulan Pembangunan Desa berupa lomba desa 1 kegiatan	1 kegiatan	44,973,000	50,000,000	
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	100 %					Panyipatan
			Kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan				Jumlah peserta pelatihan 60 orang	60 orang	9,000,000	10,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membangun desa	100 %						Panyipatan
			Pemberian stimulan pembangunan desa				Jumlah desa yang mengikuti lomba desa 10 desa	10 desa	10,800,000	12,000,000		
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100 %						Pelaihari
			Pemberian stimulan pembangunan desa				Jumlah terlaksananya lomba kudapan, lomba menyanyi dan lomba desa tingkat kelurahan/desa 3 lomba	3 lomba	48,164,400	53,516,000		
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Tingkat pemahaman peserta pelatihan	90%						Tambang Ulang
			Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan				Terlaksananya pelatihan peternakan 5 Kelompok	5 Kelompok	124,740,000	158,600,000		
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		Adanya penilaian dan peningkatan perkembangan desa oleh Tim Evaluasi Desa di tingkat Kecamatan ; Terselenggaranya kegiatan lomba desa	1 Kali Kegiatan; 1 Kali Kegiatan						Tambang Ulang
			Evaluasi perkembangan desa				Adanya penilaian dan peningkatan perkembangan desa oleh Tim Evaluasi Desa di tingkat Kecamatan 1. Kegiatan	1 Kegiatan	22,500,000	28,000,000		
			Pemberian stimulan pembangunan desa				Terselenggaranya kegiatan lomba desa 1 Kegiatan	1 Kegiatan	29,250,000	35,000,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	86 %					Bati-Bati
			Pemberian stimulan pembangunan desa				Terlaksananya penilaian lomba desa tingkat Kecamatan Bati-Bati 1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	27,000,000	30,000,000	
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Tingkat pemahaman peserta pelatihan	90%					Bumi Makmur
			Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan				Jumlah Pelatihan pemberdayaan masyarakat 3 Kali	3 Kali	218,160,000	245,000,000	
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		Tercapainya kriteria desa yang baik sesuai dengan standar dan norma yang berlaku	100%					Bumi Makmur
			Evaluasi perkembangan desa				Jumlah penilaian dan peningkatan perkembangan desa 1 Kali	1 Kali	22,050,000	25,000,000	
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		berjalannya secara baik dan berkelanjutan kegiatan yang telah diberi stimulan	100%					Kintap
			Pemberian stimulan pembangunan desa				Terciptanya peran serta masyarakat dalam pembangunan desa □ □ Kali	1 Kali	54,000,000	66,000,000	
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		berjalannya secara baik dan berkelanjutan kegiatan yang telah diberi stimulan	100%					Takisung

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemberian stimulan pembangunan desa				Terlaksananya penilaian lomba desa, lomba kegiatan pkk, lomba takbir, lomba poskamling sekecamatan Takisung dan lomba jalan santai 5 lomba	5 lomba	79,874,910	93,187,395	
		Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda	Program Bina Adat dan Budaya Desa		berfungsinya lembaga yang dilatih sesuai dengan norma dan standar yang berlaku	100%					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pembinaan lembaga adat desa	Kabupaten			Terlatihnya kelompok kerja lestari budaya desa dan kebutuhan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 11 Desa	11 Desa	40,977,900	50,084,100	
	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang akuntabel dan Profesionalisme Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Tercapainya Kriteria kompetensi SDM sesuai dengan norma dan standar yang berlaku	100%					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Bimbingan teknis manajemen pemerintahan desa	Kabupaten			Terlaksananya bimbingan manajemen pemerintahan desa 7 Angkatan	7 Angkatan	147,343,680	180,086,720	
			Bimbingan teknis manajemen aset desa	Kabupaten			Terlaksananya bimbingan teknis manajemen aset desa 7 Angkatan	7 Angkatan	147,343,680	180,086,720	
			Pemilihan dan pelantikan kepala desa	Kabupaten			Terpilih dan terlantiknya kepala desa 52 Desa	52 Desa	2,340,000,000	8,514,302,500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bimbingan teknis tata cara pengadaan barang/jasa di desa	Kabupaten			Terlaksananya bimbingan teknis tata carap engadaan barang dan jasa didesa 7 Angkatan	7 Angkatan	147,343,860	180,086,940	
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Tercapainya Kriteria kompetensi SDM sesuai dengan norma dan standar yang berlaku	100%					Bajuin
			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa				Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 1 tahun	1 tahun	5,400,000	6,600,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Tingkat pemahaman aparatur pemerintah desa	100 %					Jorong
			Peningkatan kesadaran dan pemahaman tugas dan fungsi pemerindah desa dan BPD				Jumlah anggota BPD yg mengikuti sosialisasi 0	0	6,210,900	7,500,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Tingkat pemahaman peserta pelatihan	90%					Batu Ampar
			Peningkatan aparatur desa dalam bidang pelayanan kepada masyarakat				Terlaksananya sosialisasi aparatur desa dalam bidang pelayanan kepada masyarakat 1 kegiatan sosialisasi	1 kegiatan sosialisasi	9,297,000	11,000,000	
			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa				Terlaksananya sosialisasi aparatur desa dalam bidang manajemen desa 1 kegiatan sosialisasi	1 kegiatan sosialisasi	8,572,500	10,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Tingkat pemahaman peserta pelatihan	90%					Panyipatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan administrasi desa				Jumlah aparat pemerintah desa yang mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa, manajemen pemerintahan, dan tupoksi BPD 180 orang	180 orang	54,000,000	60,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Tingkat pemahaman peserta pelatihan	90%					Pelaihari
			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa				Jumlah sosialisasi/pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 75 orang	75 orang	13,500,000	15,000,000	
			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan administrasi desa				Jumlah pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang administrasi desa 90 orang	90 orang	13,500,000	15,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Tingkat pemahaman peserta pelatihan	90%					Tambang Ulang
			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa				Jumlah peserta pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 100 60 Orang	100 60 Orang	9,000,000	12,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Tingkat pemahaman peserta sosialisasi	90%					Kintap

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan aparatur desa dalam bidang pelayanan kepada masyarakat				Jumlah peserta sosialisasi peningkatan aparatur desa 60 Orang	60 Orang	9,900,000	12,100,000	
			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa				Jumlah peserta pelatihan manajemen pemerintahan desa □ □0 Orang	50 Orang	9,630,000	11,770,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Tercapainya pelaksanaan Pilkades sesuai dengan norma dan standar yang berlaku	100%					Takisung
			Pemilihan dan pelantikan kepala desa				Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pilkadesa dan serah terima jabatan Kepala Desa 2 desa	2 desa	10,566,450	-	
			Statistik								
			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Tersedianya data yang terbaru dan valid	100 %					Pelaihari
			Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah				Jumlah penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 12 bulan	12 bulan	21,600,000	24,000,000	
			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Tersedianya data yang terbaru dan valid	100 %					Karang Taruna
			Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Karang Taruna			Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tentang Data dan Statistik Daerah 1 Dokumen	1 Dokumen	29,182,500	33,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Tersedianya data yang terbaru dan valid	100 %					Pabahanan	
			Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Pabahanan			Terlaksananya penyusunan laporan tentang data dan statistik Kelurahan 8 dokumen	8 dokumen	23,127,300	25,697,000		
			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Tersedianya data yang terbaru dan valid	100 %					Kel. Pelaihari	
			Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Pelaihari			Jumlah penyusunan profil kelurahan 1 dokumen	1 dokumen	14,198,400	15,776,000		
			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Tersedianya data yang terbaru dan valid	100 %					Sarang Halang	
			Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Sarang Halang			Jumlah dokumen profil kelurahan sarang halang tahun 2018 1 dokumen	1 dokumen	13,500,000	15,000,000		
			Kearsipan									
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		Meningkatnya minat baca dan tersusun rapi dokumen arsip DPRD	100%					Sekretariat DPRD	
			Pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan DPRD	Kabupaten			Terlaksananya Pemeliharaan pengelolaan Dokumentasi dan perpustakaan DPD Kabupaten Tanah Laut 2 bh kemoceng, 10 kapur barus, 4 bh kain pembersih, lemari arsip	2 bh kemoceng, 10 kapur barus, 4 bh kain pembersih, lemari arsip	2,448,000	2,720,000		
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		Tercapainya penyelamatan arsip sesuai dengan norma dan standar yang berlaku	100%					Dinas Perpustakaan dan kearsipan	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Kabupaten, SKPD			Terlaksananya Penyelamatan arsip In Aktif & Statis SKPD 100 Buku & Seluruh SKPD Lingkup Kab.Tala	100 Buku & Seluruh SKPD Lingkup Kab.Tala	61,605,000	71,872,500	
			Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Kabupaten, SKPD			Terlaksananya Penyelamatan&penduplikatan arsip photo dan dokumen lainnya 2.000 photo &duplikat lainnya	2.000 photo &duplikat lainnya	36,000,000	42,000,000	
			Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan		Tercapainya pemeliharaan dan penyusunan arsip sesuai dengan norma dan standar yang berlaku	100%					Dinas Perpustakaan dan kearsipan
			Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	SKPD			Terlaksananya pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah 1.000 Box Arsip	1.000 Box Arsip	43,200,000	50,400,000	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Kabupaten, SKPD			Terlaksananya Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan kondisi situasi data 11 kecamatan & 2 SKPD	11 kecamatan & 2 SKPD	14,606,820	17,041,290	
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi		Tingkat pemahaman peserta pelatihan	90%					Dinas Perpustakaan dan kearsipan
			Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Kabupaten, SKPD			Terlaksananya Sosialisasi/penyuluhan kearsipan pemerintah dan swasta 40 SKPD Lingkup Kab.Tala & 10 Lembaga Lainnya	40 SKPD Lingkup Kab.Tala & 10 Lembaga Lainnya	52,488,000	61,236,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD		
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)						
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		Meningkatkan Pelayanan Ketatausahaan dan Keuangan, Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda	100 Persentase						Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha dan Keuangan	
			Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	SKPD			Jumlah alat dan kelengkapan bahan untuk kersipan 13 jenis	13 jenis	7,404,300	8,638,350			
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi		Adanya kualitas kearsipan di lingkungan instalasi pemerintahan/swasta	84 %						Kurau	
			Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta				adanya kualitas kearsipan di lingkungan instansi/ Swasta 1 Kegiatan	1 Kegiatan	9,900,000	12,000,000			
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi		Meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi	100 %						Panyipatan	
			Peningkatan kualitas pelayanan dan informasi				Jumlah peserta sosialisasi/ workshop 25 orang	25 orang	19,800,000	22,000,000			
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi		Meningkatnya kualitas pelayanan informasi	0						Bumi Makmur	
			Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta				Jumlah peserta dalam sosialisasi /penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta 55 Orang	55 Orang	10,199,250	11,332,500			
			Komunikasi dan Informatika										
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	Program kerjasama informasi dengan mas media		Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	100 %						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Kabupaten, SKPD			Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Bahan Evaluasi dan Koordinasi Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup 1 Kegiatan	1 Kegiatan	18,000,000	20,000,000	
			Program kerjasama informasi dengan mas media		Tersampainya informasi terkait dengan kegiatan perencanaan pembangunan	100 %					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	SKPD			Terlaksananya pengembangan website Bappeda Tanah laut 1 Paket Tersampainya informasi terkait dengan kegiatan perencanaan pembangunan 12 Bulan Terlaksananya pengadaan sistem informasi internal 1 Paket	1 Paket 12 Bulan 1 Paket	124,384,500	35,000,000	
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Tercapainya Pengembangan Komunikasi Informasi kepada Masyarakat melalui Pameran	1 Tahun					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penyebarluasan informasi kepada masyarakat	Kabupaten			Jumlah Pameran Pembangunan di Kabupaten Tanah Laut 1 Kali	1 Kali	29,700,000	35,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program kerjasama informasi dengan mas media		Tersampainya informasi terkait dengan kegiatan SKPD	100 %					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penyebarluasan informasi kepada masyarakat	SKPD			Jumlah penjaga stand yang terbayar 39 orang Jumlah Spanduk, Baliho, Hadiah dan Konsumsi yang terbeli. 2 paket, 54 buah, 35 kotak	39 orang 2 paket, 54 buah, 35 kotak	18,391,500	22,478,500	
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Tecapainya pelayanan secara cepat dan baik berbasis IT	100%					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	SKPD, Pelaihari, Angsau			Jumlah modul SIM RS tahap I 9 Modul Terlaksananya penyediaan dan pengembangan pelayanan jaringan komunikasi dan SIM RS 11 Modul	9 Modul 11 Modul	339,210,000	376,900,000	
			Program kerjasama informasi dengan mas media		Tersampainya informasi terkait dengan kegiatan SKPD	100 %					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kabupaten, SKPD			Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah / Pameran 1 Kali	1 Kali	6,750,000	10,000,000	
			Program kerjasama informasi dengan mas media		Tercapainya secara optimal penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	0					Sekretariat DPRD

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Kabupaten			Jumlah Media Informasi pembangunan Daerah 4 media	4 media	327,185,100	363,539,000	
			Program kerjasama informasi dengan mas media		Tersampainya informasi terkait dengan kegiatan SKPD	100 %					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	SKPD			Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan	67,500,000	-	
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Tersampainya informasi kegiatan dengan berbasis web	100%					Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
			Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Kabupaten			Terbayarnya Jasa Penyedia Internet dan Website 12 Bulan Terbayarnya Honor Tenaga Ahli Website 6 Bulan	12 Bulan 6 Bulan	160,839,648	205,517,328	
			Program kerjasama informasi dengan mas media		Tersampainya secara baik publikasi kegiatan pemerintah daerah melalui media	100%					Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
					Terpenuhinya kebutuhan informasi yang diperlukan	100%					
			Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Kabupaten			Terselenggaranya kerjasama antara Media Massa dengan Pemerintah 12 bulan	12 bulan	670,258,800	856,441,800	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kabupaten			Tersedianya Media Cetak dan Elektronik 1 Tahun Terselenggaranya Kerjasama antara Media Massa dengan Pemerintah Daerah 1 Tahun Terbitnya Tabloid Tuntung Pandang 3 Kali	1 Tahun 1 Tahun 3 Kali	1,818,319,140	2,323,407,790	
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Persentase SKPD yang terintegrasi dalam jaringan TIK, Persentase peningkatan pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi publik, Persentase SKPD dengan sistem data yang terintegrasi berbasis aplikasi	100 persen					Dinas Komunikasi dan Informatika
			Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Kabupaten, SKPD			#####	10 SKPD 12 bulan 480 informasi/berita 12 bulan	489,690,000	-	
			Kegiatan Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Kabupaten, SKPD			#####	12 buah 12 bulan 2 unit 1 unit 12 bulan	342,814,500	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan penyusunan aplikasi sistem informasi	Kabupaten, SKPD			Jumlah belanja modal pengadaan sistem operasi client yang tersedia 6 unit Jumlah belanja modal pengadaan sistem operasi server yang tersedia 1 unit Jumlah Aplikasi Penunjang E-Government yang tersedia 2 aplikasi	6 unit 1 unit 2 aplikasi	71,285,400	-	
			Program kerjasama informasi dengan mas media		Persentase pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam pengelolaan informasi	100 persen					Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Kabupaten, SKPD, Pelaihari			Jumlah Kegiatan Sosialisasi KIM yang terlaksana 1 kegiatan Jumlah majalah kominfo untuk penyebarluasan informasi daerah yang tercetak 1 majalah Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina (aktif) 11 KIM Jumlah Tim PPID yang terbentuk 1 tim Jumlah pameran yang diikuti 1 kegiatan	1 kegiatan 1 majalah 11 KIM 1 tim 1 kegiatan	186,601,500	-	
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Kominfo		Persentase pelayanan pengelolaan komunikasi publik	100 persen					Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Kegiatan Pemeliharaan menara repeater bidang kominfo	Kabupaten, SKPD			Jumlah pemeliharaan ljin frekuensi Radio komunikasi ke Kemenkominfo 2 buah Jumlah laporan pengawasan menara telekomunikasi 1 dokumen	2 buah 1 dokumen	37,867,500	-		
			Program kerjasama informasi dengan mas media		Tersampainya informasi terkait dengan kegiatan SKPD	100 %					Dinas Sosial	
			Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Kabupaten			Jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali	1 kali	15,606,000	32,000,000		
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Tersampainya informasi bagi masyarakat	1 Pameran					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
			Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Kabupaten			Terikutinya pameran pembangunan 1 Pameran	1 Pameran	22,500,000	33,000,000		
			Perpustakaan									
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		meningkatnya minat baca sesuai dengan target yang ditetapkan	100%					Dinas Perpustakaan dan kearsipan	
					Tercapainya pelayanan perpustakaan secara baik sesuai dengan norma dan standar yang berlaku	100%						
			Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Kabupaten			Terlaksananya pelayanan perpustakaan keliling ke sekolah dan pontren 11 kecamatan	11 kecamatan	33,007,500	38,508,750		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Promosi minat baca dan layanan perpustakaan	Kabupaten			Jumlah Terlaksananya kegiatan pameran dan promosi perpustakaan 2 kali	2 kali	101,235,600	118,108,200		
			Pengolahan dan pemeliharaan bahan pustaka	SKPD			Jumlah buku yang diolah 2.500 eksemplar buku	2.500 eksemplar buku	54,244,800	63,285,600		
			Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Kabupaten			Terbinanya perpustakaan desa; terlaksananya layanan perpustakaan 50 perpustakaan 11 kecamatan	50 perpustakaan 11 kecamatan	72,022,680	84,028,460		
			Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Kabupaten			Terlaksananya kegiatan lomba-lomba, pameran pembangunan 1 kegiatan lomba, pameran pembangunan	1 kegiatan lomba, pameran pembangunan	85,121,100	99,307,950		
			Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	SKPD			Tersedianya koleksi bahan pustaka 1.100 eksemplar buku	1.100 eksemplar buku	125,505,000	146,422,500		
			Pertanian									
	Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan menurunkan Angka Pengangguran	Meningkatnya pendapatan Masyarakat	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		Tertindaklanjutnya berita acara kesepakatan hasil pertemuan	100%					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			Peningkatan kemampuan lembaga petani	Kabupaten			Jumlah pertemuan pemberdayaan kelembagaan tani 5 Kali	5 Kali	198,180,000	242,220,000		
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan		meningkatnya produksi karet sesuai dengan target yang ditetapkan	100%					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer	Kabupaten			Jumlah Pengadaan Bahan Pembeku Lateks Ramah Lingkungan 3.000 Liter Jumlah Rakor Stake Holder Perkebunan 3 Kali Jumlah Rakor Asosiasi UPPB 3 Kali Jumlah Temu Lapang Petani/Pekebun Karet 10 Kecamatan	3.000 Liter 3 Kali 3 Kali 10 Kecamatan	225,000,000	275,000,000	
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		Terbangunnya Angrek Bulan Park yang refpersenatatif dan berfungsi baik	100%					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
					Tersalurkannya pupuk bersubsidi secara baik sesuai dengan standar dan norma yang berlaku	100%					
			Pengembangan sarana dan prasaran tanaman hortikultura (tanaman hias)	Kabupaten			Jumlah Pembangunan Angrek Bulan Park 1 Unit	1 Unit	1,000,000,000	-	
			Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Kabupaten			Demonstrasi Alat Mesin Pertanian 1 Kali Jumlah Pertemuan Tim Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi & Kios Resmi Penyalur Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten 4 Kali Jumlah pengadaan handtraktor 30 Unit	1 Kali 4 Kali 30 Unit	1,147,500,000	1,402,500,000	
			Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Kabupaten			Jumlah demplot teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 7 Unit	7 Unit	47,543,850	58,109,150	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengendalian hama dan penyakit tanaman utama	Kabupaten			Jumlah koordinasi Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) 2 Kali Jumlah pengadaan Pestisida sebagai bahan pengendali OPT Kabupaten 1 Paket Jumlah pengendalian antisipasi terjadinya sumber serangan (spot stop) dan Dampak Perubahan Iklim 2 Kali Jumlah peningkatan wawasan kelompok tani/petani melalui pelatihan dan bimbingan teknis 2 Pelatihan Jumlah Gerakan Gropyokan Tikus 4 Kali	2 Kali 1 Paket 2 Kali 2 Pelatihan 4 Kali	-	274,999,450	
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		Tersedianya data yang terbaru dan valid	100%					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten			Jumlah pengumpulan data/statistik pertanian setiap musim 1 Dokumen	1 Dokumen	157,500,000	192,500,000	
			Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan		Tercapainya kinerja penyuluhan sesuai dengan standar dan norma yang berlaku	100%					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Kabupaten			Jumlah pembinaan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian 11 Kecamatan Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan di kecamatan 11 Kecamatan	11 Kecamatan 11 Kecamatan	242,532,000	296,428,000	
			Program perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian		Berfungsinya sarana sarana dan prasarana pertanian untuk menunjang peningkatan produksi sesuai dengan target yang ditetapkan	100%					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pertanian	Kabupaten			Pembangunan jembatan pertanian (Unit) 15 Unit Pembangunan pintu air (Unit) 3 Unit Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani (Ruas) 16 Ruas Rehabilitasi pintu air (Unit) 2 Unit Pembangunan/rehabilitasi jalan produksi (Ruas) 10 Ruas Pembangunan saluran irigasi tersier (Ruas) 2 Ruas	15 Unit 3 Unit 16 Ruas 2 Unit 10 Ruas 2 Ruas	7,055,100,000	8,897,900,000	
			Pengembangan/rehabilitasi infrastruktur pertanian (DAK)	Kabupaten					-	1,650,000,000	
			Penunjang kegiatan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pertanian	Kabupaten			Jumlah SID kegiatan sarana dan prasarana 3 Dokumen Jumlah pertemuan koordinasi, evaluasi kegiatan Ditjen PSP 4 Kali	3 Dokumen 4 Kali	-	275,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program perlindungan tanaman pertanian/perkebunan		Tertanggulangnya secara baik hama penyakit tanaman pangan sesuai dengan standar dan norma yang berlaku	100%					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Pengendalian hama penyakit tanaman pangan	Kabupaten			Jumlah Gerakan Gropyokan Tikus 4 Kali Jumlah koordinasi Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) 2 Kali Jumlah pengadaan Pestisida sebagai bahan pengendali OPT Kabupaten 1 Paket Jumlah pengendalian antisipasi terjadinya sumber serangan (spot stop) dan Dampak Perubahan Iklim 2 Kali Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis kelompok tani 2 Kali	4 Kali 2 Kali 1 Paket 2 Kali 2 Kali	225,000,000	274,999,450	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan	Kabupaten			umlah Pengadaan Pengadaan Bahan Kimia (Pupuk KCL) Pemulihan KAS 44 Ha Jumlah Peningkatan SDM Petani SL - PHT Perkebunan 2 Kelompok Jumlah Peningkatan SDM Penangkar Kelapa Sawit & Karet 50 Orang Jumlah Peningkatan SDM Petugas Brigade Kebakaran Perkebunan 20 Orang	44 Ha 2 Kelompok 50 Orang 20 Orang	157,500,000	192,500,000	
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan Petani serta terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	100 %					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	SKPD			Jumlah Petani dan Peternak yang dilatih pada Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 565 Orang	565 Orang	105,085,953	288,000,000	
			Peningkatan kemampuan lembaga petani	SKPD			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Penilaian Tingkat Kabupaten Tanah Laut 11 Kecamatan	11 Kecamatan	36,215,820	44,263,780	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		Tercapainya pencegahan & penanggulangan penyakit menular ternak, penyidikan dan pemeriksaan penyakit menular ternak, pengendalian penyakit zoonosa dan penyediaan pangan asal hewan yang ASUH, serta Pembangunan fasilitas sarana dan prasaran RPH	100 %					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Pengendalian penyakit zoonosa dan tersedianya pangan asal hewan yang asuh	SKPD			Jumlah Vaksinasi Rabies 200 ekor Jumlah Pengambilan sampel produk pangan asal hewan 90 sampel Jumlah Sosialisasi NKV 1 kali Jumlah Pengawasan hewan Qurban 11 kecamatan2740	200 ekor 90 sampel 1 kali 11 kecamatan2740	21,946,500	27,400,000	
			Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Kabupaten, SKPD			Jumlah Vaksinasi Ternak Sapi 3.000 ekor Jumlah Vaksinasi Ternak Unggas/ ayam buras 2.500 ekor Jumlah Pengobatan Ternak Sapi 3.000 ekor	3.000 ekor 2.500 ekor 3.000 ekor	90,000,000	200,000,000	
			Penyidikan dan pemeriksaan penyakit ternak	SKPD			Jumlah Terlaksananya penyidikan dan pemeriksaan ternak 1 Tahun	1 Tahun	22,500,000	45,500,000	
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		Tercapainya Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	100 %					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan	SKPD			Jumlah penyuluhan peningkatan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan 1 Kali penyuluhan	1 Kali penyuluhan	18,000,000	58,500,000	
			Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah				Jumlah Terlaksananya promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Kab. Tanah Laut 7 kali pameran/ EXPO	7 kali pameran/ EXPO	49,720,500	65,000,000	
			Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	SKPD			Jumlah Rapat koordinasi dengan pelaku usaha bidang perunggasan Kab. Tanah Laut yang terlaksana 2 kali Jumlah Rapat koordinasi dengan Pelaku Usaha dan Petani Peternak Kab. Tanah Laut yang terlaksana 2 kali Jumlah Terlaksananya pendataan informasi produksi dan distribusi hasil peternakan 4 Kecamatan	2 kali 2 kali 4 Kecamatan	22,500,000	50,000,000	
			Program peningkatan produksi hasil peternakan		Tercapainya peningkatan produksi hasil peternakan	100 %					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pendamping dana Tugas Pembantuan APBN	SKPD			Jumlah Pelayanan Perbibitan Ternak dengan memanfaatkan Kegiatan UPSUS SIWAB yang terlaksana 48 Lokasi	48 Lokasi	-	120,000,000	
			Pendistribusian semen bibit sapi unggul dan pelaksanaan inseminasi buatan	SKPD			Jumlah semen bibit sapi unggul dan inseminasi buatan yang terdistribusi 15.000 Dosis	15.000 Dosis	31,500,000	55,000,000	
			Peningkatan mutu bahan pangan asal ternak	SKPD			Jumlah Produk yang disertifikasi, IRT dan halal 3 sertifikasi Jumlah lomba peningkatan mutu pangan olahan 1 kali lomba Jumlah Bahan Pangan olahan yang dikembangkan 1 bahan	3 sertifikasi 1 kali lomba 1 bahan	27,000,000	-	
			Pengembangan data dan Informasi	SKPD			Jumlah Data dan Informasi Fungsi Peternakan 1 dokumen	1 dokumen	45,000,000	100,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Kabupaten, SKPD			Jumlah Pendistribusian Ternak Itik pedaging kepada kelompok tani 1.000 ekor Jumlah Pendistribusian Ternak kambing kepada kelompok tani 35 ekor Jumlah Pendistribusian Ternak Sapi kepada kelompok tani 23 ekor Jumlah Pendistribusian Ternak Itik petelur kepada kelompok tani 3.000 ekor	1.000 ekor 35 ekor 23 ekor 3.000 ekor	747,000,000	758,850,000	
			Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak	SKPD			Jumlah sampel pakan ternak yang diuji 8 sampel Jumlah terlaksananya penyebaran bibit rumput dan pemeliharaan demplot pakan ternak 1 unit demplot	8 sampel 1 unit demplot	38,700,000	55,000,000	
			Pengembangan agribisnis peternakan	SKPD			Jumlah terlaksananya Sosialisasi Program Kementerian Pertanian Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) 1 kali Jumlah Terlaksananya Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 1 kali	1 kali 1 kali	36,000,000	105,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		Tercapainya penerapan teknologi peternakan	100 %					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil peternakan	SKPD			Jumlah dokumen hasil penelitian yang tersusun 1 dokumen	1 dokumen	31,500,000	79,000,000	
			Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	SKPD			Jumlah hibah peralatan/perengkapan biogas 1 paket jumlah terpenuhinya kebutuhan kelompok tani yang membutuhkan peralatan dan mesin peternakan tepat guna 5 KT Jumlah terlaksananya CPCL untuk hibah dan evaluasi sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 11 Kecamatan Jumlah terdistribusinya peralatan dan mesin 2 chopper dan 3 mesin pengolahan pakan ternak 5 unit	1 paket 5 KT 11 Kecamatan 5 unit	328,144,500	443,000,000	
			Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	SKPD			jumlah terlaksananya bimbingan pengoperasian teknologi alat mesin pengolahan pakan ternak 7 kelompok tani	7 kelompok tani	29,628,750	70,000,000	
			Pariwisata								
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Berfungsi bangunan eks pasar lawas secara baik untuk wisata kuliner Tanah Taut	100%					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kabupaten			Terlaksananya pembongkaran eks bangunan pasar lawas 1 Buah	1 Buah	3,500,000,000	-	
							Terbangunnya wisata kuliner beserta taman pendukungnya	1 Buah			
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Tercapainya pengembangan pemasaran pariwisata	4 Event					Dinas Pariwisata
			Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata. Hasil : Tersedianya Video Promosi wisata, Majalah Pariwisata, Brosur Pariwisata, Buku Profil dan Kalender Event. 1 kegiatan	1 kegiatan	59,940,000	70,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Ramadhan Expo Tahun 2019, Terlaksananya Pemilihan Nanang Galuh Tahun 2019, Terlaksananya Festival layang-layang 2019 Terlaksananya Festival Anggrek Hasil : Terlaksananya Ramadhan Expo Tahun 2019, Terpilihnya Nanang Galuh Kab. Tanah Laut Tahun 2019, Terlaksananya festival Layang-Layang Tahun 2019, Terlaksananya Kegiatan Festival Anggrek 4 event	4 event	615,233,250	600,000,000	
			Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	SKPD			Keluaran : Telaksananya Kegiatan Tanah Laut Menghadang Hasil : Tersedianya Pos Informasi dan Tersampainya Informasi ke masyarakat. 1 kegiatan	1 kegiatan	26,955,000	35,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri. Hasil : Mengikuti Hari Jadi Kab. Tanah Laut, Festival Budaya Pasar Terapung, Kalsel Expo dan Pameran Luar Daerah Luar Provinsi 3 kegiatan pameran	3 kegiatan pameran	76,905,000	100,000,000	
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Tercapainya pengembangan destinasi pariwisata	9 Obyek Wisata					Dinas Pariwisata
			Pengembangan objek pariwisata unggulan	SKPD			Keluaran : Terlaksananya penertiban dan pengawasan obyek wisata unggulan Hasil : Penataan dan pengawasan obyek wisata unggulan 7 obyek wisata	7 obyek wisata	-	30,000,000	
			Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Hasil : Tersedianya Pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata 9 sarpras pariwisata	9 sarpras pariwisata	1,692,954,000	8,000,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	SKPD			Keluaran : Terlaksananya pengembangan jenis dan paket wisata unggulan Hasil : Tersedianya jenis dan paket wisata unggulan 7 obyek wisata	7 obyek wisata	-	25,000,000	
			Pengembangan daerah tujuan wisata	SKPD			Keluaran : Menyiapkan Perencanaan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata baru yang kompetitif Hasil : Menciptakan Obyek Wisata Yang Kompetitif 1 dokumen	1 dokumen	50,720,400	60,000,000	
			Program Pengembangan Kemitraan		Tercapainya peningkatan sumber daya manusia yang profesional bidang Kepariwisata	1 Kegiatan					Dinas Pariwisata
			Pengembangan dan penguatan informasi dan database pariwisata	SKPD			Keluaran : Tersedianya informasi Usaha Jasa dan terlaksananya Pembinaan pelaku Usaha Jasa 1 kegiatan	1 kegiatan	34,094,250	40,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Kepada Pokdarwis Hasil : Terwujudnya Pengetahuan Anggota Pokdarwis Hasil : Terbinanya Pelaku Usaha Jasa Bidang Kepariwisataaan 1 kegiatan	1 kegiatan	84,683,250	95,000,000		
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	SKPD			Keluaran : Terlaksananya pelatihan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Hasil : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 250 orang	250 orang	-	30,000,000		
			Kelautan dan Perikanan									
			Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir		tertindaklajutinya berita acara hasil pertemuan secara baik dan konsisten	100%					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Temu usaha kelautan dan perikanan	Kabupaten, SKPD			jumlah pembinaan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan 8 kecamatan jumlah temu usaha kelautan dan perikanan terkait akses permodalan 2 kali	8 kecamatan 2 kali	22,500,000	-		
			Program Pengembangan Budaya Perikanan		Tersedianya data yang terbaru dan valid RTP dan produksi budidaya perikanan	100%					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Berkelanjutannya usaha kegiatan hibah di bidang budidaya untuk menunjang perekonomian	100%						
					Tercapainya kompetensi pembudidaya sesuai dengan norma dan standar yang berlaku	100%						
			Pengembangan bibit ikan unggul	Kabupaten, SKPD			jumlah bimtek bibit ikan unggul 0 kali jumlah updating data RTP dan produksi budidaya perikanan 3 kali	0 kali 3 kali	50,000,000		-	
			Sarana prasarana budidaya perikanan	Kabupaten			Jumlah bantuan hibah budidaya air tawar 9 Pokdakan Jumlah bantuan hibah budidaya air tawar 3 Ponpes Jumlah pelatihan budidaya air tawar penerima hibah 120 Orang	9 Pokdakan 3 Ponpes 120 Orang	900,000,000		-	
			Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Kabupaten, SKPD			uji kompetensi pembudidaya tambak 30 petambak pengadaan alat pengukur kualitas air 3 alat	30 petambak 3 alat	100,377,000		-	
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap		Terfasilitasi asuransi nelayan	100%						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Tingkat pemahaman peserta pelatihan	90%						
					Terbitnya sertifikat hak atas tanah	100%						

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Kabupaten			jumlah asuransi nelayan dan Kartu Pelaku Usaha Perikanan 300 kartu jumlah pendampingan kelompok nelayan 6 kecamatan	300 kartu 6 kecamatan	36,554,760	-	
			Pelatihan peningkatan kompetensi bagi nelayan	Kabupaten, SKPD			jumlah pelatihan Nelayan Kabupaten Tanah Laut 30 orang	30 orang	69,564,150	-	
			Pendampingan Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan	Kabupaten, SKPD			jumlah data peserta program sertifikat hak atas tanah nelayan 50 peserta	50 peserta	21,138,750	-	
			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		Tercapainya peningkatan produksi hasil olahan perikanan sesuai dengan target yang ditetapkan	100%					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Pembinaan/peningkatan mutu hasil perikanan	Kabupaten, SKPD			jumlah lokasi pembinaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan 7 kecamatan jumlah pembelajaran untuk pengolah hasil perikanan 1 kali jumlah pelatihan pengolahan produk hasil perikanan 2 kali jumlah pengambilan dan pengujian sampel diversifikasi 13 sampel	7 kecamatan 1 kali 2 kali 13 sampel	108,900,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan promosi hasil perikanan dan peningkatan konsumsi ikan masyarakat	Kabupaten, SKPD			jumlah pelaksanaan pameran luar daerah dan promosi nasional 4 kali jumlah promosi kampanye Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan) 1 kali	4 kali 1 kali	65,461,590	-	
			Perdagangan								
			Program pengelolaan pasar daerah		tercapainya target penerimaan dari sektor pasar	100%					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
					Terciptanya kondisi pasar yang bersih dan nyaman	100%					
			Penyediaan sarana dan prasarana pasar daerah	Kabupaten			Jumlah Pembuatan Plang Nama Pasar Pelaihari 2 Buah	2 Buah	36,630,720	40,700,800	
			Intensifikasi pendapatan pasar	Kabupaten			Jumlah target penerimaan yang di capai 1.050.000.000 Rp	1.050.000.000 Rp	151,546,000	168,385,000	
			Pembinaan kebersihan ketertiban dan keamanan pasar daerah	Kabupaten			Jumlah terbelinya alat kebersihan 350 Buah Jumlah terpeliharanya kebersihan lingkungan pasar 12 Bulan	350 Buah 12 Bulan	91,431,900	101,591,000	
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Tercapainya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	100%					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrolgian	Kabupaten			Jumlah Terlaksananya sosialisasi kemetrolgian 1 sosialisasi	1 sosialisasi 11 kecamatan	13,500,000	15,000,000	
			Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		Tercapainya target segmentasi pelaksanaan pasar murah sesuai dengan standar dan norma yang berlaku	100%					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
					Tercapainya target transaksi selama pameran	100%					
			Pameran / Promosi Produk Unggulan Daerah	Kabupaten			Jumlah keikutsertaan pelaksanaan pameran 2 Pameran	2 Pameran	405,000,000	450,000,000	
			Pengembangan Pasar dan Distribusi barang / produk	Kabupaten			Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pasar Murah 14 Kali	14 Kali	108,000,000	120,000,000	
			Pengembangan pasar dan distribusi barang (TP)	Kabupaten			Jumlah Pendampingan Pembangunan/Revitalisasi Pasar dengan Dana TP 6 Pasar	6 Pasar	-	300,000,000	
			Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan		Tercapainya Penataan dan Penertiban Pedagang	100%					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
			Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kakilima dan Asongan	Kabupaten			Jumlah Penataan Pedagang 20 Kali	20 Kali	74,205,000	82,450,000	
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Persentase tindak lanjut hasil laporan pengawasan peredaran barang dan jasa	20 %					Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Pembangunan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Kabupaten			Tersusunnya laporan hasil pengawasan peredaran barang dan jasa 1 Dokumen	1 Dokumen	69,072,300	92,096,400	
			Industri								
			Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi		Meningkatnya kualitas SDM Industri	14 Pelatihan					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Kabupaten			Terlaksananya pelatihan dan magang 14 Pelatihan	14 Pelatihan	967,500,000	510,000,000	
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		Meningkatnya pemahaman IKM dalam melakukan proses produksi dengan baik dan benar	35 Pelaku IKM					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Pembinaan bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Kabupaten			Terlaksananya pelatihan IKM lebah madu dan kelulut 35 Pelaku IKM	35 Pelaku IKM	27,000,000	50,000,000	
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		Meningkatnya kemampuan teknologi Industri	10 Pelatihan					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Pembinaan kemampuan teknologi industri	Kabupaten			Terlaksananya pelatihan 10 Pelatihan	10 Pelatihan	202,500,000	305,000,000	
			Program Penataan Struktur Industri		Terbangunnya kawasan Industri dan peningkatan keterampilan masyarakat	3 sosialisasi, publikasi, pelatihan, dokumen					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Kabupaten, Luar Daerah			Terpublikasinya dan tersosialisasinya Kl Jorong 1 Sosialisasi & Publikasi	1 Sosialisasi & Publikasi	286,657,650	400,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	Kabupaten			Terlaksananya pelatihan bagi IKM dan pendataan IKM 2 Pelatihan & sosialisasi	2 Pelatihan & sosialisasi	203,415,300	310,000,000		
			Non Urusan									
	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang akuntabel dan Profesionalisme Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Terlaksananya pembelian ATK 12 Bulan	12 Bulan	54,000,000	60,000,000		
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan	12 Bulan	22,500,000	25,000,000		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Terlaksananya Pembelian Peralatan Listrik (10 Jenis Peralatan Listrik) 12 Bulan	12 Bulan	13,500,000	15,000,000		
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Terlaksananya Makan dan Minum Rapat 12 Bulan Terlaksananya Makan dan Minum Tamu 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	51,040,800	56,712,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah UPT Laboratorium Lingkungan 12 Bulan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	980,000,000	1,120,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	SKPD			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah 0 Bulan/Kali	0 Bulan/Kali	27,000,000	30,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Terbayarnya rekening telepon, pulsa listrik kantor dan internet 12 bulan	12 bulan	150,000,000	150,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Terbayarnya Honorarium, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT 12 bulan	218 Orang	5,336,640,000	5,336,640,000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2 Unit AC, 1 Unit Kipas Angin, 2 Unit Laptop, 4 Unit Printer, 2 Unit Ups/Stabilizer) 1 Tahun	1 Tahun	49,577,130	55,085,700	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Terlaksananya pembayaran premi asuransi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian (PTT 192 Orang) 1 Tahun Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (1 unit roda 6, 4 unit roda 4, 3 unit roda 3, 15 unit roda 2, dan 1 Unit Genset) 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	831,769,009	924,187,788	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Terbayarnya honor PA (Pengguna Anggaran), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), honor PPK-SKPD 10 Bulan	10 Bulan	95,445,000	160,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Tercapainya Pembelian sarana Kebersihan Kantor 12 Bulan Terlaksananya pembelian sarana kebersihan kantor 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	18,000,000	20,000,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Terlaksananya Perbaikan Perabot Kantor (3 Unit TV, 2 Unit Mesin Ketik, 3 Unit Soundsistem, 4 Unit Kursi, 4 Unit Meja Besi) 1 Tahun Terlaksananya Perbaikan 20 Unit AC, 15 Unit Komputer/Laptop, 17 Unit Printer 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	29,250,000	32,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%						Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Jumlah Pembayaran Tagihan Rekening Listrik 12 Bulan Jumlah Pembayaran Tagihan Air / PDAM 12 Bulan Jumlah Pembayaran Tagihan Telepon 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	129,600,000	158,400,000		
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan	12 Bulan	30,171,096	37,000,000		
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan	12 Bulan	17,010,000	22,000,000		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik 12 Bulan	12 Bulan	9,072,000	12,000,000		
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan	12 Bulan	75,195,000	92,000,000		
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 36 Eksemplar	36 Eksemplar	3,888,000	5,000,000		
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah penyediaan makanan & minuman untuk rapat dan tamu 12 Bulan	12 Bulan	14,332,500	17,600,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Terlaksananya rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah 12 Bulan	12 Bulan	1,257,315,806	1,580,000,000	
			Peningkatan manajemen aset/barang daerah pada SKPD	SKPD			Jumlah Laporan Aset / Barang Daerah yang Terdata 12 Dokumen	12 Dokumen	16,372,800	20,000,000	
			Penyusunan administrasi pengelolaan kepegawaian	SKPD			Jumlah Layanan Bidang Kepegawaian yang dilaksanakan 12 Bulan	12 Bulan	15,390,000	18,800,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah honorarium bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT yang dibayar 12 bulan	15 Orang	367,200,000	403,920,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 3 Unit Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2 9 Unit	3 Unit 9 Unit	98,730,000	120,000,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Penyediaan Jasa Pengadministrasian Keuangan 12 Bulan	12 Bulan	40,943,700	50,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Kantor 12 Bulan	12 Bulan	11,040,840	14,000,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan peralatan kerja 12 Bulan	12 Bulan	36,774,000	45,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100 %						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan	12 Bulan	27,214,650	30,000,000		
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Tersedianya bahan pencetakan dan penggandaan 12 Bulan	12 Bulan	14,701,500	24,000,000		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 Bulan	12 Bulan	18,157,500	21,000,000		
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Terlaksananya penyediaan kelengkapan komputer, spanduk, bendera dan kelengkapannya 12 Bulan	12 Bulan	33,273,000	37,000,000		
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Terlaksananya penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar 12 Bulan	12 Bulan	2,916,000	4,000,000		
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat makanan dan minuman tamu 12 Bulan	12 Bulan	46,350,000	56,000,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Terlaksananya koordinasi ke luar daerah (dalam dan luar provinsi) 12 Bulan	12 Bulan	814,750,000	2,300,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SKPD			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah (kecamatan) 12 Bulan	12 Bulan	47,861,055	55,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah rekening jasa air yang terbayar 12 Bulan Jumlah rekening jasa internat yang terbayar 12 Bulan Jumlah rekening jasa komunikasi yang terbayar 12 Bulan Jumlah rekening jasa listrik yang terbayar 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	180,000,000	185,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Terbayarnya Honorarium Pegawai Honorer (PTT) dan BPJS PTT 12 Orang	12 Orang	296,640,000	288,000,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Terbayarnya Honor PA 10 Bulan Terbayarnya Honor PPK-SKPD 10 Bulan Terbayarnya Jasa Transaksi Keuangan 1 Tahun Terbayarnya Honor KPA/ Pejabat pembuat komitmen 4 Triwulan	10 Bulan 10 Bulan 1 Tahun 4 Triwulan	19,597,500	22,775,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk peningkatan kebersihan dan kenyamanan kantor 12 Bulan	12 Bulan	4,258,800	6,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyediaan jasa surat menyurat	Luar Daerah, Kabupaten			Jumlah surat terkirim 12 bulan	12 bulan	204,715	250,000	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah alat tulis kantor yang terbeli 42 jenis/12 bulan ATK 42 jenis	42 jenis/12 bulan 42 jenis	49,697,700	55,057,400	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbeli 5 macam/12 bulan	5 macam/12 bulan	61,189,000	75,000,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah komponen listrik yang terbeli 7 macam/12 bulan	7 macam/12 bulan	3,769,200	4,803,579	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah bahan bacaan yang tersedia 12 bulan	12 bulan	6,210,000	10,381,800	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 12 bulan	12 bulan	34,130,000	36,109,367	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan Jumlah daerah yang menjadi lokasi rapat dan konsultasi 12 bulan	12 bulan 12 bulan	217,650,310	554,003,636	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tambang Ulang, Batu Ampar, Bumi Makmur, Jorong, Kintap, Kurau, Panyipatan, Pelaihari, Bajuin, Takisung, Bati-Bati			Jumlah rapat-rapat konsultasi didalam daerah yang terlaksana 12 bulan Jumlah kecamatan yang menjadi lokasi rapat dan konsultasi 11 kecamatan	12 bulan 11 kecamatan	16,200,000	19,898,450	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah rekening yang terbayar 12 bulan	12 bulan	106,706,550	150,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Honor tenaga PTT 26 orang Terbayarnya honor tenaga non PNS dan BPJS PTT 12 bulan	26 orang 12 bulan	636,480,000	660,000,000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli 7 macam	7 macam	441,250,000	94,201,060	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Terbayarnya honor pengelola keuangan 10 bulan	10 bulan	15,165,000	38,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah tersedianya jasa dan peralatan kebersihan 2 macam/12 bulan Bahan kebersihan 12 bulan Peralatan kebersihan 12 bulan	2 macam/12 bulan 12 bulan 12 bulan	16,482,000	17,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Perhubungan
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan	12 bulan	45,695,000	46,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah terbayarnya barang cetakan dan penggandaan /fotocopy 12 bulan	12 bulan	28,680,000	30,000,000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			- Printer 4 Unit Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor : 0 unit - Laptop 2 Unit - Personal Computer 3 Unit - AC 2 Unit	4 Unit 0 unit 2 Unit 3 Unit 2 Unit	95,700,000	110,000,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu 12 Bulan	12 Bulan	6,275,000	7,800,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah, SKPD			Presentase kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 %	100%	605,275,000	680,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	SKPD			Presentase kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah 100 %	100%	346,324,300	305,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah terbayarnya rekening air, listrik, telepon, surat kabar dan internet 12 bulan	12 bulan	415,000,445	204,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah terbayarnya Honorarium Pegawai Tidak Tetap /PTT dan BPJS PTT 23 Orang	23 Orang	571,200,000	650,000,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas operasional (R4, R3, R2, dan kapal patroli) 26 unit	26 unit	228,425,000	230,000,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Terkelolanya keuangan SKPD dan jasa transaksi keuangan 12 bulan	12 bulan	66,000,000	70,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor 12 bulan	12 bulan	3,912,500	5,000,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah terpeliharanya peralatan kerja (Komputer, Printer, AC, dan peralatan elektronik lainnya) 60 unit	60 unit	27,750,000	40,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Jumlah penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	18,441,500	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	209,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun	1 Tahun	51,986,160	63,538,700	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 Tahun	1 Tahun	22,198,500	27,131,500	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah penyediaan majalah 1 Tahun Jumlah penyediaan surat kabar harian 1 Tahun Jumlah penyediaan bahan bacaan dan buku ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian 20 Buah Jumlah penyediaan tabloid 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 20 Buah 1 Tahun	20,000,000	44,300,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat kegiatan 1 Tahun	1 Tahun	300,000,000	366,163,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah 1 Tahun	1 Tahun	500,000,000	791,440,313	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	SKPD			Jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi di dalam daerah 1 Tahun	1 Tahun	180,000,000	220,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah penyediaan fasilitas telepon, listrik, air dan internet 12 Bulan	12 Bulan	230,531,948	250,285,142	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah terfasilitasinya jasa honorarium PTT dan BPJS PTT (Pegawai Tidak Tetap) 12 Bulan	12 Bulan	1,107,600,000	1,260,000,000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan 1 Tahun	1 Tahun	39,105,000	47,795,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan roda empat (R4) 1 Tahun Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan roda dua (R2) 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	18,900,000	23,100,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah jasa administrasi keuangan 10 Bulan	10 Bulan	48,951,000	59,829,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah jasa kebersihan kantor 12 Bulan	12 Bulan	18,900,000	23,100,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Inspektorat Kabupaten
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Tersedianya jasa surat menyurat, prangko dan benda-benda pos 3 jenis	3 jenis	675,000	3,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Tersedia alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi kantor 12 bulan	12 bulan	27,000,000	35,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Terpenuhinya barang cetakan dan pengadaan 12 bulan	12 bulan	10,800,000	15,000,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Terpenuhinya komponen listrik/penerangan bangunan 12 bulan	12 bulan	5,400,000	7,500,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Terbayarnya surat kabar dan bahan bacaan lainnya 12 bulan	12 bulan	4,653,000	6,000,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Tersedianya makanan/minuman rapat dan tamu 12 bulan	12 bulan	26,164,800	50,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan	12 bulan	250,000,000	600,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	SKPD			Lancarnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah 10 kecamatan	10 kecamatan	16,200,000	50,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Tersedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	90,000,000	100,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Terbayarnya Honor PTT dan BPJS PTT 12 bulan	12 bulan	195,840,000	250,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah spanduk dan pameran pembangunan 12 bulan	12 bulan	20,016,000	25,000,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Terpenuhi jasa memelihara dan perijinan kendaraan dinas/operasional 10 unit	10 unit	6,750,000	15,000,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Terbayar jasa administrasi keuangan 10 bulan	10 bulan	31,095,000	50,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Tersedia bahan/peralatan kebersihan kantor 12 bulan	12 bulan	8,658,000	15,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Terkirimnya surat-surat dinas 12 Bulan	12 Bulan	4,500,000	5,000,000	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Terlaksananya pembelian alat tulis kantor 12 Bulan	12 Bulan	45,450,000	55,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan	12 Bulan	54,180,000	60,200,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Terlaksananya pembelian komponen instalasi listrik/penerangan kantor 12 Bulan	12 Bulan	5,850,000	6,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			lengkapan kantor 4 bh filing Cabinet, 30 Bh Kursi Rapat, 4 Bh Computer PC, 3 Bh Laptop dan 2 Bh Ac 1,5 PK, 2 bh Ac 1 PK 12 Bulan	12 Bulan	90,720,000	75,000,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Terbayar dan terbelinya surat kabar dan peraturan perundang-undangan serta buku bacaan 12 Bulan	12 Bulan	8,100,000	9,000,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Terbayarnya konsumsi rapat dan makan minum tamu 12 Bulan	12 Bulan	22,680,000	25,200,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Terbayarnya biaya keperluan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 Bulan	12 Bulan	393,750,000	500,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	SKPD			Terbayarnya biaya keperluan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 Bulan	12 Bulan	36,000,000	40,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Terbayarnya tagihan Telekomunikasi, air dan listrik 12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	125,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Terbayarnya honor dan BPJS Pegawai tidak tetap (PTT) 12 Bulan	12 Bulan	240,000,000	240,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Terlaksananya jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan roda 2 dan roda 4 12 Bulan	12 Bulan	85,500,000	100,000,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Terbayarnya honor pengelola keuangan 2 orang, pembelian materai dan jasa transaksi keuangan 12 Bulan	12 Bulan	28,350,000	31,500,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Terbelinya peralatan dan bahan pembersih 12 Bulan	12 Bulan	6,750,000	7,500,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja 12 Bulan	12 Bulan	21,780,000	24,200,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah Alat Kantor 729 Buah, Rim, Rol, Kotak, Pack, Biji, Keping	729 Buah, Rim, Rol, Kotak, Pack, Biji, Keping	18,000,000	30,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan	12 Bulan	7,200,000	22,000,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 12 Bulan	12 Bulan	2,700,000	5,000,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman pada saat Rapat 12 Bulan	12 Bulan	16,200,000	50,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Jumlah Rapat Koordinasi ke Luar Daerah 12 Bulan	12 Bulan	358,400,000	500,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten			Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Pelaksanaan Rapat Koordinasi ke Kecamatan 12 Bulan	12 Bulan	7,200,000	20,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah Pembayaran Rekening Air, Listrik dan Internet 12 Bulan	12 Bulan	55,011,358	60,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Pegawai Tidak Tetap terhadap Gaji yang Dibayarkan dan BPJS PTT 43 Orang	43 Orang	1,153,180,000	1,154,032,992	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 Buah	7 Buah	18,000,000	55,000,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah Kendaraan Roda 6, Roda 4 Roda 2 dan Angkutan Air Bermotor yang Terpelihara 27 Unit	27 Unit	336,257,993	470,000,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan SKPD dan Jasa Transaksi Keuangan yang Terbayarkan 12 Bulan	12 Bulan	25,353,000	35,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah Alat Kebersihan pada BPBD Kab. Tanah Laut 17 Item	17 Item	2,250,000	8,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara 21 Buah	21 Buah	4,500,000	8,500,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah Pembelian ATK 36 Jenis	36 Jenis	22,500,000	27,500,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah barang cetakan dan penggandaan 10 jenis cetakan/jilidan	10 jenis cetakan/jilidan	13,500,000	16,499,945	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 macam alat listrik	12 macam alat listrik	10,800,000	13,200,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah makanan dan minuman untuk kegiatan rapat-rapat dan tamu 12 bulan	12 bulan	40,500,000	49,500,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bulan	12 bulan	415,625,000	522,500,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Kabupaten			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah 12 bulan	12 bulan	36,000,000	44,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Internet, Air, Listrik, Internet dan Tambah Daya Listrik 12 Bulan	12 Bulan	60,000,000	66,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Terbayarnya PTT dan BPJS PTT, dan Transaksi Keuangan 9 Orang	9 Orang	236,000,000	259,600,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah Tersedianya Alat Kebersihan Kantor 23 Macam	23 Macam	10,800,000	13,200,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat 15 ob	15 ob	90,000	110,000	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli 33 Jenis	33 Jenis	11,199,629	13,688,435	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penjilidan 210 lbr, 23691 lbr, 25 jilid	210 lbr, 23691 lbr, 25 jilid	8,376,570	10,238,030	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah terbelinya lampu penerang 19 buah, 4 Jenis	19 buah, 4 Jenis	2,118,600	2,589,400	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah surat kabar yang terbeli 24 eksemplar	24 eksemplar	2,160,000	2,640,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah rapat yang terlaksana selama 1 tahun 570 kotak, 7 kali	570 kotak, 7 kali	10,437,750	12,757,250	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan 12 Bulan	12 Bulan	193,792,000	213,171,200	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	SKPD			Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan ke Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut 1 Tahun	1 Tahun	10,984,500	13,425,500	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah pembayaran rekening telepon, internet, air dan listrik 12 Bulan	12 Bulan	52,900,000	58,190,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah honorarium dan BPJS Pegawai Tidak Tetap yang terbayar 15 orang PTT	15 orang PTT	282,600,000	310,860,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah Legalitas Pajak Perizinan Kendaraan Roda 4 7 buah, Roda 4	7 buah, Roda 4	12,150,000	14,850,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah Materai yang terbeli 100 lembar Jumlah honorarium pengelola keuangan 20 ob	100 lembar 20 ob	19,305,000	23,595,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah Peralatan Kebersihan yang terbeli 18 jenis alat kebersihan	18 jenis alat kebersihan	4,397,400	5,374,600	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah terpenuhinya kebutuhan ATK 12 Bulan	12 Bulan	49,418,100	54,909,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten			Jumlah terpenuhinya cetak dan penggandaan 12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	103,898,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah terbayarnya pemenuhan kebutuhan instalasi listrik / penerangan kantor 12 Bulan	12 Bulan	13,041,000	14,490,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah terbayarnya makan dan minum untuk rapat 12 Bulan	12 Bulan	23,760,000	26,400,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Jumlah terlaksana nya rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 Bulan	12 Bulan	200,000,000	200,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten			Jumlah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah 12 Bulan	12 Bulan	52,848,900	58,721,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah terbayarnya rekening listriki, rekening telpon, dan rekening air 3 Rekening	3 Rekening	145,700,000	145,700,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah terbayar nya honorarium PTT dan BPJS (80 org) 12 Bulan	12 Bulan	1,456,380,000	1,520,160,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor roda 2 dan roda 4 27 Buah	27 Buah	10,000,000	16,025,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah tercapainya tertib administrasi keuangan 12 Bulan	12 Bulan	40,497,300	44,997,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah pembelian alat kebersihan 36 jenis	36 jenis	25,000,000	37,090,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah perbaikan / perawatan peralatan kerja 40 Buah	40 Buah	9,000,000	10,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD, Pelaihari, Angsau			Jumlah tersedianya snack tamu 330 Kotak Jumlah tersedianya makan tamu 330 Kotak Jumlah tersedianya snack rapat 1.000 Kotak Jumlah tersedianya makan rapat 1.000 Kotak	330 Kotak 330 Kotak 1.000 Kotak 1.000 Kotak	54,180,000	75,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD, Pelaihari, Angsau			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 Bulan	12 Bulan	250,000,000	350,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Pelaihari, Pelaihari			Jumlah rekening telppon dibayar 46 Rekening Jumlah penambahan daya 4330 KVA 1 Paket Jumlah rekening speedy, dan VPN data 24 Rekening Jumlah rekening air dibayar 12 Rekening Jumlah rekening listrik dibayar 12 Rekening	46 Rekening 1 Paket 24 Rekening 12 Rekening 12 Rekening	6,436,000,000	6,472,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD, Pelaihari, Angsau			Terbayarnya honorarium dan BPJS PTTD di RSUD Hadji Boejasin 12 Bulan	12 Bulan	9,222,988,650	9,722,988,650	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD, Pelaihari, Angsau			Terbayarnya belanja materai 6000 3.000 Lembar Terbayarnya honor pengelola keuangan kuasa pengguna anggaran (KPA) 5 org/bln Terbayarnya belanja materai 3000 3.000 Lembar	3.000 Lembar 5 org/bln 3.000 Lembar	67,500,000	95,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD, Pelaihari, Angsau			Jumlah tersedianya bahan kebersihan 10 jenis 12 Bulan Terlaksananya sedot tinja 20 m3/th Jumlah terbayarnya honorer / pegawai tidak tetap petugas kebersihan 42 orang 12 Bulan Jumlah tersedianya peralatan kebersihan 12 jenis 12 Bulan	12 Bulan 20 m3/th 12 Bulan 12 Bulan	585,000,000	1,050,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Jumlah Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya yang terbeli 600 Buah	600 Buah	-	7,000,000	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah penyediaan alat tulis kantor pada Satpol PP dan Damkar 28 Item	28 Item	27,000,000	39,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Satpol PP dan Damkar 1 Tahun	1 Tahun	8,999,910	12,999,870	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor pada Satpol PP dan Damkar 9 Item	9 Item	6,930,000	10,010,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan	12 Bulan	11,516,400	16,634,800	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun	1 Tahun	300,000,000	490,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah 1 Tahun	1 Tahun	-	15,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah tagihan rek. listrik, telepon, internet dan pdam Satpol PP dan Damkar yg terbayar 1 Tahun	1 Tahun	60,000,000	78,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah jasa penunjang kinerja skpd, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan yg terbayar 12 Bulan	12 Bulan	3,440,000,000	4,471,945,920	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas operasional yg terbayar 22 Buah	22 Buah	14,715,000	21,255,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jasa administrasi keuangan yang terbayar 1 Tahun Jumlah Materai yang terbeli 600 Bh	1 Tahun 600 Bh	7,200,000	24,765,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor 22 Item	22 Item	10,349,100	14,948,700	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah pemeliharaan peralatan / perlengkapan kerja pada Satpol PP dan Damkar 95 Kali	95 Kali	6,750,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Sekretariat DPRD
			Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten			Terlaksananya penyediaan materai 500 lembar	500 lembar	2,700,000	3,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten			Terlaksananya Pembelian alat tulis kantor 66 jenis ATK	66 jenis ATK	27,000,000	30,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten			Terlaksananya Percetakan dan penggandaan 10 jenis	10 jenis	48,577,500	55,000,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor 11 jenis komponen / peralatan listrik	11 jenis komponen / peralatan listrik	17,955,000	20,000,000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten			Terlaksananya penyediaan dan perlengkapan kantor 5 unit laptop & 5 bh printer	5 unit laptop & 5 bh printer	67,050,000	74,500,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten			Terlaksananya penyediaan bahan bacaan 4 media cetak	4 media cetak	22,496,400	24,996,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten			Terlaksananya penyediaan makan dan minum 160 kali rapat AKD, 5 rapat Paripurna istimewa, 41 kali rapat paripurna, 25 kali kegiatan tamu dan 24 kali rapat intern	160 kali rapat AKD, 5 rapat Paripurna istimewa, 41 kali rapat paripurna, 25 kali kegiatan tamu dan 24 kali rapat intern	391,471,200	450,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			#####	117 kali perjalanan dinas luar daerah dlm provinsi, 288 kali perjalanan dinas luar provinsi dan 15 kali pengiriman peserta workshop / undangan / asdeksi / diklat	1,630,374,000	1,880,374,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kabupaten			Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah serta untuk fasilitasi anggota DPRD 11 kecamatan	11 kecamatan	16,200,000	20,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten			Terlaksananya Pembayaran rekening telepon, internet, PDAM dan PLN 12 bulan	12 bulan	230,000,000	230,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Kabupaten			Terlaksananya jasa Penunjang Kinerja SKPD 34 org tenaga PTT beserta bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan	34 org tenaga PTT	832,320,000	832,320,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten			Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional 11 bh roda 4, 1 bbh roda 6, 17 bh roda 2, 1 bh roda 3	11 bh roda 4, 1 bbh roda 6, 17 bh roda 2, 1 bh roda 3	394,650,000	438,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten			Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan	12 bulan	54,900,000	61,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten			Terlaksananya penyediaan kebutuhan peralatan dan bahan untuk kebersihan kantor 12 bulan	12 bulan	31,500,000	35,000,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kabupaten			Terlaksananya perbaikan peralatan kerja 14 jenis peralatan	14 jenis peralatan	30,150,000	33,500,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah pembelian jenis alat tulis kantor 38 buah	38 buah	31,613,940	36,882,930	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11 jenis	11 jenis	17,725,500	20,679,750	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan	12 bulan	4,500,000	5,250,000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan	12 bulan	243,562,500	284,156,250	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat 1.136 kotak	1.136 kotak	22,492,800	26,241,600	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Jumlah koordinasi dengan instansi pemerintah provinsi dan pusat 80 persen	80 persen	129,025,000	135,476,250	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	SKPD			Jumlah koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat 11 kecamatan	11 kecamatan	22,491,000	26,239,500	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah pembayaran rekening listrik dan kawat/faksimili/internet 24 bulan rekening	24 bulan rekening	102,000,000	107,100,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah honorarium bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT yang dibayar 17 orang 12 bulan	17 orang 12 bulan	490,200,000	514,710,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 yang terbayar 3 buah dan 2 buah	3 buah dan 2 buah	3,420,000	3,990,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah honorarium jasa administrasi keuangan yang dibayar 2 orang 12 bulan	2 orang 12 bulan	20,698,200	24,147,900	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah pembelian bahan pembersih dan alat kebersihan 23 buah	23 buah	9,900,000	11,550,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah jasa perbaikan peralatan kantor 5 buah	5 buah	5,400,000	6,300,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten			Jumlah tersedianya alat tulis kantor 62 Jenis	62 Jenis	31,090,590	46,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 8 Jenis,lembar,dokumen	8 Jenis,lembar,dokumen	10,705,500	20,000,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan penambahan daya rehabilitasi instalasi listrik 6 jenis	6 jenis	5,845,500	7,000,000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 4 buah	4 buah	15,210,000	20,000,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten			Jumlah bahan informasi yang tersedia 12 bulan	12 bulan	2,592,000	2,880,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten			Terpenuhinya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu 12 bulan	12 bulan	24,294,600	25,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten			rapat rapat koordinasi maupun konsultasi kegiatan perundang-undangan ke instansi terkait keluar daerah yang terlaksana 12 bulan	12 bulan	284,250,444	400,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten			Jumlah rapat rapat koordinasi dalam daerah/ ke kecamatan 12 bulan	12 bulan	27,000,000	40,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten			Jumlah rekening listrik, sumber daya air, telepon dan speedy/internet yang dibayar 48 bulan	48 bulan	67,400,000	80,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Kabupaten			Jumlah honorer dan bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan yang dibayar 6 orang	6 orang	146,880,000	146,880,000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 19,1 jenis, pameran	19,1 jenis, pameran	19,880,100	25,000,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten			Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang tersedia 13 unit	13 unit	76,131,000	90,000,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten			terlaksananya pengadministrasian keuangan secara efisien 12,2 bulan, dokumen	12,2 bulan, dokumen	26,999,730	40,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten			Jumlah alat kebersihan yang tersedia/dibeli 20 jenis	20 jenis	4,558,500	6,500,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kabupaten			Jumlah jasa pemeliharaan / perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 35 Unit	35 Unit	17,550,000	20,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Kesehatan
			Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten, SKPD			Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia 49 jenis	49 jenis	76,400,000	101,400,000	
			Penyediaan alat tulis kantor	Kintap			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 20 item	20 item	90,000,000	100,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten, SKPD			Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia 2 paket	2 paket	87,300,000	97,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kintap			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 1 tahun	1 tahun	90,000,000	100,000,000	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Kabupaten, SKPD			Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia 26 macam	26 macam	14,850,000	16,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten, SKPD			Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia 1 tahun	1 tahun	8,100,000	9,000,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten, SKPD			Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia 1 tahun	1 tahun	54,000,000	60,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten, SKPD			Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia 12 bulan	12 bulan	831,250,000	950,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kabupaten, SKPD			Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia 12 bulan	12 bulan	40,338,000	44,820,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten, SKPD			Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia (listrik) 1 Tahun	1 Tahun	187,000,000	180,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kintap			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (komunikasi, air listrik) 1 tahun	1 tahun	200,000,000	200,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Kabupaten, SKPD			Terbayarnya Honor dan bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan bagi PTT Daerah	1 tahun	10,951,031,956	10,951,031,956	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kintap			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 1 paket	1 paket	492,300,000	547,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten, SKPD			Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia 12 bulan	12 bulan	141,300,000	157,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Panyipatan
			Penyediaan alat tulis kantor	Panyipatan			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 39 jenis	39 jenis	22,500,000	25,500,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Panyipatan			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 20 jenis	20 jenis	9,900,000	11,000,000	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Panyipatan			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (alat dan bahan pembersih) 28 jenis	28 jenis	27,000,000	22,500,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Panyipatan			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (komunikasi, air listrik) 1 tahun	1 tahun	30,000,000	11,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kurau

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD, Kurau			Jumlah saran adan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 19 Jenis	19 Jenis	19,978,000	22,500,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD, Kurau			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 23 Jenis	23 Jenis	17,640,000	17,500,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Kurau			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (komunikasi air dan listrik) 1 Tahun	1 Tahun	12,600,000	12,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD, Kurau			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (alat dan bahan pembersih) 11 Jenis	11 Jenis	5,062,500	6,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan adminstrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tambang Ulang
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD, Tambang Ulang			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 30 jenis	30 jenis	14,400,000	18,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD, Tambang Ulang			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 12 jenis	12 jenis	36,000,000	47,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD, Tambang Ulang			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (alat dan bahan pembersih) 24 Jenis	24 Jenis	13,500,000	15,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Tambang Ulang			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (komunikasi, air listrik) 1 tahun	1 tahun	30,000,000	36,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Riam
			Penyediaan alat tulis kantor	Pelaihari			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 13 jenis	13 jenis	-	15,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelaihari			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 9 jenis	9 jenis	-	6,000,000	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Pelaihari			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (alat dan bahan pembersih) 13 jenis	13 jenis	-	6,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelaihari			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (komunikasi, air listrik) 1 tahun	1 tahun	-	4,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tanjung Habulu
			Penyediaan alat tulis kantor	Bajuin			Jumlah alat tulis kantor yang terpenuhi 18 jenis	18 jenis	18,000,000	20,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bajuin			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi 12 jenis	12 jenis	18,000,000	20,000,000	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Bajuin			Jumlah peralatan rumah tangga (alat dan bahan pembersih) yang terpenuhi 15 jenis	15 jenis	9,000,000	10,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bajuin			Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi 1 tahun	1 tahun	10,000,000	10,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan
			Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (alat tulis kantor) 1 Paket	1 Paket	4,932,000	5,480,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (cetak dan penggandaan) 1 Paket	1 Paket	2,250,000	2,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 6 Buah	6 Buah	12,105,000	13,450,000	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Kabupaten			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (alat/bahan kebersihan) 14 Jenis	14 Jenis	2,668,500	2,965,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 10 Bulan	10 Bulan	11,430,000	12,700,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten			Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia 1 Tahun	1 Tahun	18,750,000	18,750,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (komunikasi, air listrik) 1 Tahun	1 Tahun	12,600,000	12,600,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Kesehatan Instalasi Farmasi
			Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (alat tulis kantor) 1 tahun	1 tahun	7,200,000	10,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (cetak dan penggandaan) 1 tahun	1 tahun	5,400,000	6,000,000	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Kabupaten			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan yang terpenuhi (alat /bahan kebersihan)kesehatan 1 tahun	1 tahun	1,800,000	5,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (komunikasi, air, listrik) 1 tahun	1 tahun	70,000,000	70,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Terlaksananya jasa surat menyurat 1 Tahun	1 Tahun	18,873,000	40,000,000	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			JUmlah atk yang akan disediakan 12 Bulan	12 Bulan	183,393,540	230,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah barang cetak dan penggandaan 12 bulan	12 bulan	93,660,300	160,000,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor 1 Tahun	1 Tahun	56,587,500	40,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan	12 Bulan	135,000,000	420,000,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			jumlah makan dan minuman terbayar 12 Bulan	12 Bulan	135,000,000	200,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Perjalanan dinas yang dilaksanakan 12 Bulan	12 Bulan	568,750,000	1,400,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	SKPD			Perjalanan dinas yang dilaksanakan 12 Bulan	12 Bulan	45,000,000	50,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Terbayarnya rekening air, listrik, telepon 12 Bulan	12 Bulan	328,200,000	470,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Honor dan bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT & GTT di lingkungan DisdikBud 2.370 Orang	2.370 Orang	16,579,284,000	21,093,440,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Terpeliharanya kendaraan dinas 22 Kendaraan	22 Kendaraan	193,495,500	200,000,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah Pengelola Keuangan SKPD 6 orang	6 orang	153,000,000	20,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah alat Kebersihan 1 Tahun	1 Tahun	67,475,700	440,000,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah Peralatan yang diperbaiki 60 buah	60 buah	87,120,000	60,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 34 Item Jumlah Penyediaan Materai 3000 100 lembar Jumlah Penyediaan Materai 6000 100 lembar	34 Item 100 lembar 100 lembar	35,726,850	45,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah barang cetakkan 15 Item Jumlah Penggandaan 10.000 Lembar	15 Item 10.000 Lembar	34,650,000	42,350,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah Penyediaan Komponen Kelistrikan 4 Item Jumlah Penyediaan Bahan Bakar 200 Liter	4 Item 200 Liter	4,500,000	11,000,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah bahan bacaan 1 tahun	1 tahun	1,800,000	6,000,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah penyediaan makanan 780 Porsi Jumlah penyediaan snack 780 Porsi	780 Porsi 780 Porsi	26,703,000	33,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Rakor dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun	1 Tahun	225,000,000	500,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Kabupaten, SKPD			Jumlah Rakor dan konsultasi di dalam daerah 1 Tahun	1 Tahun	75,000,000	75,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah rekening listrik yang dibayar 1 Tahun Jumlah rekening tv kabel yang dibayar 1 Tahun Jumlah rekening air yang dibayar 1 Tahun Jumlah rekening telepon faximili dan internet yang dibayar 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	123,320,000	140,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Honorarium dan bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT yang dibayarkan 27 orang/bulan	27 orang/bulan	580,000,000	580,000,000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah penyediaan Bendera 7 buah Jumlah penyediaan Motherboard PC 0 buah Jumlah penyediaan Mouse 2 buah Jumlah Penyediaan Printer 0 buah Jumlah Penyediaan Umbul-umbul 60 buah	7 buah 0 buah 2 buah 0 buah 60 buah	2,250,000	60,000,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah KIR Mobil yang dibayar 2 Buah Jumlah perizinan kendaraan operasional roda 2 yang dibayar 13 Buah Jumlah perizinan kendaraan operasional roda 3 yang dibayar 1 Buah Jumlah perizinan kendaraan operasional roda 4 yang dibayar 4 Buah	2 Buah 13 Buah 1 Buah 4 Buah	8,550,000	11,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah Honorarium pengelolaan keuangan SKPD yang dibayar 10 bulan Jumlah Transaksi Keuangan 1 tahun	10 bulan 1 tahun	9,000,000	20,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah peralatan dan kelengkapan kebersihan yang dibeli 15 Item	15 Item	9,000,000	25,000,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki 60 Unit	60 Unit	4,500,000	6,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah Alat Tulis Kantor dan Materai Tersedia 12 Bulan	12 Bulan	179,518,500	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah Cetakan dan Penggandaan Terbayar 12 Bulan	12 Bulan	39,307,500	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah Pembelian BBM Terbeli 12 Bulan Jumlah Pembelian Suku Cadang Genset Terbeli 12 Bulan Jumlah Pembelian Peralatan Listrik Terbeli 12 Bulan Jumlah Pembelian Pelumas Genset Terbeli 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	52,353,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terbeli 12 Bulan	12 Bulan	671,383,449	-	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan Terlaksana 3 Jenis Surat Kabar Harian	3 Jenis Surat Kabar Harian	5,400,000	-	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Terlaksana 12 Bulan	12 Bulan	176,400,000	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksana 12 Bulan	12 Bulan	1,394,102,500	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	SKPD			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksana 12 Bulan	12 Bulan	441,000,000	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah Rek. Internet terbayar 12 Bulan Jumlah Rek. Telepon terbayar 12 Bulan Jumlah Rek. Listrik terbayar 12 Bulan Jumlah Rek. Air terbayar 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	441,672,000	-	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Honorarium dan bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT Yang Terbayar 80 Orang/Bulan	80 Orang/Bulan	1,920,000,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah Kedaraan Dinas (Mobil Dinas) Terpelihara 10 Unit Jumlah Kedaraan Dinas (Sepeda Motor Dinas) Terpelihara 35 Unit	10 Unit 35 Unit	508,207,500	-	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah Honorarium PNS terbayar 10 Bulan	10 Bulan	60,435,000	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedia 12 Bulan	12 Bulan	10,462,500	-	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah AC Standing Aula terpelihara 2 Unit Jumlah AC terpelihara 60 Unit Jumlah Komputer/Laptop terpelihara 16 Unit Jumlah Printer terpelihara 31 Unit Jumlah Mesin Genset terpelihara 2 Unit Jumlah Server terpelihara 1 Unit Jumlah Mesin Fotocopy terpelihara 1 Unit	2 Unit 60 Unit 16 Unit 31 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit	76,905,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan UPT Peralatan Dinas Pekerjaan Umum
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD, Pelaihari, Angsau			alat tulis kantor 12 bulan	12 bulan	16,200,000	19,800,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD, Pelaihari, Angsau			jilid dan penggandaan 12 bulan	12 bulan	9,720,000	11,080,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Pelaihari, Angsau			instalasi listrik 12 bulan	12 bulan	5,440,500	6,649,500	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD, Pelaihari, Angsau			surat kabar harian 12 bulan	12 bulan	1,080,000	1,500,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			makan dan minuman rapat 132 ok	132 ok	5,227,200	6,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD					38,014,000	38,014,000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD, Pelaihari, Angsau			mesin genset 0 unit filling kabinet 2 unit laptop 0 unit ups 0 unit lemari arsip 0 unit kursi staf 9 unit meja staf 4 unit printer 1 unit	0 unit 2 unit 0 unit 0 unit 0 unit 9 unit 4 unit 1 unit	46,710,000	57,090,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD, Pelaihari, Angsau			belanja BBM kendaraan roda 2 1 unit belanja BBM Mobil dinas 3 unit Penggantian suku cadang alat berat 11 unit Penggantian suku cadang kendaraan roda 2 1 unit Penggantian suku cadang mobil dinas 3 unit jasa service alat berat 11 unit jasa service kendaraan roda 2 1 unit belanja STNK 4 buah jasa service mobil dinas 3 unit belanja BBM alat berat 11 unit	1 unit 3 unit 11 unit 1 unit 3 unit 11 unit 1 unit 4 buah 3 unit 11 unit	187,110,000	228,690,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD, Pelaihari, Pelaihari			alat dan bahan pembersih 12 bulan	12 bulan	1,944,000	2,376,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD, Pelaihari, Angsau			AC 4 kali/tahun komputer 4 kali/tahun printer 4 kali/tahun	4 kali/tahun 4 kali/tahun 4 kali/tahun	3,978,000	4,862,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Sekretariat Daerah Bagian Umum
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah sarana dan prasarana milik Setda yang terpelihara dan tercatat dengan baik 12 Bulan	12 Bulan	125,928,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah pelayanan rumah tangga Pimpinan 12 Bulan	12 Bulan	2,179,217,700	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah sarana dan prasarana milik Setda yang terpelihara dan tercatat dengan baik 12 Bulan	12 Bulan	2,500,000,000	-	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah Aset Milik Setda yang terkelola dan tercatat dengan baik 12 Bulan	12 Bulan	268,920,000	-	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah sarana dan prasarana milik Setda yang terpelihara dan tercatat dengan baik 12 Bulan	12 Bulan	157,500,000	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah pelayanan rumah tangga Pimpinan 12 Bulan	12 Bulan	86,776,650	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Pariwisata UPT. Obyek Wisata Pantai Takisung
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Output : Tersedianya penyediaan alat tulis kantor Outcame : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 12 bulan	12 bulan	4,950,900	6,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Output : Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Outcame : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan	12 bulan	5,760,000	6,500,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Output : Tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor Outcame : Tercapainya penggunaan instalansi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan	12 bulan	3,456,000	4,000,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Keluaran : Terlaksananya penyediaan makan dan minum Hasil : Tersedianya makan dan minum 12 bulan	12 bulan	-	3,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Output : Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Outcame : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan	12 bulan	12,805,500	15,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	SKPD			Output : Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah Outcame : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah 12 bulan	12 bulan	8,518,500	9,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Output : Tercapainya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcame : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	11,200,000	12,500,000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Output : Tersedianya jasa perlatan dan perlengkapan kantor Outcame : Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan	12 bulan	4,905,000	7,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Output : Tersedianya penyediaan jasa kebersihan kantor Outcame : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor, sarpras objek wisata 12 bulan	12 bulan	2,896,650	5,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan adminstrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bumi Makmur

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan alat tulis kantor	Bumi Makmur			jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 13 jenis	13 jenis	12,411,000	18,700,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bumi Makmur			jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 5 jenis	5 jenis	4,884,300	8,767,000	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Bumi Makmur			jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (alat dan bahan pembersih) 7 jenis	7 jenis	6,078,492	12,178,100	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bumi Makmur			jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (komunikasi, air, listrik) 1 tahun	1 tahun	11,080,000	11,880,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan UPT Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah penyediaan alat tulis kantor 12 bulan	12 bulan	9,337,500	12,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan	12 bulan	3,375,000	4,200,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia 12 bulan	12 bulan	1,350,000	1,700,000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan	12 bulan	40,045,500	49,000,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan terlaksana 12 bulan	12 bulan	1,080,000	1,400,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah makan dan minum rapat tersedia 15 kali rapat	15 kali rapat	6,075,000	7,500,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih tersedia 12 bulan	12 bulan	1,080,000	1,400,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah pemeliharaan AC, Komputer dan Printer 12 bulan	12 bulan	2,655,000	3,300,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian UPT Balai Latihan Kerja
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan	12 Bulan	9,000,000	11,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah kop surat dinas 5 Rim Jumlah kwitansi 20 Buku Jumlah amplop dinas besar dan kecil 10 Rim	5 Rim 20 Buku 10 Rim	1,350,000	1,725,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah lampu hemat energi yang dibeli 60 Buah Jumlah kabel yang dibeli 400 Meter	60 Buah 400 Meter	2,700,000	3,450,000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 15 Buah	15 Buah	2,250,000	2,875,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah surat kabar harian yang dibeli 12 Bulan	12 Bulan	1,800,000	2,300,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah rapat bulanan/rutin 12 Kali	12 Kali	2,250,000	2,875,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Terlaksananya rapat dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun	1 Tahun	70,000,000	105,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah pembayaran telepon, air, listrik, dan internet 1 Tahun	1 Tahun	129,549,732	148,982,200	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Terbayarnya honorarium PTT, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan petugas pelayanan kios 3in1, Jumlah honorarium PTT penjaga malam, Jumlah honorarium PTT petugas kebersihan 6 Orang	6 Orang	144,000,000	165,600,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4 1 Tahun	1 Tahun	11,175,300	14,279,550	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Tersedianya materai 334 Lembar Jumlah honorarium KPA 10 Bulan	334 Lembar 10 Bulan	6,750,000	8,625,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Terpeliharanya peralatan kerja 12 Bulan	12 Bulan	3,600,000	4,600,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD, Pelaihari			Jumlah alat tulis kantor yang terbayarkan 12 bulan	12 bulan	15,166,800	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD, Pelaihari			Terbayarnya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan	12 bulan	6,502,500	-	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD, Pelaihari			Jumlah spanduk/dekorasi/baliho yang terbayarkan 30 buah Jumlah peralatan operasional persandian yang terbayarkan 1 unit Jumlah belanja modal pengadaan UPS 3 unit Jumlah belanja alat listrik dan elektronik yang terbayarkan 12 bulan	30 buah 1 unit 3 unit 12 bulan	21,229,200	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD, Pelaihari			Jumlah belanja makanan dan minuman untuk rapat dan tamu 12 bulan	12 bulan	19,695,600	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terbayarkan 12 bulan	12 bulan	311,771,250	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kabupaten			Jumlah koordinasi dan konsultasi di dalam daerah yang terbayarkan 12 bulan	12 bulan	91,417,500	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Pelaihari			Jumlah jasa rekening listrik yang terbayar 12 bulan Jumlah jasa surat kabar yang terbayar 12 bulan Jumlah belanja jasa TV Kabel yang terbayar 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	38,400,000	-	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD, Pelaihari			Jumlah honorarium dan bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan pegawai honorer / tidak tetap (PTT) yang terbayarkan 12 bulan	12 bulan	362,880,000	-	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD, Pelaihari			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terbayar 12 bulan	12 bulan	35,397,720	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD, Pelaihari			Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda 4 2 unit Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda 2 5 unit	2 unit 5 unit	57,645,000	-	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD, Pelaihari			Jumlah pengelolaan keuangan SKPD yang terbayarkan 10 bulan Jumlah belanja materai yang terbayarkan 12 bulan	10 bulan 12 bulan	25,505,100	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD, Pelaihari			Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbayarkan 12 bulan	12 bulan	4,150,260	-	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD, Pelaihari			Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang terbayar 18 unit	18 unit	12,382,920	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Sosial
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah pembelian alat tulis kantor 42 macam	42 macam	21,760,200	30,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah barang cetakan dan penggandaan 5 barang	5 barang	4,500,000	7,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor 7 buah	7 buah	25,200,000	6,000,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			jumlah makanan dan minuman 5 kali	5 kali	9,900,000	15,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 bulan	12 bulan	324,000,000	200,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kabupaten			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah 12 bulan	12 bulan	72,000,000	150,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah pembayaran tagihan telepon, listrik, surat kabar, dan internet. 48 bulan	48 bulan	80,000,000	65,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Terbayarnya honorarium, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT 14 orang	12 bulan	332,520,000	411,264,000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 25 buah	25 buah	108,630,000	85,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah dokumen penyusunan Renja SKPD, RKPS, RKA KL, Dekon dan pelaksanaan kerjasama penyusunan Bahan musyawarah pembangunan dan dokumen perencanaan 9 Dokumen	9 Dokumen	28,800,000	50,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih 29 buah	29 buah	4,500,000	7,000,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			jumlah perbaikan peralatan kerja 25 buah	25 buah	9,000,000	12,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			jumlah terbelinya materai 3000 dan 6000 300 buah	300 buah	1,080,000	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			jumlah terbelinya alat tulis kantor 27 jenis	27 jenis	25,000,000	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			tercetaknya barang cetak dan penggandaan 1 bulan	1 bulan	12,600,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			jumlah instalasi serta komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 5 jenis	5 jenis	4,050,000	-	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			jumlah pengadaan printer 3 jumlah pengadaan AC 2	3 2	14,400,000	-	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			jumlah buku dan surat kabar harian 12 bulan	12 bulan	2,970,000	-	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			tersedianya snack dan makanan rapat 22 orang 11 kali	11 kali	9,801,000	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan	12 bulan	250,000,000	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten			jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 bulan	12 bulan	45,711,450	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			jumlah pembayaran listrik, air dan telpon 12 bulan	12 bulan	40,000,000	-	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			jumlah honor dan bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT 15 orang 12 bulan	12 bulan	345,600,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			jumlah service kendaraan roda 4 12 bulan jumlah pajak pajak kendaraan roda 4 dan 2 12 bulan jumlah service kendaraan roda 2 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	50,000,000	-	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			jumlah honor pengelolaan jasa keuangan; jumlah ATK + tercetaknya penggandaan 12 bulan jumlah cetak penggandaan 12 bulan jumlah ATK 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	52,445,070	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			jumlah pembelian alat kebersihan 12 bulan	12 bulan	5,000,000	-	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			jumlah terpeliharanya jasa perbaikan peralatan kerja 4 jenis	4 jenis	7,000,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Terpenuhinya ATK untuk kelancaran perkantoran 1 Tahun	1 Tahun	14,400,000	20,500,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun	1 Tahun	8,100,000	13,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Tersedianya komponen instalasi listrik 1 Tahun	1 Tahun	5,805,000	10,200,000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 %	100%	6,750,000	10,100,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan makan minuman tamu 1 Tahun	1 Tahun	18,954,000	28,050,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Terhadirinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Tahun	1 Tahun	440,000,000	500,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Kabupaten			Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi dalam daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan 1 Tahun	1 Tahun	15,000,000	25,500,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Terfasilitasinya kebutuhan komunikasi, air, listrik, telpon, internet 1 Tahun	1 Tahun	100,760,000	115,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Tersedianya jasa penunjang kinerja dan bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan SKPD 16 PTT	16 PTT	381,504,000	505,000,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Terlaksananya pembiayaan administrasi keuangan SOPD 1 Tahun	1 Tahun	30,051,990	45,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Terpeliharanya kebersihan kantor 1 Tahun	1 Tahun	6,300,000	10,000,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Terlaksananya perbaikan peralatan kantor 100 %	100%	15,750,000	23,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan	12 bulan	7,182,000	9,975,000	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Terlaksananya pembelian alat tulis kantor 12 bulan	12 bulan	33,582,600	46,600,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Terlaksananya penyediaan barang cetakab dang penggandaan 12 Bulan	12 Bulan	37,836,000	52,550,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai 12 Bulan	12 Bulan	20,385,000	28,300,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan berupa surat kabar 12 Bulan	12 Bulan	2,160,000	3,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat internal dan eksternal dan makan minum tamu 12 Bulan	12 Bulan	137,808,000	191,400,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam provinsi dan luar provinsi 12 Bulan	12 Bulan	835,012,500	1,195,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SKPD			Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah 12 Bulan	12 Bulan	31,203,000	45,350,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Terlaksananya Pembayaran Rekening Telpon, Air, Listrik dan Internet 12 bulan	12 bulan	135,200,000	169,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Terbayarnya tenaga pegawai tidak tetap/non, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PNS 12 Bulan	12 Bulan	1,272,960,000	1,591,200,000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan	12 bulan	49,950,000	69,375,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2, roda 3 dan roda 4 12 bulan	12 bulan	140,342,400	194,920,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Terbayarnya honorarium pengguna anggaran dan pejabat penatausahaan keuangan 10 bulan	10 bulan	11,475,000	15,937,500	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Terpenuhinya alat dan bahan pembersih kantor 12 bulan	12 bulan	23,297,400	32,350,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Berfungsinya peralatan kantor sesuai peruntukannya untuk menunjang kinerja SKPD 12 Bulan	12 Bulan	16,740,000	23,250,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Badan Pendapatan Daerah
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Jumlah penyediaan paket pengiriman 100 Paket	100 Paket	4,500,000	6,000,000	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah penyediaan alat tulis kantor 44 Jenis	44 Jenis	45,000,000	60,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah penggandaan 85.500 Lembar penggandaan/fotocopy Jumlah penyediaan cetakan 12 Jenis cetakan	85.500 Lembar penggandaan/fotocopy 12 Jenis cetakan	49,500,000	60,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 Jenis	10 Jenis	9,000,000	10,500,000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5 Jenis	5 Jenis	15,817,500	20,000,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah penyediaan buku bacaan/peraturan perundang-undangan 21 Buah Jumlah penyediaan Surat Kabar Harian (2 SKH x 12 bulan) 24 SKH	21 Buah 24 SKH	4,050,000	5,000,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah pengadaan makanan dan minuman untuk tamu 100 Orang Jumlah pengadaan makanan dan minuman untuk rapat 15 Kali rapat	100 Orang 15 Kali rapat	31,500,000	40,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 253 Kali	253 Kali	608,965,000	700,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	SKPD			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah 1.786 Kali	1.786 Kali	270,000,000	325,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah tagihan telepon, internet, air dan listrik (4 rekening x 12 bulan) 48 Rekening	48 Rekening	135,000,000	140,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Terbayarnya Honorarium, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT 12 bulan	15 Orang PTT	360,000,000	360,000,000	
			Peningkatan manajemen aset/barang daerah pada SKPD	SKPD			Jumlah laporan administrasi pengelolaan aset SKPD 5 Dokumen	5 Dokumen	2,700,000	4,000,000	
			Penyusunan administrasi pengelolaan kepegawaian	SKPD			Jumlah laporan administrasi kepegawaian 2 Dokumen	2 Dokumen	4,500,000	6,000,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 2 20 Unit Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan roda 4 5 Unit	20 Unit 5 Unit	88,920,000	100,000,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah honorarium pengelola administrasi keuangan SKPD 5 Orang/10 Bulan	5 Orang/10 Bulan	58,500,000	75,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah penyediaan bahan /peralatan kebersihan kantor 18 Bahan	18 Bahan	14,400,000	20,000,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki/dipelihara 8 Jenis	8 Jenis	31,500,000	50,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			, Kabupaten Terlaksananya Penyediaan paket pengiriman 20 paket pengiriman	20 paket pengiriman	450,000	500,000	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 tahun	1 tahun	54,000,000	60,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Terlaksananya penyediaan barang cetakan & penggandaan 12 jenis barang cetakan	12 jenis barang cetakan	52,200,000	60,000,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 jenis komponen/peralatan listrik	10 jenis komponen/pera latan listrik	13,500,000	10,000,000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 9 jenis peralatan/perlengkap an kantor	9 jenis peralatan/perle ngkapan kantor	90,000,000	100,000,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU 3 SKH	3 SKH	6,480,000	7,200,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Terlaksananya Penyediaan Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu kantor 25 kali rapat	25 kali rapat	81,000,000	90,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Terlaksananya rapat2 koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Tahun	1 Tahun	750,000,000	850,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SKPD			Terlaksananya rapat2 koordinasi dan konsultasi dalam daerah 11 Kecamatan	11 Kecamatan	36,000,000	40,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Terlaksananya Penyediaan Biaya rekening telepon, internet, air dan listrik 12 bulan	12 bulan	318,000,000	320,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Terbayarnya Honorarium, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT 12 bulan	19 Orang PTT	485,913,600	486,500,000	
			Peningkatan manajemen aset/barang daerah pada SKPD	SKPD			Terlaksananya penyusunan adm pengelolaan aset/brg SKPD 5 Dokumen	5 Dokumen	6,750,000	7,500,000	
			Penyusunan administrasi pengelolaan kepegawaian	SKPD			Terlaksananya Penyusunan adm pengelolaan kepegawaian SKPD 2 Dokumen	2 Dokumen	13,140,000	14,600,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 29 kendaraan R2 dan R4	29 kendaraan R2 dan R4	145,800,000	163,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Terlaksananya Penyediaan Biaya Administrasi Keuangan SKPD 5 pengelola keuangan	5 pengelola keuangan	101,376,900	110,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Terlaksananya Penyediaan bahan/peralatan kantor 36 bahan/peralatan kebersihan	36 bahan/peralatan kebersihan	31,500,000	35,000,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja 8 bahan dan peralatan kerja	8 bahan dan peralatan kerja	54,000,000	60,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha dan Keuangan
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah peralatan mesin hitung 3 buah Jumlah alat tulis kantor 72 jenis Jumlah perlengkapan komputer 5 jenis	3 buah 72 jenis 5 jenis	138,581,460	161,678,370	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah belanja bingkai KIR 80 bingkai Jumlah belanja papan nama jabatan 60 buah Jumlah belanja cetakan 39 jenis Jumlah belanja penggandaan 40.100 lembar	80 bingkai 60 buah 39 jenis 40.100 lembar	85,104,000	99,288,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah buku ekonomi dan keuangan 3 buah Jumlah buku peraturan dan perundang-undangan 3 buah Jumlah buku ilmu politik dan ketatanegaraan 3 buah	3 buah 3 buah 3 buah	1,822,500	2,025,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Jumlah belanja kepersertaan 12 bulan Jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Jumlah 72 kamar penginapan tamu pemerintah daerah 12 bulan Jumlah perjalanan dinas luar negeri 12 bulan Jumlah pengangkutan jenazah 12 bulan Jumlah pemetian jenazah 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	4,629,432,938	5,555,319,525	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Kabupaten, SKPD			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan	12 bulan	185,903,100	295,044,750	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Terbayarnya Honorarium, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT 12 bulan	133 orang/bulan	2,781,120,000	2,920,176,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah honorarium PNS yang dibayar 10 bulan Jumlah belanja transaksi keuangan 1 tahun Jumlah belanja materai 4.100 lembar	10 bulan 1 tahun 4.100 lembar	122,985,000	164,482,500	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Dinas Pariwisata
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Hasil : Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 bulan	12 bulan	2,565,000	3,000,000	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor Hasil : Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan	12 bulan	21,618,900	45,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Hasil : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan	12 bulan	16,812,000	20,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Hasil : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan	12 bulan	2,745,450	5,000,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Hasil : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 12 bulan	12 bulan	2,970,000	4,000,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Keluaran : Terlaksananya penyediaan makan dan minum Hasil : Tersedianya makan dan minum 12 bulan	12 bulan	22,275,000	25,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan	12 bulan	200,000,000	300,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Penyediaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah Hasil : Tersedianya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 12 bulan	12 bulan	48,448,800	60,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Hasil : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan	12 bulan	62,240,000	65,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Terbayarnya Honorarium, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT 12 bulan Pegawai tidak tetap pada Dinas Pariwisata & UPT OW Pantai Takisung 12 bulan	12 bulan	648,000,000	700,000,000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Hasil : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan	12 bulan	3,892,500	10,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Oprasional Hasil : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Oprasional 12 bulan	12 bulan	4,590,000	6,000,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan Hasil : Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan	12 bulan	36,945,000	40,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Hasil : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan	12 bulan	9,125,100	10,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Kurau
			Penyediaan alat tulis kantor				Terbelinya Alat Tulis Kantor sebanyak 38 jenis 1 Tahun	1 Tahun	15,930,000	18,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Terlaksananya belanja cetak, amplop, map, dan penjiilidan DPA, DPA Perubahan 1 Tahun	1 Tahun	3,465,000	5,275,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor 1 Tahun	1 Tahun	7,425,000	8,500,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Terlaksananya penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar & Majalah 1 Tahun	1 Tahun	3,456,000	4,000,000	
			Penyediaan makanan dan minuman				Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu 1 Tahun	1 Tahun	14,526,000	16,500,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kurau			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi 1 Tahun	1 Tahun	135,000,000	140,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah				Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dalam kabupaten 1 Tahun	1 Tahun	129,091,050	140,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kurau			Terlaksananya Pembayaran Rekening Air dan listrik 1 Tahun	1 Tahun	41,400,000	41,500,000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Kurau			Terbayarnya Honorarium, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT 12 bulan	1 Tahun	90,000,000	90,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terbayarnya jasa Pengguna Anggaran dan PPK SKPD serta transaksi keuangan 1 Tahun	1 Tahun	30,600,000	34,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terbelinya alat pembersih dan bahan pembersih kantor 1 Tahun	1 Tahun	4,500,000	5,000,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Terbelinya Peralatan dan perlengkapan Kerja 1 Tahun	1 Tahun	7,065,000	7,850,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Bajuin
			Penyediaan alat tulis kantor				Terpenuhinya alat tulis kantor untuk kelancaran tugas 1 tahun	1 tahun	15,755,850	19,257,150	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 tahun	1 tahun	8,505,000	10,395,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terpenuhinya penerangan bangunan kantor 1 tahun	1 tahun	2,812,500	3,437,500	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun	1 tahun	5,886,000	7,194,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Terpenuhinya kebutuhan informasi □ □ tahun	1 tahun	1,944,000	2,376,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan makanan dan minuman				Tertindaklanjutnya rapat koordinasi □ tahun	1 tahun	13,770,000	16,830,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Ditindak lanjutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah □ □tindak lanjutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah □ tahun	1 tahun	182,275,625	2,291,465,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah				Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah 0	0	60,975,000	74,525,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bajuin			Terlaksananya pembayaran rekening listrik 1 tahun	1 tahun	37,700,000	41,470,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Bajuin			Terbayarnya Honorarium, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT 12 bulan	1 tahun	220,320,000	242,352,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terpenuhinya pemeliharaan roda 4 dan roda dua 1 tahun	1 tahun	80,658,000	98,582,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan				Tercapainya pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan 1 tahun	1 tahun	11,520,000	14,080,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor 1 tahun	1 tahun	4,845,600	5,922,400	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Terpeliharanya peralatan kantor 1 tahun	1 tahun	10,530,000	12,870,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Jorong
			Penyediaan alat tulis kantor				Terlaksananya pembelian alat tulis kantor 0	0	21,233,250	25,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan 0	0	13,194,810	15,700,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terlaksananya penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 0	0	8,010,000	10,000,000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0	0	11,070,000	14,500,000	
			Penyediaan makanan dan minuman				Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman untuk tamu, rapat internal & eksternal kantor 0	0	19,800,000	25,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terlaksananya - Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dalam propinsi & luar Propinsi 0	0		177,318,750	210,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah				Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah 0	0		96,498,000	115,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Terbayarnya jasa komunikasi, rekening air dan listrik 12 bulan	12 bulan		34,200,000	35,500,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD				Terbayarnya Honorarium, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT 12 bulan	100%		142,800,000	160,000,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terlaksananya Pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2,3 dan 4 0	0		6,570,000	8,000,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terbayarnya Honorarium Pengguna Anggaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan 0	0		10,575,000	13,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terpenuhinya alat dan bahan pembersih kantor 0	0		3,510,000	5,000,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Terlaksananya perbaikan peralatan Kerja 0	0		2,250,000	2,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Batu Ampar
			Penyediaan alat tulis kantor				Terbelinya Alat Tulis Kantor 12 bulan	12 bulan	27,998,100	28,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Terlaksananya pencetakan amplop, kwitansi, map, dan fotocopy surat/ dokumen 12 bulan	12 bulan	7,186,500	7,000,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				terbelinya lampu dan kabel rol untuk penerangan bangunan kantor 12 bulan	12 bulan	2,250,000	3,500,000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Terbelinya perlengkapan kantor 18 jenis	18 jenis	141,750,000	130,000,000	
			Penyediaan peralatan rumah tangga				Terbelinya peralatan rumah tangga 3 jenis	3 jenis	4,680,000	30,000,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Terlaksananya penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar 12 bulan	12 bulan	2,592,000	3,000,000	
			Penyediaan makanan dan minuman				Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu 5 kegiatan rapat	5 kegiatan rapat	5,602,500	12,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Batu Ampar			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi 12 bulan	12 bulan	150,000,000	153,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah				Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dalam kabupaten 12 bulan	12 bulan	106,690,500	113,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	26,400,000	27,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Batu Ampar			Terbayarnya Honorarium, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT 12 bulan	100%	151,200,000	153,000,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terbayarnya jasa Pengguna Anggaran, PPK SKPD dan belanja jasa transaksi keuangan 12 bulan	12 bulan	39,600,000	45,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terbelinya alat pembersih dan bahan pembersih kantor 12 bulan	12 bulan	7,443,000	8,500,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Panyipatan
			Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah Materai dan buku cek yang terbeli 3 jenis	3 jenis	2,700,000	3,500,000	
			Penyediaan alat tulis kantor				jumlah alat tulis kantor 43 jenis	43 jenis	14,098,050	16,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah barang cetakan dan penggandaan 3 jenis	3 jenis	5,400,000	6,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah alat listrik dan elektronik yang terbeli 8 jenis	8 jenis	3,600,000	4,500,000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 6 jenis	6 jenis	67,500,000	100,000,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				jumlah bahan bacaan 2 jenis	2 jenis	3,150,000	4,000,000	
			Penyediaan makanan dan minuman				jumlah rapat rapat kecamatan 31 kali	31 kali	27,000,000	32,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Panyipatan			Jumlah rapat - rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bulan	12 bulan	175,000,000	175,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah				Jumlah Rapat - Rapat koordinasi didalam daerah (kabupaten) 12 bulan	12 bulan	89,460,000	110,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Panyipatan			Terbayarnya Rekening PDAM, Listrik dan Internet 12 bulan	12 bulan	32,000,000	35,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Panyipatan			Terbayarnya Honorarium, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT 12 bulan	8 orang	147,600,000	195,600,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan				Honor Pengelolaan Keuangan SKPD 10 Bulan	10 Bulan	13,500,000	15,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor				jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih 22 jenis	22 jenis	5,400,000	6,000,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 29	29	18,000,000	25,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Pelaihari
			Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah terlaksananya pembayaran jasa telepon,internet,air dan listrik 12 bulan	12 bulan	54,000,000	60,000,000	
			Penyediaan alat tulis kantor				Terlaksananya pembelian alat tulis kantor 12 bulan	12 bulan	35,996,400	39,996,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah terlaksananya penyediaan barang cetakan dan fotocopy 12 bulan	12 bulan	16,020,000	17,800,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor 12 bulan	12 bulan	7,951,500	8,835,000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah terbelinya penyediaan kelengkapan kantor 17 jenis	17 jenis	252,873,000	280,970,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar dan pembelian buku cerita anak-anak 74 buku	74 buku	3,510,000	3,900,000	
			Penyediaan makanan dan minuman				Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu 12 bulan	12 bulan	44,977,500	49,975,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam propinsi dan luar provinsi 12 bulan	12 bulan	319,331,250	364,950,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah				Jumlah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 bulan	12 bulan	19,197,000	21,330,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Pelaihari			Terbayarnya Honorarium, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT 12 bulan	8 orang	163,200,000	163,200,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah terlaksananya pembayaran pajak 2 unit kendaraan dinas/operasional roda 4 dan 7 unit roda 2 9 unit	9 unit	6,750,000	7,500,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah terbayarnya honor Pengguna Anggaran, PPK SKPD 2 orang	2 orang	13,644,000	15,160,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah terbelinya alat pembersih dan bahan pembersih kantor 12 bulan	12 bulan	8,788,500	9,765,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Tambang Ulang

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan alat tulis kantor				Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan	12 Bulan	14,850,000	20,500,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan	12 Bulan	5,850,000	9,500,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 Bulan	12 Bulan	4,500,000	8,000,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan yang terbayar 2 Jenis	2 Jenis	4,320,000	5,800,000	
			Penyediaan makanan dan minuman				Terbayarnya penyediaan makanan dan minuman rapat 12 Bulan	12 Bulan	32,508,000	39,120,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan	12 Bulan	193,348,750	240,970,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah 12 Bulan	12 Bulan	81,823,500	95,915,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tambang Ulang			Terlaksananya pembayaran rekening listrik dan internet 12 Bulan	12 Bulan	35,000,000	40,000,000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Tambang Ulang			Terbayarnya Honorarium, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT 12 bulan	100 6 Orang	146,880,000	166,880,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terbayarnya honorarium PA dan PPK 12 Bulan	12 Bulan	25,200,000	30,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terpenuhinya keperluan peralatan kebersihan kantor 12 Bulan	12 Bulan	9,000,000	13,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Bati-Bati
			Penyediaan alat tulis kantor				Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor 35 Jenis	35 Jenis	11,880,000	15,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah kebutuhan Barang Cetak, Penggandaan dan penjilidan 8 Jenis	8 Jenis	8,100,000	11,500,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah kebutuhan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor 12 Jenis	12 Jenis	9,963,000	12,000,000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah pembelian / pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 10 Jenis	10 Jenis	265,455,000	150,000,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				jumlah kebutuhan bahan bacaan sebagai sumber informasi 2 jenis	2 jenis	2,160,000	3,000,000	
			Penyediaan makanan dan minuman				jumlah terbayarnya makanan dan minuman untuk rapat 12 Bulan	12 Bulan	23,760,000	30,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bati-Bati			Jumlah terbayarnya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan	12 Bulan	251,000,000	210,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah				Jumlah terbayarnya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke desa dan kabupaten 12 Bulan	12 Bulan	78,138,000	120,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bati-Bati			Jumlah terbayarnya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon 12 Bulan	12 Bulan	51,000,000	62,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Bati-Bati			Terbayarnya Honorarium, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT 12 bulan	6 orang	122,400,000	168,000,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah terbayarnya kebutuhan Pemeliharaan dan Perizinan Mobil dan Kendaraan Dinas 9 Unit	9 Unit	63,351,000	75,000,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah terbayarnya Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan kebutuhan penunjang administrasi keuangan 10 Bulan	10 Bulan	10,687,500	13,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah terbayarnya kebutuhan alat dan bahan Kebersihan serta bahan penunjang keindahan kantor 30 Jenis	30 Jenis	9,441,000	12,000,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah perbaikan peralatan kerja / kantor 36 Unit	36 Unit	11,385,000	15,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Bumi Makmur
			Penyediaan alat tulis kantor				Terbelinya Alat Tulis Kantor Untuk Kelancaran Administrasi Perkantoran 12 Bulan	12 Bulan	14,897,250	16,552,500	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Terlaksananya cetak spanduk, amplop dan terjilidnya DPA, DPAP dan laporan-laporan 1 Tahun	1 Tahun	4,815,000	5,350,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terbelinya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor 1 Tahun	1 Tahun	1,017,000	1,400,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Terbayarnya surat kabar 12 Bulan	12 Bulan	2,376,000	2,640,000	
			Penyediaan makanan dan minuman				Terbelinya Makanan dan Minuman untuk Rapat, tamu dan kegiatan 12 Bulan	12 Bulan	29,646,000	32,940,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun	1 Tahun	160,416,055	161,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah				Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1 Tahun	1 Tahun	79,857,450	88,730,500	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bumi Makmur			Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun	1 Tahun	24,800,000	24,800,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Bumi Makmur			Terbayarnya Honorarium, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT 12 bulan	100%	163,184,640	163,184,640	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				Terbayarnya sewa tenda, kursi dan sound system untuk kegiatan 1 Tahun	1 Tahun	32,670,000	36,300,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terlaksananya Pembayaran pemeliharaan, perijinan dan operasional kendaraan bermotor Roda 4 (2 buah) dan Roda 2 (11 buah) 1 Tahun	1 Tahun	68,451,750	80,000,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terbayarnya honorarium penyedia jasa administrasi keuangan dan jasa transaksi keuangan serta terbelinya materai dan benda pos lainnya 1 Tahun	1 Tahun	25,335,000	30,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terlaksananya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 Bulan	12 Bulan	5,110,200	6,000,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Terbayarnya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja 12 Bulan	12 Bulan	5,107,500	5,700,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Kintap
			Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan Non PNS				Terbayarnya jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan Non PNS 12 Bulan	12 Bulan	3,600,000	4,400,000	
			Penyediaan jasa surat menyurat				Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan	12 Bulan	2,878,200	3,517,800	
			Penyediaan alat tulis kantor				Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan	12 Bulan	13,500,000	16,500,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan	12 Bulan	6,300,000	8,000,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 Bulan	12 Bulan	4,500,000	5,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kintap			Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan	12 Bulan	1,500,000	1,650,000	
			Penyediaan makanan dan minuman				Terlaksananya penyediaan makan dan minum 12 Bulan	12 Bulan	31,500,000	38,500,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kintap			Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi, konsultasi ke luar daerah 12 Bulan	12 Bulan	175,000,000	192,500,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah				Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dan bimtek di dalam daerah 12 Bulan	12 Bulan	72,000,000	88,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kintap			Terbayarnya Rekening Air dan Listrik 12 Bulan	12 Bulan	39,400,000	43,340,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Kintap			Terbayarnya Honorarium, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT 12 bulan	9 Orang	220,320,000	242,352,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kintap			Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 12 Bulan	12 Bulan	5,450,000	5,995,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan	12 Bulan	24,299,100	28,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan	12 Bulan	6,493,500	7,936,500	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 Bulan	12 Bulan	9,000,000	11,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Takisung
			Penyediaan alat tulis kantor				Jumlah terbayarnya Alat Tulis Kantor 12 Bulan	12 Bulan	21,599,100	25,198,950	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah terbayarnya bahan cetakan, jilid dan penggandaan 12 bulan	12 bulan	12,377,250	14,440,125	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah terbayarnya BBM Genset, komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor 12 bulan	12 bulan	6,431,400	7,503,300	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah terbayarnya peralatan dan perlengkapan kantor (LCD, kursi lipat, AC, Mesin potong rumput, Laptop dan Printer) 7 jenis	7 jenis	87,201,000	101,850,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah terbayarnya bahan bacaan 12 Bulan	12 Bulan	2,160,000	2,520,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah terbayarnya makanan dan minuman 12 bulan	12 bulan	51,660,000	60,270,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Takisung			Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan koordinasi ke luar daerah 12 Bulan	12 Bulan	180,000,000	189,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah				Jumlah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 bulan	12 bulan	63,000,000	73,500,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Takisung			Jumlah terbayarnya Rekening Listrik, Rekening Telpon dan Internet 12 Bulan	12 Bulan	49,200,000	51,660,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Takisung			Terbayarnya Honorarium, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT 12 bulan	5 PTT	97,920,000	102,816,000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah terbayarnya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan	12 bulan	21,141,000	24,664,500	
			Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS				Jumlah terbayarnya Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi PNS dan PTT Kecamatan Takisung 12 bulan	12 bulan	4,320,000	5,040,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah terbayarnya honor pengguna anggaran dan PPK 12 bulan	12 bulan	14,175,000	16,537,500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah Terbayar Pembelian Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih bagi gedung kantor, rumah dinas dan gedung PKK 12 bulan	12 bulan	12,172,500	14,201,250	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan	12 bulan	11,655,000	13,177,500	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Angsau
			Penyediaan alat tulis kantor	Angsau			Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan	12 bulan	10,343,700	11,493,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Angsau			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 bulan	12 bulan	9,378,000	10,420,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Angsau			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 4 jenis	4 jenis	747,000	830,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Angsau			Jumlah Surat Kabar Harian dan Tabloid 1 percetakan	1 percetakan	1,728,000	1,920,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	Angsau			Tersedianya makan minum rapat 12 bulan	12 bulan	16,632,000	24,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Angsau			Terlaksanannya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Bulan	12 Bulan	64,700,000	65,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Angsau			Terbayarnya rekening telepon, listrik, air dan internet 12 bulan	12 bulan	9,900,000	9,900,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Angsau			Terbayarnya Honorarium, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT 12 bulan	100%	61,200,000	61,200,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Angsau			Jumlah Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda dua 1 unit	1 unit	3,500,000	3,500,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Angsau			Jumlah Kuasa Pengguna Anggaran 1 orang	1 orang	4,599,000	6,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Angsau			Jumlah Peralatan Kebersihan serta Bahan Pembersih 14 jenis	14 jenis	2,128,500	2,500,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Angsau			Jumlah Jasa Service Peralatan Kerja (komputer) 6 unit Jumlah Jasa Service Peralatan Kerja (laptop) 4 unit Jumlah Jasa Service Peralatan Kerja (printer) 8 unit	6 unit 4 unit 8 unit	3,240,000	4,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD					Karang Taruna

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan alat tulis kantor	Karang Taruna			Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor 12 bulan	12 bulan	6,696,000	7,500,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Karang Taruna			Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan 1 Tahun	1 Tahun	967,500	1,100,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Karang Taruna			Jumlah Pembelian Alat Listrik dan Elektronik 12 Bulan	12 Bulan	2,700,000	3,500,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	Karang Taruna			Jumlah Pelaksanaan Rapat 15 Kali	15 Kali	11,340,000	12,600,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Karang Taruna			Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	80,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Karang Taruna			Jumlah Rekening Telepon, Air, Listrik, Internet dan TV Berlangganan 12 Bulan	12 Bulan	18,420,000	19,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Karang Taruna			Terbayarnya Honorarium, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT 12 bulan	3 Orang	52,800,000	66,000,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Karang Taruna			Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1 Unit	1 Unit	3,500,000	3,500,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Karang Taruna			Jumlah Pembayaran Materai 100 Lembar Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan 1 Orang	100 Lembar 1 Orang	4,680,000	5,200,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Karang Taruna			Jumlah Pembelian Bahan dan Alat Pembersih dan Bahan Kimia 12 Bulan	12 Bulan	3,780,000	4,400,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Karang Taruna			umlah Pemeliharaan Komputer, Mesin Ketik Elektrik, Laptop, Printer dan AC 12 Bulan	12 Bulan	4,500,000	5,500,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan adminstrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Pabahanan
			Penyediaan alat tulis kantor	Pabahanan			Terlaksananya pembelian ATK 12 bulan	12 bulan	13,711,950	16,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pabahanan			Tersusunnya dokumen dan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15 dokumen	15 dokumen	4,031,730	5,000,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pabahanan			Jumlah pembelian komponen peralatan listrik 3 jenis	3 jenis	1,350,000	2,000,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	Pabahanan			Terlaksananya penyediaan makan dan minum untuk rapat internal SKPD 12 kali	12 kali	4,860,000	7,200,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pabahanan			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam daerah 12 bulan	12 bulan	65,000,000	65,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pabahanan			Terlaksananya pembayaran rekening telpon, PDAM, PLN dan Surat Kabar 12 bulan	12 bulan	12,600,000	16,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Pabahanan			Terbayarnya Honorarium, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT 12 bulan	2 orang	28,800,000	50,400,000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pabahanan			Terlaksananya sewa meja kursi dan tenda 12 bulan	12 bulan	4,500,000	5,000,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pabahanan			Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan bermotor kendaraan roda 2 dan pemeliharaan kendaraan dinas 1 unit	1 unit	3,500,000	3,600,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pabahanan			Terlaksananya pembayaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Belanja Cetak dan Belanja Materai 12 bulan	12 bulan	6,480,000	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pabahanan			Terlaksananya pembelian peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bulan	12 bulan	1,416,150	1,600,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pabahanan			Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja 12 bulan	12 bulan	5,400,000	6,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Kel. Pelaihari
			Penyediaan alat tulis kantor	Pelaihari			Jumlah pembelian ATK 32 jenis	32 jenis	12,963,600	14,900,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pelaihari			Jumlah rekening majalah 1 jenis	1 jenis	1,404,000	3,120,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	Pelaihari			Jumlah pelaksanaan rapat 4 kali	4 kali	4,356,000	6,050,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaihari			Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bulan	12 bulan	70,000,000	80,000,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelaihari			Jumlah rekening, telepon, air, listrik, internet 12 bulan	12 bulan	7,800,000	7,800,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Pelaihari			Terbayarnya Honorarium, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT 12 bulan	3 orang	46,800,000	50,400,000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pelaihari			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan	12 bulan	2,631,600	4,000,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pelaihari			Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 1 unit	1 unit	2,634,000	3,000,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelaihari			Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan 1 orang	1 orang	11,709,000	13,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelaihari			Jumlah pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih 18 jenis	18 jenis	3,288,600	4,000,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pelaihari			Jumlah pemeliharaan komputer, laptop, printer, AC 20 buah	20 buah	4,860,000	5,900,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja SKPD	100%					Sarang Halang
			Penyediaan alat tulis kantor	Sarang Halang			Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 32 jenis	32 jenis	13,862,700	16,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sarang Halang			jumlah barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun	1 Tahun	4,311,000	7,500,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sarang Halang			penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang dibeli 16 Buah	16 Buah	882,000	1,000,000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sarang Halang			jumlah bahan bacaan/koran/majalah 12 bulan	12 bulan	2,376,000	3,000,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	Sarang Halang			jumlah makanan dan minumam untuk rapat kelurahan dan rapat RT/RW 17 Kali	17 Kali	10,692,000	15,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sarang Halang			Jumlah Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan	12 bulan	61,752,000	65,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sarang Halang			Jumlah Rekening Telpon, Listrik, Dan Air yang dibayar 1 Tahun	1 Tahun	15,700,000	8,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Sarang Halang			Terbayarnya Honorarium, bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan PTT 12 bulan	24 orang/bulan	36,000,000	40,000,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Sarang Halang			Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan diurus perizinannya 1 unit	1 unit	1,498,000	3,000,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sarang Halang			jumlah honorarium KPA yang dibayar 10 orang/bulan	10 orang/bulan	4,950,000	5,500,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sarang Halang			penyediaan jasa kebersihan dan bahan pembersih 12 Bulan	12 Bulan	1,408,500	2,000,000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Sarang Halang			jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 15 Unit	15 Unit	4,230,000	5,000,000	
TOTAL									564,880,589,540	1,712,117,005,498	



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah Bagian Kelima Paragraf 8 Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019;
- c. Hasil Kegiatan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati oleh Bappeda Provinsi Kalsel tanggal 30 Mei 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 550);
13. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut No.10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2019**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten Tanah Laut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA SKPD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisa, perhitungan, dan pembahasan serta tidak bersifat kaku.
14. Keadaan darurat adalah Suatu keadaan tidak normal/tidak diinginkan yang terjadi pada suatu tempat/kegiatan, yang cenderung membahayakan bagi manusia, merusak peralatan/harta-benda atau merusak lingkungan sekitarnya. Suatu kejadian yang didalam daerah unit itu sendiri yang disebabkan oleh sesuatu dari dalam/luar.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

- (1) RKPD dan Matrik Program Prioritas Tahun 2019 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2019 yang dihitung mulai Tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.
- (2) RKPD Tahun 2019 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi :
 - a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran SKPD; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019, yang didahului dengan penyusunan KUA dan PPAS.

Pasal 3

RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 merupakan rencana indikatif program/kegiatan beserta pendanaannya yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019.

- (2) Program/kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD ini dapat dilaksanakan sepanjang apabila :
- a. pelaksanaan program/kegiatan karena adanya kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun dana pusat lainnya yang informasinya diperoleh setelah disahkannya Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 ini.
 - b. petunjuk teknis dari kementerian dan/atau lembaga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD ini ; dan
 - c. keadaan mendesak dan atau darurat yang tidak bisa diprediksi sebelum disahkannya RKPD ini.
- (3) Tahapan selanjutnya dari penetapan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah verifikasi terhadap Renja SKPD yang meliputi kegiatan antara lain :
- a. pembahasan kesesuaian antara program dan kegiatan SKPD dengan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD;
 - b. pembahasan untuk menentukan keluaran/*output* dan hasil/*outcome* setiap program/ kegiatan;
 - c. pembahasan untuk menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program;
 - d. menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya; dan
 - e. menghitung alokasi pagu SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab SKPD;
- (4) Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

- (1). RKPD Tahun 2019 merupakan landasan dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019.

(2). Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal

Pjs. BUPATI TANAH LAUT,

ACHMAD SOFIANI

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

.....
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2018
NOMOR